



Kementerian Kelautan Perikanan  
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



# Laporan Keuangan Semester I TA 2024

Direktorat Jenderal Perikanan  
Tangkap

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Akuntansi dan Pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Juli 2024  
Sekretaris Ditjen Perikanan  
Langkap



Trian Yunanda, S.Pi, M.Sc  
19740626 199903 1 004

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	39
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	58
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	115
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	176
F. Pengungkapan Penting Lainnya	180
VI. Lampiran dan Daftar	238



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Juli 2024  
Sekretaris Ditjen Perikanan  
Tangkap,



Trian Yunanda, S.Pi, M.Sc  
19740626 199903 1 004

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Ditjen Perikanan Tangkap semester I tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara periode 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0(467.047.332.469) dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp324.338.310.418 dari alokasi anggaran sebesar Rp0.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.726.927.112.224 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp39.748.023.614; Aset Tetap (netto) sebesar Rp5.655.933.950.955; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp2.841.696.229; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp28.403.441.426.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp(54.515.603.185) dan Rp5.672.411.509.039.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar (Rp450.367.119.454) sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp437.138.475.180 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp13.228.644.274), Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Rp2.300.175.642. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya (Rp9.061.503.923). Jumlah Surplus dari kegiatan Non Operasional (Rp7.818.203.349) dan Surplus/Defisit sebelum Pos-Pos Luar Biasa masing-masing (Rp21.046.847.623) sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp21.046.847.623.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp5.802.866.832.042 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp21.046.847.623 kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp5.529.616.250 terdiri dari koreksi nilai persediaan Rp3.138.368, koreksi nilai aset non revaluasi Rp5.360.748.987, lain-lain Rp172.005.631. Transaksi antar entitas senilai Rp145.972.554.376 serta menghasilkan kenaikan/penurunan Ekuitas sebesar Rp130.455.323.003 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp5.672.411.509.039.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### DITJEN PERIKANAN TANGKAP LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

No	Uraian	Catatan	30 Juni 2024				30 Juni 2023
			Anggaran	Realisasi	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	
1	2	3	4	5	6=5-4	7=4/3	8
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		0	0	0	0	0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN		0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		3.562.040.173.000	467.047.332.469	(3.094.992.840.531)	13,11	92.036.449.270
	PENERIMAAN HIBAH		0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>		3.562.040.173.000	467.047.332.469	(3.094.992.840.531)	13,11	92.036.449.270
B	BELANJA		0	0	0	0	0
	BELANJA PEGAWAI		205.502.581.000	121.208.867.860	(84.293.713.140)	58,98	91.642.439.229
	BELANJA BARANG		668.796.894.000	186.346.635.349	(482.450.258.651)	27,86	146.035.068.464
	BELANJA MODAL		72.691.096.000	16.782.807.209	(55.908.288.791)	23,09	13.827.541.672
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG		0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI		0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH		0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL		0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN		0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil		0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum		0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik		0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus		0	0	0	0	0

	Dana Alokasi Khusus Non Fisik		0	0	0	0	0
	Dana Desa		0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		946.990.571.000	324.338.310.418	(622.652.260.582)	34,25	251.505.049.365
C	PEMBIAYAAN		0	0	0	0	0
	I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)		0	0	0	0	0
	II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI		0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>		0	0	0	0	0

## NERACA

## DITJEN PERIKANAN TANGKAP

## NERACA

## UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

Uraian	Catatan	30 Juni 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran		6.481.001.000	(20.366.500)
Kas di Bendahara Penerimaan		0	81.395.000
Kas Lainnya dan Setara Kas		20.396.924.975	376.025.613
Uang Muka Belanja (prepayment)		(100.361)	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima		0	16.636.099.254
Piutang Bukan Pajak		32.541.665.416	29.335.154.473
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		(31.976.512.673)	(28.556.171.456)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		565.152.743	778.983.017
Persediaan		12.242.803.157	2.059.252.792
Persediaan yang Belum Diregister		62.242.100	8.122.500
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>39.748.023.614</b>	<b>19.919.511.676</b>
ASET TETAP			
Tanah		3.618.080.652.312	3.618.080.652.312
Peralatan dan Mesin		801.213.831.501	798.944.153.232
Gedung dan Bangunan		744.973.205.905	741.721.136.129
Jalan, Irigasi dan Jaringan		2.817.779.210.690	2.819.552.971.798
Aset Tetap Lainnya		26.789.105.470	27.617.048.970
Konstruksi Dalam Pengerjaan		22.459.445.016	20.324.415.386
AKUMULASI PENYUSUTAN		(684.835.142.442)	(677.465.284.125)
AKUMULASI PENYUSUTAN		(132.453.173.585)	(123.771.919.609)
AKUMULASI PENYUSUTAN		(1.728.710.646.263)	(1.639.768.033.689)
AKUMULASI PENYUSUTAN		(402.547.666)	(387.778.333)
Properti Investasi		186.878.004.466	185.795.815.112
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		(15.947.308.449)	(14.657.808.942)
Aset Tetap yang Belum Diregister		109.314.000	(265.243.250)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>5.655.933.950.955</b>	<b>5.755.720.124.991</b>
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Jangka Panjang lainnya		2.855.976.110	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Jangka Panjang Lainnya		(14.279.881)	0
PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA(NETTO)		2.841.696.229	0
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>		<b>2.841.696.229</b>	<b>0</b>

ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud		6.425.497.132	6.425.497.132
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya		0	2.760.602.390
Aset Lain-lain		168.010.660.747	166.659.657.474
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA		(127.887.752.171)	(123.938.333.929)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA		(18.144.964.282)	(18.063.802.157)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>28.403.441.426</b>	<b>33.843.620.910</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>5.726.927.112.224</b>	<b>5.809.483.257.577</b>
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga		13.063.796.517	166.901.385
Utang Yang Belum Ditagihkan		5.164.075.782	(8.700.753.039)
Hibah Yang Belum Disahkan		29.803.912.429	0
Pendapatan Diterima Dimuka		0	3.406.878.905
Uang Muka dari KPPN		6.481.001.000	(788.723.746)
Utang Jangka Pendek Lainnya		2.817.457	(51.201)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>54.515.603.185</b>	<b>(5.915.747.696)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>54.515.603.185</b>	<b>(5.915.747.696)</b>
EKUITAS			
Ekuitas		5.672.411.509.039	5.792.506.953.924
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>5.672.411.509.039</b>	<b>5.792.506.953.924</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>5.726.927.112.224</b>	<b>5.786.591.206.228</b>

## LAPORAN OPERASIONAL

### DITJEN PERIKANAN TANGKAP

### LAPORAN OPERASIONAL

### UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

Uraian	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
KEGIATAN OPERASIONAL		0	0
PENDAPATAN OPERASIONAL		0	0
PENDAPATAN PERPAJAKAN		0	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		0	0
Pendapatan Sumber Daya Alam		410.525.020.422	42.609.219.425
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		39.842.099.032	30.177.766.284
PENDAPATAN HIBAH		0	0
BEBAN OPERASIONAL		0	0
Beban Pegawai		128.808.738.352	97.500.594.269
Beban Persediaan		2.894.165.395	3.539.387.230
Beban Barang dan Jasa		111.274.877.036	107.363.247.133
Beban Pemeliharaan		17.358.659.723	17.974.641.141
Beban Perjalanan Dinas		57.383.330.021	48.334.998.459
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat		4.416.284.286	4.938.682.753
Beban Bantuan Sosial		0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi		116.260.730.602	134.411.509.214
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(1.258.310.235)	(805.981)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		(1.056.875.068)	(424.658.764)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		(2.300.175.642)	(7.879.840.457)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(9.061.923.923)	(19.113.624.337)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(420.000)	(8.713.650)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(21.046.847.623)	329.625.539.515
POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO		(21.046.847.623)	329.625.539.515

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### DITJEN PERIKANAN TANGKAP LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

Uraian	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
EKUITAS AWAL		5.802.866.832.042	5.986.784.264.050
SURPLUS/DEFISIT-LO		21.046.847.623	(329.625.539.515)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI		0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(5.529.616.250)	5.177.398.100
PENYESUAIAN NILAI ASET		0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		3.138.368	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		0	1.982.500
SELISIH REVALUASI ASET		0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		(5.360.748.987)	5.066.118.273
LAIN-LAIN		(172.005.631)	109.297.327
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		(145.972.554.376)	162.173.093.315
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(130.455.323.003)	(162.275.048.100)
EKUITAS AKHIR		5.672.411.509.039	5.824.509.215.950

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

##### A.1.1 Visi

Visi DJPT tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Perikanan Tangkap yang maju dan berkelanjutan serat Masyarakat Perikanan Tangkap yang sejahtera untukmewujudkan Indonesia majuyang berdaulat, mandiri dan berkperdibadian berdasarkan gotong royong

##### A.1.2 Misi

DJPT melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan tangkap;
- b. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap; dan
- c. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup DJPT.

##### A.1.3 Renstra

Secara khusus arah kebijakan untuk sub sektor perikanan tangkap yaitu memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan meliputi:

- a. membuka komunikasi dengan stakeholders untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual;
- b. optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI, termasuk optimalisasi kelembagaannya, baik WPPNRI di laut maupun perairan darat;
- c. penguatan penyediaan dan pemanfaatan data stok sumber daya ikan sebagai basis pengelolaan sumber daya ikan yang maju dan berkelanjutan;

- d. perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan berusaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait;
- e. pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port), dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (Major Project RPJMN 2020-2024), dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
- f. eksplorasi perikanan di ZEEI dan laut lepas;
- g. fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, serta optimalisasi peran Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU- perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, perlindungan hak asasi manusia perikanan);
- h. penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan (Major Project RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BUMN, Pemerintah Daerah, dan Swasta;
- i. pengelolaan perikanan di perairan darat;
- j. pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- k. partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan Indonesia/Regional Fisheries Management Organization (RFMOs);
- l. pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;
- m. pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan penguatan unit pelaksana teknis perikanan tangkap

#### **A.1.4 Kebijakan UAPPA-Es1**

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan stakeholder untuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual. Kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan:

- a. kajian atas regulasi dalam rangka percepatan investasi subbidang perikanan tangkap;
  - b. konsultasi publik dengan stakeholder untuk perumusan kebijakan;
  - c. pendekatan ilmiah/akademik berbasis data dan pengetahuan faktual dalam perumusan kebijakan;
  - d. koordinasi dengan Kementerian Koordinator dan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan kebijakan perikanan tangkap; dan
  - e. kunjungan kerja dan diskusi stakeholder di pelabuhan perikanan dan sentra nelayan.
2. Pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang - 44 - berkelanjutan. Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. pengembangan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif ;
  - b. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI;
  - c. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI;
  - d. Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan
3. Reformasi Birokrasi DJPT menuju birokrasi yang lebih berkualitas Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka implementasi RB DJPT berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu:
- a. human capital
  - b. organisation capital (rightsSizing organisation)
  - c. finacial and planning capital
  - d. information capital; dan
  - e. control capital

Untuk mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut, DJPT telah menginisiasi beberapa kegiatan prioritas yang diharapkan dapat menjadi kunci, memberikan multiplier effect pada kegiatan lainnya, serta menghasilkan

dampak langsung pada stakeholder. Kegiatan prioritas tersebut meliputi implementasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol, penyederhanaan regulasi perikanan tangkap, pengembangan pelabuhan perikanan unggul, pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU), serta armada perikanan yang kompetitif. Kegiatan prioritas setidaknya bersifat, namun tidak terbatas, sebagai akselerator setiap arah kebijakan serta terdapat unsur inovasi didalamnya. Kegiatan lainnya yang mengacu pada beberapa pertimbangan seperti dukungan legislatif dan berbagai kebijakan pimpinan lainnya masih dapat dikategorikan sebagai kegiatan prioritas dalam konteks pembangunan perikanan tangkap secara utuh.

### **A.3 Kerjasama Ditjen Perikanan Tangkap**

Kerja sama di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdiri dari kerja sama internasional dan antarlembaga. Kerja sama internasional meliputi kerja sama bilateral, regional, multilateral, dan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Kerja sama bilateral dibagi berdasarkan Kawasan, yaitu Asia Pasifik, Afrika dan Timur Tengah, dan Amerika dan Eropa. Kerja sama regional meliputi RFMO, ASEAN, SEAFDEC, dan Kerja Sama Ekonomi Subregional (KESR). Kerja sama multilateral meliputi intrakawasan dan PBB. Adapun kerja sama antarlembaga meliputi kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah.

#### **1. Internasional**

##### **a. Bilateral**

##### **1) Asia Pasifik**

Kerja sama dengan negara di kawasan Asia Pasifik meliputi negara Australia, Bangladesh, Jepang, Malaysia, RRT, Taiwan, dan Vietnam.

##### **a) Australia**

Pemerintah Australia melalui berbagai jalur diplomatik telah menyampaikan perhatian atas semakin meningkatnya pencurian ikan oleh nelayan Indonesia di wilayah Australia dan telah meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pencurian ikan tersebut. Peningkatan aksi pencurian ikan tersebut terjadi di berbagai wilayah perairan Australia, khususnya di perairan pedalaman, daerah taman laut yang dilindungi (Kimberly Marine Park), dan wilayah daerah pesisir Australia Barat. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, diharapkan dapat mengambil langkah-langkah nyata untuk mencegah terus berlanjutnya aktivitas pencurian ikan tersebut.

##### **b) Bangladesh**

Melalui Note Verbale nomor 19.01.6201.202.25.082.24, tanggal 15 Mei 2024, Kedutaan Besar Republik Bangladesh di Jakarta

menyampaikan usulan naskah *Memorandum of Understanding* kerja sama kelautan dan perikanan antara Kementerian Perikanan dan Peternakan Bangladesh dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Ruang lingkup kerja sama yang diusulkan meliputi tugas dan fungsi lintas eselon I di KKP termasuk Ditjen Perikanan Tangkap. Hingga saat ini pembahasan draf MoU masih berproses.

**c) Jepang**

*Ocean Solution Technology (OST) Japan* memperkenalkan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang berpotensi mendukung kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dalam hal pemantauan kapal perikanan skala kecil. Saat ini tengah dilakukan uji coba di PPS Nizam Zachman Jakarta, PPN Muara Angke, dan Pelabuhan Tanjung Benoa. Di saat yang sama dilakukan juga pembahasan draf *Technical Arrangement* untuk mendokumentasikan uji coba tersebut dan hasilnya. Unit kerja yang terkait yaitu Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Pusat Data Statistik dan Informasi (Setjen).

**d) Malaysia**

Pertemuan Teknis Penetapan Batas Maritim (PBM) ke-42 antara RI dan Malaysia di Penang, 6-7 Mei 2024. Permasalahan utama dalam penentuan batas maritim Indonesia dan Malaysia terkait dengan konsep dan metode pengukuran yang digunakan oleh kedua negara. Malaysia menggunakan konsep *dual maritime boundary line* (Batas Landas Kontinen dan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)), sementara Indonesia menggunakan konsep *single maritime boundary line* (Zona Ekonomi Eksklusif). Lebih lanjut, dalam metode pengukuran, Malaysia menggunakan pengukuran *basepoint to basepoint*, sementara Indonesia menggunakan metode *baseline to baseline*. Kedua hal inilah yang menyebabkan belum adanya kesepakatan diantara kedua negara dalam menentukan batas maritim sehingga perundingan akan dilanjutkan pada pertemuan PBM ke-43 di Indonesia.

**e) Republik Rakyat Tiongkok (RRT)**

Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRT tentang Penguatan Kerja Sama Maritim telah ditandatangani di Guiyang pada tanggal 5 Juni 2021 oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI dan Investasi dan State Councillor dan Menteri Luar Negeri RRT.

Sebagai turunan dari MSP, Pengaturan Pelaksanaan (*Implementing Arrangement/IA*) antara KKP RI dan Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan RRT tentang Kerja Sama Perikanan telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 6 September 2023 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan RRT.

Merujuk pada Pasal 4 IA, perlu dibuatkan Panduan Kerja Sama Teknis untuk Mempromosikan Kerja Sama Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI dan Biro Perikanan Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan RRT. Indonesia telah menyampaikan draf Panduan Kerja Sama Teknis kepada pihak RRT melalui Note Verbale, nomor No. D/01440/06/202, tanggal 12 Juni 2024. Hingga saat ini pihak RRT belum menyampaikan *counterdraft*.

**f) Taiwan**

Isu yang mengemuka terkait dengan Taiwan yaitu perlindungan awak kapal perikanan (AKP). Saat ini terdapat inisiatif untuk menyusun *Memorandum of Understanding* antara Indonesia dan Taiwan terkait perlindungan awak kapal perikanan yang bekerja di atas kapal Taiwan. Beberapa hal yang mengemuka selama pembahasan. Peningkatan kapasitas AKP yang akan dikirim sangat penting dan disesuaikan dengan kebutuhan di negara tujuan. Di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, kementerian/lembaga terkait perlu untuk menyusun materi dan posisi Indonesia serta membahas rencana penyusunan MoU dengan pihak Taiwan.

**g) Vietnam**

Saat ini terdapat isu area tumpang tindih Yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen antara RI dan Vietnam yang akan dituangkan dalam *Implementing Arrangement (IA)*. IA tersebut merupakan akan mandat dari ditandatanganinya Persetujuan Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara pada tanggal 23 Desember 2022. Perundingan IA Tengah berproses sebagai tindak lanjut dari kunjungan Presiden RI ke Vietnam pada 12 Januari 2024 di mana kedua negara telah berkomitmen untuk menyelesaikan IA yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam persetujuan batas ZEE yang saat ini dalam proses pengesahan/ratifikasi.

**2) Afrika dan Timur Tengah**

Kerja sama dengan negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah meliputi negara Afrika Selatan, Aljazair, Arab Saudi, Mozambik, Namibia, Tanzania, dan Turki.

**a) Afrika Selatan**

KKP RI dan Departemen Kehutanan, Perikanan, dan Lingkungan Afrika Selatan saat ini tengah membahas draf MoU kerja sama Perikanan dan Akuakultur. Melalui Nota Diplomatik, nomor IDN11/2024, Pemerintah Afrika Selatan menyampaikan *counterdraft* MoU kepada KBRI Pretoria dengan ruang lingkup kerja sama yang meliputi:

- (1) *exchange of information and expertise in the field of combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing;*

- (2) *sustainable fisheries and aquaculture development, and marine resources management;*
- (3) *capacity building and academic program, and knowledge exchange in the area of fisheries and aquaculture;*
- (4) *processing, marketing and investment of fish and/or aquaculture and/or fisheries products;*
- (5) *sharing of technology and innovation application in the area of fisheries and aquaculture; and*
- (6) *collaboration in science, technology and innovation in areas of fisheries and aquaculture.*

**b) Aljazair**

KKP RI dan Ministry of Fisheries and Haliuetic Productions Aljazair membahas draf MoU tentang Kerja Sama Perikanan Tangkap dan Perikanan Budi Daya dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) *development of sustainable fisheries and aquaculture;*
- (2) *capacity building and academic program in the area of fisheries and aquaculture;*
- (3) *processing and value added of fish and fisheries products;*
- (4) *conservation of marine threatened species; and*
- (5) *trade and investment of fisheries and aquaculture products.*

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari MoU tersebut, *Plan of Action* juga sedang dibahas antara kedua pihak.

**c) Arab Saudi**

KKP RI dan *Ministry of Environment, Water, and Agriculture (MEWA)* Arab Saudi telah menandatangani MoU *in the Field of Marine Affairs and Fisheries Cooperation* pada tanggal 1 Maret 2017 dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) *Marine and fisheries development;*
- (2) *Food safety and fish quarantine;*
- (3) *Promotion and marketing of fisheries products;*
- (4) *Management and conservation of marine coastal resources;*
- (5) *Scientific and applied research as well as modern technical practices;*
- (6) *Exchange of information and experience in addition to training and development of cadres;*
- (7) *Encourage mutual visits by public and private sectors; and*
- (8) *Any activities mutually agreed between the Parties.*

Saat ini tengah dilakukan pembahasan amandemen MoU tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak, serta disusun *draft Plan of Action* sebagai rencana tindak lanjut untuk implementasi area kerja sama sebagaimana tercantum dalam MoU. MEWA menghilangkan beberapa rancangan kegiatan kerja sama yang disulkan oleh pihak Indonesia dimana semula 32 kegiatan menjadi 8 kegiatan dengan alasan bukan menjadi ruang lingkup kerja MEWA.

**d) Mozambik**

KKP RI dan *Ministry of the Sea, Inland Waters and Fisheries* Mozambik membahas draf MoU tentang Kerja Sama Kelautan dan Perikanan dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) *Sustainable aquaculture and fisheries development;*
- (2) *Marine spatial planning;*
- (3) *sharing of information as well as technology and innovation on marine and fisheries;*
- (4) *Processing, marketing and investment of fish and fisheries products;*
- (5) *Prevention, deterrence and elimination of illegal, unreported, and unregulated (IUU) Fishing;*
- (6) *Marine conservation and marine eco-tourism; and*
- (7) *Capacity building on marine and fisheries.*

**e) Namibia**

KKP RI dan *Ministry of Fisheries and Marine Resources* Namibia membahas draf MoU tentang Kerja Sama Perikanan Tangkap dan Perikanan Budi Daya dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) *sustainable fisheries and aquaculture development;*
- (2) *capacity building, exchange of information/knowledge and research on marine affairs, fisheries and aquaculture; and*
- (3) *marine conservation, coastal and marine ecotourism.*

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari MoU tersebut, *Plan of Action* juga sedang dibahas antara kedua pihak.

**f) Tanzania**

*Memorandum of Understanding on Development of Blue Economy through Marine Affairs and Fisheries* antara KKP RI dan *Ministry of Livestock and Fisheries* Tanzania telah ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2024 dengan ruang lingkup kerja sama sebagai berikut:

- (1) *sustainable aquaculture, capture fisheries development, and marine resources management;*
- (2) *marine conservation, sustainable coastal and marine ecotourism;*
- (3) *capacity building and academic program in the area of fisheries;*
- (4) *promoting fish and fisheries product as well as investment; and*
- (5) *sharing of knowledge and best practices in combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing.*

Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut, tengah dilakukan pembahasan draf *Plan of Action/Work Plan* dan draf *ToR Joint Technical Committee*.

**g) Turki**

KKP RI dan *Ministry of Agriculture and Forestry* Turki membahas *Memorandum of Understanding (MoU) Kerja Sama Perikanan dan Akuakultur* dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) *fishery product processing, marketing and investment;*

- (2) *sustainable development of fisheries and aquaculture;*
- (3) *capacity building on fisheries and aquaculture, including education, training, and extension program; and*
- (4) *exchange of knowledge and experience in the field of combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing.*

Sebagai turunan MoU akan dibuat *Implementing Arrangement* untuk mengatur lebih lanjut ketentuan kerja sama teknis dan dibahas draf *Terms of Reference Working Group on Fisheries and Aquaculture* yang meliputi *objective, responsibility, structure and scope (composition and chair, meeting arrangement, dan scope of discussion), agreed minutes, dan expenses.*

### **3) Amerika dan Eropa**

Kerja sama dengan negara di kawasan Amerika dan Eropa meliputi negara Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Portugal, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Uni Eropa.

#### **a) Amerika Serikat**

Terdapat isu *Antidumping dan Countervailing Duties (CVD)* atas produk udang Indonesia yang dilancarkan oleh Amerika Serikat. Terhadap 15 kebijakan dan program Pemerintah Indonesia yang dituduh sebagai subsidi, 6 diantaranya merupakan program KKP untuk penguatan produksi

nelayan dan pembudidaya perikanan skala mikro kecil. Sementara itu program lainnya antara lain: fasilitas kepabeanan yang universal dan program pembiayaan LPEI yang sebenarnya non-diskriminatif atau tidak hanya untuk pembiayaan ekspor udang, yang semuanya ini tidak termasuk kategori subsidi menurut Perjanjian *Subsidy and Countervailing Measures* WTO-GATT 1994. KKP telah memberikan tanggapan tertulis terhadap 15 kebijakan dan program yang dituduh subsidi kepada USDOC melalui Kemendag dan KBRI Washington DC pada tanggal 6 November 2023. Pada tanggal 14 November 2023, USDOC secara resmi melakukan investigasi CVD/AD sampai dengan Juli 2024. Dalam menghadapi kasus ini, Indonesia menggandeng pengacara Mayer Brown untuk pembelaan jalur normatif dan Appleton Luff untuk mekanisme *settlement*.

Pihak USDOC menjadwalkan untuk mengadakan kunjungan verifikasi ke Indonesia pada 20 – 22 Mei 2024 untuk melakukan *on-site verification* atas

informasi yang telah disampaikan oleh Pemri. Dalam kunjungan verifikasi ini seluruh Kementerian/Lembaga dan instansi lainnya akan dipusatkan dalam satu pertemuan di Kementerian Perdagangan.

#### **b) Inggris**

*Blue Planet Fund (BPF)* merupakan inisiatif Pemerintah Inggris yang diluncurkan pada Amerika Konferensi Iklim Bangsa-Bangsa (COP26) pada tahun 2021. BPF bertujuan untuk mendukung pelestarian dan

konservasi lautan serta upaya perlindungan ekosistem laut di seluruh dunia. Indonesia merupakan salah satu negara prioritas BPF. Ruang lingkup BPF meliputi ekosistem laut, perikanan dan budidaya yang tertuang dalam 12 program utama BPF. BPF bukan merupakan program hibah, pendanaan tidak langsung ke Pemerintah Indonesia melainkan melalui proses channeling ke CSO/NGO yang menjadi implementing partner BPF, sehingga BPF akan menyesuaikan dengan pedoman dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Seluruh unit kerja eselon I lingkup KKP termasuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap diharapkan dapat memberikan masukan/usulan kegiatan untuk dikerjasamakan yang sesuai dengan arah kebijakan sesuai dengan Rencana Strategis.

### c) Italia

Pada tanggal 20 s.d. 23 Mei 2024, Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan anggota Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja Italia untuk:

- (1) melaksanakan studi komparasi implementasi fungsi-fungsi legislatif, khususnya aspek perencanaan dan penganggaran bagi sektor pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan dengan pihak-pihak terkait di Italia;
- (2) mendiskusikan program adaptasi dan strategi mitigasi perubahan iklim yang diterapkan di Italia;
- (3) membahas penguatan kerjasama bilateral kedua negara; dan
- (4) kerja sama konkret sektor lainnya sebagai *outcome* kunjungan kerja ini.

Delegasi melakukan serangkaian pertemuan/kunjungan dengan/ke KBRI di Roma, FAO, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF), dan Mercato del Pesce di Rialto (Modern Fish Market).

Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dan Mitra Kerja ini diharapkan akan semakin mempererat hubungan bilateral RI dan Italia di masa depan. Dan secara khusus, dapat menambah khasanah dalam menjalankan fungsi lembaga legislatif, khususnya pengawasan kepada pemerintah yang perlu mendapatkan perhatian segera, yakni efek perubahan iklim yang berpengaruh bagi sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta sumber daya alam lainnya. Hal ini menjadi penting, karena sektor-sektor tersebut berkaitan erat dengan hajat hidup Masyarakat luas. Program kerja Pemerintah Italia dalam menghadapi efek perubahan iklim juga dapat kiranya diadaptasi oleh Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian/Lembaga terkait, selain tentu saja menjalankan program yang telah disusun di dalam negeri dalam kaitan dengan mitigasi perubahan iklim.

#### d) Jerman

Proyek *Solar Cold Chains for Green Economy in Indonesia (SOCOOL)*, merupakan *government collaboration*, antara Kementerian Federal Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Jerman c.q. *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH* dengan pemerintah Indonesia melalui Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana Proyek ini bernilai 5 Juta Euro, dengan durasi Januari 2023 s.d. Desember 2026.

Isu penanganan rantai dingin perikanan di Indonesia khususnya Indonesia bagian timur masih menjadi perhatian khusus terkait *economy loss* yang tinggi karena masih minimnya penanganan rantai dingin yang baik dikarenakan keterbatasan energi, sedangkan mayoritas masyarakat masih menggunakan teknologi diesel yang membutuhkan biaya tinggi.

SOCOOL merupakan program yang mendukung dekarbonisasi yang menjadi isu penting di berbagai negara, hal ini dapat mendukung program dekarbonisasi pada rencana Kerja KKP.

SOCOOL dikembangkan oleh Kementerian Federal Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) Pemerintah Jerman, akan tetapi bahan baku produknya berasal dari dalam negeri, program ini bersifat hibah murni dalam bentuk *technical assistant*, yang didukung oleh profesional dari Jerman yang saat ini masih dalam proses tender di Pemerintah Jerman.

Adapun rencana kerja SOCOOL tahun 2024 yaitu melakukan *monitoring* dan evaluasi di:

- (1) 12 tempat di mana *solar cold storage* yang saat ini sudah dibangun; dan
- (2) Kampung Nelayan Modern, sehingga bisa memberikan gambaran perbandingan, untuk proses *lesson learned*.

#### e) Kanada

Pada hari Jumat, 26 Januari 2024 dilakukan audiensi dengan Kedutaan Besar Kanada dan *Navcast Asia*. *Navcast* memperkenalkan Alon, perangkat berbasis satelit, bertenaga surya, dan didesain khusus untuk mendukung pengelolaan perikanan pantai yang meliputi pemberantasan IUUF, pengaturan musim dan zona tangkapan, komunikasi, dan keamanan, serta dapat bermanfaat dalam pengamanan pantai dan ketelusuran makanan laut (*seafood*). Alon juga memiliki spesifikasi yang baik dengan harga bersaing.

Alon merupakan perangkat multiguna yang dapat digunakan oleh nelayan, operator kapal perikanan, perusahaan perikanan, pengolah ikan, otoritas pengelolaan perikanan, otoritas keselamatan dan keamanan, dan ilmuwan. Keunggulan perangkat tersebut antara lain:

- (1) pemasangan yang sangat mudah;
- (2) pengaturan otomatis pada saat pemasangan;
- (3) tidak memerlukan perawatan khusus dan terus menerus (hanya perlu dijaga kebersihannya);
- (4) terdapat fitur darurat (SOS dan pemberitahuan otomatis kapal tenggelam).

Perangkat *Navcast Alon* yang diperkenalkan oleh pihak Kanada berpotensi untuk mendukung implementasi kebijakan pengelolaan perikanan Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait, penerapannya dapat dibahas lebih lanjut.

**f) Portugal**

Bersama dengan kementerian terkait dan unit kerja lingkup KKP, Ditjen Perikanan Tangkap terlibat dalam pembahasan draf *Agreement on the Mutual Recognition (MRA) of the Personnel Certification of Fishing Vessels* antara RI dan Portugal. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama bilateral dengan perspektif meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan awak kapal penangkap ikan antara Para Pihak. Melalui MRA ini diharapkan Para Pihak sepakat untuk mengakui sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi yang dikeluarkan hanya kepada warga negaranya oleh otoritas yang berwenang dari salah satu Pihak sesuai dengan ketentuan STCW-F 1995 untuk personel di kapal penangkap ikan yang menjalankan tugas di atas kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera Republik Indonesia dan Republik Portugal.

**g) Prancis**

Bersama dengan kementerian/lembaga terkait, Ditjen Perikanan Tangkap berpartisipasi pada pertemuan Bilateral Maritime Dialogue (BMD) Indonesia – Prancis ke-2 Tahun 2024 yang dilaksanakan di Paris, Prancis pada tanggal 11-16 Maret 2023 dengan hasil antara lain sebagai berikut:

- (1) pembahasan fokus pada kerja sama *maritime safety and security*, *protection of the environment and development of blue economy*, dan *research and culture* dengan pokok-pokok yang mengemuka sebagai berikut:
  - (a) menegaskan pentingnya Indonesia sebagai salah satu pemain kunci dalam isu maritim di tingkat internasional;
  - (b) kedua negara sepakat untuk mengembangkan kerja sama maritim dalam konteks bilateral maupun regional melalui mekanisme ASEAN dan IORA;
  - (c) dalam konteks Indo-Pasifik, Indonesia dan Prancis sama-sama berupaya memperkuat keamanan maritim dan mendorong pembangunan ekonomi biru;

- (d) Prancis apresiasi peran Indonesia dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati laut, termasuk upaya kolektif mendukung kesuksesan perundingan BBNJ;
  - (e) *shared concern* mengenai perlunya peningkatan keamanan pesisir berkaitan dengan upaya melindungi dan mengamankan wilayah pesisir dari berbagai ragam ancaman dampak perubahan iklim serta kejahatan transnasional;
  - (f) komitmen kedua negara untuk mengurangi pencemaran polusi plastik melalui strategi nasional maupun negosiasi perjanjian di tingkat global, termasuk mendorong perampungan negosiasi internasional legally binding instrument mengenai polusi plastik pada tahun 2024;
  - (g) menindaklanjuti 2+2 Ministerial Meeting antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI-Prancis, pada Juli 2023, Prancis menyepakati usulan Indonesia untuk mengeksplor pembentukan kerja sama triangular di bidang maritim, seperti penanggulangan polusi plastik dan promosi pengelolaan laut yang berkelanjutan di Pasifik;
  - (h) turut dibahas berbagai proposal kerja sama Indonesia-Prancis dengan fokus pada upaya peningkatan kapasitas SDM, penanganan IUUF, polusi plastik, pemanfaatan teknologi dan penelitian kemaritiman, serta pelestarian sumber daya kelautan;
  - (i) undangan Prancis kepada Indonesia untuk menghadiri 3<sup>rd</sup> UN Ocean Conference pada Juni 2025 di Nice, Prancis, serta partisipasi pada Coastal Regions and Sea-Level Rise Coalition pada 7-8 Juni 2025 di Monako; dan
  - (j) pertemuan BMD menyepakati penyelenggaraan BMD ke-3 di Indonesia pada paruh kedua tahun 2025;
- (2) Intervensi KKP adalah penjelasan tentang program Blue Economy KKP yang mencakup 5 program prioritas: perluasan kawasan konservasi laut, Penangkapan Ikan Terukur (PIT), pengembangan budi daya perikanan yang berkelanjutan, perlindungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, penanganan sampah laut. Terkait PIT, disampaikan bahwa KKP sedang mengembangkan sarana dan prasarana, sumber daya manusia sehingga diperlukan dukungan dari pihak Prancis salah satunya melalui pengembangan pelabuhan perikanan Eco Fishing Port bekerja sama dengan AFD. Juga disampaikan bahwa program pengembangan pelabuhan perikanan dan pengawasan kegiatan penangkapan ikan terhadap IUU fishing menjadi kunci dalam implementasi PIT ke depannya. Delegasi Prancis menyampaikan dukungan terhadap implementasi PIT dan siap untuk berkoordinasi lebih lanjut.

#### **h) Rusia**

Kerja sama kelautan dan perikanan RI-Rusia diwadahi dalam forum *Working Group on Marine and Fisheries (WGMAF)* RI-Rusia. Saat ini sedang dilakukan persiapan pertemuan WGMAF ke-2 sesi 1 yang dilaksanakan pada tanggal 23-25 Agustus 2022 di Jakarta. Adapun *pending matters* kedua negara, antara lain:

- (1) Draf MoU kerja sama kelautan dan perikanan RI – Rusia;
- (2) Draf MRA KKP-Rosselkhoznadzor;
- (3) *temporary restriction* oleh Rusia terhadap 5 UPI Indonesia;
- (4) usulan registrasi tambahan 13 UPI Indonesia ke Rusia; dan
- (5) registrasi perusahaan Rusia di Indonesia.

**i) Spanyol**

Pengakuan Timbal Balik terhadap Sertifikasi Personel Kapal Penangkap Ikan (*Agreement on Mutual Recognition of Certification of Fishing Vessel Personnel*) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap RI, dan Direktur Jenderal Perencanaan Perikanan Tangkap pada tanggal 14 November 2022 dan Perikanan Budi Daya Spanyol pada tanggal 8 Februari 2023. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral dengan maksud untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan awak kapal penangkap ikan.

MRA akan memungkinkan AKP Indonesia memperoleh izin tinggal di Spanyol, gaji minimal sesuai upah minimum, jaminan sosial, uang pensiun, tunjangan pengangguran, serta hak-hak lainnya.

Dalam perkembangan implementasi MRA diperlukan penyesuaian, yakni pembaruan sertifikasi AKP Indonesia tingkat rating di Spanyol yang mencantumkan *Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (STCW-F 1995)*, yaitu konvensi IMO terkait standar pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi awak kapal perikanan, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2019.

Terdapat 2 (dua) isu lain yang diharapkan dapat menjadi fokus utama dalam reviu atau menjadi bagian dari pembahasan implementasi MRA di masa mendatang dengan otoritas Spanyol dan agen/pemilik kapal ikan di Spanyol, yaitu:

- (1) Perluasan cakupan MRA untuk mengikutsertakan AKP pada jenjang perwira dan nahkoda.
- (2) Perbedaan gaji yang diperoleh oleh AKP Indonesia, yaitu antara yang bekerja di kapal ikan Spanyol yang beroperasi di perairan teritorial Spanyol dan Uni Eropa, dengan yang bekerja di kapal ikan Spanyol yang beroperasi di laut lepas (*high seas*).

**j) Uni Eropa**

RI dan Uni Eropa tengah melakukan pembahasan Draft Text Bidang Perikanan pada *Working Group on Trade and Sustainable*

*Development (WG on TSD) Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership (I-EU CEPA) antara lain terkait teks The Parties shall work together to strengthen their cooperation on trade-related aspects of matters covered by this Article, bilaterally, regionally, and international fora, as appropriate, including in the WTO, FAO, RFMOs, and under other multilateral instruments in this field. This cooperation shall aim to achieve the following objectives:*

- (1) promotion of sustainable fishing practices and aquaculture;*
- (2) facilitation of trade in sustainable fishery products, including through market incentives and market access for sustainably sourced fishery products; and*
- (3) provision of technical assistance and capacity building for effective fisheries management, including training for fish inspectors, implementation of electronic monitoring and reporting systems, and other measures for monitoring and inspection of fishery activities.*

Selain itu, terkait dengan *audit assessment* yang dilakukan oleh *Directorate General for Health and Food Safety (DG SANTE)* pada tahun 2019, sejak tahun 2020 tercatat hanya terdapat sebanyak 176 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memiliki Approval Number untuk mengekspor produk perikananannya ke

Uni Eropa. Jumlah UPI yang memiliki Approval Number tersebut tidak dapat

ditingkatkan sebelum Indonesia menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Audit DG SANTE pada tahun 2019. Audit DG SANTE dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku mengenai mutu dan keamanan hasil perikanan untuk konsumsi di Uni Eropa. Sampai dengan saat ini baru 4 (empat) dari 10 (sepuluh) rekomendasi yang dinyatakan memuaskan oleh DG SANTE, sedangkan 6 (enam) rekomendasi lainnya masih berproses dalam penyelesaiannya.

Tindak lanjut yang telah sesuai dan dinyatakan memuaskan adalah :

- (1) Kompetensi laboratorium penguji dan pengendalian terhadap kandungan logam berat dan histamin, dan Cadmium;
- (2) Regulasi yang menjadi dasar hukum pemenuhan persyaratan ekspor ke Uni Eropa meliputi sistem jaminan mutu di hulu pada sektor perikanan tangkap dan sektor perikanan budidaya;
- (3) Sanitasi dan higienis di kapal/pelabuhan, penerapan sistem rantai dingin,
- (4) persyaratan sarana dan prasarana di kapal (penggunaan alat perekam suhu otomatis); dan Sistem monitoring residu pada perikanan budi daya;

Tindak lanjut yang dinilai belum memuaskan adalah terkait implementasi penjaminan mutu dan keamanan terutama dalam bidang perikanan tangkap, yaitu:

- (1) Pemenuhan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- (2) Pemenuhan persyaratan sistem penjaminan mutu/HACCP untuk proses pengolahan dan pembekuan di kapal;
- (3) Pengendalian suhu di kapal tidak mencapai  $-18$  derajat C dan kapal pembeku belum mempunyai alat perekam suhu otomatis;
- (4) Kompetensi dan jumlah inspektur yang melakukan sertifikasi CPIB dan inspeksi pembongkaran ikan di pelabuhan;
- (5) Database kapal, produksi dan ketertelusuran; dan
- (6) Pengendalian terhadap jaminan mutu di pelabuhan dan kapal perikanan.

Yang perlu dilakukan oleh Ditjen Perikanan Tangkap:

- (1) elakukan pembahasan lebih lanjut atas jumlah kapal yang tercantum dalam temuan mengingat existing jumlah kapal yang berizin tidak sama dengan temuan UE;
- (2) menyampaikan usulan personel dari Dit. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan untuk dimasukkan dalam Surat Keputusan Tim Tindak Lanjut Hasil Audit DG SANTE;
- (3) berkoordinasi dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) untuk:
  - (a) menelaah relevansi rekomendasi UE dengan upaya yang dilakukan Indonesia dalam penjaminan mutu hasil perikanan;
  - (b) mengevaluasi efektivitas kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan KKP;
  - (c) menyusun rencana aksi pemenuhan tindak lanjut rekomendasi DG SANTE;

## **b. Regional**

### **1) Regional Fisheries Management Organization (RFMO)**

Indonesia menjadi anggota *Indian Ocean Tuna Commision (IOTC)*, *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*, dan *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)* serta *contracting non-member* pada *Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC)*.

### **2) Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)**

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan:

- a) *The 2<sup>nd</sup> Workshop on the Development of the ASEAN Guidelines on the Placement and Protection of Migrant Fishers* dilaksanakan pada tanggal 5 – 6 Februari 2024 di Semarang, Indonesia. Kegiatan lokakarya tersebut dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan beberapa instansi yang meliputi International Labour Organization (ILO), International Organization for Migration (IOM), ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT), the Addressing Labor Exploitation in Fishing in ASEAN (ALFA) Project dan ASEAN Secretariat dengan tujuan untuk mendiskusikan serta mengumpulkan berbagai masukan

pada dokumen ASEAN Guidelines on the Placement and Protection of Migrant Fishers yang antara lain terkait dengan hak para pekerja, akses pada informasi, pengembangan skill, sertifikasi, dan akses bantuan hukum.

- b) *Workshop on Building Climate Resilience in Aquaculture and Fisheries: an ASEAN-Bangladesh Initiative dan Training on Regional Knowledge Exchange to Apply Ecosystem Approaches in Managing Inland Fisheries: an ASEAN-Bangladesh Training Initiative* dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 Mei 2024 di Kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan *31<sup>st</sup> ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi)* tahun 2023, di mana perwakilan Bangladesh pada pertemuan tersebut memaparkan *concept note* terkait pengembangan kerja sama *inland fisheries* di kawasan Asia Tenggara melalui pertukaran informasi dan kunjungan lapangan. Dalam pertemuan dimaksud setiap perwakilan negara anggota ASEAN diharapkan dapat menyiapkan *country paper* terkait implementasi EAFM pada perikanan darat dan sungai, serta peluang dan tantangannya.
- c) *The 4<sup>th</sup> Meeting of the ASEAN Network for Combating IUU Fishing* dilaksanakan secara virtual pada tanggal 19 Juni 2024.
- d) *the 16<sup>th</sup> ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF)* tanggal 2 Juli 2024, dan *the 32<sup>nd</sup> ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi)* tanggal 3 – 5 Juli 2024 di Penang, Malaysia. Pada pembahasan agenda ACFF dan ASWGFI terkait *Securing Sustainable Small-Scale Fisheries*, dilaporkan perkembangan finalisasi penyusunan dokumen *Regional Strategies to Encourage the Implementation of FAO Voluntary Guidelines on SSF*. Pada agenda pertemuan ACFF ke-16 *Impacts of Climate Change on Fisheries and Aquaculture* delegasi RI mencermati dokumen inisiasi Filipina dan Vietnam terkait *Draft Regional Guidelines on Indicators for Capture Fisheries and Aquaculture to Facilitate the Adaptation to the Impact of Climate Change*. Diharapkan beberapa unit kerja terkait seperti Ditjen PKRL, DJPB, DJPT, dan BPPSDMKP dapat mencermati bersama mengenai dokumen tersebut sebelum disahkan di ASWGFi.

### **3) Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC)**

*The 56<sup>th</sup> Meeting of the SEAFDEC Council (56<sup>th</sup> SCM)* dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 9 Mei 2024 secara luring di Tagaytay, Cavite, Filipina. KKP sebagai focal point kerja sama SEAFDEC hadir sebagai Delegasi RI dan menyiapkan Posisi Delri pada pertemuan dimaksud. Pertemuan dipimpin oleh Filipina selaku Chair SCM ke-56, membahas program kerja sama yang disusun dan disepakati pada pertemuan *the 46<sup>th</sup> Program Committee Meeting (PCM)* tahun 2023, sekaligus membahas laporan keuangan SEAFDEC.

### **4) Kerja Sama Ekonomi Subregional (KESR)**

Sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama Indonesia dalam forum *Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)*, serta menindaklanjuti surat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perihal Call for Proposal, *the 4<sup>th</sup> BIMP-EAGA Korea Cooperation Fund (BKCF)* tahun 2024, KKP diharapkan dapat memanfaatkan penawaran untuk menyusun proposal proyek terkait perikanan guna diajukan pada pembiayaan BKCF tahap IV tahun 2024.

Pembiayaan BKCF tahap IV merupakan lanjutan dari BKCF tahap I dan II periode tahun 2022, dan BKCF tahap III tahun 2023 dimana Pemerintah Korea melalui *Global Green Growth Initiative (GGGI)* berkomitmen untuk berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan inklusif dan seimbang di wilayah Asia Tenggara melalui forum kerja sama BIM-EAGA. Pada *Call for Proposal* BKCF tahap IV ini akan diprioritaskan pada 4 (empat) sektor, yaitu: 1) Lingkungan Hidup; 2) Pariwisata; 3) Konektivitas; dan 4) Pertanian dan Perikanan, dengan total pendanaan yang diberikan sebesar 4 juta USD.

### **c. Multilateral**

Kerja sama multilateral terdiri dari kerja sama intrakawasan dan kerja sama dalam kerangka Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

#### **1) Intrakawasan**

- a) WTO
- b) OKI
- c) IPEF
- d) IORA
- e) IBSAP
- f) G20

#### **2) PBB**

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a) SCFM1
- b) JWG5
- c) PSMA
- d) APFSD11
- e) APRC37
- f) BPI
- g) FAO Council
- h) Fish Trade Training
- i) UNFCCC
- j) UNESCAP
- k) UNODC
- l) FAO Biodiversity Plan
- m) IMO
- n) ILO
- o) IOM

## **d. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri**

### **1) Pinjaman**

- a) Ecofishing Port
- b) IFP-IFM Phase I
- c) IFP-IFM Phase II
- d) Lautra

### **2) Hibah**

- a) GEF5 ISLME
- b) GEF6 CFI
- c) ALDFG GGGI
- d) Blue Halo S
- e) BOBLME Phase II
- f) USAID Berikan
- g) ATSEA 2
- h) IFAD

## **2. Antarlembaga**

### **a. Pemerintah**

Ditjen Perikanan Tangkap tengah melakukan pembahasan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan:

- 1) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan terkait sinergi tata kelola ketenagakerjaan bidang perikanan tangkap;
- 2) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait sinergisitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan penggunaan perangkat telekomunikasi untuk mendukung sektor kelautan dan perikanan;
- 3) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terkait sinergitas pelayanan dan tata kelola di bidang kepelabuhanan, kesyahbandaran, pengawakan, pengukuran, serta kelaikan kapal perikanan;
- 4) Lintas sektor (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian) terkait pelaksanaan pemberdayaan tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan, dan pembudidaya ikan;

### **b. Nonpemerintah**

- 1) Pada triwulan II tahun 2024, Ditjen Perikanan Tangkap bekerja sama dengan 17 mitra, yaitu:
  - (a) BPJS Ketenagakerjaan;
  - (b) Yayasan IPNLF Indonesia;
  - (c) Yayasan Konservasi Alam Nusantara;
  - (d) PT Moores Rowland dba Starling Resources;
  - (e) WWF Indonesia;
  - (f) Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia;

- (g) PT Pertamina Patra Niaga;
- (h) Yayasan Pesisir Lestari;
- (i) Institut Teknologi Kelautan Buton;
- (j) FPIK Institut Pertanian Bogor;
- (k) FPIK Universitas Brawijaya;
- (l) FPIK Universitas Diponegoro;
- (m) FPIK Universitas Padjadjaran;
- (n) FPIK Universitas Jenderal Soedirman;
- (o) FIKP Universitas Hasanuddin;
- (p) FPIK Universitas Halu Oleo; dan
- (q) FKP Universitas Syiah Kuala;

dengan jumlah keseluruhan ruang lingkup kerja sama sebanyak 65.

- 2) PKS dengan DPLK BRI, Yayasan Pusat Segitiga Karang, dan PT Moores Rowland dba Starling Resources telah berakhir pada tanggal 6 April 2024. Hingga berakhirnya periode triwulan II 2024, pihak DPLK BRI dan Yayasan Pusat Segitiga Karang tidak mengajukan permohonan perpanjangan/penyusunan PKS baru sehingga kedua mitra tersebut tidak dimasukkan ke dalam matriks. Adapun Starling Resources tetap dimasukkan ke dalam matriks karena telah mengajukan permohonan perpanjangan dan saat ini tengah berproses pembahasannya.
- 3) Terdapat pula PKS baru dengan Yayasan Pesisir Lestari yang ditandatangani akhir triwulan II (28 Juni 2024) sehingga belum ada pelaksanaan kegiatan yang dapat dilaporkan. Selain itu, terdapat penambahan sembilan PKS dengan perguruan tinggi (tersebut di angka 1) yang ditandatangani pada tanggal 9 Juli 2023. Pada periode-periode pelaporan sebelumnya, PKS tersebut tidak dimasukkan ke dalam matriks karena belum dilengkapi dengan rencana aksi. Atas arahan Biro Perencanaan, sembilan PKS tersebut agar dimasukkan ke dalam matriks.
- 4) Persentase capaian mitra diperoleh dari penjumlahan angka persentase dibagi dengan jumlah ruang lingkup. Kemudian secara keseluruhan diperoleh angka agregat 35% (jika tanpa PKS dengan perguruan tinggi 76%). Dibandingkan dengan periode sebelumnya, capaian tersebut mengalami penurunan antara lain karena tidak terlaksananya kegiatan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sehubungan dengan dialihkannya anggaran untuk Buku Pelaut Perikanan dalam rangka pemenuhan persyaratan awak kapal perikanan yang wajib di bulan Januari 2025 sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Relaksasi Pemenuhan Persyaratan bagi Awak Kapal Perikanan. Namun, telah ada tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan mendatang di beberapa lokasi sehingga diharapkan capaian dapat meningkat.

#### A.4 Jumlah Entitas Pelaporan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

No	Kd	Entitas	Jenis Kewenangan				Juml Sat
			KP	KD	DK	TP	
<b>KANTOR PUSAT (KP)</b>							
1	03	SEKRETARIAT DIT. JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1				1
<b>KANTOR DAERAH (KD)</b>							
2	03	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN		1			1
9	03	PPN AMBON		1			1
4	03	PPN BRONDONG		1			1
5	03	PPN KARANGANTU		1			1
6	03	PPN KEJAWANAN		1			1
7	03	PPN KWANDANG		1			1
8	03	PPN PEKALONGAN		1			1
9	03	PPN PELABUHAN RATU		1			1
10	03	PPN PEMANGKAT		1			1
11	03	PPN PENGAMBENGAN		1			1
12	03	PPN PRIGI		1			1
13	03	PPN SIBOLGA		1			1
14	03	PPN SUNGAILIAT		1			1
15	03	PPN TANJUNG PANDAN		1			1
16	03	PPN TERNATE		1			1
17	03	PPN TUAL		1			1
18	03	PPP TELUK BATANG		1			1

No	Kd	Entitas	Jenis Kewenangan				Juml Sat
			KP	KD	DK	TP	
19	03	PPS BELAWAN		1			1
20	03	PPS BITUNG		1			1
21	03	PPS BUNGUS		1			1
22	03	PPS CILACAP		1			1
23	03	PPS KENDARI		1			1
24	03	PPS NIZAM ZACHMAN		1			1
<b>DEKONSENTRASI (DK)</b>							
25	03	DKP PROV. BANTEN				1	1
26	03	DKP PROV. BALI				1	1
27	03	DKP PROV. BENGKULU				1	1
28	03	DKP PROV. DKI JAKARTA				1	1
29	03	DKP PROV. GORONTALO				1	1
30	03	DKP PROV. JAMBI				1	1
31	03	DKP PROV. JAWA BARAT				1	1
32	03	DKP PROV. JAWA TENGAH				1	1
33	03	DKP PROV. JAWA TIMUR				1	1
34	03	DKP PROV. KALIMANTAN BARAT				1	1
35	03	DKP PROV. KALIMANTAN SELATAN				1	1
36	03	DKP PROV. KALIMANTAN TENGAH				1	1
37	03	DKP PROV. KALIMANTAN TIMUR				1	1
38	03	DKP PROV. KALIMANTAN UTARA				1	1
39	03	DKP PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG				1	1
40	03	DKP PROV. KEPULAUAN RIAU				1	1
41	03	DKP PROV. LAMPUNG				1	1

No	Kd	Entitas	Jenis Kewenangan				Juml Sat
			KP	KD	DK	TP	
42	03	DKP PROV. MALUKU				1	1
43	03	DKP PROV. MALUKU UTARA				1	1
44	03	DKP PROV. NANGGROE ACEH DARUSSALAM				1	1
45	03	DKP PROV. NUSA TENGGARA BARAT				1	1
46	03	DKP PROV. NUSA TENGGARA TIMUR				1	1
47	03	DKP PROV. PAPUA				1	1
48	03	DKP PROV. PAPUA BARAT				1	1
49	03	DKP PROV. RIAU				1	1
50	03	DKP PROV. SULAWESI BARAT				1	1
51	03	DKP PROV. SULAWESI SELATAN				1	1
52	03	DKP PROV. SULAWESI TENGAH				1	1
53	03	DKP PROV. SULAWESI TENGGARA				1	1
54	03	DKP PROV. SULAWESI UTARA				1	1
55	03	DKP PROV. SUMATERA BARAT				1	1
56	03	DKP PROV. SUMATERA SELATAN				1	1
57	03	DKP PROV. SUMATERA UTARA				1	1
58	03	DKP PROV. YOGYAKARTA				1	1
<b>Jumlah</b>			<b>1</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>58</b>

### A.5 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

#### **A.5.1 Basis Akuntansi**

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **A.5.2 Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5.3 Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perikanan

Tangkap. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut:

### **Pendapatan LRA**

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- e. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

### **Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

## Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

### a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan

- a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

#### **b. Aset Tetap**

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah];

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tata Cara Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

#### e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya, Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas

dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### **f. Kewajiban**

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

**Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

### Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

### **g. Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 946.540.091.000. Selama tahun 2024, dilakukan revisi atas DIPA Awal Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang disebabkan adanya Automatic Adjustment serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA  
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
PENDAPATAN NEGARA	3.562.040.173.000	3.562.040.173.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.562.040.173.000</b>	<b>3.562.040.173.000</b>
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	205.025.347.000	205.502.581.000
BELANJA BARANG	667.354.238.000	668.796.894.000
BELANJA MODAL	74.160.506.000	72.691.096.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>946.540.091.000</b>	<b>946.990.571.000</b>

Realisasi  
Pendapatan Rp  
467.047.332.469

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 467.047.332.469 atau mencapai 13,11 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 3.562.040.173.000. Pendapatan di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdiri dari Pendapatan fungsional SDA, fungsional non SDA, Pendapatan Umum dan Pendapatan Non Anggaran sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2024

URAIAN	ANGGARAN AWAL	REALISASI	%
SDA	3.500.000.000.000	411.281.309.491	11,75
Non-SDA	62.040.173.000	50.753.677.212	81,81
Umum	0	2.594.041.715	N/A
Non Anggaran	0	2.418.304.051	N/A
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.562.040.173.000</b>	<b>467.047.332.469</b>	<b>13,11</b>

#### B.1.1 Pendapatan SDA

Penerimaan Sumber daya alam terdiri dari tiga jenis penerimaan, yaitu pertama penerimaan pungutan pengusaha perikanan yang terdiri atas pungutan perusahaan perikanan bagi izin usaha perikanan (SIUP) untuk perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atau pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, baru

atau perpanjangan, pungutan perusahaan perikanan untuk perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, baru atau perpanjangan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri Kelautan Perikanan. Kedua, penerimaan pungutan hasil perikanan atas perizinan berusaha penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan baru atau perpanjangan. Jenis penerimaan SDA Perikanan kami jelaskan pada table berikut ini:

PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM (Pendapatan Perikanan)	
421521. Pendapatan Pungutan Perusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	
A. Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP) Baru atau Perubahan	
B. Izin Usaha Perikanan Untuk Alokasi Kapal Penangkap Ikan. Alokasi Kapal Dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan Baru atau Perubahan dengan Alat Penangkapan Ikan	
C. Izin Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Asing Baru atau Perpanjangan	
D. Kapal Pengangkut Ikan Tunggal	
421531. Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	
A. Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Atas Izin Penangkapan Ikan Untuk Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan Baru atau Perpanjangan	
421522. Pendapatan Pungutan Perusahaan Perikanan Bidang Perikanan Budidaya	
A. Izin Kapal pengangkut perairan darat	

Akun	Satker	Total
421521. Pendapatan Pungutan Perusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	18.977.302.407
Pendapatan Pungutan Perusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap Total		18.977.302.407
421522. Pendapatan Pungutan Perusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	55.275.000
Pendapatan Pungutan Perusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Total		55.275.000
421531. Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	392.248.732.084
Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan Total		392.248.732.084

Satker	2023	2024	Selisih	%
421521. Pendapatan Pungutan Perusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap				
238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	45.970.982.828	18.977.302.407	(26.993.680.421)	(58,72)
421522. Pendapatan Pungutan Perusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				
238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	93.225.000	55.275.000	(37.950.000)	(40,71)
421531. Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan				
238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	590.829.145.441	392.248.732.084	(198.580.413.357)	(33,61)

Realisasi Penerimaan PNBPN SDA Perikanan periode Desember TA.2023 adalah sebesar Rp392.248.732.084,- yang terdiri dari Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Perikanan Tangkap sebesar Rp18.977.302.407,- dari Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Perikanan Budidaya Rp55.275.000,-, dan Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebesar Rp392.248.732.084,-. Penerimaan SDA pada TA 2023 belum memenuhi target yang direncanakan. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2023 merupakan tahun transisi pelaksanaan penarikan pascaproduksi yang sebelumnya praproduksi, sehingga kapal penangkap ikan baru mulai beralih dari sistem praproduksi ke pascaproduksi yang menyebabkan adanya jeda penerimaan karena sebelumnya pungutan dilakukan di awal perizinan beralih ke pungutan yang dilakukan saat pendaratan produksi ikan, sementara itu pada tahun 2024 kapal penangkap ikan sudah seluruhnya memiliki izin dengan sistem pascaproduksi. Meskipun demikian, pendapatan Bulan Januari s.d Juni 2024 masih jauh dari target tahun 2024 yaitu baru mencapai 11,75% dari target sebesar Rp3.500.000.000.000. Realisasi PNBPN SDA Perikanan ini masih jauh dari target disebabkan karena harga acuan ikan tahun 2024 yang turun sekitar 40% dari tahun 2023. Selain itu, target yang ditetapkan untuk tahun 2024 merupakan target gabungan antara SDA Perikanan dan SDA Kelautan, dimana sampai Bulan Juni 2024 belum terdapat keputusan pemisahan target untuk SDA Kelautan.

#### B.1.2 Pendapatan Non-SDA

Penerimaan Non-Sumber daya alam terdiri dari penerimaan imbal jasa pelabuhan seperti table berikut ini:

PENERIMAAN IMBAL JASA PELABUHAN (PNBP Fungsional)
425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi
A. Penggunaan tanah dan/atau bangunan
1. tanah di kawasan pelabuhan perikanan
a. penggunaan tanah dalam rangka tusi pelabuhan perikanan
b. pemeliharaan prasarana
2. tanah yang dipakai di kawasan pelabuhan perikanan
a. penjemuran
b. penumpukan barang
c. bangunan di kawasan pelabuhan perikanan
d. ruangan di dalam gedung pemasaran
e. asrama
f. ruang rapat
g. ruang kelas
h. ruang pertemuan/aula
i. ruang pameran
j. bak semen untuk pembenihan
k. bak semen back yard
l. kolam untuk pameran
m. kolam untuk pembudidayaan
n. rumah susun nelayan
B. Penggunaan Peralatan dan Mesin

1. Jasa Pengadaan Es
2. Penggunaan ruang pendingin, freezer, cold storage
a. freezer
b. cold storage
c. chest freezer
d. plugging container
3. Penggunaan peralatan Pelabuhan Perikanan
a. tangki BBM
b. tangki Air
4. Penggunaan Peralatan Pengembangan Penangkapan Ikan
5. Penggunaan Peralatan Pengolahan
6. Penggunaan Peralatan Riset
7. Penggunaan Peralatan Multimedia
8. Penggunaan Peralatan Permesinan
9. Penggunaan Transportasi
a. kapal
b. kendaraan
425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya
A. Sertifikasi
1. Pelayanan Teknis dan Sertifikasi Produk Perikanan
a. Sertifikasi Produk
b. Persetujuan Penggunaan SNI
c. Surveilans Sertifikasi Produk
425439 Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya
A. Royalti, Alih Teknologi, dan Jasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1. Royalti atas lisensi paten di bidang kelautan dan perikanan
2. Kerja sama alih teknologi hasil riset
3. Pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi
425621 Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan
A. Jasa Listrik
1. Pemakaian Listrik yang Bersumber dari Daya Milik Pelabuhan Perikanan
2. Pemakaian Listrik yang bersumber dari daya milik Perusahaan Listrik Negara melalui instalasi milik pelabuhan perikanan
B. Jasa Pelabuhan Perikanan
1. Jasa Tambat dan Labuh
a. Tambat Kapal Perikanan
b. Labuh Kapal Perikanan
c. Tambat/Labuh Kapal non Perikanan
d. Floating Repair
e. Tambat/Labuh menunggu musim cuaca baik
2. Jasa Docking
a. Docking dengan pekerjaan
b. Docking tanpa pekerjaan
3. Jasa Pengadaan Air
a. sumber sumur bor
b. sumber PDAM
c. sumber SWRO
d. sumber BWRO
6. Jasa Bengkel

a. Pekerjaan Ringan
b. Pekerjaan Sedang
c. Pekerjaan Berat
7. Jasa penggunaan kawasan Pelabuhan
a. pembuatan film/video komersial untuk domestic
b. pembuatan film/video komersial untuk mancanegara
8. Jasa Pas Masuk
a. Pas Harian (sekali masuk)
b. Pas berlangganan
9. Jasa Kebersihan
a. Kebersihan kawasan PP
b. Kebersihan kolam
10. Jasa IPAL
11. Jasa Wisata Bahari Pelabuhan Perikanan
a. Pas Harian
b. Karcis masuk wisata akuarium
c. Karcis perahu wisata
d. Penggunaan toko/kios
e. Karcis permainan air
f. Penggunaan gedung pertemuan
g. Penggunaan halaman
h. Karcis wahana edukasi
425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya
A. Pengembangan Penangkapan Ikan
1. Pengujian mesin kapal s.d 50 HP
2. Pengujian mesin kapal diatas 51 HP
3. pengujian bahan jaring/jarring
4. pengujian alat bantu penangkapan ikan
425692 Pendapatan Jasa Tenaga. Pekerjaan. dan Informasi
A. Pelatihan Kelautan dan Perikanan
1. Konsultasi dan Bimbingan Teknis
a. Bidang Pengembangan Penangkapan Ikan

Nama Satker	2023	2024	Selisih	%
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi				
BBPPI	87.540.000	60.540.000	- 27.000.000	-30,84%
PPN AMBON	422.968.687	298.048.820	- 124.919.867	-29,53%
PPN BRONDONG	300.731.993	420.291.639	119.559.646	39,76%
PPN KARANGANTU	404.795.918	490.612.877	85.816.959	21,20%
PPN KEJAWANAN	1.041.032.753	373.223.222	- 667.809.531	-64,15%
PPN KWANDANG	579.186.753	464.764.587	- 114.422.166	-19,76%
PPN PEKALONGAN	2.715.000	3.500.000	785.000	28,91%
PPN PELABUHAN RATU	270.351.813	306.860.347	36.508.534	13,50%
PPN PEMANGKAT	43.243.652	29.035.011	- 14.208.641	-32,86%
PPN PENGAMBENGAN	91.425.820	409.912.191	318.486.371	348,35%
PPN PRIGI	354.624.430	323.440.000	- 31.184.430	-8,79%

PPN SIBOLGA	94.972.920	272.385.950	177.413.030	186,80%
PPN SUNGAILIAT	57.776.100	97.210.800	39.434.700	68,25%
PPN TANJUNG PANDAN	219.879.172	290.249.096	70.369.924	32,00%
PPN TELUK BATANG	25.664.080	50.748.194	25.084.114	97,74%
PPN TERNATE	409.750.930	610.009.684	200.258.754	48,87%
PPN TUAL	154.709.500	125.000.000	- 29.709.500	-19,20%
PPS BELAWAN	314.566.145	205.142.920	- 109.423.225	-34,79%
PPS BITUNG	212.310.038	205.873.027	- 6.437.011	-3,03%
PPS BUNGUS	249.458.857	343.951.643	94.492.786	37,88%
PPS CILACAP	1.134.130.291	1.028.761.165	- 105.369.126	-9,29%
PPS KENDARI	1.641.377.433	1.431.489.717	- 209.887.716	-12,79%
PPS NIZAM ZAHMAN	224.123.755	110.581.102	- 113.542.653	-50,66%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya				
BBPPI	-	4.000.000	4.000.000	#DIV/0!
PPS KENDARI	-	1.820.000	1.820.000	#DIV/0!
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya				
BBPPI	22.899.130	-	22.899.130	- 100,00%
Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan				
PPN AMBON	178.379.833	290.528.669	112.148.836	62,87%
PPN BRONDONG	467.484.636	639.949.214	172.464.578	36,89%
PPN KARANGANTU	222.492.546	239.560.689	17.068.143	7,67%
PPN KEJAWANAN	3.393.957.633	5.028.528.245	1.634.570.612	48,16%
PPN KWANDANG	107.032.794	112.295.632	5.262.838	4,92%
PPN PEKALONGAN	281.027.223	605.366.367	324.339.144	115,41%
PPN PELABUHAN RATU	475.693.893	613.213.358	137.519.465	28,91%
PPN PEMANGKAT	408.936.101	426.913.435	17.977.334	4,40%
PPN PENGAMBENGAN	312.278.803	249.429.925	- 62.848.878	-20,13%
PPN PRIGI	466.935.432	488.475.447	21.540.015	4,61%
PPN SIBOLGA	805.371.388	1.094.653.108	289.281.720	35,92%
PPN SUNGAILIAT	269.778.061	275.088.921	5.310.860	1,97%
PPN TANJUNG PANDAN	697.441.964	580.771.957	- 116.670.007	-16,73%
PPN TELUK BATANG	77.859.426	65.296.341	- 12.563.085	-16,14%
PPN TERNATE	767.177.714	718.962.198	- 48.215.516	-6,28%
PPN TUAL	231.152.063	237.184.598	6.032.535	2,61%
PPS BELAWAN	386.840.884	467.856.555	81.015.671	20,94%
PPS BITUNG	1.045.617.476	1.481.421.944	435.804.468	41,68%
PPS BUNGUS	894.620.562	1.076.442.466	181.821.904	20,32%
PPS CILACAP	2.393.596.749	2.536.463.732	142.866.983	5,97%
PPS KENDARI	2.894.762.350	2.399.807.293	- 494.955.057	-17,10%
PPS NIZAM ZAHMAN	21.540.438.718	23.024.510.126	1.484.071.408	6,89%
Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya				
BBPPI	110.040.000	132.480.000	22.440.000	20,39%

Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi				
BBPPI	9.075.000	11.025.000	1.950.000	21,49%
<b>Total</b>	<b>46.798.226.419</b>	<b>50.753.677.212</b>	<b>3.955.450.793</b>	<b>8,45%</b>

1. Pendapatan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi, merupakan pendapatan yang berasal dari penatausahaan barang milik negara pada Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah yang mengatur Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pendapatan ini terdapat pada 23 pelabuhan Unit Pelaksana Teknis. Jika dibandingkan dengan TA 2023 mengalami, kenaikan signifikan terdapat pada satker PPN Pengambengan dan PPN Sibolga yang disebabkan oleh telah habisnya masa kontrak penggunaan tanah dan bangunan sehingga menimbulkan pendapatan atas kontrak penggunaan sarana dan prasarana yang baru.
2. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya merupakan pendapatan atas Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap hanya terdapat pada satu satker yaitu Balai Besar Penangkapan Ikan, yang berasal dari kerjasama alih teknologi hasil riset, 1% per kontrak Kerjasama. Adapun pada PPS Kendari merupakan kesalahan akun setora pendapatan yang akan diralat pada periode Semester II 2024
3. Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya merupakan Penelitian/Riset, Survei, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya, antara lain jasa penggunaan peralatan survey dan pemetaan, jasa penimbangan peralatan nautika. Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap hanya terdapat pada satu satker yaitu Balai Besar Penangkapan Ikan, yang berasal dari pelayanan teknis sertifikasi produk perikanan
4. Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan merupakan Pendapatan dari pelayanan di pelabuhan perikanan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan terdapat pada 22 pelabuhan Unit Pelayanan Teknis. Jika dibandingkan dengan TA 2023 terdapat kenaikan yang cukup signifikan terutama pada PPN Ambon dan PPN Pekalongan yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas pada Pelabuhan perikanan yang menyebabkan meningkatnya pendapatan jasa pas masuk dan pendapatan jasa tambat labuh.
5. Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya merupakan pendapatan selain Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan, antara lain berupa pungutan dari

penggunaan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan dan pembudidayaan ikan. Masuk Bagian Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Ditjen Perikanan Tangkap pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari pelayanan pengujian sarana penangkapan ikan berupa pengujian mesin kapal.

6. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi merupakan pendapatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pada Ditjen Perikanan Tangkap beraal dari BBPI atas konsultasi dan bimbingan teknis dalam bidang pengembangan penangkapan ikan.

### B.1.3 Pendapatan Umum

Penerimaan Umum per satker adalah sebagai berikut ini:

Nama Satker	2023	2024	Selisih	%
<b>Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan</b>				
PPN PEKALONGAN		10.582.000	10.582.000	#DIV/0!
PPN TUAL	5.500.000		- 5.500.000	-100,00%
<b>Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin</b>				
BBPPI		280.250.461	280.250.461	#DIV/0!
PPN BRONDONG	226.221.782	5.592.000	- 220.629.782	-97,53%
PPN KARANGANTU	-	8.279.000	8.279.000	#DIV/0!
PPN KEJAWANAN	21.111.678		- 21.111.678	-100,00%
PPN PEMANGKAT		5.661.700	5.661.700	#DIV/0!
PPN TUAL		81.515.000	81.515.000	#DIV/0!
PPS BELAWAN	60.488.888	282.769.000	222.280.112	367,47%
PPS CILACAP		41.728.750	41.728.750	#DIV/0!
PPS KENDARI	-	394.743	394.743	#DIV/0!
PPS NIZAM ZAHMAN	-	48.057.000	48.057.000	#DIV/0!
SEKRETARIAT DJPT	77.425.750	244.052.898	166.627.148	215,21%
<b>Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya</b>				
PPN BRONDONG	5.000.000	156.517	- 4.843.483	-96,87%
PPN KWANDANG	6.440.000		- 6.440.000	-100,00%
PPN PELABUHAN RATU	8.666.666	11.000.999	2.334.333	26,93%
PPN PEMANGKAT	6.700.000		- 6.700.000	-100,00%
PPN TELUK BATANG	-		-	#DIV/0!
PPN TUAL	6.504.000		- 6.504.000	-100,00%
PPS NIZAM ZAHMAN		36.835.000	36.835.000	#DIV/0!
<b>Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan</b>				
PPN AMBON	19.051.376	17.399.688	- 1.651.688	-8,67%
PPN BRONDONG	1.343.340	2.121.090	777.750	57,90%
PPN KARANGANTU	7.339.068	89.899.674	82.560.606	1124,95%
PPN KEJAWANAN	8.004.480	506.284.022	498.279.542	6225,01%

PPN KWANDANG	1.811.630	2.020.722	209.092	11,54%
PPN PEKALONGAN	477.036	1.773.889	1.296.853	271,86%
PPN PELABUHAN RATA	24.499.350	24.776.956	277.606	1,13%
PPN PEMANGKAT	2.273.040	2.273.040	-	0,00%
PPN PENGAMBENGAN		12.554.000	12.554.000	#DIV/0!
PPN PRIGI	21.329.378	53.295.864	31.966.486	149,87%
PPN SIBOLGA	17.997.150	17.803.670	- 193.480	-1,08%
PPN SUNGAILIAT	12.495.636	13.178.502	682.866	5,46%
PPN TANJUNG PANDAN	6.476.184	6.690.024	213.840	3,30%
PPN TELUK BATANG	8.656.128	8.355.874	- 300.254	-3,47%
PPN TERNATE	14.826.990	14.439.615	- 387.375	-2,61%
PPN TUAL	2.459.624	2.209.680	- 249.944	-10,16%
PPS BELAWAN	2.957.396	1.364.952	- 1.592.444	-53,85%
PPS BITUNG	20.752.067	21.137.998	385.931	1,86%
PPS BUNGUS	2.291.300	10.971.575	8.680.275	378,84%
PPS CILACAP	8.341.040	395.363.612	387.022.572	4639,98%
PPS KENDARI	6.739.986	333.252.200	326.512.214	4844,40%
	<b>614.180.963</b>	<b>2.594.041.715</b>	<b>1.979.860.752</b>	<b>322,36%</b>

1. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, merupakan pendapatan dari penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan, tidak termasuk penjualan sewa beli rumah negara, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga. Pendapatan tersebut hanya ada pada satu satker yaitu PPN Pekalongan yang berasal dari lelang Gedung
2. TPI Higienis dengan risalah lelang Nomor 77/0903/2024-1  
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin merupakan pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga. Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terdapat pada 10 satker dengan rincian sebagai berikut;
  - a. Pada BBPI terdapat lelang 1 buag mobil jeep, 5 buah mobil mini bus dan lima buah sepeda motor dengan risalah lelang Nomor 76/09.01/2024-01
  - b. Pada PPN Brondong terdapat lelang 1 paket peralatan mesin kondisi rusak berat dengan risalah lelang Nomor 357/10.07/2024-01 dan lelang Steam Pressure Gauge dengan risalah lelang Nomor 368/10-01/2024-01
  - c. Pada PPN Karangantu terdapat lelang 1 peralatn mesin dengan risalah lelang Nomor 80/06.01/2024-01
  - d. Pada PPN Pemangkat lelang tiga buah kendaraan bermotor
  - e. Pada PPN Tual terdapat lelang dua kendaraan roda empat
  - f. Pada PPS Belawan terdapat lelang atas satu unit kendaraan roda empat dengan risalah lelang Nomor 246/03.04/2024-01 dan tiga kendaraan bermotor dengan risalah lelang Nomor 787/02.01/2024-01
  - g. Pada PPS Cilacap terdapat lelang 7 kendaraan bermotor dengan risalah lelang Nomor 124/09.06/2024.01
  - h. Pada PPS Kendari

- i. Pada PPS Nizam Zachman
  - j. Pada Sekretariat terdapat lelang satu kendaraan roda empat dengan risalah lelang Nomor 55/08.03/2024-01, satu unit kendaraan roda empat dengan risalah lelang Nomor 17/15.02/2024-01, satu kendaraan mini bus dengan risalah lelang Nomor 203/15.02/2024-01, tiga unit sepeda motor dengan risalah lelang Nomor 135/06.01/2024-01, satu kendaraan roda empat dengan risalah lelang Nomor 39/14.03/2024-01.
3. Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.
  4. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan merupakan pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan termasuk pendapatan sewa rumah dinas. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga sesuai dengan PP Nomor 27 TA 2014.

#### B.1.4 Pendapatan Non Anggaran

Pendapatan Non Anggaran per satker adalah sebagai berikut ini:

Nama Satker	2023	2024	Selisih	%
<b>Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan</b>				
PPS KENDARI		3.759	3.759	#DIV/0!
PPN KARANGANTU	12.250.000		-	-100,00%
PPN PRIGI	-	2.493.288	2.493.288	#DIV/0!
<b>Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara</b>				
PPS BITUNG	12.000.000	1.000.000	-	-91,67%
<b>Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah</b>				
PPN AMBON	-		-	#DIV/0!
PPN KARANGANTU	-		-	#DIV/0!
PPN SIBOLGA	298.945		-	-100,00%
PPN SUNGAILIAT	-		-	#DIV/0!
PPN TERNATE	-	1.970.100	1.970.100	#DIV/0!
PPN TUAL		12.067.510	12.067.510	#DIV/0!
PPS BITUNG	2.810.287		-	-100,00%
PPS KENDARI	-		-	#DIV/0!
PPS NIZAM ZAHMAN	-	-	-	#DIV/0!
PROV. SULAWESI TENGGERA TP	-		-	#DIV/0!
PROV. SULAWESI UTARA TP	-		-	#DIV/0!
SEKRETARIAT DJPT	32.147.600	1.067.516.444	1.035.368.844	3220,67%
<b>Pendapatan Denda Lainnya</b>				
PPS NIZAM ZAHMAN	615.145		-	-100,00%
<b>Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu</b>				
BBPPI	1.480.108	2.420.100	939.992	63,51%
PPN AMBON	88.547	553.300	464.753	524,87%

PPN BRONDONG	520.918	3.368.050	2.847.132	546,56%
PPN KARANGANTU	619		619	-100,00%
PPN PEKALONGAN	1.960.481	376.691	1.583.790	-80,79%
PPN PELABUHAN RATU	111.891	2.154.572	2.042.681	1825,60%
PPN PEMANGKAT	13.350.306		13.350.306	-100,00%
PPN PENGAMBENGAN		2.530.443	2.530.443	#DIV/0!
PPN PRIGI	2.752.100	740.200	2.011.900	-73,10%
PPN SIBOLGA		1.460.154	1.460.154	#DIV/0!
PPN SUNGAILIAT	13.113	1.496.041	1.482.928	#####
PPN TANJUNG PANDAN	68	281	213	313,24%
PPN TERNATE	155.371	676.467	521.096	335,39%
PPN TUAL	19.440.400	2.920.702	16.519.698	-84,98%
PPS BELAWAN	351.350	3.152.600	2.801.250	797,28%
PPS BITUNG	544		544	-100,00%
PPS BUNGUS	602.466	3.566.766	2.964.300	492,03%
PPS CILACAP	144		144	-100,00%
PPS KENDARI	9.231.250	2.557.068	6.674.182	-72,30%
PPS NIZAM ZAHMAN	25.680.686	3.075.887	22.604.799	-88,02%
SEKRETARIAT DJPT	-	65.416.250	65.416.250	#DIV/0!
<b>Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu</b>				
BBPPI	9.335.000	17.971.210	8.636.210	92,51%
PPN BRONDONG		14.615.359	14.615.359	#DIV/0!
PPN KWANDANG	3.789.994		3.789.994	-100,00%
PPN PEKALONGAN		1.978.020	1.978.020	#DIV/0!
PPN PELABUHAN RATU		1.045.820	1.045.820	#DIV/0!
PPN PENGAMBENGAN	38.181.060		38.181.060	-100,00%
PPN SIBOLGA	90.667.782		90.667.782	-100,00%
PPS BELAWAN		580.000	580.000	#DIV/0!
PPS BITUNG		17.181.000	17.181.000	#DIV/0!
PPS BUNGUS	2.533.300	3.530.000	996.700	39,34%
PPS KENDARI	57.595.352	23.069.912	34.525.440	-59,94%
PPS NIZAM ZAHMAN	176.824.937	18.035	176.806.902	-99,99%
PROV. LAMPUNG TP		3.000.000	3.000.000	#DIV/0!
PROV. RIAU TP	271.108.538		271.108.538	-100,00%
PROV. SULAWESI TENGGARA TP		34.749.011	34.749.011	#DIV/0!
PROV. SULAWESI UTARA TP		16.053.834	16.053.834	#DIV/0!
SEKRETARIAT DJPT	653.399.136	986.330.927	332.931.791	50,95%
<b>Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu</b>				

PPN KARANGANTU		987.400	987.400	#DIV/0!
PPN KWANDANG	1.736.604		-	-100,00%
PPN PENGAMBENGAN	55.544.613		-	-100,00%
PPN TUAL		2.577.000	2.577.000	#DIV/0!
PPS BELAWAN		6.897.743	6.897.743	#DIV/0!
PPS NIZAM ZAHMAN	39.339.231		-	-100,00%
PROV. JAWA TENGAH TP	3.793.338		-	-100,00%
SEKRETARIAT DJPT		58.194.668	58.194.668	#DIV/0!
<b>Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu</b>				
SEKRETARIAT DJPT		586	586	#DIV/0!
<b>Pendapatan Anggaran Lain-lain</b>				
BBPPI	-		-	#DIV/0!
PPN AMBON	-		-	#DIV/0!
PPN KEJAWANAN	-		-	#DIV/0!
PPN PEKALONGAN	-		-	#DIV/0!
PPN PELABUHAN RATU	-		-	#DIV/0!
PPN PEMANGKAT	-		-	#DIV/0!
PPN TANJUNG PANDAN	-		-	#DIV/0!
PPN TERNATE	-		-	#DIV/0!
PPS KENDARI	-		-	#DIV/0!
PPS NIZAM ZAHMAN		30.000.000	30.000.000	#DIV/0!
SEKRETARIAT DJPT	44.535.544	18.006.853	-	-59,57%
<b>Total</b>	<b>1.708.629.293</b>	<b>2.418.304.051</b>	<b>4.126.933.344</b>	<b>241,53%</b>

1. Pendapatan Jasa Lainnya merupakan pengakuan Beban langganan daya dan jasa lainnya, termasuk Beban apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan daya dan jasa lainnya. Pada Ditjen Perikanan Tangkap merupakan pendapatan yang berasal dari PPN Prigi yang berasal dari kekurangan pembayaran atas Pembagian Hasil Pungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Prigi periode 16 Desember 2022 s.d 15 Desember 2023 sesuai amanah Peraturan Bupati Trenggalek No. 1 tahun 2015
2. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap merupakan pendapatan yang berasal dari dari pembayaran cicilan Piutang 51 Bendahara. Pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada PPS Bitung, yang merupakan pengembalian atas kelalaian bendahara
3. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah merupakan pendapatan atas pekerjaan pemerintah berupa keterlambatan pekerjaan;
  - a. Pada PPN sungailiat terdapat keterlambatan pekerjaan
  - b. Pada PPN Ternate terdapat keterlambatan pekerjaan pada Pembangunan Gedung pelayanan terpadu
  - c. Pada Sekretariat merupakan denda atas wanprestasi pekerjaan Pembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi Fasilitas di Pelabuhan Lampulo Provinsi Aceh

4. Pendapatan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu merupakan pendapatan yang timbul atas kelebihan belanja pegawai tahun anggaran yg lalu seperti kelebihan pembayaran tunjangan dan uang makan, serta pengembalian tunjangan, tunjangan umum dan tunjangan fungsional tugas belajar
5. Pendapatan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu merupakan pendapatan atas belanja barang seperti listrik dan air Desember TA 2022 yang dibayar pada TA 2023 dan temuan BPK atas belanja barang,
6. Pendapatan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu merupakan pendapatan yang diterima atas temuan pengembalian belanja modal berupa kekurangan volume
7. Pendapatan Anggaran Lain-lain Merupakan pendapatan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga. Pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat pada 2 satker yaitu PPS Nizam Zachman dan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Pada Sekretariat merupakan pendapatan atas setoran temuan Itjen.

Belanja Rp  
324.338.310.418

## B.2 Belanja

Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 324.338.310.418 atau 34,26 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 946.540.091.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

AKUN	NAMA AKUN	TAHUN		%
		2024	2023	
51	BELANJA PEGAWAI	121.208.867.860	91.642.439.229	32,26
52	BELANJA BARANG	186.346.635.349	146.035.068.464	27,60
53	BELANJA MODAL	16.782.807.209	13.827.541.672	21,37
<b>JUMLAH</b>		<b>324.338.310.418</b>	<b>251.505.049.365</b>	<b>28,96</b>

Belanja Pegawai Rp  
121.208.867.860

## B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 121.208.867.860 dan Rp 91.642.439.229. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi

belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 32,28 persen dari TA 2023. Hal tersebut disebabkan oleh rapel pembayaran gaji PPPK.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai.  
TA 2024 dan TA 2023

AKUN	NAMA AKUN	TAHUN		%
		2024	2023	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	36.887.180.900	35.053.234.064	5,23
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	529.179	550.500	-3,87
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2.862.988.420	2.708.629.358	5,70
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	879.137.342	824.990.289	6,56
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	494.260.000	539.275.000	-8,35
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.692.616.000	3.904.281.000	-5,42
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	562.072.696	158.713.657	254,14
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	2.090.910.240	2.157.174.540	-3,07
511129	Belanja Uang Makan PNS	3.190.694.000	3.695.762.000	-13,67
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	807.445.000	920.684.950	-12,30
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	10.270.862.600	1.570.485.100	553,99
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	226.603	39.622	471,91
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	657.286.830	104.397.491	529,60
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	199.106.676	35.142.246	466,57
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.497.616.000	240.000.000	524,01
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	663.005.100	121.738.020	444,62
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1.238.077.250	246.632.000	401,99
512211	Belanja Uang Lembur	554.235.000	286.156.000	93,68
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	343.499.000	25.575.000	1.243,10
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	42.467.590.653	37.396.160.007	13,56
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	11.849.528.371	1.652.818.385	616,93
<b>JUMLAH</b>		<b>121.208.867.860</b>	<b>91.642.439.229</b>	<b>32,26</b>

Jumlah pegawai pada Ditjen Perikanan Tangkap periode 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

JENIS KELAMIN	STATUS				TOTAL
	CPNS	PNS	PPPK	DPK KE INSTANSI LAIN	
Laki - laki	0	843	328	1	1172
Perempuan	0	378	125	0	503
Jumlah	0	1221	453	1	1675

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN	JABATAN FUNGSIONAL	PELAKSANA	TOTAL
1	Setditjen Perikanan Tangkap	Laki - laki	27	31	59
		Perempuan	26	13	39
		Jumlah	53	44	98

2	Direktorat PSDI	Laki - laki	25	9	35
		Perempuan	21	9	30
		Jumlah	46	18	65
3	Direktorat KAPI	Laki - laki	26	17	44
		Perempuan	17	7	24
		Jumlah	43	24	68
4	Direktorat Kepelabuhanan Perikanan	Laki - laki	37	11	49
		Perempuan	15	12	27
		Jumlah	52	23	76
5	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	Laki - laki	26	15	42
		Perempuan	8	13	21
		Jumlah	34	28	63
6	Direktorat KN	Laki - laki			
		Perempuan			
		Jumlah			
6	BPPI Semarang	Laki - laki	37	10	49
		Perempuan	22	4	26
		Jumlah	59	14	75
7	PPS Nizam Zachman Jakarta	Laki - laki	38	23	63
		Perempuan	12	4	16
		Jumlah	50	27	79
8	PPS Kendari	Laki - laki	29	31	61
		Perempuan	9	6	16
		Jumlah	38	37	77
9	PPS Cilacap	Laki - laki	38	21	60
		Perempuan	11	5	17
		Jumlah	49	26	77
10	PPS Bungus	Laki - laki	25	16	42
		Perempuan	9	7	17
		Jumlah	34	23	59
11	PPS Belawan	Laki - laki	23	23	47
		Perempuan	15	9	25
		Jumlah	38	32	72
12	PPS Bitung	Laki - laki	25	9	35
		Perempuan	13	4	18
		Jumlah	38	13	53
13	PPN Ambon	Laki - laki	20	21	43
		Perempuan	12	4	16
		Jumlah	32	25	59
14	PPN Palabuhanratu	Laki - laki	19	22	42
		Perempuan	10	6	17
		Jumlah	29	28	59
15	PPN Ternate	Laki - laki	21	11	34

		Perempuan	9	6	15
		Jumlah	30	17	49
16	PPN Prigi	Laki - laki	29	20	49
		Perempuan	15	2	19
		Jumlah	44	22	68
17	PPN Pemangkat	Laki - laki	24	9	34
		Perempuan	6	4	11
		Jumlah	30	13	45
18	PPN Sibolga	Laki - laki	22	15	38
		Perempuan	18	3	22
		Jumlah	40	18	60
19	PPN Tual	Laki - laki	26	9	37
		Perempuan	5	1	6
		Jumlah	31	10	43
20	PPN Kejawan	Laki - laki	26	21	49
		Perempuan	12	2	14
		Jumlah	38	23	63
21	PPN Pekalongan	Laki - laki	26	18	45
		Perempuan	13	2	16
		Jumlah	39	20	61
22	PPN Brondong	Laki - laki	29	12	43
		Perempuan	17	5	22
		Jumlah	46	17	65
23	PPN Tanjung Pandan	Laki - laki	20	11	33
		Perempuan	12	1	13
		Jumlah	32	12	46
24	PPN Sungai Liat	Laki - laki	28	4	34
		Perempuan	9	1	10
		Jumlah	37	5	44
25	PPN Pengambangan	Laki - laki	24	4	30
		Perempuan	19	3	22
		Jumlah	43	7	52
26	PPN Karangantu	Laki - laki	18	6	26
		Perempuan	13	1	14
		Jumlah	31	7	40
27	PPN Kwandang	Laki - laki	21	3	26
		Perempuan	5		5
		Jumlah	26	3	31
28	PPP Teluk Batang	Laki - laki	17	5	23
		Perempuan	4		5
		Jumlah	21	5	28
TOTAL		Laki - laki	726	407	1172
		Perempuan	357	134	503

	Jumlah	1083	541	1675
--	--------	------	-----	------

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**  
Rp  
186.346.635.349

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 186.346.635.349 dan Rp 146.035.068.464. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 27,59 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang.  
TA 2024 dan TA 2023

AKUN	NAMA AKUN	TAHUN		%
		2024	2023	
5211	Belanja Barang Operasional	21.326.966.308	30.791.351.927	-30,74
5212	Belanja Barang Non Operasional	21.690.768.072	14.786.271.472	46,70
5218	Belanja Barang Persediaan	3.381.713.112	3.131.470.679	7,99
5221	Belanja Jasa	54.508.319.238	35.237.128.593	54,69
5231	Belanja Pemeliharaan	16.796.689.885	15.991.423.992	5,04
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	53.221.170.624	44.398.438.871	19,87
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.820.913.180	968.321.488	88,05
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	13.600.094.930	730.661.442	1.761,34
<b>JUMLAH</b>		<b>186.346.635.349</b>	<b>146.035.068.464</b>	<b>27,60</b>

1. Belanja Barang Operasional adalah seluruh belanja barang yang digunakan untuk mendukung operasional perkantoran pada Ditjen Perikanan Tangkap. Pada TA 2024 terdapat penurunan belanja barang operasional yang disebabkan oleh penurunan belanja operasional atas pegawai tenaga kontrak menjadi jasa lainnya atau menjadi PPPK;
2. Belanja Barang Non Operasional adalah seluruh belanja diluar operasional kegiatan. Pada 30 Juni 2024 terdapat kenaikan yang signifikan pada belanja barang non operasional yang disebabkan oleh meningkatnya belanja bahan pada Ditjen Perikanan Tangkap;
3. Belanja barang persediaan adalah belanja yang digunakan untuk mencatat barang yang menimbulkan persediaan. Pada TA 2024 terdapat peningkatan belanja persediaan yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas perkantoran pada Ditjen Perikanan Tangkap;

4. Belanja Jasa pada TA 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yang disebabkan oleh meningkatnya belanja jasa outsourcing, belanja jasa Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan;
5. Pada 30 Juni 2024 terdapat peningkatan pada belanja pemeliharaan sebagaimana tertuang dalam RK-BMN TA 2024;
6. Pada belanja perjalanan dinas terdapat kenaikan yang cukup signifikan yang disebabkan oleh meningkatnya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan dan mendukung program program prioritas nasional pada Ditjen Perikanan Tangkap;
7. Pada TA 2024 terdapat peningkatan belanja persediaan yang disebabkan oleh meningkatnya realisasi belanja persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan;

Belanja Modal  
Rp  
16.782.807.209

### B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 16.782.807.209 dan Rp 13.827.541.672. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 21,37 persen dibandingkan TA 2023.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Modal. TA 2024 dan TA 2023

AKUN	NAMA AKUN	TAHUN		%
		2024	2023	
532	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	11.171.228.538	7.228.734.884	54,54
533	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	3.467.220.050	5.441.498.274	-36,28
534	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2.117.158.293	853.499.600	148,06
536	BELANJA MODAL LAINNYA	27.200.328	164.025.914	-83,42
<b>JUMLAH</b>		<b>16.782.807.209</b>	<b>13.687.758.672</b>	<b>22,61</b>

1. Pada belanja modal peralatan dan mesin merupakan belanja untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat peningkatan belanja modal pada satker



## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Penjelasan atas pos-pos Neraca Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

*Aset Lancar Rp  
39.748.023.614*

### C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 39.748.023.614 dan Rp 23.428.920.372. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp  
6.481.001.000*

#### C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 6.481.001.000 dan Rp 206.500. Kas di bendahara pengeluaran pada Ditjen Perikanan Tangkap merupakan Uang Persediaan yang belum di pertanggungjawabkan.

*Kas di Bendahara  
Penerimaan Rp 0*

#### C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 81.395.000, yang meliputi saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pembayarapas masuk per 30 Juni 2024.

*Kas Lainnya dan Setara  
Kas Rp 20.396.924.975*

#### C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 20.396.924.975 dan

Rp471.900.375. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara hibah hibah GEF SDI, yaitu terdiri dari kas hibah yang sudah disahkan sebesar Rp450.480.375 dan kas hibah yang belum disahkan adalah sebesar 19.547.323.268. Jumlah Hibah yang telah direalisasikan s.d Tahun lalu (2023) adalah sebesar Rp. 22.302.239.337,- berdasarkan SP2HL. Sedangkan pada Tahun ini (2024) terdapat Saldo Awal TA 2024 sebesar Rp.450.480.375,- yang merupakan sisa saldo Tahun Anggaran 2023 yang belum direalisasikan dan pendapatan hibah tahun berjalan sebesar Rp19.997.803.643,-.

*Piutang Bukan Pajak Rp  
32.541.665.416*

### C.1.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 32.541.665.416 dan Rp 29.336.475.042.

#### 1. Piutang PNBPN

Piutang Bukan Pajak merupakan piutang yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum dilakukn pembayaran melebihi waktu jatuh tempo pembayaran. Adapun Piutang PNBPN periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp28.360.451.193 dan 26.585.364.193 dengan rincian sebagai berikut;

Nama Satker	2023	2024	Selisih	%
PPN KEJAWANAN	10.870.311.656	9.699.644.128	1.170.667.528	-10,77%
PPN KWANDANG	15.800.709	-	15.800.709	100,00%
PPN PELABUHAN RATA	10.058.278	4.157.766	5.900.512	-58,66%
PPN PENGAMBENGAN	199.227.457	108.190.065	-91.037.392	45,70%
PPS BITUNG	4.157.400	2.801.400	1.356.000	-32,62%
PPS BUNGUS	205.227.550	107.303.250	97.924.300	-47,71%
PPS KENDARI	53.291.228	53.291.228	-	0,00%
PPS NIZAM ZAHMAN	691.210.616	309.669.847	-381.540.769	-55,20%
SEKRETARIAT DJPT	16.311.166.109	16.300.306.509	10.859.600	-0,07%
<b>Total</b>	<b>28.360.451.003</b>	<b>26.585.364.193</b>	<b>-1.775.086.810</b>	<b>-5,59%</b>

- a. PPN Kejawanan, Saldo Piutang Bukan Pajak Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan per tanggal 30 Juni 2024

adalah sebesar Rp9.700.892.570,- sedangkan pada 31 Desember 2023 Piutang Bukan Pajak tercatat sebesar Rp10.870.311.656,- Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan masih berjalan namun belum diselesaikan pembayarannya pada saat jatuh tempo. Piutang Bukan Pajak pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2024 berupa biaya tambat labuh, kebersihan kolam, pemeliharaan dan kebersihan kawasan dari 1 pengguna jasa atas nama PT. Hacienda Ocean Industries yang saat ini penagihan piutangnya telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN sesuai surat nomor: SP3N-376/PUPNC.13.06/2018 tanggal 27 Februari 2018 dan SP3N-01/PUPNC.13.06/2019 tanggal 04 Maret 2019, secara terperinci dijelaskan pada bagian pengungkapan-pengungkapan lainnya.

- b. Tidak terdapat saldo piutang pada PPN Kwandang, atas piutang audited TA 2023 telah dilakuakn pembayaran seluruhnya.
- c. Pada PPN Pelabuhanratu masih terdapat piutang PNBPN atas penggunaan Jasa Listrik
- d. Piutang PNBPN PPN Pengambengan merupakan piutang yang tercatat pada Desember 2022 atas jasa tambat labuh
- e. Piutang pada PPS Bitung merupakan piutang atas jasa kebersihan Kawasan yang sudah jatuh tempo tapi belum dibayarkan. Piutang tersebut berasal dari Dinas Perikanan Kota Bitung
- f. Piutang pada PPS Bungus merupakan piutang atas jasa tambat labuh puskopal yang sudah dilakukan pelunasan pada periode Juli 2024
- g. Piutang pada PPS Kendari merupakan sisa piutang atas penggunaan sarana dan prasarana yang telah dilimpahkan ke PUPN dan baru dicatat sebagai piutang pada TA 2023 dan piutang pada PP Untia, yang berdasarkan surat pernyataan akan dilunasi sampai dengan desember 2023.
- h. PPS Nizam Zachman

Deskripsi	Saldo Audited 2023	Progress Tahun 2024	saldo 30 Jun 24
-----------	--------------------	---------------------	-----------------

LHA Itjen 2022 (Periode Aktivitas 2019-2020)	503.677.626	287.161.769	216.515.857
Piutang non tambat 2021	45.720.000	14.640.000	31.080.000
LHP BPK RI 2021 (22M) (Periode Aktivitas 2019- 2020)	62.073.990	-	62.073.990
Piutang Tambat Labuh 2023 (KM. Arta Sampurna - II)	79.739.000	79.739.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>691.210.616</b>	<b>381.540.769</b>	<b>309.669.847</b>
Penyisihan Piutang Lancar (0,5%)	3.456.053	1.907.704	1.548.349
<b>Netto</b>	<b>687.754.563</b>	<b>379.633.065</b>	<b>308.121.498</b>

Saldo Piutang PNBPN PPS Nizam Zachman Jakarta per tanggal 30 Juni 2024 senilai Rp309.669.847 dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Piutang atas Jasa Tambat Labuh kapal perikanan pada kapal Arta Sampurna – II yang mencicil pembayaran sebanyak 6 kali dari November 2023 sampai dengan Juni 2024 sudah selesai membayar semua kewajibannya di tahun 2024 senilai Rp79.739.000.
- b. Piutang atas Pendapatan Pelabuhan Perikanan senilai Rp611.471.616 pada TA 2023 telah berprogress dengan sisa nilai piutang Rp309.669.847 dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Senilai Rp503.677.626 yang merupakan piutang atas temuan pada LHA dari Tim Inspektorat Jenderal II KKP terkait Penerimaan yang masih harus diterima atas kekurangan bayar dan denda dari Jasa Tambat Labuh Tahun 2019 s.d. 2020 dan telah dibayarkan pada TA 2024 senilai Rp287.161.769 sehingga sisa piutang menjadi Rp216.515.857,-.
  - b) Piutang atas jasa kebersihan Kawasan dan unit pengolahan limbah pada tahun 2021 dan jasa penggunaan listrik tahun 2022 yang masih belum dibayarkan senilai Rp45.720.000 terdapat koreksi senilai Rp14.640.000 atas jasa pengolahan limbah cair pada PT. Inti Samudera Hasilindo yang terakhir beroperasi pada Akhir 2019,

namun tidak terinfokan ke PPSNZJ, sehingga seharusnya tidak ada tagihan UPL tahun 2021. Sehingga sisa piutang pada kelompok ini menjadi Rp31.080.000

- c) Sebesar Rp62.073.990 merupakan nilai Piutang yang sudah berprogres sampai dengan TA 2023 yang awalnya terbentuk atas rekomendasi BPK RI pada LHP BPK RI tahun 2021 terkait potensi penerimaan Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam TA 2019 s.d. 2020 dan progres di tahun 2024, belum ada tambahan pembayaran pada TA 2024 dikarenakan tagihan belum ada yang dibayarkan oleh debitur dan sisa piutang masih tetap senilai Rp62.073.990.
- i. Sekretariat Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada tanggal 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp16.300.306.509. Piutang tersebut berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 39/LHP/XVII/11/2013 tanggal 19 November 2013 atas Pengelolaan PNPB TA. 2011 s.d Mei 2013, yaitu adanya tunggakan selisih Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang belum dilunasi.

## 2. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan yang masih terhutang oleh pihak lain setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang bersumber dari tunggakan dan/atau denda yang diberikan oleh pemerintah diluar Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Fungsional Lainnya di lingkup Direkrotar Jenderal Perikanan Tangkap. kelebihan pembayaran atas transaksi pembayaran pemerintah yang harus dikembalikan kepada negara setelah tanggal 30 Juni 2023 setelah dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih.. Pada Ditjen Perikanan Tangkap terdapat piutang lainnya sebesar Rp5.956.301.223 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Nama Satker</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Selisih</b>	<b>%</b>
BBPPI	5.136.900		- 5.136.900	-100,00%
PAPUA BARAT	832.996.000		-832.996.000	-100,00%
PAPUA BARAT TP		832.996.000	832.996.000	#DIV/0!
PPN AMBON	553.300	2.286.336	1.733.036	313,22%
PPN BRONDONG	343.583.409	325.977.220	- 17.606.189	-5,12%
PPN KARANGANTU		1.095.171	1.095.171	#DIV/0!
PPN KEJAWANAN		1.248.442	1.248.442	#DIV/0!
PPN KWANDANG		285.183	285.183	#DIV/0!

PPN PEKALONGAN	376.691	491.164	114.473	30,39%
PPN PELABUHAN RATU	2.154.572	4.280.913	2.126.341	98,69%
PPN PEMANGKAT		378.840	378.840	#DIV/0!
PPN PENGAMBENGAN	2.530.443		- 2.530.443	-100,00%
PPN PRIGI		3.130.744	3.130.744	#DIV/0!
PPN SIBOLGA		2.789.148	2.789.148	#DIV/0!
PPN SUNGAILIAT		2.196.417	2.196.417	#DIV/0!
PPN TANJUNG PANDAN	2.585.790	1.115.004	- 1.470.786	-56,88%
PPN TELUK BATANG		1.554.071	1.554.071	#DIV/0!
PPN TERNATE	676.467	2.470.539	1.794.072	265,21%
PPN TUAL		368.280	368.280	#DIV/0!
PPS BELAWAN	3.152.600	227.492	- 2.925.108	-92,78%
PPS BITUNG	17.181.000	2.681.266	- 14.499.734	-84,39%
PPS BUNGUS	1.504.600	1.571.913	67.313	4,47%
PPS CILACAP		2.355.996	2.355.996	#DIV/0!
PPS KENDARI	25.626.980	1.546.911	- 24.080.069	-93,96%
PPS NIZAM ZAHMAN		185.000	185.000	#DIV/0!
PROV. NUSA TENGGARA BARAT	537.727.080		-537.727.080	-100,00%
PROV. NUSA TENGGARA BARAT TP		537.727.080	537.727.080	#DIV/0!
PROV. RIAU TP	280.964.200	280.964.200	-	0,00%
SEKRETARIAT DJPT	4.317.205.635	3.946.377.893	-370.827.742	-8,59%
<b>Total</b>	<b>6.373.955.667</b>	<b>5.956.301.223</b>	<b>-417.654.444</b>	<b>-6,55%</b>

1. Pada Satker BBPI piutang atas kelebihan belanja pegawai tubel dan uang makan desember telah dikembalikan kepada negara sehingga sudah tidak ada piutang lainnya pada 30 Juni 2024.
2. Pada satker papua barat terdapat likuidasi transfer keluar dan masuk dari Dekon Papua Barat ke TP Papua Barat. Piutang pada Papua Barat merupakan temuan BPK Nomor 19 A,B,C/LHP/XVII/05/2012 LK KKP 2011 atas pekerjaan Pembangunan kapal dan alat kapal oleh PT Crita Boat Indonesia
3. Pada satker Dekon Nusa Tenggara Barat likuidasi transfer keluar dan masuk dari Dekon Nusa Tenggara Barat ke TP Nusa Tenggara Barat. Piutang pada Nusa Tenggara Barat merupakan piutang yang timbul atas uang muka pekerjaan kapal yang tidak bisa

dikembalikan atas Pembangunan kapal yang tidak selesai oleh PT. F1 Perkasa.

4. Pada satker Riau merupakan temuan BPK atas pekerjaan Kapal yang sudah diserahkan ke KPKNL
5. Pada satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap merupakan piutang yang timbul atas temuan Pembangunan Kapal dan Direktorat KAPI yang sudah diserahkan ke KPKNL, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Nilai Piutang
1	PT Carita Boat Indonesia	828.450.545
2	PT Kurnia Marina	597.936.000
3	CV Sumber Pratama	1.450.826.753
4	CV. Indomalut Fiberboat Tabamarine	435.420.000

6. Adapun piutang lainnya pada satker UPT merupakan piutang yang timbul atas rumah dinas yang dibayarkan melalui SPM Gaji.

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Rp (31.976.512.673)*

### **C.1.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Pendek**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp (31.976.512.673) dan Rp (28.556.171.456), yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur

#### **C.1.5.1 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp26.164.859.066 dan Rp28.360.451.003 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Nama Satker	Piutang	Penyisihan
PPN KEJAWANAN	9.699.644.128	9.699.644.128
PPN PELABUHAN RATU	4.157.766	20.789
PPN PENGAMBENGAN	108.190.065	2.464.673
PPS BITUNG	2.801.400	280.140
PPS BUNGUS	107.303.250	107.303.250
PPS KENDARI	53.291.228	53.291.228

PPS NIZAM ZAHMAN	309.669.847	1.548.349
SEKRETARIAT DJPT	16.300.306.509	16.300.306.509
<b>Total</b>	<b>26.585.364.193</b>	<b>26.164.859.066</b>

### C.1.5.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp5.956.301.223 dan Rp6.424.758.512, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur

*Belanja Dibayar di Muka  
Rp 0*

### C.1.6 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang Masih  
Harus Diterima Rp 0*

### C.1.7 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pada Periode Semester Pendapatan yang MasihHarus Diterima sudah dilakukan jurnal balim pada awal tahun. Adapun progress pemabayaran atas PYMHD TA 2023 adalah sebagai berikut:

1. PYMHD pada Sekretariat Ditjen Perkinana Tangkap merupakan PYMHD yang bersal dari LPM yang belum terbayar atas PNBPN SDA. Per 30 Juni 2024 terisisa satu Perusahaan yang belum melalukan pembayaran yaitu musafak.

1. PYMHD pada PPS Nizam Zachman merupakan PYMHD yang timbul atas jasa tamabt labuh dan kesebersihan kolam. Pada periode 30 Juni 2024 tersisa 203 kapal dari 712 kapal. Penjelasan

dan progress mengenai PYMHD serta PYMHD dari rekomendasi BPK dalam LHP BPK RI tahun 2022 dan 2023 dijelaskan sebagai berikut :

- a) PYMHD atas Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam pada LHP BPK RI no. 15b/LHP/XVII/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang PPS Nizam Zachman Jakarta untuk melakukan rekonsiliasi PYMHD senilai Rp3.606.961.957,00 kepada pemilik kapal telah ditindaklanjuti oleh PPS Nizam Zachman Jakarta serta telah dilakukan reuiu oleh tim Inspektorat Jenderal KKP dengan rincian hasil sebagai berikut :
  - 1) Berdasarkan hasil tindaklanjut rekonsiliasi dengan pemilik kapal dari 9 unit kapal yang tercatat sebagai PYMHD 2021, 8 unit masih berada dikolam dalam kondisi rusak berat dan tidak operasional dan 1 unit telah beraktifitas yaitu Kapal Hasil Laut 8 dengan total nilai PYMHD atas 9 kapal tersebut senilai Rp3.727.706.864.
  - 2) Terhadap 5 Kapal yang terdapat selisih perhitungan pada penetapan PYMHD tahun 2021 senilai Rp371.481.810,00 telah ditindaklanjuti dengan rekonsiliasi Bersama pemilik kapal sehingga nilai PYMHD menjadi senilai Rp21.464.217,00. Selisih perhitungan tersebut terjadi karena adanya klarifikasi dari pemilik kapal yang didukung dengan dokumen aktifitas kapal yang menyatakan ke lima kapal sudah tidak berada dalam kolam per 31 Desember 2021 dan seharusnya tidak masuk ke dalam PYMHD 2021. Terhadap senilai Rp21.464.217,00 telah dilakukan pembayaran atas nama kapal Samudera Deli dengan NTPN 805A548VV5LGRHRM.
  - 3) Terhadap data awal 16 kapal yang berada di kolam pelabuhan per 31 desember 2021, berdasarkan dokumen aktifitas kapal dan/atau hasil klarifikasi dengan pemilik kapal dinyatakan 3 kapal tidak berada di kolam pelabuhan pada 31 Desember 2021, 10 kapal menyampaikan hasil klarifikasi lama waktu keberadaan kapal di kolam s.d. 31 Desember 2021 dan 3 kapal belum memberikan keterangan/klarifikasi. Terdapat pembayaran atas nama

Kapal Tri Wijaya Makmur senilai Rp23.342.250, sehingga PYMHD setelah dilakukan rekonsiliasi dengan pemilik kapal menjadi senilai Rp64,493,743. Hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh PPS Nizam Zachman terhadap perhitungan PYMHD 31 Desember 2021 senilai Rp3.606.961.957 dapat diketahui bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari keterangan pemilik/pengurus kapal dan data absensi kapal diketahui perhitungan PYMHD Per 30 Juni 2024 dapat diakui senilai Rp3.792.200.607 dan pendapatan yang telah diterima senilai Rp44.806.676.

b) Progres selama tahun 2024 atas LHP BPK RI Tahun 2022 atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, terkait temuan yang terdapat dalam LHP BPK RI Tahun 2022 nomor: 10b/LHP/XVII/05/2023 tanggal 27 Mei 2023 mengenai Penerimaan yang masih harus diterima atas kekurangan bayar dan denda dari Jasa Pelabuhan Perikanan pada CaLK tahun 2022 senilai Rp22.754.943.665 sudah berprogres dengan membayar dan mengajukan klarifikasi pada saat rekonsiliasi dengan pemilik kapal dan hasil progres tersebut telah direviu oleh Tim Itjen II KKP melalui surat hasil reviu nomor : R.53/ITJ.2/HP.380/III/202 tanggal 17 Maret 2023 terhadap hasil rekonsiliasi antara PPS Nizam Zachman Jakarta dan Pemilik/Pengurus/Nakhoda kapal tersebut, bahwa kurang tagih Pendapatan JPP senilai Rp22.754.943.665,00 didapatkan hasil dengan rincian sebagai berikut :

1) Terhadap PYMHD JPP non Tambat Labuh yang terdiri dari Jasa Kebersihan kolam Pelabuhan, Jasa Pengolahan Limbah Cair dan Jasa Kebersihan Kawasan Pelabuhan senilai Rp173.744.434 yang dirinci sebagai berikut :

❖ Dicatatkan pada Piutang Neraca pada LK audited TA 2022 senilai Rp141.814.994,69 (Rp57.346.212,77 atas Jasa UPL dan Kebersihan Kawasan dan Rp84.468.781,92 atas Jasa Kebersihan Kolam) yang

kemudian progresnya dicatat dan diupdate pada bagian piutang;

- ❖ Dicatatkan pada catatan atas Laporan Keuangan bagian PYMHD (non neraca face) senilai Rp22.250.111,08 yang merupakan tagihan terhadap 2 (dua) Perusahaan yang tidak bisa ditagihkan dikarenakan Perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi pada tahun 2019 dan 2020 berdasarkan laporan yang diberikan PT. Perikanan Indonesia pada Maret 2023;
  - ❖ Senilai Rp9.679.328,00 telah tercatat dan terakumulasi pada Saldo PYMHD TA 2023 dan belum dapat ditagihkan dikarenakan nilai tersebut merupakan nilai potensi atas jasa kebersihan kolam Pelabuhan pada kapal yang masih berada di kolam PPSNZJ sampai saat ini.
- 2) Terhadap PYMHD JPP Tambat Labuh kapal non perikanan senilai Rp2.421.999.457,00 dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :
- ❖ Kekurangan penagihan Pendapatan JPP berupa Jasa Tambat dan Labuh Non Perikanan senilai Rp1.968.190.500,00 untuk 2 (dua) transaksi atas 1 (satu) kapal, yaitu Kapal SPBB milik PT Perindo yang sudah dibayarkan oleh PT. Perikanan Indonesia pada tanggal 6 Maret 2024 dengan nomor NTPN 2ED606U8EU8F258V.
  - ❖ Terdapat kekurangan bayar atas JPP Tambat dan Labuh Kapal Non Perikanan senilai Rp7.375.724,00 atas 6 kapal non perikanan yang dicatatkan di piutang neraca LK Audited TA 2023 dan progres dijelaskan pada bagian piutang.
- 3) Terhadap PYMHD JPP Tambat Labuh kapal perikanan senilai Rp2.399.594.790 dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Dicatat pada piutang neraca LK Audited TA 2022 senilai Rp484.957.817,86. Terhadap progres pembayarannya dijelaskan pada bagian piutang;
- ❖ Dicatat pada PYMHD senilai Rp1.192.083.882 karena kapal tersebut masih di kolam Pelabuhan sampai dengan akhir tahun 2022 dan nilai sudah terakumulasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang setelahnya menjadi bagian dari PYMHD kapal masih di kolam pada tahun 2022;
- ❖ Dicatat pada catatan LK (CaLK) bagian PYMHD (non neraca face) dikarenakan tagihan tersebut masih diperlukan klarifikasi oleh pemilik kapal senilai Rp722.553.091,00. Setelah dikonfirmasi dengan pemilik kapal, telah ditagihkan senilai Rp447.515.386,00 dikarenakan senilai Rp275.037.705,00 sudah diklarifikasi dengan menyertakan dokumen pendukung yang valid sehingga tidak perlu ditagihkan kembali. Terhadap Rp447.515.386,00 yang ditagihkan, telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan telah disetorkan seluruhnya ke kas negara dengan Billing PNBP.

2. PYMHD pada PPS Kendari
3. PYMHD pada PPN Ambon merupakan PYMHD yang timbul atas penggunaan jasa Listrik Desember yang sudah seluruhnya dibayar pada bulan Januari 2024.
4. PYMHD pada PPN Brondong merupakan pymhd yang timbul atas pendapatan jasa Pelabuhan perikanan yang telah dibayarkan seluruhnya pada Januari 2024.
5. PYMHD pada PPN Pelabuhanratu merupakan PYMHD yang berasal dari jasa tambat labuh dan kebersihan yang telah dibayarkan seluruhnya
6. PYMHD pada PPN Pemangkat merupakan PYMHD yang berasal dari Listrik dan jasa tamat labuh, yang seluruhnya telah dilakukan pembayaran pada bulan Januari 2024
7. PYMHD pada PPN Pengambangan merupakan PYMHD yang berasal dari pendapatan jasa tambat labuh dan kebersihan kolam. Atas PYMHD

2023 masih terdapat 10 kapal yang belum melakukan pembayaran dari 44 kapal.

8. PYMHD pada PPN Prigi merupakan PYMHD yang bersalah dari jasa tambat labuh dan kebersihan kolam yg sudah seluruhnya dilakukan pembayaran
9. PYMHD pada PPN Sibolga merupakan PYMHD yang berasal dari jasa tambat labuh, bengkel, air, Listrik dan IPAL yang seluruhnya telah dilakukan pemabayaran
10. PYMHD pada PPN Sungailiat merupakan PYMHD yang bersala dari jasa tambat labuh yang sudah dilakukan pembayaran seluruhnya
11. PYMHD pada PPN Tanjung Pandan merupakan PYMHD yang berasal dari jasa tambat labuh yang sudah dilakukan pembayaran seluruhnya
12. PYMHD pada PPN Ternate merupakan PYMHD yang berasal pendapatan jasa tambat labuh. Atas PYMHD tersebut masih tersisa 2 kapal yang belum melakukan pembayaran.
13. PYMHD pada PPN Tual merupakan PYMHD yang berasal dari pendapatan jasa tambat labuh dan kebersihan kolam
14. PYMHD pada PPS Belawan merupakan PYMHD yang berasal dari tambat labuh dan kebersihan kolam yang seleuruhnya telah dilakukan pembayaran.
15. PYMHD pada PPS Bitung merupakan PYMHD yang berasal dari tambat labuh dan kebersihan kolam yang seleuruhnya telah dilakukan pembayaran.
16. PYMHD pada PPS Cialcap merupakan PYMHD yang timbul atas jasa tambat labuh dan kebersihan kolam. Pada 30 Juni 2024 masih terdapat 23 kapal yang belum melakukan pembayaran dari 243 kapal yang tercatat pada PYMHD TA 2023.
17. PYMHD pada PPS Bungus merupakan PYMHD merupakan PYMHD yang berasal dari docking dan jasa tambat labuh. Atas PYMHD tersebut masing-masing pada docking dan tambat labuh masih tersisa satu kapal

*Persediaan Rp  
12.305.045.257*

### **C.1.8 Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat. Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 12.305.045.257 dan Rp 2.055.417.542 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024

Akun	Nama Akun	Rupiah
117111	Barang Konsumsi	1.394.711.177
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	13.271.530
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	3.188.439.300
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	140.202.000
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	7.020.000.000
117131	Bahan Baku	486.179.150
117911	Persediaan yang belum diregister	62.242.100
<b>JUMLAH</b>		<b>12.305.045.257</b>

Nama Satker	2023	2024	Grand Total	Grand Total
<b>Barang Konsumsi</b>				
BBPPI	7.849.036	13.496.300	5.647.264	71,95%
PPN AMBON	20.647.564	24.225.397	3.577.833	17,33%
PPN BRONDONG	1.100.000	360.000	740.000	-67,27%
PPN KARANGANTU	3.785.000	13.550.000	9.765.000	257,99%
PPN KEJAWANAN	17.327.400	31.203.978	13.876.578	80,08%
PPN PEKALONGAN	11.923.000	11.706.950	216.050	-1,81%
PPN PELABUHAN RATU	62.692.000	58.930.280	3.761.720	-6,00%
PPN PEMANGKAT	1.403.000	5.663.000	4.260.000	303,64%
PPN PENGAMBENGAN	4.568.500	2.657.900	1.910.600	-41,82%
PPN PRIGI	33.982.335	36.057.646	2.075.311	6,11%
PPN SIBOLGA	1.637.700	1.467.600	170.100	-10,39%
PPN SUNGAILIAT	42.668.667	120.322.567	77.653.900	181,99%
PPN TANJUNG PANDAN	3.467.268	20.091.250	16.623.982	479,45%
PPN TELUK BATANG		580.000	580.000	#DIV/0!
PPN TERNATE	45.765.969	32.535.342	13.230.627	-28,91%
PPN TUAL	3.375.000	8.198.000	4.823.000	142,90%
PPS BELAWAN	5.843.500	10.807.500	4.964.000	84,95%
PPS BITUNG	72.305.350	68.835.335	3.470.015	-4,80%
PPS BUNGUS	7.097.930	3.965.000	3.132.930	-44,14%
PPS CILACAP	17.312.836	37.642.880	20.330.044	117,43%
PPS KENDARI	111.955.600	160.385.957	48.430.357	43,26%

PPS NIZAM ZAHMAN	168.423.087	306.379.145	137.956.058	81,91%
SEKRETARIAT DJPT	102.311.250	425.649.150	323.337.900	316,03%
<b>Bahan untuk Pemeliharaan</b>				
PPN SIBOLGA	593.000	412.000	181.000	-30,52%
PPN SUNGAILIAT		1.679.430	1.679.430	#DIV/0!
PPN TUAL		125.000	125.000	#DIV/0!
PPS BITUNG	2.931.200	3.215.600	284.400	9,70%
PPS KENDARI	8.339.100	7.712.500	626.600	-7,51%
SEKRETARIAT DJPT		127.000	127.000	#DIV/0!
<b>Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat</b>				
SEKRETARIAT DJPT	299.395.000		299.395.000	-100,00%
<b>Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat</b>				
SEKRETARIAT DJPT		3.188.439.300	3.188.439.300	#DIV/0!
<b>Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat</b>				
SEKRETARIAT DJPT	140.202.000	140.202.000	-	0,00%
<b>Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat ? Dalam Proses</b>				
SEKRETARIAT DJPT		7.020.000.000	7.020.000.000	#DIV/0!
<b>Bahan Baku</b>				
PAPUA BARAT TP	485.600.000	485.600.000	-	0,00%
PPS KENDARI	965.250	579.150	386.100	-40,00%
<b>Persediaan yang belum diregister</b>				
BBPPI		48.416.100	48.416.100	#DIV/0!
PPN SIBOLGA		13.826.000	13.826.000	#DIV/0!
	<b>1.685.467.542</b>	<b>12.305.045.257</b>	<b>10.619.577.715</b>	<b>630,07%</b>

1. Pada Persediaan Barang konsumsi terdapat kenaikan yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas perkantoran pada lingkup Ditjen Perikanan Tangkap;
2. Pada persediaan barang pemeliharaan mengalami penurunan yang disebabkan oleh lebih sesuainya klasifikasi kode barang persediaan pada TA 2024
3. Pada tanah dan bangunan tidak mengalami perubahan nilai. Persediaan tanah dan bangunan tersebut terdapat pada Direktorat Kepelabuhanana Perikanan;
4. Pada peralatan dan mesin terdapat peningkatan yang cukup signifikan yang disebabkan oleh peningkatan realisasi alat Tangkap pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan
5. Pada Aset lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat tidak mengalami perubahan nilai, persediaan tersebut merupakan dokumen perencanaan pemabngunan TPI Higienis pada Dinas Provinsi Maluku Utara, Dinas Provinis Bengkulu dan Dinas Provinsi Kalimantan Timur.

6. Pada persediaan lainnya untuk diserahkan dalam proses terdapat kenaikan yang signifikan disebabkan oleh realisasi belanja Kampung Nelayan Maju pada Direktorat Perizinan dan Kenalayanan.
7. Pada persediaan bahan baku terdapat saldo dari audited yaitu pada Papua Barat, yang merupakan rumah ikan yang BAST nya masih dalam proses
8. Persediaan yang belum deregister merupakan persediaan yang tanggal BAST nya dibulan Juni namun penginputan dan pembayarannya dilakukan pada bulan Juli 2024

*Aset Tetap Rp*  
5.655.933.950.955

## C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 5.655.933.950.955 dan Rp 5.755.985.368.241. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

*Tanah Rp*  
3.618.080.652.312

### C.2.1 Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 3.618.080.652.312 dan Rp 3.618.080.652.312.

#### Rincian Transaksi Tanah TA 2024

Uraian Transaksi	Nama Barang	Total
Saldo Awal TAYL	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	6.685.489.000
	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	985.343.035
	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	8.977.862.376
	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	11.661.909.000
	Tanah Kaveling Tanah Matang	41.438.905.000
	Tanah Bangunan Terminal Laut	109.000.070.243
	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan Lainnya	4.669.858.000
	Tanah Bangunan Industri Lainnya	350.546.457.446
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.048.373.369.786
	Tanah Bangunan Bangsal Pengolahan/Pondok Kerja	6.784.685.200
	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	338.688.000
	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	202.436.316.894

	Tanah Rawa	224.899.585.000
	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	1.318.400.000
	Tanah Tegalan	18.794.514.332
	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	131.227.586.000
	Tanah Hasil Reklamasi	424.393.486.000
	Tanah Kering Lainnya	6.465.167.000
	Tanah Kebun Lainnya	11.683.335.000
	Tanah Non Persil Lainnya	3.478.000
	Tanah Lapangan Tennis	2.754.604.000
	Tanah Untuk Jalan Lainnya	1.667.993.000
	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.284.141.000
	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Bersih/Air Baku	689.409.000
Internal Transfer Keluar	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-60.753.933.236
	Tanah Non Persil Lainnya	-3.478.000
Internal Transfer Masuk	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	60.753.933.236
	Tanah Non Persil Lainnya	3.478.000

Peralatan dan Mesin Rp  
801.213.831.501

### C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 801.213.831.501 dan Rp 798.944.153.232.

#### Rincian Transaksi Peralatan dan Mesin TA 2024

Uraian Transaksi	Nama Barang	Total
Saldo Awal TAYL		797.654.420.257
Pembelian	Hand Palet Truck	5.006.100
	Sumersible Pump	3.825.000
	Pompa Air	658.658.200
	Selang Air	19.750.000
	Spy Hidden Camera	98.374.800
	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	424.900.000
	Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	573.000.000
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Barang	35.600.000
	Sepeda Motor	73.470.000
	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	40.000.000
	Baggage Trolley	7.250.000
	Kursi Roda	1.829.280
	Speed Boat / Motor Tempel	56.250.000
	Mesin Las Listrik	6.923.000
	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi Lainnya	26.361.000
	Mesin Gergaji	12.900.000

	Dongkrak Hidrolik	14.775.000
	Mesin Battery Set / Pengisi Accu	4.440.000
	Mesin Pompa air PMK	22.800.000
	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	2.300.000
	Scanner (Universal Tester)	41.960.000
	Alat Ukur Lainnya	4.950.000
	Alat Ukur Lainnya	7.300.000
	Alat Produksi Perikanan Lainnya	49.700.000
	Lemari Besi/Metal	74.084.594
	Lemari Kayu	30.000.000
	Rak Besi	34.830.893
	Rak Kayu	2.800.000
	Filing Cabinet Besi	6.000.000
	Locker	9.347.296
	Tabung Pemadam Api	47.777.175
	Hydrant	8.764.560
	CCTV - Camera Control Television System	561.450.000
	Papan Visual/Papan Nama	8.000.000
	Alat Penghancur Kertas	4.640.000
	LCD Projector/Infocus	82.899.773
	Alat Kantor Lainnya	55.000.000
	Meja Kerja Besi/Metal	153.328.000
	Meja Kerja Kayu	200.189.080
	Kursi Besi/Metal	389.216.220
	Kursi Kayu	10.229.980
	Sice	81.034.440
	Bangku Panjang Besi/Metal	6.748.800
	Meja Rapat	133.662.564
	Partisi	117.360.000
	Sofa	129.122.000
	Meja Ruang Tamu	5.569.910
	Meubelair Lainnya	222.399.561
	Mesin Pemetong Rumput	72.690.000
	Lemari Es	10.634.050
	A.C. Sentral	51.998.000
	A.C. Split	525.540.800
	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	29.970.000
	Televisi	913.781.850
	Sound System	150.390.000
	Wireless	4.795.200
	Microphone	141.336.300
	Timbangan Orang	1.385.280
	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ))	10.045.000
	Tangga Aluminium	3.000.000
	Dispenser	18.003.500
	Mimbar/Podium	6.900.000
	Vertikal Blind	8.748.000
	Tangga	6.800.000

	Bracket Standing Peralatan	8.400.000
	Tempat Sampah	113.850.000
	Microphone/Wireless MIC	4.400.000
	Digital LED Running Text	15.900.000
	Lensa Kamera	15.900.000
	Camera Digital	33.750.000
	Video Conference	18.600.000
	Drone	99.100.000
	Mesin Potong	10.766.000
	Teropong/Keker	11.124.000
	Telephone Mobile	12.500.000
	Handy Talky (HT)	50.500.000
	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	88.909.000
	Unit Tranceiver Ssb Stationery	38.750.000
	Alat DF Radio VHF	6.000.000
	Alat Surveillance	29.200.000
	Kursi Zeis	110.763.996
	Timbangan Elektronik	3.842.820
	TV Monitor	88.200.000
	Meja Kerja Stainless	11.000.000
	Portal Press	7.500.000
	Mesin Steam Rol	1.195.900
	Personal Computer	211.155.300
	Stabilizer/UPS	10.700.000
	Komponen/Alat Pengolah Data	188.800.000
	Uninterrupted Power Supply (UPS)	12.250.000
	Kamera Digital	35.000.000
	Flow Meter Water	73.000.000
	Mini Komputer	80.370.000
	P.C Unit	577.203.800
	Lap Top	2.687.889.698
	Tablet PC	221.899.558
	Personal Komputer Lainnya	92.500.000
	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	15.315.780
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	475.290.000
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	204.354.000
	ICE Board (Interactive Collaborative Electronic Board)	195.000.000
	Laptop Case	100.800.000
	Air Conditioning (AC)	98.040.000
	Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	265.590.000
	Traffic Light	4.000.000
	Alat Tenis Meja	6.898.650
Transfer Masuk	Crawler Excavator + Attachment	1.979.000.000
	Truck Crane	1.603.432.600
	Station Wagon	199.500.000
	Sepeda Motor	35.447.500
	Lemari Besi/Metal	34.440.000
	Display	16.714.700

	LCD Projector/Infocus	32.520.000
	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	64.792.000
	Meja Rapat	30.525.000
	Sofa	11.100.000
	A.C. Split	89.910.000
	Televisi	205.500.000
	Mic Conference	97.005.000
	Unit Power Supply	13.139.500
	Kabel	21.768.900
	Bracket Standing Peralatan	200.126.500
	Video Processor	62.914.500
	Layar Film/Projector	8.120.000
	LCD Monitor	13.414.500
	Camera Conference	19.091.200
	Switcher/Patch Panel	33.000.000
	Kursi Zeis	26.640.000
	PC Workstation	71.313.000
	Note Book	194.640.000
	Tablet PC	196.496.300
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	112.950.000
	Kabel UTP	5.164.500
	Wireless Access Point	12.974.400
Reklasifikasi Masuk	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	573.000.000
Perolehan Lainnya	Filing Cabinet Kayu	1.731.586
	LCD Projector/Infocus	6.609.200
	Camera Digital	8.151.262
	Lap Top	45.497.415
	CPU (Peralatan Personal Komputer)	21.946.010
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4.956.820
Likuidasi Masuk	Mesin Pembuat Es	3.547.959.000
	Mesin Penghancur Es	32.870.000
	Water Treatment (Mesin Proses)	785.180.000
	Water Treatment (Mesin Proses Apung)	3.000.000
	Alat Penarik Kapal	198.900.000
	Transportable Generating Set	35.950.000
	Portable Generating Set	94.836.000
	Stationary Generating Set	23.900.000
	Transportable Water Pump	16.170.000
	Portable Water Pump	326.741.000
	Stationary Water Pump	6.495.000
	Mesin Diesel	408.344.000
	Alat Bantu Lainnya	55.036.000
	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	176.000.000
	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	39.270.000
	Sepeda Motor	318.262.000
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	31.754.000
	Mobil Unit Penerangan Darat	165.200.000
	Mobil Unit Monitoring Frekwensi	138.649.000

	Gerobak Dorong	147.555.000
	Lori Dorong	4.089.000
	Speed Boat / Motor Tempel	262.914.500
	Klotok	32.156.500
	Long Boat	80.061.000
	Kapal Penangkap Ikan	2.856.887.900
	Car Washer	47.150.000
	Perkakas Bengkel Service	99.957.000
	Peralatan Bengkel Lainnya	10.000.000
	Radio Meter (Alat Ukur Universal)	12.650.000
	Alat Kalibrasi Alinnya	6.000.000
	Scanner (Universal Tester)	6.082.000
	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	28.056.000
	Timbangan Cepat Kapasitas 200 Kg	6.400.000
	Timbangan Kwadran Kapasitas 100 Kg	5.668.000
	Cold Storage (Kamar Pendingin)	21.000.000
	Lemari Penyimpan	20.086.000
	Drift Gill Net ( Jaring Insang Hanyut )	146.850.000
	Boat Raft Lift Net ( Bagan Perahu/Rakit )	212.170.000
	Portable Traps ( Bubu )	49.700.000
	Perangkap Lainnya	98.500.000
	Bak Pengendapan	89.732.500
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	8.596.000
	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	17.110.000
	Lemari Besi/Metal	29.805.200
	Lemari Kayu	72.898.500
	Rak Besi	15.000.000
	Filing Cabinet Besi	33.452.000
	Filing Cabinet Kayu	2.000.000
	Brandkas	5.000.000
	Kontainer	42.240.000
	Tabung Pemadam Api	7.495.000
	Papan Visual/Papan Nama	38.355.500
	White Board	1.009.800
	Overhead Projector	15.000.000
	Mesin Laminating	4.000.000
	LCD Projector/Infocus	30.841.000
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1.870.000
	Perkakas Kantor Lainnya	2.500.000
	Meja Kerja Kayu	26.805.000
	Kursi Besi/Metal	3.630.000
	Kursi Kayu	5.850.000
	Sice	20.712.000
	Tempat Tidur Kayu	21.560.000
	Meja Resepsionis	8.992.500
	Sketsel	9.009.000
	Meja Makan Kayu	5.967.000
	Meubelair Lainnya	25.000.000

	Mesin Pemotong Rumput	6.380.000
	Air Cleaner	3.194.000
	Lemari Es	20.084.500
	A.C. Split	31.400.000
	Cold Storage (Alat Pendingin)	185.847.500
	Cold Room Frezzer	248.654.005
	Treng Air/Tandon Air	16.750.000
	Televisi	9.580.000
	Amplifier	5.335.000
	Loudspeaker	3.312.000
	Sound System	81.594.000
	Wireless	10.518.000
	Megaphone	1.900.500
	Microphone	15.000.000
	Camera Video	5.975.000
	Tustel	11.519.000
	Timbangan Barang	8.970.000
	Water Filter	3.141.000
	Tangga Aluminium	2.200.000
	Dispenser	3.437.000
	Handy Cam	44.575.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )	5.500.000
	Professional Sound System	3.300.000
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	9.840.000
	Camera Electronic	16.850.000
	VITS Inserter Generator	10.000.000
	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	3.200.000
	Rak Peralatan	21.000.000
	Camera Film	1.139.000
	Camera Digital	6.050.000
	GPS Receiver	118.365.000
	Pesawat Telephone	59.950.000
	Handy Talky (HT)	5.850.000
	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya	104.450.000
	Voltage Regulator	1.700.000
	Tabung O2	2.660.000
	Bak Korentang (Stainles)	26.840.000
	Lemari Obat (Kaca)	14.127.000
	Proyektor Romad Complet	6.050.000
	Kursi Gynecologi	3.597.000
	Infant Ventilator	3.863.200
	Timbangan Elektronik	95.446.000
	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	18.040.000
	Blender	3.225.000
	Timbangan/Neraca	3.000.000
	Vacum Pump	8.479.000
	Container Gas Chlorine	16.046.400
	Bak Fiberglass	139.003.000

	Binocular Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	10.984.000
	Water Distiling	34.705.000
	Freezer (Alat Laboratorium Patologi)	58.980.000
	Mikroskop Binokuler	13.629.000
	Lemari Asam	13.214.000
	PC-Based UV Gel Documentation System	22.660.000
	Colony Counter (Alat Laboratorium Makanan)	15.510.000
	Cold Storage (Alat Laboratorium Makanan)	49.406.500
	Tablet Press Machine	6.952.000
	Bak Pendingin	21.755.000
	Mesin Rami	10.040.000
	Alat Press Laminasi	4.000.000
	Pompa Airasil	47.879.000
	Beater Unit (Mesin Penggiling)	3.200.000
	Anaerobic Jar	17.930.000
	Freezer (Alat Laboratorium Pertanian)	3.084.000
	Hot Plate Stirer	7.150.000
	Personal Computer	29.500.000
	Stabilizer/UPS	1.260.000
	Stereo Microscope (Alat Laboratorium Pertanian)	17.287.000
	Stomacher	27.246.000
	Vortex Mixer	16.000.000
	Soil Tester	4.000.000
	Under Water Camera	25.300.000
	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	9.000.000
	Mikrolitre Piperdort	1.131.000
	Generator Set (Lab Scale)	211.200.000
	Generator Set(Lab Scale)	635.000.000
	Uninterrupted Power Supply (UPS)	35.127.000
	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	8.000.000
	Automatic Dispenser	5.125.000
	Pompa Peristaltik	6.428.700
	Control Panel	34.592.000
	Water Bath (Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu)	12.672.000
	Kamera Digital	39.000.000
	Local Area Network (LAN)	14.080.000
	P.C Unit	548.421.550
	Lap Top	517.461.500
	Note Book	762.909.500
	Personal Komputer Lainnya	39.952.000
	Komputer Unit Lainnya	23.510.000
	Floppy Disk Unit (Peralatan Mainframe)	1.500.000
	Hard Disk	11.745.000
	CPU (Peralatan Personal Komputer)	25.434.000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	175.809.050
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	20.650.000

	Modem	4.895.000
	Side Scan Sonar	49.500.000
	Tubing Slip	616.971.000
	Alat Pelindung Lainnya	48.950.000
	OHP 3 M	12.200.000
	Kamera/Video dengan tempatnya U/ Bawah Air (Sea & Sea)	8.970.000
	Cooling Pond	45.625.000
	Mercury Flood Light	163.086.000
	Perahu Layar	61.548.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Station Wagon	36.234.660
Penghapusan	Trolley Car/Lori	-37.115.000
	CCTV - Camera Control Television System	-90.000.000
	Road Barrier External	-300.000.000
Transfer Keluar	Truck Crane	-1.603.432.600
	Station Wagon	-199.500.000
	Sepeda Motor	-35.447.500
	Lemari Besi/Metal	-34.440.000
	Display	-16.714.700
	LCD Projector/Infocus	-32.520.000
	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	-64.792.000
	Meja Rapat	-30.525.000
	Sofa	-11.100.000
	A.C. Split	-89.910.000
	Televisi	-205.500.000
	Mic Conference	-97.005.000
	Unit Power Supply	-13.139.500
	Kabel	-21.768.900
	Bracket Standing Peralatan	-200.126.500
	Video Processor	-62.914.500
	Layar Film/Projector	-8.120.000
	LCD Monitor	-13.414.500
	Camera Conference	-19.091.200
	Switcher/Patch Panel	-33.000.000
	Kursi Zeis	-26.640.000
	PC Workstation	-71.313.000
	Note Book	-194.640.000
	Tablet PC	-196.496.300
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-112.950.000
	Kabel UTP	-5.164.500
	Wireless Access Point	-12.974.400
Hibah Keluar	Hand Palet Truck	-96.000.000
	Baggage Trolley	-123.765.000
	CCTV - Camera Control Television System	-89.854.600
	Road Barrier External	-1.124.502.150
Reklasifikasi Keluar	Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	-573.000.000
Likuidasi Keluar	Mesin Pembuat Es	-3.547.959.000
	Mesin Penghancur Es	-32.870.000
	Water Treatment (Mesin Proses)	-785.180.000

	Water Treatment (Mesin Proses Apung)	-3.000.000
	Alat Penarik Kapal	-198.900.000
	Transportable Generating Set	-35.950.000
	Portable Generating Set	-94.836.000
	Stationary Generating Set	-23.900.000
	Transportable Water Pump	-16.170.000
	Portable Water Pump	-326.741.000
	Stationary Water Pump	-6.495.000
	Mesin Diesel	-408.344.000
	Alat Bantu Lainnya	-55.036.000
	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	-176.000.000
	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	-39.270.000
	Sepeda Motor	-318.262.000
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	-31.754.000
	Mobil Unit Penerangan Darat	-165.200.000
	Mobil Unit Monitoring Frekwensi	-138.649.000
	Gerobak Dorong	-147.555.000
	Lori Dorong	-4.089.000
	Speed Boat / Motor Tempel	-262.914.500
	Klotok	-32.156.500
	Long Boat	-80.061.000
	Kapal Penangkap Ikan	-2.856.887.900
	Car Washer	-47.150.000
	Perkakas Bengkel Service	-99.957.000
	Peralatan Bengkel Lainnya	-10.000.000
	Radio Meter (Alat Ukur Universal)	-12.650.000
	Alat Kalibrasi Alinnya	-6.000.000
	Scanner (Universal Tester)	-6.082.000
	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	-28.056.000
	Timbangan Cepat Kapasitas 200 Kg	-6.400.000
	Timbangan Kwadran Kapasitas 100 Kg	-5.668.000
	Cold Storage (Kamar Pendingin)	-21.000.000
	Lemari Penyimpan	-20.086.000
	Drift Gill Net ( Jaring Insang Hanyut )	-146.850.000
	Boat Raft Lift Net ( Bagan Perahu/Rakit )	-212.170.000
	Portable Traps ( Bubu )	-49.700.000
	Perangkap Lainnya	-98.500.000
	Bak Pengendapan	-89.732.500
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	-8.596.000
	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	-17.110.000
	Lemari Besi/Metal	-29.805.200
	Lemari Kayu	-72.898.500
	Rak Besi	-15.000.000
	Filing Cabinet Besi	-33.452.000
	Filing Cabinet Kayu	-2.000.000
	Brandkas	-5.000.000
	Kontainer	-42.240.000
	Tabung Pemadam Api	-7.495.000

	Papan Visual/Papan Nama	-38.355.500
	White Board	-1.009.800
	Overhead Projector	-15.000.000
	Mesin Laminating	-4.000.000
	LCD Projector/Infocus	-30.841.000
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	-1.870.000
	Perkakas Kantor Lainnya	-2.500.000
	Meja Kerja Kayu	-26.805.000
	Kursi Besi/Metal	-3.630.000
	Kursi Kayu	-5.850.000
	Sice	-20.712.000
	Tempat Tidur Kayu	-21.560.000
	Meja Resepsionis	-8.992.500
	Sketsel	-9.009.000
	Meja Makan Kayu	-5.967.000
	Meubelair Lainnya	-25.000.000
	Mesin Pemotong Rumput	-6.380.000
	Air Cleaner	-3.194.000
	Lemari Es	-20.084.500
	A.C. Split	-31.400.000
	Cold Storage (Alat Pendingin)	-185.847.500
	Cold Room Frezzer	-248.654.005
	Treng Air/Tandon Air	-16.750.000
	Televisi	-9.580.000
	Amplifier	-5.335.000
	Loudspeaker	-3.312.000
	Sound System	-81.594.000
	Wireless	-10.518.000
	Megaphone	-1.900.500
	Microphone	-15.000.000
	Camera Video	-5.975.000
	Tustel	-11.519.000
	Timbangan Barang	-8.970.000
	Water Filter	-3.141.000
	Tangga Aluminium	-2.200.000
	Dispenser	-3.437.000
	Handy Cam	-44.575.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )	-5.500.000
	Professional Sound System	-3.300.000
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-9.840.000
	Camera Electronic	-16.850.000
	VITS Inserter Generator	-10.000.000
	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	-3.200.000
	Rak Peralatan	-21.000.000
	Camera Film	-1.139.000
	Camera Digital	-6.050.000
	GPS Receiver	-118.365.000
	Pesawat Telephone	-59.950.000

	Handy Talky (HT)	-5.850.000
	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya	-104.450.000
	Voltage Regulator	-1.700.000
	Tabung O2	-2.660.000
	Bak Korentang (Stainles)	-26.840.000
	Lemari Obat (Kaca)	-14.127.000
	Proyektor Romad Complet	-6.050.000
	Kursi Gynecologi	-3.597.000
	Infant Ventilator	-3.863.200
	Timbangan Elektronik	-95.446.000
	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	-18.040.000
	Blender	-3.225.000
	Timbangan/Neraca	-3.000.000
	Vacum Pump	-8.479.000
	Container Gas Chlorine	-16.046.400
	Bak Fiberglass	-139.003.000
	Binocular Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	-10.984.000
	Water Distiling	-34.705.000
	Freezer (Alat Laboratorium Patologi)	-58.980.000
	Mikroskop Binokuler	-13.629.000
	Lemari Asam	-13.214.000
	PC-Based UV Gel Documentation System	-22.660.000
	Colony Counter (Alat Laboratorium Makanan)	-15.510.000
	Cold Storage (Alat Laboratorium Makanan)	-49.406.500
	Tablet Press Machine	-6.952.000
	Bak Pendingin	-21.755.000
	Mesin Rami	-10.040.000
	Alat Press Laminasi	-4.000.000
	Pompa Airasil	-47.879.000
	Beater Unit (Mesin Penggiling)	-3.200.000
	Anaerobic Jar	-17.930.000
	Freezer (Alat Laboratorium Pertanian)	-3.084.000
	Hot Plate Stirer	-7.150.000
	Personal Computer	-29.500.000
	Stabilizer/UPS	-1.260.000
	Stereo Microscope (Alat Laboratorium Pertanian)	-17.287.000
	Stomacher	-27.246.000
	Vortex Mixer	-16.000.000
	Soil Tester	-4.000.000
	Under Water Camera	-25.300.000
	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	-9.000.000
	Mikrolitre Piperdort	-1.131.000
	Generator Set (Lab Scale)	-211.200.000
	Generator Set(Lab Scale)	-635.000.000
	Uninterupted Power Supply (UPS)	-35.127.000
	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	-8.000.000
	Automatic Dispenser	-5.125.000

	Pompa Peristaltik	-6.428.700
	Control Panel	-34.592.000
	Water Bath (Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu)	-12.672.000
	Kamera Digital	-39.000.000
	Local Area Network (LAN)	-14.080.000
	P.C Unit	-548.421.550
	Lap Top	-517.461.500
	Note Book	-762.909.500
	Personal Komputer Lainnya	-39.952.000
	Komputer Unit Lainnya	-23.510.000
	Floppy Disk Unit (Peralatan Mainframe)	-1.500.000
	Hard Disk	-11.745.000
	CPU (Peralatan Personal Komputer)	-25.434.000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-175.809.050
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-20.650.000
	Modem	-4.895.000
	Side Scan Sonar	-49.500.000
	Tubing Slip	-616.971.000
	Alat Pelindung Lainnya	-48.950.000
	OHP 3 M	-12.200.000
	Kamera/Video dengan tempatnya U/ Bawah Air (Sea & Sea)	-8.970.000
	Cooling Pond	-45.625.000
	Mercury Flood Light	-163.086.000
	Perahu Layar	-61.548.000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Forklift	-1.342.554.400
	Portable Water Pump	-1.359.000
	Sedan	-274.695.000
	Jeep	-497.135.000
	Station Wagon	-326.733.000
	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	-199.200.000
	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	-2.394.450.667
	Truck + Attachment	-62.171.000
	Pick Up	-316.780.000
	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	-364.970.000
	Sepeda Motor	-156.496.730
	Sepeda Motor Patroli	-21.500.000
	Mobil Tinja	-71.276.000
	Gerobak Tarik	-180.000
	Gerobak Dorong	-10.486.001
	Lori Dorong	-21.376.000
	Kapal Penangkap Ikan	-98.382.500
	Mesin Ketam (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	-116.000
	Mesin Bor	-7.599.901
	Mesin Gergaji Logam	-645.682
	Mesin Gerinda	-4.795.000

	Mesin Kompresor	-682.051
	Mesin Las Listrik	-45.000
	Mesin Gunting Plat	-2.970.000
	Mesin Gerinda Tangan	-7.684.000
	Mesin Bor Tangan	-1.109.000
	Mesin Ampelas Rol Kecil	-1.137.500
	Mesin Gergaji Besi	-62.000
	Battery Charge	-18.349.577
	Electric Wire Rope	-500.000
	Perkakas Bengkel Listrik Lainnya (Alat Bengkel Bermesin)	-4.011.000
	Steam Cleaner	-329.535
	Overhead Crane	-165.000
	Mesin Gergaji	-750.000
	Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)	-582.923
	Peralatan Las Listrik	-8.000.000
	Peralatan Las Karbit	-109.000
	Dongkrak Hidrolik	-13.888.500
	T A K E L	-9.531.500
	Tool Kit Set	-6.233.456
	Tool Kit Box	-7.499.997
	Kunci Pipa	-5.326.496
	Puller Set	-667.700
	Scaffolding Set & Tool	-9.460.000
	Perkakas Standard (Standard Tools) Lainnya	-26.069.995
	Water Pas	-2.000.000
	Tanggem	-115.000
	Gunting Plat	-700.000
	Kunci Pas	-1.000.000
	Tang Senai & Tap	-467.500
	Rol Meter	-347.000
	Palu Besar	-1.182.000
	Mesin Bor Listrik Tangan	-990.000
	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	-481.800
	Circuit Tester (Alat Ukur Universal)	-1.500.000
	Multisester Digital	-375.000
	Memori Programmer	-312.500
	Thermohygrometer (Alat Ukur Universal)	-515.000
	Vidio Measurement	-3.850.000
	Scanner (Universal Tester)	-1.716.000
	Termometer Governmen Tester 0 Derajat Sampai Dengan 100 Derajat C	-1.192.179
	Thermostat ( Penguji Pemeriksaan Termometer )	-1.000.000
	Stopwatch	-1.000.000
	Avometer Su 20 - 20 K	-769.574
	Venier Caliver	-15.000
	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	-410.000
	Timbangan Bbi Kapasitas 100 Kg	-1.930.000
	Timbangan Cepat Kapasitas 25 Kg	-2.424.000

	Timbangan Pegas Kapasitas 50 Kg (Alat Timbangan/biara)	-58.458
	Noise Tester	-312.000
	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	-1.700.000
	Cold Storage (Kamar Pendingin)	-23.100.000
	Rak-Rak Penyimpan	-325.000
	Alat Pengukur Temperatur	-423.500
	Alat Prosesing Daging	-924.000
	Payang ( Termasuk Lampara )	-3.507.692
	Drift Gill Net ( Jaring Insang Hanyut )	-18.505.825
	Encircling Gill Net ( Jaring Insang Lingkar )	-5.059.930
	Set Gill Net ( Jaring Insang Tetap )	-1.616.624
	Perangkap Lainnya	-14.458.900
	Alat Produksi Perikanan Lainnya	-32.585.000
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	-6.168.000
	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	-1.996.000
	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	-997.000
	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	-1.565.600
	Mesin Stensil Listrik Folio	-50.000
	Alat Reproduksi (Penggandaan) Lainnya	-88.000
	Lemari Besi/Metal	-27.464.978
	Lemari Kayu	-23.244.001
	Rak Besi	-9.972.434
	Rak Kayu	-12.007.846
	Filing Cabinet Besi	-3.695.000
	Filing Cabinet Kayu	-63.000
	Brandkas	-828.769
	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	-1.176.000
	Kardex Besi	-1.788.922
	Kardex Kayu	-1.092.000
	Lemari Display	-1.936.000
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	-4.000.000
	Tabung Pemadam Api	-18.544.745
	Rambu-Rambu	-3.630.000
	Papan Visual/Papan Nama	-7.422.212
	White Board	-13.017.315
	Alat Detektor Uang Palsu	-603.000
	Copy Board/Elektrik White Board	-3.440.000
	Peta	-14.021.000
	Alat Penghancur Kertas	-3.850.000
	Alat Pemotong Kertas	-350.000
	Headmachine Besar	-1.170.413
	Perforator Besar	-1.135.205
	Overhead Projector	-71.000
	Lampu-lampu Kristal	-7.500.000
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	-1.500.000
	Mesin Fogging	-6.864.000
	Perkakas Kantor Lainnya	-29.447.000
	Meja Kerja Besi/Metal	-30.785.710

	Meja Kerja Kayu	-114.734.072
	Kursi Besi/Metal	-786.215.484
	Kursi Kayu	-77.894.412
	Sice	-16.068.332
	Meja Rapat	-80.953.995
	Meja Komputer	-50.100.219
	Tempat Tidur Kayu	-594.000
	Meja Ketik	-2.224.000
	Meja Telepon	-1.003.535
	Meja Resepsionis	-850.000
	Meja Makan Kayu	-8.648.394
	Kursi Fiber Glas/Plastik	-1.125.000
	Rak Sepatu ( Almunium )	-993.846
	Nakas	-26.525.100
	Meubelair Lainnya	-2.000.000
	Jam Mekanis	-2.600.000
	Control Clock	-1.500.000
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	-1.325.999
	Mesin Pemotong Rumput	-10.826.000
	Alat Pembersih Lainnya	-4.000.000
	Lemari Es	-1.485.000
	A.C. Window	-7.887.000
	A.C. Split	-964.614
	Kipas Angin	-8.674.116
	Exhause Fan	-8.738.400
	Cold Storage (Alat Pendingin)	-2.009.000
	Kompor Gas (Alat Dapur)	-6.231.832
	Kompor Minyak	-2.400.000
	Rice Cooker (Alat Dapur)	-3.710.652
	Kitchen Set	-1.350.000
	Tabung Gas	-6.334.655
	Mesin Giling Bumbu	-1.780.000
	Rak Piring Alumunium	-5.330.000
	Panci	-4.257.000
	Alat Dapur Lainnya	-425.000
	Televisi	-17.409.500
	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ))	-130.223
	Amplifier	-149.515
	Equalizer	-949.000
	Loudspeaker	-14.988.000
	Sound System	-19.569.000
	Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	-1.175.000
	Wireless	-7.220.000
	Megaphone	-7.104.000
	Microphone	-1.600.000
	Microphone Table Stand	-2.200.000
	Unit Power Supply	-1.624.000
	Stabilisator	-1.029.994

	Tustel	-11.800.000
	Timbangan Barang	-1.000.000
	Lambang Garuda Pancasila	-94.000
	Gambar Presiden/Wakil Presiden	-37.000
	Tiang Bendera	-500.000
	Tangga Aluminium	-2.015.000
	Kaca Hias	-3.279.000
	Dispenser	-12.519.600
	Mimbar/Podium	-860.000
	Karpet	-725.000
	Gordyin/Kray	-7.195.560
	Kabel Roll	-6.869.000
	Lemari Plastik	-4.900.000
	DVD Player	-1.500.000
	Lampu Belajar	-3.141.000
	Tempat Sampah	-4.950.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )	-5.770.005
	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	-2.207.148
	Microphone/Wireless MIC	-2.737.000
	Microphone/Boom Stand	-312.000
	Microphone Connector Box	-600.000
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	-3.242.644
	Automatic Voltage Regulator (AVR)	-2.581.000
	Digital Audio Taperecorder	-900.000
	Microphone Cable	-880.000
	Peralatan Studio Audio Lainnya	-1.100.000
	Rak Peralatan	-71.500
	Tripod Camera	-2.800.000
	Film Projector	-15.000
	Slide Projector	-26.000
	Command Desk	-500.000
	Lensa Kamera	-3.320.400
	Changing Bag	-375.000
	Meja Editing Film	-800.000
	Tacho Generator For Drive Motor Raching	-28.000
	Analog Delay (Peralatan Studio Video Dan Film)	-362.500
	Camera Digital	-1.000.000
	Tas Kamera	-573.750
	Meja Gambar	-985.000
	Jangka Gambar	-300.000
	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	-1.112.538
	Teropong/Keker	-1.799.034
	GPS Receiver	-5.250.051
	Alat Studio Lainnya	-3.333.333
	Telephone (PABX)	-55.643.000
	Intermediate Telephone/Key Telephone	-500.000
	Pesawat Telephone	-1.837.000

	Handy Talky (HT)	-22.470.700
	Facsimile	-1.255.000
	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	-10.960.000
	Unit Tranceiver Ssb Portable	-38.000
	Switcher Combination	-1.500.000
	Coaxial Feeder	-975.000
	Antenna Tuning Unit	-1.200.000
	Peralatan Antena Penerima VHF	-1.989.000
	Genset	-78.595.000
	Kursi Dorong	-3.991.000
	Bracket Holder	-2.000.000
	Kursi Zeis	-1.745.000
	Oxygen Regulator	-4.182.921
	Refractometer (Alat Kedokteran Mata)	-811.569
	Tiang Keseimbangan	-19.527.750
	Kursi Gynecologi	-452.000
	Boor Reamer	-700.000
	Diving Tank	-36.543.383
	Sepeda Statis	-8.250.000
	Timbangan Elektronik	-2.529.838
	Elektronik Thermometer	-1.674.930
	Calibration Anvil For Concrete	-39.000
	Pompa Hidrolik	-270.000
	Mantel Destilasi	-1.300.000
	Dial Gauge LC.13	-310.000
	Valve Spring Tester	-1.800.000
	Diode Tester	-850.000
	Dial & Test Indikator	-350.769
	Alat Uji Diameter	-141.000
	Techometer Digital Multimeter	-705.000
	Ultrasonic Thickness Meter	-1.500.000
	Mega Ohm Meter	-993.846
	Vernier Caliper Height Gauge	-800.000
	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	-450.154
	Microscope	-1.334.000
	Blender	-1.577.000
	Lampu Natrium	-1.800.000
	Bak Fiberglass	-1.885.000
	Alat Ukur Kadar Air (Alat Laboratorium Umum)	-930.600
	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	-37.000
	Cooling Water Circulator	-1.300.000
	Alat Laboratorium Umum Lainnya	-84.999
	Stabilizer	-5.899.998
	Peralatan Chlorine Injector	-978.500
	Rack, Diluter/Pipet	-1.300.000
	Voltmeter	-475.000
	Pipa Resonansi	-425.000
	Spidle Sander	-993.846

	Manual Pipe Cutter Oxy Acetilence	-643.500
	Pompa Airasil	-13.435.000
	Echo Sounder (Alat Laboratorium Pertanian)	-1.600.000
	Ice Maker (Alat Laboratorium Pertanian)	-2.176.000
	Micrometer	-960.000
	Personal Computer	-926.000
	PH Meter Digital	-1.036.094
	Roll Meter	-1.400.000
	Stabilizer/UPS	-4.713.000
	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Pertanian)	-2.110.958
	Heating Coil	-2.000.000
	Kompas (Alat Laboratorium Oceanografi)	-890.000
	Disolved Oksigen Analyzer	-540.184
	Liqor Light Meter	-740.000
	Radio Meter (Alat Laboratorium Lingkungan Perairan)	-22.508
	Abem Sounding Cable	-1.720.000
	Mobile Lab. Met System UV Radiation Sensor	-1.600.000
	Filter Photo Meter	-650.000
	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	-14.570.888
	Incline Tube Manometer	-2.000.000
	Tachometer (General Laboratory Tool)	-800.000
	Vibrating Screen (General Laboratory Tool)	-500.000
	Serial Scanner/Printer	-1.870.000
	DC Power Supply	-9.515.000
	Uninterrupted Power Supply (UPS)	-2.900.000
	Tachometer (Measuring/testing Device)	-800.000
	Extention Code (30M)	-27.000
	Ice Cube Maker	-63.482.100
	Refrigerator/Freezer	-360.000
	Pompa Peristaltik	-450.000
	Multi Tester	-1.080.000
	Peralatan Umum Lainnya	-2.100.000
	Lighting Equipment	-1.101.370
	Ampere Meter / Clamp Meter	-495.000
	COD Meter	-375.128
	Vice Grippe USA	-1.012.000
	Tang Ampere	-1.345.000
	Digital Multimeter (Alat Lab. Standarisasi Kalibrasi & Instrumens	-1.275.000
	Alat Khusus Keamanan Lainnya	-1.000.000
	Alat Keamanan Lainnya	-1.000.000
	Topeng Pelindung	-930.000
	P.C Unit	-131.517.140
	Lap Top	-99.951.000
	Card Reader (Peralatan Mainframe)	-2.177.000
	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	-34.962.000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-115.376.000

	External	-1.900.000
	Peralatan Personal Komputer Lainnya	-1.630.000
	Modem	-543.500
	Card Punch	-400.000
	Peralatan Jaringan Lainnya	-4.020.000
	Pesawat Radio Meter	-104.000
	Baju Pengaman Lainnya	-3.500.000
	Life Jacket	-6.000.000
	Alat Penolong Lainnya	-5.103.000
	Alat Selam Seet	-2.060.000
	Regulator	-9.000
	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	-654.500.000
	Air Filter Dry	-600.000
	Jet Pump	-1.453.000
	Fan	-720.000
	Blower	-42.007.517
	Water Jet Ejector	-20.790.000
	Pallet	-12.733.200
	Solid Material Handling Equipment Lainnya	-7.040.000
	Rambu Cermin	-7.876.000
	Alat Bilyard	-11.550.000
	Kaca Mata Air	-3.040.000
	Peralatan Olah Raga Lainnya	-3.850.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Portable Water Pump	1.359.000
	Gerobak Dorong	950.001
	Mesin Gerinda	120.000
	Mesin Las Listrik	45.000
	Mesin Gerinda Tangan	106.000
	Mesin Bor Tangan	117.000
	Peralatan Las Karbit	109.000
	Dongkrak Hidrolik	146.000
	Tool Kit Set	5.749.995
	Tool Kit Box	7.499.997
	Kunci Pipa	3.549.996
	Perkakas Standard (Standard Tools) Lainnya	26.069.995
	Venier Caliver	15.000
	Noise Tester	312.000
	Set Gill Net ( Jaring Insang Tetap )	908.000
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2.306.000
	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	760.000
	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1.565.600
	Alat Reproduksi (Penggandaan) Lainnya	88.000
	Filing Cabinet Besi	2.542.000
	Brandkas	250.000
	Copy Board/Elektric White Board	3.440.000
	Peta	3.864.000

	Overhead Projector	71.000
	Meja Kerja Besi/Metal	3.454.960
	Meja Kerja Kayu	7.820.000
	Kursi Besi/Metal	38.525.200
	Sice	851.348
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	975.999
	Mesin Pemotong Rumput	1.468.000
	Lemari Es	1.485.000
	A.C. Window	7.887.000
	Kipas Angin	732.000
	Mesin Giling Bumbu	1.780.000
	Rak Piring Alumunium	3.980.000
	Loudspeaker	4.000.000
	Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	1.175.000
	Wireless	870.000
	Megaphone	1.390.000
	Lambang Garuda Pancasila	65.000
	Gambar Presiden/Wakil Presiden	15.000
	Tangga Aluminium	187.000
	Kaca Hias	1.200.000
	Dispenser	1.898.000
	Gordyin/Kray	3.363.600
	Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )	4.020.005
	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	550.000
	Microphone/Wireless MIC	1.000.000
	Automatic Voltage Regulator (AVR)	589.000
	Film Projector	15.000
	Slide Projector	26.000
	Tacho Generator For Drive Motor Raching	28.000
	Telephone (PABX)	526.000
	Intermediate Telephone/Key Telephone	500.000
	Handy Talky (HT)	2.478.200
	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1.500.000
	Diving Tank	1.543.383
	Calibration Anvil For Concrete	39.000
	Pompa Hidrolik	270.000
	Dial Gauge LC.13	310.000
	Alat Uji Diameter	141.000
	Techometer Digital Multimeter	705.000
	Alat Laboratorium Umum Lainnya	84.999
	Micrometer	960.000
	Personal Computer	926.000
	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	480.000
	Extention Code (30M)	27.000
	P.C Unit	2.239.640
	Pesawat Radio Meter	104.000
	Jet Pump	550.000
Internal Transfer Keluar	Truck Crane	-1.227.000.000

	Forklift	-23.188.000
	Mesin Penghancur Es	-1.721.857.422
	Water Treatment (Mesin Proses)	-2.108.543.940
	Portable Generating Set	-19.952.000
	Stationary Generating Set	-1.304.879.428
	Pompa Air	-58.301.884
	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	-333.800.000
	Sepeda Motor	-66.280.000
	Baggage Trolley	-244.911.700
	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	-28.056.000
	Cold Storage (Kamar Pendingin)	-2.397.427.586
	Lemari Penyimpan	-3.000.000
	Mesin Fotocopy Electronic	-49.885.000
	Lemari Besi/Metal	-28.158.000
	Lemari Kayu	-53.460.000
	Brandkas	-19.800.000
	Buffet	-6.650.000
	Lemari Display	-58.795.000
	Tabung Pemadam Api	-7.495.000
	CCTV - Camera Control Television System	-199.000.000
	Papan Visual/Papan Nama	-59.300.000
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	-3.575.000
	Meja Kerja Besi/Metal	-154.687.500
	Meja Kerja Kayu	-10.500.000
	Kursi Besi/Metal	-49.410.000
	Meja Rapat	-27.150.000
	Meja Komputer	-850.000
	Tempat Tidur Besi	-4.200.000
	Tempat Tidur Kayu	-1.100.000
	Kasur/Spring Bed	-73.110.000
	Partisi	-58.382.420
	Meubelair Lainnya	-66.095.000
	Mesin Pemotong Rumput	-2.585.000
	Lemari Es	-10.000.000
	A.C. Split	-140.858.844
	Cold Storage (Alat Pendingin)	-4.669.156.788
	Alat Pendingin Lainnya	-56.716.000
	Kitchen Set	-7.025.000
	Televisi	-41.173.950
	Loudspeaker	-26.796.000
	Sound System	-8.140.000
	Microphone	-6.781.500
	Microphone Table Stand	-335.000
	Timbangan Barang	-49.716.000
	Mimbar/Podium	-4.425.000
	Lampu	-459.491.127
	Tangki Air	-442.762.355
	Alat Rumah Tangga Lainnya	-78.551.000

	Audio Amplifier	-14.355.000
	Microphone/Wireless MIC	-6.650.000
	Kamera Udara	-28.875.000
	Solar Cell	-159.894.940
	Kursi Zeis	-25.905.000
	Timbangan Elektronik	-11.109.500
	Slicer	-26.235.000
	Bak Pendingin	-40.150.000
	Alat Pemadam Kebakaran	-28.175.046
	Kamera Digital	-45.545.000
	P.C Unit	-51.040.000
	Lap Top	-76.984.500
	Note Book	-17.325.000
	Hard Disk	-2.400.000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-55.295.000
	Air Conditioning (AC)	-97.405.000
	Flood Lights Lainnya	-6.046.936
Internal Transfer Masuk	Truck Crane	1.227.000.000
	Forklift	23.188.000
	Mesin Penghancur Es	1.721.857.422
	Water Treatment (Mesin Proses)	2.108.543.940
	Portable Generating Set	19.952.000
	Stationary Generating Set	1.304.879.428
	Pompa Air	58.301.884
	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	333.800.000
	Sepeda Motor	66.280.000
	Baggage Trolley	244.911.700
	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	28.056.000
	Cold Storage (Kamar Pendingin)	2.397.427.586
	Lemari Penyimpan	3.000.000
	Mesin Fotocopy Electronic	49.885.000
	Lemari Besi/Metal	28.158.000
	Lemari Kayu	53.460.000
	Brandkas	19.800.000
	Buffet	6.650.000
	Lemari Display	58.795.000
	Tabung Pemadam Api	7.495.000
	CCTV - Camera Control Television System	199.000.000
	Papan Visual/Papan Nama	59.300.000
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3.575.000
	Meja Kerja Besi/Metal	154.687.500
	Meja Kerja Kayu	10.500.000
	Kursi Besi/Metal	49.410.000
	Meja Rapat	27.150.000
	Meja Komputer	850.000
	Tempat Tidur Besi	4.200.000
	Tempat Tidur Kayu	1.100.000
	Kasur/Spring Bed	73.110.000

	Partisi	58.382.420
	Meubelair Lainnya	66.095.000
	Mesin Pemotong Rumput	2.585.000
	Lemari Es	10.000.000
	A.C. Split	140.858.844
	Cold Storage (Alat Pendingin)	4.669.156.788
	Alat Pendingin Lainnya	56.716.000
	Kitchen Set	7.025.000
	Televisi	41.173.950
	Loudspeaker	26.796.000
	Sound System	8.140.000
	Microphone	6.781.500
	Microphone Table Stand	335.000
	Timbangan Barang	49.716.000
	Mimbar/Podium	4.425.000
	Lampu	459.491.127
	Tangki Air	442.762.355
	Alat Rumah Tangga Lainnya	78.551.000
	Audio Amplifier	14.355.000
	Microphone/Wireless MIC	6.650.000
	Kamera Udara	28.875.000
	Solar Cell	159.894.940
	Kursi Zeis	25.905.000
	Timbangan Elektronik	11.109.500
	Slicer	26.235.000
	Bak Pendingin	40.150.000
	Alat Pemadam Kebakaran	28.175.046
	Kamera Digital	45.545.000
	P.C Unit	51.040.000
	Lap Top	76.984.500
	Note Book	17.325.000
	Hard Disk	2.400.000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	55.295.000
	Air Conditioning (AC)	97.405.000
	Flood Lights Lainnya	6.046.936

Gedung Bangunan Rp  
744.973.205.905

### C.2.3 Gedung Bangunan

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 744.973.205.905 dan Rp 741.721.136.129 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Nama Barang	Total
Saldo Awal TAYL		740.302.680.416
Pembelian	Bangunan Gedung Kantor Permanen	373.954.250
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	39.965.550
	Bangunan TPI Permanen	54.863.700
	Tugu/Tanda Batas Lainnya	184.751.250

Hibah Masuk	Bangunan Gedung Kantor Permanen	88.507.000	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Bangunan Gedung Kantor Permanen	118.871.350	
	Kanopi	201.558.001	
	Bangunan Tempat Parkir	121.926.000	
Reklasifikasi Masuk	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	4.519.817.000	
	Pagar Permanen	1.228.947.000	
Perolehan Lainnya	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	132.000.000	
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	3.688.087.000	
	Bangunan Gudang Lainnya	3.258.403.000	
	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	280.000.000	
	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya	328.972.000	
	Likuidasi Masuk	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.277.569.063
		Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	238.230.961
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2.505.972.000	
	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	73.766.381	
	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	283.808.379	
	Bangunan Bengkel /Hanggar Semi Permanen	764.803.731	
	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar Lainnya	145.654.000	
	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	18.585.000	
	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	809.411.000	
	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	410.962.437	
	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	111.240.000	
	Gedung Pos Jaga Permanen	50.297.000	
	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	15.418.400	
	Gedung Garasi/Pool Permanen	24.780.000	
	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	5.722.103.000	
	Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen	145.279.000	
	Bangunan TPI Permanen	3.902.653.500	
	Bangunan TPI Semi Permanen	980.479.768	
	Bangunan Pabrik Es	1.340.827.635	
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	788.541.000	
	Bangunan Lainnya	39.704.085	
	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	620.395.000	
	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	290.196.889	
	Bangunan Menara Pengawas Semi Permanen	292.293.095	
	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	830.993.830	
	Pagar Permanen	107.953.486	
	Pagar Semi Permanen	92.050.215	

Reklasifikasi PI ke BMN	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya	768.264.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Bangunan Gedung Kantor Permanen	217.417.000
	Bangunan TPI Permanen	196.479.800
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Bangunan Gedung Kantor Permanen	567.080.900
	Bangunan TPI Permanen	474.649.650
	Tugu/Tanda Batas Lainnya	194.475.000
Pengembangan Melalui KDP	Bangunan Gedung Kantor Permanen	217.687.000
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	80.548.000
	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	150.051.088
Koreksi Susulan	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya	77.000.000
	Gedung Pos Jaga Permanen	26.179.000
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	-987.400
Hibah Keluar	Bangunan Lainnya	-4.776.469.000
	Pagar Permanen	-397.380.000
Reklasifikasi Keluar	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	-1.228.947.000
	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	-4.519.817.000
Koreksi Pencatatan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-619.174.500
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-39.965.550
	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	-74.665.000
	Gedung Pos Jaga Permanen	-41.116.543
	Bangunan TPI Permanen	-346.634.350
	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lainnya	-61.700.000
	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	-102.877.642
Tugu/Tanda Batas Lainnya	-184.751.250	
Likuidasi Keluar	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-2.277.569.063
	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	-238.230.961
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-2.505.972.000
	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	-73.766.381
	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	-283.808.379
	Bangunan Bengkel /Hanggar Semi Permanen	-764.803.731
	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar Lainnya	-145.654.000
	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	-18.585.000
	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	-809.411.000
	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	-410.962.437
	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	-111.240.000
	Gedung Pos Jaga Permanen	-50.297.000
	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	-15.418.400
	Gedung Garasi/Pool Permanen	-24.780.000
Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	-5.722.103.000	

	Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen	-145.279.000
	Bangunan TPI Permanen	-3.902.653.500
	Bangunan TPI Semi Permanen	-980.479.768
	Bangunan Pabrik Es	-1.340.827.635
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	-788.541.000
	Bangunan Lainnya	-39.704.085
	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	-620.395.000
	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen	-290.196.889
	Bangunan Menara Pengawas Semi Permanen	-292.293.095
	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	-830.993.830
	Pagar Permanen	-107.953.486
	Pagar Semi Permanen	-92.050.215
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Kerangka Dasar Kadastral Orde 2	-4.896.000
	Pagar Permanen	-1.228.947.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Bangunan Gedung Kantor Permanen	17.572.000
	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	74.665.000
	Gedung Pos Jaga Permanen	67.901.543
	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1.228.947.000
	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lainnya	61.700.000
	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	102.877.642
Perubahan BMN Ke PI	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya	-845.264.000
Internal Transfer Keluar	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-261.500.000
	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar Lainnya	-145.654.000
	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	-312.224.382
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	-2.315.387.136
	Gedung Pos Jaga Permanen	-227.229.394
	Bangunan Halte/Shelter	-86.723.344
	Bangunan TPI Permanen	-8.592.603.477
	Bangunan TPI Semi Permanen	-605.345.885
	Bangunan Pabrik Es	-6.331.603.119
	Bangunan Lainnya	-1.477.426.466
	Taman Lainnya	-256.713.298
	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	-1.825.164.374
	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	-2.695.250.287
	Bangunan Menara Pengawas Semi Permanen	-292.293.095
	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	-830.993.830
	Pagar Permanen	-401.888.457

	Pagar Lainnya	-1.730.903.912
Internal Transfer Masuk	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	261.500.000
	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar Lainnya	145.654.000
	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	312.224.382
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2.315.387.136
	Gedung Pos Jaga Permanen	227.229.394
	Bangunan Halte/Shelter	86.723.344
	Bangunan TPI Permanen	8.592.603.477
	Bangunan TPI Semi Permanen	605.345.885
	Bangunan Pabrik Es	6.331.603.119
	Bangunan Lainnya	1.477.426.466
	Taman Lainnya	256.713.298
	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1.825.164.374
	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	2.695.250.287
	Bangunan Menara Pengawas Semi Permanen	292.293.095
	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	830.993.830
	Pagar Permanen	401.888.457
	Pagar Lainnya	1.730.903.912

Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp 2.817.779.210.690

#### C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2.817.779.210.690 dan Rp 2.819.552.971.798 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Nama Barang	Total
Saldo Awal TAYL	Jalan Nasional Lainnya	2.819.507.801.303
Pembelian	Jalan Khusus Kompleks	189.500.000
	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya Lainnya	44.448.000
	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	132.222.000
	Jaringan Air Minum Lainnya	96.090.700
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Jalan Khusus Kompleks	599.492.000
	Jalan Khusus Lainnya	133.200.000
Likuidasi Masuk	Jalan Khusus Kompleks	5.434.388.321
	Dermaga	3.059.665.190
	Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	43.860.000
	Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut)	3.221.000
	Kolam Pasang	394.191.200
	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa)	69.349.000
	Saluran Drainage	151.198.100

	Kantong Pasir/Lahar/Lumpur (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/P	417.323.850
	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	2.888.907.600
	Peralatan Saringan Sampah ( Pond Screen )	1.034.168.000
	Bangunan Pemecah Gelombang	3.575.850.000
	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Lainnya	222.798.120
	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai)	6.109.000
	Bangunan Dermaga	25.959.904.000
	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai Lainnya	160.688.005
	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	330.937.900
	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	667.456.715
	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku Lainnya	349.022.600
	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Kecil	14.496.600
	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang	42.305.000
	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Kecil	74.800.000
	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Sedang	63.324.100
	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	119.281.400
	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	127.800.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Jalan Khusus Kompleks	389.177.000
Pengembangan Melalui KDP	Jalan Khusus Kompleks	410.256.427
	Saluran Drainage	50.000.000
	Instalasi PLTS Kapasitas Kecil	18.757.200
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Jalan Khusus Kompleks	-5.081.475
	Saluran Banjir	-1.816.268
Transfer Keluar	Jalan Lainnya	-6.009.927.763
Koreksi Pencatatan	Jalan Khusus Kompleks	-189.500.000
Likuidasi Keluar	Jalan Khusus Kompleks	-5.434.388.321
	Dermaga	-3.059.665.190
	Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	-43.860.000
	Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut)	-3.221.000
	Kolam Pasang	-394.191.200
	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa)	-69.349.000
	Saluran Drainage	-151.198.100
	Kantong Pasir/Lahar/Lumpur (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/P	-417.323.850
	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	-2.888.907.600
	Peralatan Saringan Sampah ( Pond Screen )	-1.034.168.000
	Bangunan Pemecah Gelombang	-3.575.850.000

	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Lainnya	-222.798.120
	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai)	-6.109.000
	Bangunan Dermaga	-25.959.904.000
	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai Lainnya	-160.688.005
	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	-330.937.900
	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	-667.456.715
	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku Lainnya	-349.022.600
	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Kecil	-14.496.600
	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang	-42.305.000
	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Kecil	-74.800.000
	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Sedang	-63.324.100
	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	-119.281.400
	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	-127.800.000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Jalan Khusus Kompleks	-670.363.064
	Saluran Banjir	-161.047.190
	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	-83.002.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Jalan Khusus Kompleks	1.340.726.128
	Saluran Banjir	322.094.380
	Bangunan Dermaga	1.625.209.000
	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	40.974.312
Internal Transfer Keluar	Jalan Khusus Kompleks	-112.900.070
	Jalan Lainnya	-14.311.945.577
	Dermaga	-34.239.444.995
	Saluran Drainage	-2.287.544.238
	Chekdam/Penahan Sedimen	-3.724.620.000
	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	-852.736.000
	Peralatan Saringan Sampah ( Pond Screen )	-1.034.168.000
	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Lainnya	-189.566.120
	Bangunan Dermaga	-31.831.819.431
	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai Lainnya	-160.688.005
	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	-519.018.370
	Bangunan Air Bersih/air Baku Lainnya	-212.608.460
	Bangunan Pompa Air Buangan Domestik	-31.978.988
	Bangunan Air Kotor Lainnya	-866.666.751
	Penampungan Air Hujan (PAH)	-4.122.544
	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	-1.544.336.558
	Instalasi Air Kotor Lainnya	-296.007.460

	Instalasi Penangkal Petir Manual	-51.765.577
	Instalasi AC	-22.256.411
	Jaringan Listrik Lainnya	-1.573.912.827
Internal Transfer Masuk	Jalan Khusus Kompleks	112.900.070
	Jalan Lainnya	14.311.945.577
	Dermaga	34.239.444.995
	Saluran Drainage	2.287.544.238
	Chekdam/Penahan Sedimen	3.724.620.000
	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	852.736.000
	Peralatan Saringan Sampah ( Pond Screen )	1.034.168.000
	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Lainnya	189.566.120
	Bangunan Dermaga	31.831.819.431
	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai Lainnya	160.688.005
	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	519.018.370
	Bangunan Air Bersih/air Baku Lainnya	212.608.460
	Bangunan Pompa Air Buangan Domestik	31.978.988
	Bangunan Air Kotor Lainnya	866.666.751
	Penampungan Air Hujan (PAH)	4.122.544
	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	1.544.336.558
	Instalasi Air Kotor Lainnya	296.007.460
	Instalasi Penangkal Petir Manual	51.765.577
	Instalasi AC	22.256.411
	Jaringan Listrik Lainnya	1.573.912.827

Aset Tetap Lainnya Rp  
26.789.105.470

### C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 26.789.105.470 dan Rp 27.617.048.970 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Nama Barang	Total
Saldo Awal TAYL	Monografi	298.902.998
	Buku Lainnya	9.507.676.781
	Laporan	2.096.673.231
	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	78.000.000
	Video	212.315.000
	CD/VCD/DVD/LD	2.500.000
	Audio Visual Lainnya	31.100.000
	Atlas	19.600.000
	Blue Print	2.200.000
	Bahan Kartografi Lainnya	2.600.000
	Ukiran dan Lukisan Lainnya	110.500.000
	Kartografi, Naskah Dan Lukisan Lainnya	148.995.000
	Alat Musik Modern/Band	18.545.000
	Lukisan Lainnya	64.995.000
	Maket/Miniatur/Replika	1.044.617.400

	Foto Dokumen	1.500.000
	Arca/ Patung	64.723.000
	Tanah Dalam Renovasi	2.362.871.500
	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	752.773.924
	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Renovasi	336.168.000
	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	10.459.792.136
Transfer Masuk	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	197.875.000
Likuidasi Masuk	Tanah Dalam Renovasi	1.605.388.000
	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	3.810.585.000
Transfer Keluar	Tanah Dalam Renovasi	-757.483.500
	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	-197.875.000
Likuidasi Keluar	Tanah Dalam Renovasi	-1.605.388.000
	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	-3.810.585.000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Buku Lainnya	-9.375.000
	Laporan	-7.625.000
	CD/VCD/DVD/LD	-2.500.000
	Ukiran dan Lukisan Lainnya	-1.000.000
	Maket/Miniatur/Replika	-48.460.000
	Foto Dokumen	-1.500.000
Internal Transfer Keluar	Tanah Dalam Renovasi	-1.605.388.000
Internal Transfer Masuk	Tanah Dalam Renovasi	1.605.388.000

#### Aset Tetap Renovasi

Satker	Rupiah
169124. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	5.415.973.000
179053. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	208.851.674
238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	7.331.422.386
537611. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	197.875.000
<b>JUMLAH</b>	<b>13.154.122.060</b>

#### Aset Tetap Lainnya

Satker	Rupiah
189034. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	34.410.000
238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	8.010.945.108
239146. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	88.792.000
239150. BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	321.076.000
239171. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	29.810.000
239214. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	404.740.000
239221. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	31.100.000

239235. PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	21.450.000
239991. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	515.000.000
310719. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	710.146.400
427655. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	145.300.000
427670. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	95.854.000
427692. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	96.182.000
518117. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	1.745.528.202
531488. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	61.765.000
560393. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	49.440.000
560401. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	203.089.000
622461. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	967.675.500
622482. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	14.750.000
633707. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	87.930.200
<b>JUMLAH</b>	<b>13.634.983.410</b>

*Konstruksi Dalam  
Pengerjaan Rp  
22.459.445.016*

### C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 22.459.445.016 dan Rp 20.324.415.386 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Transaksi	Nama Barang	Total
Saldo Awal TAYL	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	18.923.639.186
	Jalan Dalam Pengerjaan	1.243.522.000
	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	138.497.000
	Jaringan Dalam Pengerjaan	18.757.200
Perolehan/Penambahan KDP	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	49.800.000
	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1.027.862.960
	Jalan Dalam Pengerjaan	666.382.538
	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	27.200.328
Pengembangan KDP	Irigasi Dalam Pengerjaan	47.961.366
	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1.456.478.965
	Jalan Dalam Pengerjaan	899.368.024
Koreksi Nilai KDP Bertambah	Irigasi Dalam Pengerjaan	41.185.665
	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	127.136.007
Perolehan Lainnya KDP	Jalan Dalam Pengerjaan	211.141.000
	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	10.391.043
Uraian Jenis Transaksi Tidak Ada	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	-138.497.000
Uraian Jenis Transaksi Tidak Ada	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	138.497.000
Koreksi Pencatatan KDP	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	-97.561.500
	Jalan Dalam Pengerjaan	-211.141.000
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	-909.470.139
	Jalan Dalam Pengerjaan	-1.142.948.427

	Irigasi Dalam Pengerjaan	-50.000.000
	Jaringan Dalam Pengerjaan	-18.757.200

## Rincian KDP TA 2024

Satker	Rupiah
238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	19.991.163.186
239146. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	49.842.400
239171. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	227.259.876
239214. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	21.077.790
239235. PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	425.088.618
239991. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	90.630.662
310719. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	368.506.087
427661. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	197.307.575
427670. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	154.981.599
427692. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	369.136.895
560401. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	221.353.000
622461. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	315.897.000
633693. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	27.200.328
<b>JUMLAH</b>	<b>22.459.445.016</b>

*Piutang Jangka Panjang*  
Rp 2.841.696.229

### C.3 Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 2.841.696.229 dan Rp 0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

*Piutang Tagihan Tuntutan*  
*Perbendaharaan/Tuntutan*  
*Ganti Rugi (TP/TGR)*

#### C.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp 0

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing Kanwil disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Tagihan Penjualan  
Angsuran Rp 0*

### **C.3.2 Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing Kanwil disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

*Penyisihan Piutang Tidak  
Tertagih - Piutang Jangka  
Panjang Rp (14.279.881)*

### **C.3.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp (14.279.881) dan Rp 0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Aset Lainnya Rp  
28.403.441.426*

### **C.4 Aset Lainnya**

Saldo Aset Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 28.403.441.426 dan Rp 33.843.620.910.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Direktorat

Jenderal Perikanan Tangkap terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Uraian	Satker	Rupiah
Software	238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	4.148.682.382
	239221. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	15.365.000
	518117. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	26.490.000
	531488. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	20.900.000
	537611. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	200.647.000
	622461. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	56.125.000
<b>Total Software</b>		<b>4.468.209.382</b>
Lisensi	238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	198.000.000
<b>Total Lisensi</b>		<b>198.000.000</b>
Hasil Kajian/Penelitian	238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	789.767.000
<b>Total Hasil Kajian/Penelitian</b>		<b>789.767.000</b>
Aset Tak Berwujud Lainnya	239150. BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	969.520.750
<b>Total Aset Tak Berwujud Lainnya</b>		<b>969.520.750</b>
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	019062. DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	397.869.710
	029172. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	2.040.443.540
	039163. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	24.145.000
	069145. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	290.839.775
	079031. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	23.425.000
	089143. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	1.182.095.450
	099325. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	343.398.000
	109131. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	334.734.000
	119114. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	187.890.000
	129123. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	1.492.192.700
	139138. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	176.575.000
	149124. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	30.938.000

	238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	19.335.022.787
	239146. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	543.130.800
	239150. BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	2.918.551.409
	239171. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	18.490.091.600
	239214. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	3.918.796.281
	239221. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	553.218.766
	239235. PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	844.056.000
	239991. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	8.963.952.006
	259107. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	2.462.705.000
	289112. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	292.700.000
	299391. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	875.612.000
	310719. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	342.212.500
	319098. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	171.670.000
	427655. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	6.087.658.921
	427661. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	19.000.000
	427670. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	1.409.834.383
	427692. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	292.886.000
	531488. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	4.984.960.809
	537611. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	46.267.929.627
	560393. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	77.550.000
	560401. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	3.592.804.533
	622461. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	1.575.090.000
	622475. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	677.816.000
	622482. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	606.778.750
	633693. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	22.196.690.000
	633707. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	208.445.000
	<b>Total Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>	<b>154.233.709.347</b>
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	13.524.651.400

dalam Operasional Pemerintahan		
	239150. BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	49.500.000
	537611. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	202.800.000
<b>Total Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan</b>		<b>13.776.951.400</b>
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	019062. DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	-397.869.710
	029172. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	-1.674.725.050
	039163. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	-24.145.000
	069145. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-107.839.942
	079031. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	-23.425.000
	089143. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	-1.118.581.938
	099325. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	-343.398.000
	109131. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	-334.734.000
	119114. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	-34.043.135
	129123. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	-1.303.761.521
	139138. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	-176.575.000
	149124. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	-30.938.000
	238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	-18.431.154.801
	239146. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	-471.050.674
	239150. BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	-2.885.551.409
	239171. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	-18.490.091.600
	239214. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	-1.842.807.397
	239221. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	-425.087.670
	239235. PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	-242.222.810
	239991. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	-8.943.839.332

	259107. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	-1.394.495.840
	289112. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	-292.700.000
	299391. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	-874.649.501
	310719. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	-321.310.008
	319098. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	-120.035.712
	427655. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	-5.576.019.356
	427661. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	-19.000.000
	427670. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	-1.393.638.783
	427692. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	-292.886.000
	531488. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	-4.840.228.604
	537611. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	-28.020.026.082
	560393. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	-77.550.000
	560401. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	-2.683.406.802
	622461. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	-1.434.229.062
	622475. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	-428.894.344
	622482. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	-411.705.088
	633693. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	-22.196.690.000
	633707. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	-208.445.000
<b>Total Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan</b>		<b>-127.887.752.171</b>
Akumulasi Amortisasi Software	238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	-4.063.499.882
	239221. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	-15.365.000
	518117. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	-26.490.000
	531488. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	-20.900.000
	537611. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	-119.804.250
	622461. PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	-42.093.750
<b>Total Akumulasi Amortisasi Software</b>		<b>-4.288.152.882</b>
Akumulasi Amortisasi Lisensi	238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	-178.200.000
<b>Total Akumulasi Amortisasi Lisensi</b>		<b>-178.200.000</b>
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	238720. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	-13.426.311.400

yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan		
	239150. BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	-49.500.000
	537611. PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	-202.800.000
<b>Total Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan</b>		<b>-13.678.611.400</b>

*Aset Tak Berwujud Rp  
6.425.497.132*

#### **C.4.1 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 6.425.497.132 dan Rp 6.425.497.132.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik seperti software, lisensi, hasil kajian serta aset tak berwujud lainnya.

*Aset Lain-lain Rp  
168.010.660.747*

#### **C.4.2 Aset Lain-lain**

Saldo Aset Lain-lain Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 168.010.660.747 dan Rp 166.659.657.474.

Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN

*Akumulasi  
Penyusutan/Amortisasi  
Aset Lainnya Rp  
(146.032.716.453)*

#### **C.4.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp (146.032.716.453) dan Rp (142.002.136.086).

*Kewajiban Jangka  
Pendek Rp  
54.515.603.185*

#### **C.5 Kewajiban Jangka Pendek**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 54.515.603.185 dan Rp 8.412.690.602.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

*Uang Muka dari KPPN Rp  
6.481.001.000*

### **C.5.1 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 6.481.001.000 dan Rp 206.500.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan

*Utang kepada Pihak  
Ketiga Rp 13.063.796.517*

### **C.5.2 Utang kepada Pihak Ketiga**

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 13.063.796.517 dan Rp 5.005.605.197.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Pendapatan Diterima di  
Muka Rp 0*

### **C.5.3 Pendapatan Diterima di Muka**

Saldo Pendapatan Diterima di Muka Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 3.406.878.905.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNB. Pendapatan Diterima di Muka pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan pendapatan sewa gedung dan bangunan pada beberapa instansi yang suda dilakukan jurnal bail pada periode Semester I 2024.

*Beban yang Masih Harus  
Dibayar Rp  
13.063.796.517*

#### **C.5.4 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Saldo Beban yang Masih Harus Dibayar Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 13.063.796.517 dan Rp 5.005.605.197.

Beban yang Masih Harus Dibayar merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. Beban yang masih harus dibayar ini terdiri dari beban pegawai yang masih harus dibayar, beban barang yang masih harus dibayar dan beban modal yang masih harus dibayar.

*Utang Jangka Pendek  
Lainnya Rp 2.817.457*

#### **C.5.5 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 2.817.457 dan Rp 0. Utang jangka pendek lainnya merupakan utang pajak yang belum disetor pada periode 30 Juni 2024, yang terdapat pada empat satker yaitu, PPN Tanjung Pandan, PPS Bitung, PPS Nizam Zachman , DKP Provinsi Banten dan DKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

*Ekuitas Rp  
5.651.364.661.416*

#### **C.6 Ekuitas**

Saldo Ekuitas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 5.651.364.661.416 dan Rp 6.135.444.546.360.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Neraca Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan  
PNBP Rp  
(450.367.119.454)

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp (450.367.119.454) dan Rp (72.786.985.709).

Pendapatan akrual pada Satker Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap berasal dari Pendapatan dari Pendapatan SDA, Pendapatan Fungsional Non SDA, Pendapatan umum dan Pendapatan Lain-Lain yang merupakan jenis pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

#### D.1.1 Pendapatan SDA

Tabel pendapatan SDA

No	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
1	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	-18.977.302.407	-10.626.361.782	78,59
2	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	-55.275.000	-31.245.000	76,91
3	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	-391.492.443.015	-31.951.612.643	1.125,27
<b>JUMLAH</b>		<b>-410.525.020.422</b>	<b>-42.609.219.425</b>	<b>863,47</b>

Realisasi Penerimaan PNBPN SDA Perikanan periode Desember TA.2023 adalah sebesar Rp410.525.020.422,- yang terdiri dari Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Perikanan Tangkap sebesar Rp18.977.302.407,- dari Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) Perikanan Budidaya Rp55.275.000,- dan Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebesar Rp391.492.443.015,- Penerimaan SDA pada TA 2023 belum memenuhi target yang direncanakan. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2023 merupakan tahun transisi pelaksanaan penarikan pascaproduksi yang sebelumnya praproduksi, sehingga kapal penangkap ikan baru mulai beralih dari sistem praproduksi ke pascaproduksi yang menyebabkan adanya jeda penerimaan karena sebelumnya pungutan dilakukan di awal perizinan beralih ke pungutan yang dilakukan saat pendaratan produksi ikan, sementara itu pada tahun 2024 kapal penangkap ikan sudah seluruhnya memiliki izin dengan sistem pascaproduksi. Meskipun demikian, pendapatan Bulan Januari

s.d Juni 2024 masih jauh dari target tahun 2024 yang disebabkan karena harga acuan ikan tahun 2024 yang turun sekitar 40% dari tahun 2023. Selain itu, target yang ditetapkan untuk tahun 2024 merupakan target gabungan antara SDA Perikanan dan SDA Kelautan, dimana sampai Bulan Juni 2024 belum terdapat keputusan pemisahan target untuk SDA Kelautan

Apabila jika dibandingkan dengan dengan Laporan Realisasi Anggaran terdapat perbedaan nilai realisasi pada akun Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan senilai Rp756.289.069 yang berasal dari jurnal manual atas Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp745.429.469 dan Pembayaran Piutang PNBPN SDA Rp10.859.600

Nama Akun	2023	2024	Grand Total	%
Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Tangkap	- 18.977.302.407	- 18.977.302.407	-	0,00%
Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	- 55.275.000	- 55.275.000	-	0,00%
Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	- 391.492.443.015	- 392.248.732.084	- 756.289.069	0,19%
	<b>- 410.525.020.422</b>	<b>- 411.281.309.491</b>	<b>- 821.806.329.913</b>	<b>200,18%</b>

## D.1.2 Pendapatan PNBPN Lainnya

Tabel pendapatan PNBPN Lainnya

No	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-1.600.804.853	-221.706.969	622,04
2	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-14.931.657.435	-8.015.269.933	86,29
3	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	-5.820.000	0	100,00
4	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	-3.759	0	100,00
5	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	0	-22.899.130	0,00
6	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	-22.028.068.790	-21.670.837.731	1,65
7	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	-132.480.000	-110.040.000	20,39
8	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	-11.025.000	-9.075.000	21,49
9	Pendapatan Jasa Lainnya	-2.493.288	-12.250.000	(79,65)
10	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-1.081.554.054	-35.256.832	2.967,64

11	Pendapatan Denda Lainnya	0	-615.145	0,00
12	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	-35.280.000	0,00
13	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-48.191.853	-44.535.544	8,21
<b>JUMLAH</b>		<b>-39.842.099.032</b>	<b>-30.177.766.284</b>	<b>32,02</b>

Nama Satker	LO	LRA	Selisih
<b>Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan</b>			
PPN AMBON	20.069.124	17.399.688	- 2.669.436
PPN BRONDONG	2.498.310	2.121.090	- 377.220
PPN KARANGANTU	90.994.845	89.899.674	- 1.095.171
PPN KEJAWANAN	538.436.881	506.284.022	- 32.152.859
PPN KWANDANG	2.305.905	2.020.722	- 285.183
PPN PEKALONGAN	2.265.053	1.773.889	- 491.164
PPN PELABUHAN RATU	29.057.869	24.776.956	- 4.280.913
PPN PEMANGKAT	2.651.880	2.273.040	- 378.840
PPN PENGAMBENGAN	12.554.000	12.554.000	-
PPN PRIGI	56.426.608	53.295.864	- 3.130.744
PPN SIBOLGA	20.592.818	17.803.670	- 2.789.148
PPN SUNGAILIAT	15.374.919	13.178.502	- 2.196.417
PPN TANJUNG PANDAN	7.805.028	6.690.024	- 1.115.004
PPN TELUK BATANG	9.909.945	8.355.874	- 1.554.071
PPN TERNATE	16.910.154	14.439.615	- 2.470.539
PPN TUAL	2.577.960	2.209.680	- 368.280
PPS BELAWAN	1.592.444	1.364.952	- 227.492
PPS BITUNG	23.819.264	21.137.998	- 2.681.266
PPS BUNGUS	12.443.127	10.971.575	- 1.471.552
PPS CILACAP	397.719.608	395.363.612	- 2.355.996
PPS KENDARI	334.799.111	333.252.200	- 1.546.911
<b>Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi</b>			

BBPPI	60.540.000	60.540.000	-
PPN AMBON	1.568.532.013	298.048.820	1.270.483.193
PPN BRONDONG	520.966.431	420.291.639	100.674.792
PPN KARANGANTU	487.273.377	490.612.877	3.339.500
PPN KEJAWANAN	1.396.189.471	373.223.222	1.022.966.249
PPN KWANDANG	451.426.765	464.764.587	13.337.822
PPN PEKALONGAN	3.500.000	3.500.000	-
PPN PELABUHAN RATU	489.449.047	306.860.347	182.588.700
PPN PEMANGKAT	35.981.724	29.035.011	6.946.713
PPN PENGAMBENGAN	538.108.123	409.912.191	128.195.932
PPN PRIGI	404.580.559	323.440.000	81.140.559
PPN SIBOLGA	1.131.036.336	272.385.950	858.650.386
PPN SUNGAILIAT	97.210.800	97.210.800	-
PPN TANJUNG PANDAN	290.249.096	290.249.096	-
PPN TELUK BATANG	50.748.194	50.748.194	-
PPN TERNATE	599.158.609	610.009.684	10.851.075
PPN TUAL	157.135.177	125.000.000	32.135.177
PPS BELAWAN	765.508.763	205.142.920	560.365.843
PPS BITUNG	629.700.435	205.873.027	423.827.408
PPS BUNGUS	490.005.139	343.951.643	146.053.496
PPS CILACAP	1.651.661.819	1.028.761.165	622.900.654
PPS KENDARI	2.931.827.439	1.431.489.717	1.500.337.722
PPS NIZAM ZAHMAN	180.868.118	110.581.102	70.287.016
<b>Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya</b>			
BBPPI	4.000.000	4.000.000	-
PPS KENDARI	1.820.000	1.820.000	-
<b>Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan</b>			
PPS KENDARI	3.759	3.759	-
<b>Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan</b>			
PPN AMBON	285.532.880	290.528.669	4.995.789
PPN BRONDONG	634.463.838	639.949.214	5.485.376

PPN KARANGANTU	234.626.849	239.560.689	4.933.840
PPN KEJAWANAN	3.197.319.527	5.028.528.245	1.831.208.718
PPN KWANDANG	111.378.905	112.295.632	916.727
PPN PEKALONGAN	478.821.212	605.366.367	126.545.155
PPN PELABUHAN RATU	583.737.006	613.213.358	29.476.352
PPN PEMANGKAT	415.587.640	426.913.435	11.325.795
PPN PENGAMBENGAN	219.185.990	249.429.925	30.243.935
PPN PRIGI	495.641.925	488.475.447	- 7.166.478
PPN SIBOLGA	998.806.454	1.094.653.108	95.846.654
PPN SUNGAILIAT	275.026.121	275.088.921	62.800
PPN TANJUNG PANDAN	580.721.467	580.771.957	50.490
PPN TELUK BATANG	65.296.341	65.296.341	-
PPN TERNATE	699.586.308	718.962.198	19.375.890
PPN TUAL	225.892.988	237.184.598	11.291.610
PPS BELAWAN	462.328.182	467.856.555	5.528.373
PPS BITUNG	1.471.066.384	1.481.421.944	10.355.560
PPS BUNGUS	884.667.251	1.076.442.466	191.775.215
PPS CILACAP	2.291.356.983	2.536.463.732	245.106.749
PPS KENDARI	2.392.407.298	2.399.807.293	7.399.995
PPS NIZAM ZAHMAN	5.024.617.241	23.024.510.126	17.999.892.885
<b>Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya</b>			
BBPPI	132.480.000	132.480.000	-
<b>Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi</b>			
BBPPI	11.025.000	11.025.000	-
<b>Pendapatan Jasa Lainnya</b>			
PPN PRIGI	2.493.288	2.493.288	-
<b>Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah</b>			
PPN TERNATE	1.970.100	1.970.100	-
PPN TUAL	12.067.510	12.067.510	-
PPS NIZAM ZAHMAN		-	-
SEKRETARIAT DJPT	1.067.516.444	1.067.516.444	-
<b>Pendapatan Anggaran Lain-lain</b>			
PPS NIZAM ZAHMAN	30.185.000	30.000.000	- 185.000
SEKRETARIAT DJPT	18.006.853	18.006.853	-
	<b>39.842.099.032</b>	<b>53.422.901.813</b>	<b>13.580.802.781</b>

1. Terdapat perbedaan antara LO dan LRA pada Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan dan Pendapatan sarana dan prasarana sesuai yang disebabkan oleh jurnal manual atas pendapatan sewa diterima dimuka yang tercatat pada periode audited TA 2023.
2. Terdapat perbedaan antara LO dan LRA pada Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan yang disebabkan oleh jurnal manual atas Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang tercatat pada periode audited TA 2023.
3. Terdapat perbedaan antara LO dan LRA atas pendapatan anggaran lain-lain pada PPS Nizam Zachman yang disebabkan oleh pengembalian melalui SPM gaji yang realisasinya terjadi pada periode Juli.

Beban Pegawai  
Rp  
128.808.738.352

## D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 128.808.738.352 dan Rp 97.500.594.269.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

No	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
1	Beban Gaji Pokok PNS	41.444.813.800	39.366.159.664	5,28
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	588.937	613.262	(3,97)
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	3.218.702.005	3.040.860.958	5,85
4	Beban Tunj. Anak PNS	987.776.594	926.373.775	6,63
5	Beban Tunj. Struktural PNS	555.705.000	600.720.000	(7,49)
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	4.163.592.000	4.346.218.000	(4,20)
7	Beban Tunj. PPh PNS	570.275.523	163.866.367	248,01
8	Beban Tunj. Beras PNS	2.348.471.970	2.421.435.120	(3,01)
9	Beban Uang Makan PNS	3.109.147.600	3.681.446.572	(15,55)
10	Beban Tunjangan Umum PNS	915.135.000	1.032.494.950	(11,37)
11	Beban Gaji Pokok PPPK	11.596.050.700	1.758.785.800	559,32
12	Beban Pembulatan Gaji PPPK	253.863	44.803	466,62
13	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	742.771.270	116.826.351	535,79
14	Beban Tunjangan Anak PPPK	224.851.432	39.439.874	470,11
15	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1.690.738.000	268.620.000	529,42
16	Beban Tunjangan Beras PPPK	748.533.120	136.439.280	448,62
17	Beban Uang Makan PPPK	1.221.284.600	248.945.300	390,58
18	Beban Uang Lembur	555.955.000	288.182.000	92,92
19	Beban Uang Lembur PPPK	348.179.000	25.575.000	1.261,40
20	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	42.515.538.951	37.384.703.994	13,72

21	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	11.850.373.987	1.652.843.199	616,97
<b>JUMLAH</b>		<b>128.808.738.352</b>	<b>97.500.594.269</b>	<b>32,11</b>

<b>Nama Satker</b>	<b>Akrual</b>	<b>Kas</b>	<b>Grand Total</b>
<b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>			
BBPPI	2.307.330.800	2.051.628.200	- 255.702.600
PPN AMBON	1.304.650.300	1.160.853.900	- 143.796.400
PPN BRONDONG	1.544.546.600	1.377.745.500	- 166.801.100
PPN KARANGANTU	721.456.400	640.368.500	- 81.087.900
PPN KEJAWANAN	1.435.175.400	1.278.688.800	- 156.486.600
PPN KWANDANG	460.677.700	406.102.200	- 54.575.500
PPN PEKALONGAN	1.322.549.200	1.171.449.300	- 151.099.900
PPN PELABUHAN RATU	1.810.240.700	1.614.270.900	- 195.969.800
PPN PEMANGKAT	866.401.400	771.944.200	- 94.457.200
PPN PENGAMBENGAN	1.061.031.900	940.525.800	- 120.506.100
PPN PRIGI	1.819.131.800	1.618.580.500	- 200.551.300
PPN SIBOLGA	1.335.235.800	1.190.299.900	- 144.935.900
PPN SUNGAILIAT	827.056.100	736.186.300	- 90.869.800
PPN TANJUNG PANDAN	823.686.300	731.524.100	- 92.162.200
PPN TELUK BATANG	437.146.200	388.121.800	- 49.024.400
PPN TERNATE	1.074.263.700	956.574.000	- 117.689.700
PPN TUAL	846.289.200	748.263.800	- 98.025.400
PPS BELAWAN	1.753.455.800	1.563.905.600	- 189.550.200
PPS BITUNG	1.119.039.500	997.482.500	- 121.557.000
PPS BUNGUS	1.521.200.200	1.356.219.900	- 164.980.300
PPS CILACAP	1.978.544.400	1.764.017.900	- 214.526.500
PPS KENDARI	2.276.426.700	2.026.547.300	- 249.879.400
PPS NIZAM ZAHMAN	1.648.049.200	1.471.802.600	- 176.246.600
SEKRETARIAT DJPT	11.151.228.500	9.924.077.400	- 1.227.151.100
<b>Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>			
BBPPI	38.437	34.704	- 3.733
PPN AMBON	20.461	18.545	- 1.916
PPN BRONDONG	23.367	21.182	- 2.185

PPN KARANGANTU	11.104	10.018	- 1.086
PPN KEJAWANAN	22.631	20.305	- 2.326
PPN KWANDANG	6.701	5.806	- 895
PPN PEKALONGAN	18.592	16.661	- 1.931
PPN PELABUHAN RATU	23.062	20.976	- 2.086
PPN PEMANGKAT	13.925	12.628	- 1.297
PPN PENGAMBENGAN	15.983	14.498	- 1.485
PPN PRIGI	25.739	23.076	- 2.663
PPN SIBOLGA	19.761	18.043	- 1.718
PPN SUNGAILIAT	12.483	11.123	- 1.360
PPN TANJUNG PANDAN	11.518	10.391	- 1.127
PPN TELUK BATANG	6.822	6.287	- 535
PPN TERNATE	16.769	14.938	- 1.831
PPN TUAL	12.726	11.382	- 1.344
PPS BELAWAN	24.175	21.716	- 2.459
PPS BITUNG	19.150	17.137	- 2.013
PPS BUNGUS	22.550	20.300	- 2.250
PPS CILACAP	25.636	23.368	- 2.268
PPS KENDARI	29.650	26.534	- 3.116
PPS NIZAM ZAHMAN	26.969	24.745	- 2.224
SEKRETARIAT DJPT	140.726	124.816	- 15.910
<b>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</b>			
BBPPI	164.629.520	146.285.870	- 18.343.650
PPN AMBON	103.872.060	92.413.360	- 11.458.700
PPN BRONDONG	137.778.810	122.598.050	- 15.180.760
PPN KARANGANTU	54.250.050	48.080.950	- 6.169.100
PPN KEJAWANAN	123.656.730	110.197.950	- 13.458.780

PPN KWANDANG	38.788.260	33.883.530	- 4.904.730
PPN PEKALONGAN	106.743.320	94.428.560	- 12.314.760
PPN PELABUHAN RATU	131.128.190	117.114.600	- 14.013.590
PPN PEMANGKAT	80.944.950	72.102.250	- 8.842.700
PPN PENGAMBENGAN	83.261.030	73.795.620	- 9.465.410
PPN PRIGI	141.078.550	125.604.110	- 15.474.440
PPN SIBOLGA	99.111.560	88.357.240	- 10.754.320
PPN SUNGAILIAT	59.307.360	52.820.100	- 6.487.260
PPN TANJUNG PANDAN	67.733.850	59.908.540	- 7.825.310
PPN TELUK BATANG	35.300.520	31.338.450	- 3.962.070
PPN TERNATE	76.358.640	68.227.230	- 8.131.410
PPN TUAL	58.026.790	51.404.920	- 6.621.870
PPS BELAWAN	122.541.020	109.216.650	- 13.324.370
PPS BITUNG	89.921.195	80.250.520	- 9.670.675
PPS BUNGUS	113.867.450	101.209.360	- 12.658.090
PPS CILACAP	166.778.970	148.810.710	- 17.968.260
PPS KENDARI	189.355.710	168.148.920	- 21.206.790
PPS NIZAM ZAHMAN	140.804.990	125.863.020	- 14.941.970
SEKRETARIAT DJPT	833.462.480	740.927.910	- 92.534.570
<b>Belanja Tunj. Anak PNS</b>			
BBPPI	56.303.224	50.035.936	- 6.267.288
PPN AMBON	38.139.462	33.919.190	- 4.220.272
PPN BRONDONG	42.120.408	37.572.542	- 4.547.866
PPN KARANGANTU	18.924.690	16.781.204	- 2.143.486
PPN KEJAWANAN	36.557.892	32.488.056	- 4.069.836
PPN KWANDANG	10.235.640	8.961.462	- 1.274.178
PPN PEKALONGAN	29.113.546	25.813.108	- 3.300.438

PPN PELABUHAN RATU	51.381.520	45.862.820	- 5.518.700
PPN PEMANGKAT	26.900.550	23.963.054	- 2.937.496
PPN PENGAMBENGAN	25.459.572	22.664.520	- 2.795.052
PPN PRIGI	38.297.668	34.082.744	- 4.214.924
PPN SIBOLGA	29.009.714	25.845.922	- 3.163.792
PPN SUNGAILIAT	17.611.938	15.641.236	- 1.970.702
PPN TANJUNG PANDAN	20.894.850	18.558.896	- 2.335.954
PPN TELUK BATANG	11.302.970	10.035.096	- 1.267.874
PPN TERNATE	23.217.864	20.610.642	- 2.607.222
PPN TUAL	18.636.388	16.497.964	- 2.138.424
PPS BELAWAN	40.362.360	36.037.516	- 4.324.844
PPS BITUNG	31.675.558	28.300.832	- 3.374.726
PPS BUNGUS	33.205.404	29.616.766	- 3.588.638
PPS CILACAP	51.907.092	46.273.388	- 5.633.704
PPS KENDARI	61.077.498	54.508.028	- 6.569.470
PPS NIZAM ZAHMAN	40.222.574	35.901.110	- 4.321.464
SEKRETARIAT DJPT	235.218.212	209.165.310	- 26.052.902
<b>Belanja Tunj. Struktural PNS</b>			
BBPPI	23.085.000	20.520.000	- 2.565.000
PPN AMBON	16.200.000	14.400.000	- 1.800.000
PPN BRONDONG	16.200.000	14.400.000	- 1.800.000
PPN KARANGANTU	13.230.000	11.760.000	- 1.470.000
PPN KEJAWANAN	16.200.000	14.400.000	- 1.800.000
PPN KWANDANG	13.230.000	11.760.000	- 1.470.000
PPN PEKALONGAN	16.200.000	14.400.000	- 1.800.000
PPN PELABUHAN RATU	16.200.000	14.400.000	- 1.800.000
PPN PEMANGKAT	16.200.000	14.400.000	- 1.800.000

PPN PENGAMBENGAN	16.200.000	14.400.000	- 1.800.000
PPN PRIGI	16.200.000	14.400.000	- 1.800.000
PPN SIBOLGA	16.200.000	14.400.000	- 1.800.000
PPN SUNGAILIAT	16.200.000	14.400.000	- 1.800.000
PPN TANJUNG PANDAN	16.200.000	14.400.000	- 1.800.000
PPN TELUK BATANG	8.100.000	7.200.000	- 900.000
PPN TERNATE	16.200.000	14.400.000	- 1.800.000
PPN TUAL	16.200.000	14.400.000	- 1.800.000
PPS BELAWAN	23.085.000	20.520.000	- 2.565.000
PPS BITUNG	23.085.000	20.520.000	- 2.565.000
PPS BUNGUS	23.085.000	20.520.000	- 2.565.000
PPS CILACAP	23.085.000	20.520.000	- 2.565.000
PPS KENDARI	25.785.000	23.220.000	- 2.565.000
PPS NIZAM ZAHMAN	23.085.000	20.520.000	- 2.565.000
SEKRETARIAT DJPT	146.250.000	130.000.000	- 16.250.000
<b>Belanja Tunj. Fungsional PNS</b>			
BBPPI	383.395.000	339.585.000	- 43.810.000
PPN AMBON	70.695.000	63.380.000	- 7.315.000
PPN BRONDONG	148.668.000	132.358.000	- 16.310.000
PPN KARANGANTU	78.030.000	69.320.000	- 8.710.000
PPN KEJAWANAN	114.948.000	102.458.000	- 12.490.000
PPN KWANDANG	61.380.000	54.510.000	- 6.870.000
PPN PEKALONGAN	109.514.000	97.508.000	- 12.006.000
PPN PELABUHAN RATU	116.040.000	103.500.000	- 12.540.000
PPN PEMANGKAT	64.926.000	57.916.000	- 7.010.000
PPN PENGAMBENGAN	156.610.000	138.970.000	- 17.640.000
PPN PRIGI	162.962.000	145.126.000	- 17.836.000

PPN SIBOLGA	99.246.000	89.366.000	- 9.880.000
PPN SUNGAILIAT	100.080.000	88.820.000	- 11.260.000
PPN TANJUNG PANDAN	60.030.000	53.560.000	- 6.470.000
PPN TELUK BATANG	27.450.000	24.360.000	- 3.090.000
PPN TERNATE	82.902.000	74.552.000	- 8.350.000
PPN TUAL	96.654.000	86.208.000	- 10.446.000
PPS BELAWAN	122.000.000	108.140.000	- 13.860.000
PPS BITUNG	115.654.000	103.568.000	- 12.086.000
PPS BUNGUS	124.650.000	112.120.000	- 12.530.000
PPS CILACAP	192.750.000	171.300.000	- 21.450.000
PPS KENDARI	170.190.000	151.740.000	- 18.450.000
PPS NIZAM ZAHMAN	126.429.000	113.283.000	- 13.146.000
SEKRETARIAT DJPT	1.378.389.000	1.210.968.000	- 167.421.000
<b>Belanja Tunj. PPh PNS</b>			
BBPPI	37.197.062	36.512.163	- 684.899
PPN AMBON	11.624.143	11.537.575	- 86.568
PPN BRONDONG	19.925.854	19.690.501	- 235.353
PPN KARANGANTU	9.321.998	9.288.831	- 33.167
PPN KEJAWANAN	15.383.175	15.253.640	- 129.535
PPN KWANDANG	4.030.977	4.030.977	-
PPN PEKALONGAN	14.488.356	14.387.413	- 100.943
PPN PELABUHAN RATU	20.530.372	20.370.690	- 159.682
PPN PEMANGKAT	10.301.998	10.209.736	- 92.262
PPN PENGAMBENGAN	12.289.113	12.227.358	- 61.755
PPN PRIGI	20.811.206	20.724.004	- 87.202
PPN SIBOLGA	14.390.274	14.259.559	- 130.715
PPN SUNGAILIAT	11.544.350	11.366.363	- 177.987

PPN TANJUNG PANDAN	8.866.235	8.817.201	- 49.034
PPN TELUK BATANG	3.254.532	3.254.532	-
PPN TERNATE	14.245.522	14.076.311	- 169.211
PPN TUAL	10.242.524	10.098.883	- 143.641
PPS BELAWAN	22.131.809	21.831.308	- 300.501
PPS BITUNG	13.486.826	13.331.751	- 155.075
PPS BUNGUS	19.993.894	19.727.478	- 266.416
PPS CILACAP	29.401.916	28.861.641	- 540.275
PPS KENDARI	33.260.569	32.860.987	- 399.582
PPS NIZAM ZAHMAN	23.219.854	22.905.293	- 314.561
SEKRETARIAT DJPT	190.332.964	186.448.501	- 3.884.463
<b>Belanja Tunj. Beras PNS</b>			
BBPPI	130.718.100	116.234.100	- 14.484.000
PPN AMBON	86.686.740	77.199.720	- 9.487.020
PPN BRONDONG	97.404.900	86.831.580	- 10.573.320
PPN KARANGANTU	43.958.940	39.034.380	- 4.924.560
PPN KEJAWANAN	90.452.580	80.603.460	- 9.849.120
PPN KWANDANG	29.547.360	25.926.360	- 3.621.000
PPN PEKALONGAN	75.244.380	66.698.820	- 8.545.560
PPN PELABUHAN RATU	100.881.060	90.090.480	- 10.790.580
PPN PEMANGKAT	62.063.940	55.401.300	- 6.662.640
PPN PENGAMBENGAN	63.295.080	56.197.920	- 7.097.160
PPN PRIGI	96.825.540	86.252.220	- 10.573.320
PPN SIBOLGA	73.940.820	65.974.620	- 7.966.200
PPN SUNGAILIAT	46.783.320	41.641.500	- 5.141.820
PPN TANJUNG PANDAN	50.694.000	44.972.820	- 5.721.180
PPN TELUK BATANG	27.374.760	24.333.120	- 3.041.640

PPN TERNATE	58.225.680	51.852.720	- 6.372.960
PPN TUAL	47.652.360	42.220.860	- 5.431.500
PPS BELAWAN	95.594.400	85.310.760	- 10.283.640
PPS BITUNG	74.628.810	66.698.820	- 7.929.990
PPS BUNGUS	79.662.000	70.971.600	- 8.690.400
PPS CILACAP	115.147.800	102.691.560	- 12.456.240
PPS KENDARI	129.704.220	115.582.320	- 14.121.900
PPS NIZAM ZAHMAN	95.666.820	85.383.180	- 10.283.640
SEKRETARIAT DJPT	576.318.360	512.806.020	- 63.512.340
<b>Belanja Uang Makan PNS</b>			
BBPPI	168.927.100	166.507.000	- 2.420.100
PPN AMBON	123.865.000	123.865.000	-
PPN BRONDONG	135.632.000	135.336.000	- 296.000
PPN KARANGANTU	58.260.000	58.260.000	-
PPN KEJAWANAN	129.219.000	129.219.000	-
PPN KWANDANG	38.186.000	38.186.000	-
PPN PEKALONGAN	104.224.000	104.150.000	- 74.000
PPN PELABUHAN RATU	151.623.000	151.586.000	- 37.000
PPN PEMANGKAT	81.943.000	88.540.000	6.597.000
PPN PENGAMBENGAN	94.972.000	93.449.000	- 1.523.000
PPN PRIGI	142.308.000	142.308.000	-
PPN SIBOLGA	121.741.000	121.741.000	-
PPN SUNGAILIAT	78.026.000	78.026.000	-
PPN TANJUNG PANDAN	68.128.850	66.852.000	- 1.276.850
PPN TELUK BATANG	36.109.000	36.109.000	-
PPN TERNATE	104.786.000	104.786.000	-
PPN TUAL	69.028.050	83.092.000	14.063.950
PPS BELAWAN	141.988.850	140.516.000	- 1.472.850
PPS BITUNG	86.034.000	86.034.000	-
PPS BUNGUS	119.131.000	119.131.000	-
PPS CILACAP	174.259.000	174.259.000	-
PPS KENDARI	166.537.500	165.098.000	- 1.439.500

PPS NIZAM ZAHMAN	130.630.000	130.630.000	-
SEKRETARIAT DJPT	583.589.250	653.014.000	69.424.750
<b>Belanja Tunjangan Umum PNS</b>			
BBPPI	23.175.000	20.600.000	- 2.575.000
PPN AMBON	42.530.000	37.745.000	- 4.785.000
PPN BRONDONG	27.765.000	24.825.000	- 2.940.000
PPN KARANGANTU	11.600.000	10.310.000	- 1.290.000
PPN KEJAWANAN	38.880.000	34.660.000	- 4.220.000
PPN KWANDANG	3.510.000	2.960.000	- 550.000
PPN PEKALONGAN	31.870.000	28.185.000	- 3.685.000
PPN PELABUHAN RATU	48.110.000	42.950.000	- 5.160.000
PPN PEMANGKAT	22.015.000	19.630.000	- 2.385.000
PPN PENGAMBENGAN	10.545.000	9.250.000	- 1.295.000
PPN PRIGI	38.020.000	33.960.000	- 4.060.000
PPN SIBOLGA	28.635.000	25.515.000	- 3.120.000
PPN SUNGAILIAT	9.370.000	8.450.000	- 920.000
PPN TANJUNG PANDAN	19.660.000	17.455.000	- 2.205.000
PPN TELUK BATANG	8.465.000	7.545.000	- 920.000
PPN TERNATE	27.290.000	24.155.000	- 3.135.000
PPN TUAL	16.770.000	14.945.000	- 1.825.000
PPS BELAWAN	53.935.000	48.415.000	- 5.520.000
PPS BITUNG	21.555.000	19.160.000	- 2.395.000
PPS BUNGUS	40.090.000	35.840.000	- 4.250.000
PPS CILACAP	45.515.000	40.725.000	- 4.790.000
PPS KENDARI	60.870.000	54.205.000	- 6.665.000
PPS NIZAM ZAHMAN	45.790.000	41.010.000	- 4.780.000
SEKRETARIAT DJPT	239.170.000	204.950.000	- 34.220.000

<b>Belanja Gaji Pokok PPPK</b>			
BBPPI	148.256.000	129.724.000	- 18.532.000
PPN AMBON	465.247.800	412.184.000	- 53.063.800
PPN BRONDONG	503.207.000	446.407.200	- 56.799.800
PPN KARANGANTU	432.419.400	383.015.600	- 49.403.800
PPN KEJAWANAN	488.409.300	432.794.400	- 55.614.900
PPN KWANDANG	367.858.300	326.964.700	- 40.893.600
PPN PEKALONGAN	484.205.400	429.036.100	- 55.169.300
PPN PELABUHAN RATU	261.420.300	230.970.400	- 30.449.900
PPN PEMANGKAT	442.176.200	392.202.600	- 49.973.600
PPN PENGAMBENGAN	449.290.800	397.977.600	- 51.313.200
PPN PRIGI	391.910.400	346.856.800	- 45.053.600
PPN SIBOLGA	484.285.500	429.230.600	- 55.054.900
PPN SUNGAILIAT	450.820.800	399.382.400	- 51.438.400
PPN TANJUNG PANDAN	519.035.300	457.817.600	- 61.217.700
PPN TELUK BATANG	344.868.300	305.202.400	- 39.665.900
PPN TERNATE	403.875.000	357.476.800	- 46.398.200
PPN TUAL	363.049.400	325.860.400	- 37.189.000
PPS BELAWAN	523.531.900	463.379.200	- 60.152.700
PPS BITUNG	443.348.200	391.980.000	- 51.368.200
PPS BUNGUS	433.050.100	382.824.600	- 50.225.500
PPS CILACAP	560.455.300	496.200.000	- 64.255.300
PPS KENDARI	365.663.800	323.052.000	- 42.611.800
PPS NIZAM ZAHMAN	834.837.400	739.970.400	- 94.867.000
SEKRETARIAT DJPT	1.434.828.800	1.270.352.800	- 164.476.000
<b>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</b>			
BBPPI	3.088	2.652	- 436

PPN AMBON	9.123	8.068	- 1.055
PPN BRONDONG	11.936	10.738	- 1.198
PPN KARANGANTU	8.271	7.375	- 896
PPN KEJAWANAN	9.691	8.590	- 1.101
PPN KWANDANG	6.755	6.093	- 662
PPN PEKALONGAN	10.899	9.523	- 1.376
PPN PELABUHAN RATU	6.487	5.859	- 628
PPN PEMANGKAT	10.149	9.197	- 952
PPN PENGAMBENGAN	11.263	10.142	- 1.121
PPN PRIGI	9.679	8.654	- 1.025
PPN SIBOLGA	9.836	8.820	- 1.016
PPN SUNGAILIAT	7.550	6.708	- 842
PPN TANJUNG PANDAN	12.610	11.266	- 1.344
PPN TELUK BATANG	7.038	6.257	- 781
PPN TERNATE	9.258	8.262	- 996
PPN TUAL	7.294	6.569	- 725
PPS BELAWAN	11.392	10.207	- 1.185
PPS BITUNG	9.945	8.960	- 985
PPS BUNGUS	9.646	8.478	- 1.168
PPS CILACAP	12.125	10.721	- 1.404
PPS KENDARI	8.229	7.440	- 789
PPS NIZAM ZAHMAN	18.870	16.844	- 2.026
SEKRETARIAT DJPT	32.729	29.180	- 3.549
<b>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</b>			
BBPPI	10.581.920	9.334.960	- 1.246.960
PPN AMBON	25.861.400	22.914.480	- 2.946.920
PPN BRONDONG	27.693.710	24.538.400	- 3.155.310

PPN KARANGANTU	23.565.150	20.811.080	- 2.754.070
PPN KEJAWANAN	32.348.340	28.619.360	- 3.728.980
PPN KWANDANG	25.527.530	22.546.710	- 2.980.820
PPN PEKALONGAN	38.392.550	34.053.370	- 4.339.180
PPN PELABUHAN RATU	10.986.030	9.759.760	- 1.226.270
PPN PEMANGKAT	31.980.410	28.342.740	- 3.637.670
PPN PENGAMBENGAN	29.134.610	25.821.760	- 3.312.850
PPN PRIGI	22.603.590	20.085.040	- 2.518.550
PPN SIBOLGA	31.150.400	27.624.880	- 3.525.520
PPN SUNGAILIAT	31.174.110	27.710.320	- 3.463.790
PPN TANJUNG PANDAN	21.065.680	18.617.930	- 2.447.750
PPN TELUK BATANG	24.769.160	21.945.840	- 2.823.320
PPN TERNATE	29.702.790	26.253.680	- 3.449.110
PPN TUAL	20.537.140	18.532.770	- 2.004.370
PPS BELAWAN	34.797.240	30.324.640	- 4.472.600
PPS BITUNG	22.365.900	19.742.080	- 2.623.820
PPS BUNGUS	31.550.540	27.961.100	- 3.589.440
PPS CILACAP	43.757.190	38.760.560	- 4.996.630
PPS KENDARI	19.963.080	17.424.600	- 2.538.480
PPS NIZAM ZAHMAN	61.447.950	54.475.840	- 6.972.110
SEKRETARIAT DJPT	91.814.850	81.084.930	- 10.729.920
<b>Belanja Tunjangan Anak PPPK</b>			
BBPPI	3.656.120	3.221.408	- 434.712
PPN AMBON	8.972.222	7.946.160	- 1.026.062
PPN BRONDONG	9.257.722	8.212.736	- 1.044.986
PPN KARANGANTU	6.895.652	6.100.592	- 795.060
PPN KEJAWANAN	8.886.978	7.845.648	- 1.041.330

PPN KWANDANG	4.738.760	4.211.598	- 527.162
PPN PEKALONGAN	13.632.214	12.024.686	- 1.607.528
PPN PELABUHAN RATU	3.561.476	3.135.040	- 426.436
PPN PEMANGKAT	10.459.784	9.277.496	- 1.182.288
PPN PENGAMBENGAN	10.787.650	9.519.686	- 1.267.964
PPN PRIGI	8.067.654	7.168.432	- 899.222
PPN SIBOLGA	9.099.828	8.093.256	- 1.006.572
PPN SUNGAILIAT	6.811.470	6.054.640	- 756.830
PPN TANJUNG PANDAN	6.611.938	5.835.024	- 776.914
PPN TELUK BATANG	6.949.204	6.162.832	- 786.372
PPN TERNATE	8.472.226	7.501.936	- 970.290
PPN TUAL	5.160.260	4.651.980	- 508.280
PPS BELAWAN	9.822.518	8.698.602	- 1.123.916
PPS BITUNG	6.357.762	5.596.656	- 761.106
PPS BUNGUS	8.580.730	7.618.380	- 962.350
PPS CILACAP	13.505.090	11.956.750	- 1.548.340
PPS KENDARI	4.489.056	3.926.200	- 562.856
PPS NIZAM ZAHMAN	21.756.836	19.295.472	- 2.461.364
SEKRETARIAT DJPT	28.318.282	25.051.466	- 3.266.816
<b>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</b>			
BBPPI	22.590.000	19.760.000	- 2.830.000
PPN AMBON	69.300.000	61.400.000	- 7.900.000
PPN BRONDONG	71.100.000	63.080.000	- 8.020.000
PPN KARANGANTU	62.820.000	55.640.000	- 7.180.000
PPN KEJAWANAN	72.000.000	63.800.000	- 8.200.000
PPN KWANDANG	52.740.000	46.880.000	- 5.860.000
PPN PEKALONGAN	70.380.000	62.360.000	- 8.020.000

PPN PELABUHAN RATA	39.114.000	34.568.000	- 4.546.000
PPN PEMANGKAT	57.960.000	51.440.000	- 6.520.000
PPN PENGAMBENGAN	61.155.000	54.160.000	- 6.995.000
PPN PRIGI	53.640.000	47.480.000	- 6.160.000
PPN SIBOLGA	68.760.000	60.920.000	- 7.840.000
PPN SUNGAILIAT	64.980.000	57.560.000	- 7.420.000
PPN TANJUNG PANDAN	79.560.000	70.200.000	- 9.360.000
PPN TELUK BATANG	47.160.000	41.720.000	- 5.440.000
PPN TERNATE	57.960.000	51.320.000	- 6.640.000
PPN TUAL	52.980.000	47.580.000	- 5.400.000
PPS BELAWAN	72.000.000	63.720.000	- 8.280.000
PPS BITUNG	63.675.000	56.320.000	- 7.355.000
PPS BUNGUS	62.955.000	55.680.000	- 7.275.000
PPS CILACAP	80.415.000	71.200.000	- 9.215.000
PPS KENDARI	56.160.000	49.640.000	- 6.520.000
PPS NIZAM ZAHMAN	118.954.000	105.468.000	- 13.486.000
SEKRETARIAT DJPT	232.380.000	205.720.000	- 26.660.000
<b>Belanja Tunjangan Beras PPPK</b>			
BBPPI	10.211.220	8.980.080	- 1.231.140
PPN AMBON	28.605.900	25.347.000	- 3.258.900
PPN BRONDONG	31.502.700	27.954.120	- 3.548.580
PPN KARANGANTU	24.550.380	21.726.000	- 2.824.380
PPN KEJAWANAN	31.430.280	27.809.280	- 3.621.000
PPN KWANDANG	21.219.060	18.829.200	- 2.389.860
PPN PEKALONGAN	38.961.960	34.471.920	- 4.490.040
PPN PELABUHAN RATA	13.108.020	11.587.200	- 1.520.820
PPN PEMANGKAT	33.458.040	29.692.200	- 3.765.840

PPN PENGAMBENGAN	33.313.200	29.474.940	- 3.838.260
PPN PRIGI	26.433.300	23.464.080	- 2.969.220
PPN SIBOLGA	31.502.700	27.954.120	- 3.548.580
PPN SUNGAILIAT	27.736.860	24.622.800	- 3.114.060
PPN TANJUNG PANDAN	25.347.000	22.377.780	- 2.969.220
PPN TELUK BATANG	24.188.280	21.436.320	- 2.751.960
PPN TERNATE	28.461.060	25.202.160	- 3.258.900
PPN TUAL	21.074.220	18.974.040	- 2.100.180
PPS BELAWAN	35.051.280	30.923.340	- 4.127.940
PPS BITUNG	24.115.860	21.291.480	- 2.824.380
PPS BUNGUS	28.678.320	25.419.420	- 3.258.900
PPS CILACAP	41.134.560	36.427.260	- 4.707.300
PPS KENDARI	18.467.100	16.222.080	- 2.245.020
PPS NIZAM ZAHMAN	63.367.500	56.197.920	- 7.169.580
SEKRETARIAT DJPT	86.614.320	76.620.360	- 9.993.960
<b>Belanja Uang Makan PPPK</b>			
BBPPI	13.630.000	13.630.000	-
PPN AMBON	51.176.000	51.176.000	-
PPN BRONDONG	52.992.000	52.992.000	-
PPN KARANGANTU	43.838.000	43.838.000	-
PPN KEJAWANAN	56.293.000	56.293.000	-
PPN KWANDANG	33.395.250	33.395.250	-
PPN PEKALONGAN	48.041.000	47.971.000	- 70.000
PPN PELABUHAN RATU	31.806.000	31.806.000	-
PPN PEMANGKAT	51.875.000	51.875.000	-
PPN PENGAMBENGAN	50.614.000	50.112.000	- 502.000
PPN PRIGI	46.122.000	46.122.000	-
PPN SIBOLGA	57.137.000	57.137.000	-
PPN SUNGAILIAT	56.597.000	56.597.000	-
PPN TANJUNG PANDAN	45.540.200	45.039.000	- 501.200

PPN TELUK BATANG	40.153.000	40.153.000	-
PPN TERNATE	50.830.000	50.830.000	-
PPN TUAL	38.000.300	45.855.000	7.854.700
PPS BELAWAN	61.004.150	60.829.000	175.150
PPS BITUNG	47.617.000	47.617.000	-
PPS BUNGUS	44.246.000	44.246.000	-
PPS CILACAP	63.661.000	63.661.000	-
PPS KENDARI	38.989.950	38.533.000	456.950
PPS NIZAM ZAHMAN	99.903.000	99.903.000	-
SEKRETARIAT DJPT	97.823.750	108.467.000	10.643.250
<b>Belanja Uang Lembur</b>			
BBPPI	34.297.000	34.297.000	-
PPN AMBON	8.048.000	8.048.000	-
PPN BRONDONG	7.060.000	7.060.000	-
PPN KARANGANTU	11.758.000	10.038.000	1.720.000
PPN KEJAWANAN	31.408.000	31.408.000	-
PPN KWANDANG	13.216.000	13.216.000	-
PPN PEKALONGAN	55.287.000	55.287.000	-
PPN PELABUHAN RATU	7.481.000	7.481.000	-
PPN PEMANGKAT	39.965.000	39.965.000	-
PPN PENGAMBENGAN	11.524.000	11.524.000	-
PPN PRIGI	12.368.000	12.368.000	-
PPN SIBOLGA	22.054.000	22.054.000	-
PPN SUNGAILIAT	3.844.000	3.844.000	-
PPN TANJUNG PANDAN	21.687.000	21.687.000	-
PPN TELUK BATANG	5.164.000	5.164.000	-
PPN TERNATE	41.932.000	41.932.000	-
PPS BELAWAN		-	-
PPS BITUNG	55.145.000	55.145.000	-
PPS KENDARI	84.507.000	84.507.000	-
PPS NIZAM ZAHMAN	89.210.000	89.210.000	-
<b>Belanja Uang Lembur PPPK</b>			
BBPPI	4.566.000	4.566.000	-
PPN AMBON	8.230.000	8.230.000	-
PPN BRONDONG	4.334.000	4.334.000	-
PPN KARANGANTU	13.856.000	9.176.000	4.680.000

PPN KEJAWANAN	8.401.000	8.401.000	-
PPN KWANDANG	18.218.000	18.218.000	-
PPN PEKALONGAN	19.684.000	19.684.000	-
PPN PELABUHAN RATU	3.065.000	3.065.000	-
PPN PEMANGKAT	19.899.000	19.899.000	-
PPN PENGAMBENGAN	10.499.000	10.499.000	-
PPN PRIGI	3.988.000	3.988.000	-
PPN SUNGAILIAT	8.411.000	8.411.000	-
PPN TANJUNG PANDAN	19.397.000	19.397.000	-
PPN TELUK BATANG	4.853.000	4.853.000	-
PPN TERNATE	37.228.000	37.228.000	-
PPS BELAWAN		-	-
PPS BITUNG	43.699.000	43.699.000	-
PPS KENDARI	23.628.000	23.628.000	-
PPS NIZAM ZAHMAN	96.223.000	96.223.000	-
<b>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</b>			
BBPPI	2.714.387.607	2.711.670.807	- 2.716.800
PPN AMBON	1.256.268.650	1.255.502.450	- 766.200
PPN BRONDONG	1.460.608.950	1.457.676.900	- 2.932.050
PPN KARANGANTU	760.428.900	760.428.900	-
PPN KEJAWANAN	1.409.806.521	1.409.806.521	-
PPN KWANDANG	565.954.700	565.954.700	-
PPN PEKALONGAN	1.293.539.923	1.293.371.688	- 168.235
PPN PELABUHAN RATU	1.542.444.255	1.540.326.683	- 2.117.572
PPN PEMANGKAT	859.665.754	859.665.754	-
PPN PENGAMBENGAN	1.163.171.057	1.162.714.972	- 456.085
PPN PRIGI	1.710.699.000	1.710.699.000	-
PPN SIBOLGA	1.233.322.963	1.233.322.963	-
PPN SUNGAILIAT	889.602.626	889.602.626	-
PPN TANJUNG PANDAN	833.573.022	833.172.408	- 400.614
PPN TELUK BATANG	440.794.534	440.794.534	-
PPN TERNATE	1.047.176.977	1.047.176.977	-
PPN TUAL	877.924.928	877.924.928	-
PPS BELAWAN	1.781.358.300	1.779.853.700	- 1.504.600

PPS BITUNG	1.227.194.050	1.227.194.050	-
PPS BUNGUS	1.550.859.450	1.549.354.850	1.504.600
PPS CILACAP	1.888.494.852	1.888.494.852	-
PPS KENDARI	2.141.882.375	2.141.236.233	646.142
PPS NIZAM ZAHMAN	1.635.427.500	1.635.427.500	-
SEKRETARIAT DJPT	12.230.952.057	12.196.216.657	34.735.400
<b>Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK</b>			
BBPPI	143.064.294	143.064.294	-
PPN AMBON	479.868.750	479.698.550	170.200
PPN BRONDONG	511.713.238	511.573.238	140.000
PPN KARANGANTU	442.192.170	442.192.170	-
PPN KEJAWANAN	499.428.025	499.428.025	-
PPN KWANDANG	377.746.700	377.746.700	-
PPN PEKALONGAN	492.001.534	491.937.078	64.456
PPN PELABUHAN RATU	264.252.532	264.252.532	-
PPN PEMANGKAT	436.046.684	436.046.684	-
PPN PENGAMBENGAN	449.654.251	449.604.893	49.358
PPN PRIGI	385.237.300	385.237.300	-
PPN SIBOLGA	483.473.873	483.473.873	-
PPN SUNGAILIAT	457.239.912	457.239.912	-
PPN TANJUNG PANDAN	519.851.530	519.444.404	407.126
PPN TELUK BATANG	336.642.399	336.642.399	-
PPN TERNATE	405.475.974	405.475.974	-
PPN TUAL	386.612.721	386.612.721	-
PPS BELAWAN	550.498.500	550.498.500	-
PPS BITUNG	445.357.100	445.357.100	-
PPS BUNGUS	437.694.351	437.694.351	-
PPS CILACAP	569.961.364	569.961.364	-
PPS KENDARI	395.472.342	395.457.866	14.476
PPS NIZAM ZAHMAN	859.912.350	859.912.350	-
SEKRETARIAT DJPT	1.520.976.093	1.520.976.093	-
	<b>128.808.738.352</b>	<b>121.208.867.860</b>	<b>250.017.606.212</b>

1. Pada belanja gaji pokok PNS, belanja pembulatan gaji PNS, belanja tunjangan suami/isteri PNS, belanja tunjangan anak, belanja tunjangan struktural PNS, belanja tunjangan fungsional PNS, belanja tunjangan PPh PNS, belanja tunjangan beras PNS, uang lembuar PNS dan uang lembur PPPK merupakan selisih yang timbul dari pengajuan gaji juli yang sudah di proses pengajuan pembayaran pada periode juni namun sp2d nya per tanggal 1 Juli 2024
2. Pada belanja uang makan PNS, belanja tunjangan kinerja PNS dan belanja tunjangan kinerja PPPK terdapat selisih dari beberapa satker yang disebabkan oleh kelebihan pembayaran uang makan desember yang disetor Kembali kepada negara pada bulan Januari 2024
3. Pada belanja tunjangan kinerja PNS, tunjangan fungsional PNS merupakan pengembalian atas temuan tugas belajar pada periode Laporan Keuangan TA 2023 oleh BPK-RI

Beban  
Persediaan Rp  
2.894.165.395

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 2.894.165.395 dan Rp 3.539.387.230. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

No	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
1	Beban Persediaan konsumsi	2.832.695.745	3.391.266.310	(16,47)
2	Beban Persediaan bahan baku	61.469.650	148.120.920	(58,50)
<b>JUMLAH</b>		<b>2.894.165.395</b>	<b>3.539.387.230</b>	<b>(18,23)</b>

Beban Persediaan per satker

Nama Satker	LO	LRA	Selisih
<b>Belanja Persediaan konsumsi</b>			
BBPPI	57.888.862	57.888.862	-
PPN AMBON	33.584.364	33.584.364	-
PPN BRONDONG	40.188.000	40.188.000	-
PPN KARANGANTU	82.800.100	82.800.100	-
PPN KEJAWANAN	37.874.508	37.874.508	-
PPN PEKALONGAN	49.726.250	49.726.250	-
PPN PELABUHAN RATU	33.723.495	33.723.495	-
PPN PEMANGKAT	42.984.200	42.984.200	-
PPN PENGAMBENGAN	37.599.360	37.599.360	-
PPN PRIGI	51.259.224	51.259.224	-
PPN SIBOLGA	54.473.700	54.473.700	-
PPN SUNGAILIAT	6.816.260	6.816.260	-
PPN TANJUNG PANDAN	16.168.886	16.168.886	-
PPN TELUK BATANG	41.246.347	41.246.347	-

PPN TERNATE	81.643.256	81.643.256	-
PPN TUAL	6.471.000	6.471.000	-
PPS BELAWAN	128.751.100	128.751.100	-
PPS BITUNG	177.329.015	177.329.015	-
PPS BUNGUS	72.055.774	72.055.774	-
PPS CILACAP	110.904.316	110.904.316	-
PPS KENDARI	172.083.338	172.083.338	-
PPS NIZAM ZAHMAN	119.384.140	119.384.140	-
SEKRETARIAT DJPT	1.377.740.250	1.377.740.250	-
<b>Belanja Persediaan bahan baku</b>			
PPN KARANGANTU	41.248.000	41.248.000	-
PPN PELABUHAN RATU	18.764.550	18.764.550	-
PPN TELUK BATANG	300.000	300.000	-
PPS KENDARI	386.100	386.100	-
PPS NIZAM ZAHMAN	771.000	771.000	-
	<b>2.894.165.395</b>	<b>2.894.165.395</b>	

Beban Barang  
dan Jasa Rp  
111.274.877.036

#### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 111.274.877.036 dan Rp 107.363.247.133.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan terjadi Kenaikan Beban Barang dan Jasa, hal ini disebabkan peningkatan beberapa pos beban seperti beban langganan listrik, telepon/internet, beban jasa profesi, beban honor dan beban bahan seiring dengan meningkatnya aktivitas pelayanan dan diklat.

#### Belanja Barang & Jasa

No	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
1	Beban Keperluan Perkantoran	19.670.798.629	29.193.090.056	(32,62)
2	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	267.168.866	385.810.393	(30,75)
3	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	37.785.082	48.435.732	(21,99)
4	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.672.546.800	2.371.862.270	(29,48)
5	Beban Barang Operasional Lainnya	1.302.840.189	1.776.453.139	(26,66)
6	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	5.835.000	0,00
7	Beban Bahan	20.671.381.987	12.601.021.706	64,05
8	Beban Honor Output Kegiatan	1.624.033.000	2.462.428.166	(34,05)

9	Beban Barang Non Operasional Lainnya	747.599.695	1.048.110.997	(28,67)
10	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomtabel	0	2.500.000	0,00
11	Beban Langganan Listrik	7.863.413.905	7.817.187.597	0,59
12	Beban Langganan Telepon	610.584.354	445.997.361	36,90
13	Beban Langganan Air	1.249.096.415	771.228.283	61,96
14	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.531.427.125	518.795.080	195,19
15	Beban Jasa Pos dan Giro	214.500	2.444.500	(91,23)
16	Beban Jasa Konsultan	1.705.539.268	676.399.580	152,15
17	Beban Sewa	4.620.383.502	4.796.429.905	(3,67)
18	Beban Jasa Profesi	888.202.933	681.270.000	30,37
19	Beban Jasa Lainnya	46.810.754.786	41.630.636.418	12,44
20	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	105.500.000	0,00
21	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1.106.000	21.810.950	(94,93)
<b>JUMLAH</b>		<b>111.274.877.036</b>	<b>107.363.247.133</b>	<b>3,64</b>

## Beban Barang &amp; Jasa per satker

Nama Satker	Akrual	Kas	Selisih
<b>Belanja Keperluan Perkantoran</b>			
BBPPI	655.178.124	595.901.424	- 59.276.700
PPN AMBON	418.373.207	372.953.207	- 45.420.000
PPN BRONDONG	1.375.055.449	1.173.042.198	- 202.013.251
PPN KARANGANTU	1.487.688.026	1.393.963.026	- 93.725.000
PPN KEJAWANAN	457.624.399	420.962.767	- 36.661.632
PPN KWANDANG	466.887.821	415.521.821	- 51.366.000
PPN PEKALONGAN	202.949.295	191.000.290	- 11.949.005
PPN PELABUHAN RATU	411.209.448	359.963.448	- 51.246.000
PPN PEMANGKAT	341.078.204	305.252.204	- 35.826.000
PPN PENGAMBENGAN	470.547.716	412.983.216	- 57.564.500
PPN PRIGI	297.518.804	276.685.404	- 20.833.400
PPN SIBOLGA	386.363.065	344.780.605	- 41.582.460
PPN SUNGAILIAT	622.967.267	558.167.267	- 64.800.000
PPN TANJUNG PANDAN	693.281.917	605.581.917	- 87.700.000

PPN TELUK BATANG	303.190.352	280.488.414	22.701.938	-
PPN TERNATE	458.092.252	406.843.252	51.249.000	-
PPN TUAL	485.438.340	447.501.340	37.937.000	-
PPS BELAWAN	532.133.643	464.218.511	67.915.132	-
PPS BITUNG	499.887.940	444.641.440	55.246.500	-
PPS BUNGUS	121.388.903	108.154.403	13.234.500	-
PPS CILACAP	561.754.173	502.407.250	59.346.923	-
PPS KENDARI	590.277.323	528.456.823	61.820.500	-
PPS NIZAM ZAHMAN	3.212.237.637	3.210.254.337	1.983.300	-
SEKRETARIAT DJPT	4.619.675.324	4.301.744.777	317.930.547	-
<b>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</b>				
PPN KEJAWANAN	890.500	890.500	-	-
PPN PRIGI	12.009.500	12.009.500	-	-
PPN SIBOLGA	1.529.800	1.529.800	-	-
PPN TELUK BATANG	49.797.000	49.797.000	-	-
PPN TERNATE	20.815.000	20.815.000	-	-
PPN TUAL	22.487.400	17.831.400	4.656.000	-
PPS BELAWAN	24.242.166	24.242.166	-	-
PPS BITUNG	39.899.700	39.899.700	-	-
PPS CILACAP	70.686.400	70.686.400	-	-
PPS NIZAM ZAHMAN	24.811.400	24.636.400	175.000	-
<b>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</b>				
BBPPI	618.720	579.720	39.000	-
PPN AMBON	437.000	437.000	-	-
PPN BRONDONG	432.600	432.600	-	-
PPN KARANGANTU	223.500	223.500	-	-
PPN KEJAWANAN	1.263.500	1.263.500	-	-
PPN PELABUHAN RATU	464.000	334.000	130.000	-
PPN PEMANGKAT	228.000	228.000	-	-
PPN PENGAMBENGAN	636.400	636.400	-	-
PPN PRIGI	1.258.500	1.258.500	-	-
PPN SIBOLGA	3.146.000	3.146.000	-	-
PPN SUNGAILIAT	1.429.580	1.489.080	59.500	-
PPN TANJUNG PANDAN	506.000	506.000	-	-

PPN TELUK BATANG	2.030.100	2.030.100	-
PPN TERNATE	3.538.000	3.538.000	-
PPN TUAL	417.000	417.000	-
PPS BELAWAN	2.595.300	1.597.800	997.500
PPS BITUNG	314.000	314.000	-
PPS BUNGUS	324.300	324.300	-
PPS CILACAP	196.000	196.000	-
PPS KENDARI	3.701.168	4.099.198	398.030
SEKRETARIAT DJPT	14.025.414	14.025.414	-
<b>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</b>			
BBPPI	50.632.000	42.148.000	8.484.000
KALTIMTP	30.600.000	30.600.000	-
PPN AMBON	42.508.000	42.508.000	-
PPN BRONDONG	46.050.000	46.050.000	-
PPN KARANGANTU	43.430.000	43.430.000	-
PPN KEJAWANAN	38.752.000	38.752.000	-
PPN KWANDANG	47.582.000	47.582.000	-
PPN PEKALONGAN	45.070.000	45.070.000	-
PPN PELABUHAN RATU	43.610.000	43.610.000	-
PPN PEMANGKAT	47.080.000	47.080.000	-
PPN PENGAMBENGAN	35.316.000	35.316.000	-
PPN PRIGI	44.528.000	44.528.000	-
PPN SIBOLGA	41.568.000	41.568.000	-
PPN SUNGAILIAT	31.850.000	31.850.000	-
PPN TANJUNG PANDAN	43.724.000	43.724.000	-
PPN TELUK BATANG	37.760.000	37.760.000	-
PPN TERNATE	46.220.000	46.220.000	-
PPN TUAL	49.145.000	49.145.000	-
PPS BELAWAN	41.640.000	41.640.000	-
PPS BITUNG	49.640.000	49.640.000	-
PPS BUNGUS	32.544.000	32.544.000	-
PPS CILACAP	42.200.000	42.200.000	-
PPS KENDARI	54.258.000	54.258.000	-
PPS NIZAM ZAHMAN	60.748.800	60.748.800	-
PROV. BANTEN TP	9.000.000	9.000.000	-
PROV. BENGKULU TP	11.300.000	11.300.000	-
PROV. D.I. ACEH TP	12.168.000	12.168.000	-
PROV. D.I. YOGYAKARTA TP		-	-
PROV. DKI TP	5.213.000	-	5.213.000
PROV. GORONTALO TP	8.750.000	8.750.000	-

PROV. JAMBI TP		-	-
PROV. JAWA BARAT TP	15.960.000	10.640.000	5.320.000
PROV. JAWA TENGAH TP	6.300.000	6.300.000	-
PROV. KALIMANTAN SELATAN TP	13.000.000	13.000.000	-
PROV. KEPULAUAN RIAU TP	10.350.000	6.900.000	3.450.000
PROV. LAMPUNG TP	8.680.000	6.510.000	2.170.000
PROV. MALUKU TP	16.650.000	16.650.000	-
PROV. MALUKU UTARA TP	14.750.000	-	14.750.000
PROV. NUSA TENGGARA BARAT TP	14.250.000	14.250.000	-
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR TP	14.750.000	14.750.000	-
PROV. PAPUA	10.200.000	-	10.200.000
PROV. RIAU TP	11.184.000	11.184.000	-
PROV. SULAWESI BARAT TP	5.310.000	5.310.000	-
PROV. SULAWESI SELATAN TP	12.500.000	12.500.000	-
PROV. SULAWESI TENGAH TP	20.350.000	18.250.000	2.100.000
PROV. SULAWESI TENGGARA TP	12.630.000	12.630.000	-
PROV. SULAWESI UTARA TP	9.800.000	9.800.000	-
PROV. SUMATERA SELATAN TP		-	-
PROV. SUMATERA UTARA TP	5.586.000	5.586.000	-
SEKRETARIAT DJPT	377.410.000	377.410.000	-
#N/A		-	-
<b>Belanja Barang Operasional Lainnya</b>			
BBPPI	62.162.500	62.162.500	-
PPN AMBON	51.423.000	51.423.000	-
PPN BRONDONG	49.675.800	49.675.800	-
PPN KARANGANTU	102.391.700	102.391.700	-
PPN KEJAWANAN	79.487.049	77.097.049	2.390.000
PPN KWANDANG	142.741.018	142.741.018	-
PPN PEKALONGAN	11.250.000	11.250.000	-
PPN PEMANGKAT	7.430.000	7.430.000	-
PPN PRIGI	3.300.000	3.300.000	-

PPN TANJUNG PANDAN	4.924.825	4.924.825	-
PPN TELUK BATANG	38.594.250	38.594.250	-
PPN TERNATE	82.466.182	82.226.182	240.000
PPS BUNGUS	65.516.640	65.516.640	-
PPS CILACAP	55.454.250	55.454.250	-
PPS KENDARI	318.308.300	303.321.300	14.987.000
PPS NIZAM ZAHMAN	63.070.000	63.070.000	-
SEKRETARIAT DJPT	164.644.675	164.644.675	-
<b>Belanja Bahan</b>			
BBPPI	172.849.046	171.624.046	1.225.000
KALTIMTP	2.249.800	2.249.800	-
PPN AMBON	109.331.485	108.655.375	676.110
PPN BRONDONG	131.001.543	130.001.543	1.000.000
PPN KARANGANTU	95.385.400	95.385.400	-
PPN KEJAWANAN	353.026.218	349.655.718	3.370.500
PPN KWANDANG	142.377.207	140.784.707	1.592.500
PPN PEKALONGAN	185.260.600	185.260.600	-
PPN PELABUHAN RATU	146.566.700	139.858.700	6.708.000
PPN PEMANGKAT	82.780.500	53.083.900	29.696.600
PPN PENGAMBENGAN	95.528.500	92.648.500	2.880.000
PPN PRIGI	103.270.489	103.270.489	-
PPN SIBOLGA	104.831.520	104.831.520	-
PPN SUNGAILIAT	75.050.900	55.751.900	19.299.000
PPN TANJUNG PANDAN	46.491.097	46.491.097	-
PPN TELUK BATANG	49.964.000	49.964.000	-
PPN TERNATE	53.931.000	53.431.000	500.000
PPN TUAL		-	-
PPS BELAWAN	73.571.372	62.449.122	11.122.250
PPS BITUNG	154.956.850	140.746.850	14.210.000
PPS BUNGUS	88.961.610	85.069.110	3.892.500
PPS CILACAP	179.263.600	179.263.600	-
PPS KENDARI	191.116.745	190.416.745	700.000

PPS NIZAM ZAHMAN	276.825.850	252.011.850	- 24.814.000
PROV. BANTEN TP	1.470.000	1.230.000	- 240.000
PROV. BENGKULU TP	5.810.000	3.460.000	- 2.350.000
PROV. GORONTALO TP	2.525.000	2.525.000	-
PROV. JAWA BARAT TP	26.907.000	25.607.000	- 1.300.000
PROV. JAWA TENGAH TP	25.445.000	-	- 25.445.000
PROV. KALIMANTAN SELATAN TP		-	-
PROV. KEPULAUAN RIAU TP	26.485.500	21.947.000	- 4.538.500
PROV. LAMPUNG TP	42.580.000	36.470.000	- 6.110.000
PROV. MALUKU TP	2.400.000	2.400.000	-
PROV. NUSA TENGGARA BARAT TP	5.332.000	5.332.000	-
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR TP	16.845.000	3.885.000	- 12.960.000
PROV. RIAU TP	12.423.000	12.423.000	-
PROV. SULAWESI BARAT TP	15.524.000	15.524.000	-
PROV. SULAWESI SELATAN TP	12.430.000	11.430.000	- 1.000.000
PROV. SULAWESI TENGGARA TP	10.582.000	10.582.000	-
PROV. SULAWESI UTARA TP	17.528.000	16.118.000	- 1.410.000
PROV. SUMATERA UTARA TP		-	-
SEKRETARIAT DJPT	17.532.503.455	16.458.081.205	- 1.074.422.250
<b>Belanja Honor Output Kegiatan</b>			
KALTIMTP	26.920.000	26.920.000	-
PPN AMBON	4.700.000	4.700.000	-
PPN BRONDONG	6.100.000	6.100.000	-
PPN KARANGANTU	4.950.000	4.950.000	-
PPN KEJAWANAN	23.100.000	22.800.000	- 300.000
PPN KWANDANG	3.800.000	3.800.000	-
PPN PEKALONGAN	18.600.000	18.600.000	-
PPN PELABUHAN RATU	12.950.000	12.950.000	-
PPN PEMANGKAT	8.350.000	7.350.000	- 1.000.000

PPN PENGAMBENGAN	66.325.000	64.925.000	- 1.400.000
PPN PRIGI	8.788.000	8.788.000	-
PPN SIBOLGA	7.200.000	7.200.000	-
PPN SUNGAILIAT	5.320.000	5.320.000	-
PPN TANJUNG PANDAN	9.350.000	9.350.000	-
PPN TELUK BATANG	6.000.000	6.000.000	-
PPN TERNATE	2.800.000	2.800.000	-
PPS BELAWAN	5.350.000	3.600.000	- 1.750.000
PPS BITUNG	9.900.000	8.900.000	- 1.000.000
PPS CILACAP	41.150.000	41.150.000	-
PPS KENDARI	20.700.000	20.700.000	-
PPS NIZAM ZAHMAN	83.200.000	82.000.000	- 1.200.000
PROV. BANTEN TP	19.080.000	4.770.000	- 14.310.000
PROV. BENGKULU TP	26.950.000	25.400.000	- 1.550.000
PROV. D.I. ACEH TP	85.200.000	85.200.000	-
PROV. D.I. YOGYAKARTA TP		-	-
PROV. DKI TP		-	-
PROV. GORONTALO TP	18.000.000	18.000.000	-
PROV. JAMBI TP		-	-
PROV. JAWA BARAT TP	115.200.000	115.200.000	-
PROV. JAWA TENGAH TP	170.000.000	170.000.000	-
PROV. KALIMANTAN SELATAN TP	22.800.000	22.800.000	-
PROV. LAMPUNG TP	50.600.000	36.800.000	- 13.800.000
PROV. MALUKU UTARA TP	33.000.000	-	- 33.000.000
PROV. NUSA TENGGARA BARAT TP	40.800.000	40.800.000	-
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR TP	87.000.000	87.000.000	-
PROV. RIAU TP	25.200.000	25.200.000	-
PROV. SULAWESI BARAT TP	14.700.000	14.700.000	-
PROV. SULAWESI SELATAN TP	160.750.000	160.750.000	-
PROV. SULAWESI TENGAH TP	25.200.000	-	- 25.200.000

PROV. SULAWESI TENGGARA TP		-	-
PROV. SULAWESI UTARA TP	50.500.000	50.500.000	-
PROV. SUMATERA SELATAN TP		-	-
PROV. SUMATERA UTARA TP	80.100.000	80.100.000	-
SEKRETARIAT DJPT	223.400.000	223.400.000	-
#N/A		-	-
<b>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</b>			
PPN AMBON	13.760.000	13.760.000	-
PPN BRONDONG	19.006.650	19.006.650	-
PPN KEJAWANAN	67.482.220	66.702.220	780.000
PPN KWANDANG	44.314.000	44.314.000	-
PPN PELABUHAN RATU	91.106.240	89.673.740	1.432.500
PPN PENGAMBENGAN	83.180.800	83.180.800	-
PPN PRIGI	7.625.000	7.625.000	-
PPN SIBOLGA	105.673.010	105.673.010	-
PPN SUNGAILIAT	1.800.000	1.800.000	-
PPN TANJUNG PANDAN	6.883.500	6.883.500	-
PPN TELUK BATANG	35.204.000	35.204.000	-
PPN TERNATE	52.704.000	52.704.000	-
PPS BITUNG	2.997.000	2.997.000	-
PPS CILACAP	33.380.000	33.380.000	-
PPS KENDARI	160.190.800	156.128.900	4.061.900
SEKRETARIAT DJPT	22.292.475	22.292.475	-
<b>Belanja Langganan Listrik</b>			
BBPPI	286.024.505	331.264.758	45.240.253
PPN AMBON	169.185.960	198.225.485	29.039.525
PPN BRONDONG	451.068.791	548.112.222	97.043.431
PPN KARANGANTU	356.122.693	443.034.924	86.912.231
PPN KEJAWANAN	384.270.810	480.689.819	96.419.009
PPN KWANDANG	332.648.939	406.033.705	73.384.766
PPN PEKALONGAN	82.941.603	100.764.465	17.822.862
PPN PELABUHAN RATU	388.963.211	468.476.658	79.513.447
PPN PEMANGKAT	97.184.869	117.030.788	19.845.919
PPN PENGAMBENGAN	231.678.569	280.142.080	48.463.511
PPN PRIGI	224.429.724	267.973.309	43.543.585
PPN SIBOLGA	328.697.289	385.651.256	56.953.967
PPN SUNGAILIAT	187.127.470	227.244.241	40.116.771

PPN TANJUNG PANDAN	134.273.162	164.016.192	29.743.030
PPN TELUK BATANG	87.327.771	105.686.366	18.358.595
PPN TERNATE	546.955.640	673.445.845	126.490.205
PPN TUAL	75.471.743	93.007.296	17.535.553
PPS BELAWAN	109.559.638	107.501.171	- 2.058.467
PPS BITUNG	209.737.612	253.312.006	43.574.394
PPS BUNGUS	454.174.443	566.668.779	112.494.336
PPS CILACAP	488.054.154	408.773.000	- 79.281.154
PPS KENDARI	806.108.501	979.764.776	173.656.275
PPS NIZAM ZAHMAN	642.767.719	782.948.955	140.181.236
SEKRETARIAT DJPT	788.639.089	788.639.089	-
<b>Belanja Langganan Telepon</b>			
BBPPI	66.913.598	69.010.665	2.097.067
PPN AMBON	1.122.590	1.348.373	225.783
PPN BRONDONG	361.300	400.075	38.775
PPN KEJAWANAN	517.962	790.787	272.825
PPN KWANDANG	49.976.122	49.976.122	-
PPN PEKALONGAN	61.392.854	62.354.538	961.684
PPN PELABUHAN RATU	29.531.451	30.034.257	502.806
PPN PEMANGKAT	612.428	734.491	122.063
PPN PENGAMBENGAN	105.359.761	107.457.507	2.097.746
PPN PRIGI	496.200	595.440	99.240
PPN SIBOLGA	1.850.584	1.850.584	-
PPN SUNGAILIAT	96.414.738	76.316.238	- 20.098.500
PPN TANJUNG PANDAN	14.281.872	17.080.689	2.798.817
PPN TELUK BATANG	23.477.206	27.549.399	4.072.193
PPN TERNATE	13.422.213	16.119.475	2.697.262
PPS BELAWAN	192.025	198.830	6.805
PPS BITUNG	354.073	354.073	-
PPS BUNGUS	21.319.212	27.683.606	6.364.394
PPS CILACAP	415.584	415.584	-
PPS KENDARI	53.309.013	53.309.013	-
PPS NIZAM ZAHMAN	555.000	444.000	- 111.000
PROV. NUSA TENGGARA BARAT TP	3.572.000	3.572.000	-
SEKRETARIAT DJPT	65.136.568	65.136.568	-
<b>Belanja Langganan Air</b>			
BBPPI	975.020	1.333.520	358.500
PPN BRONDONG	133.691.314	196.412.281	62.720.967

PPN KARANGANTU	78.707.500	87.875.000	9.167.500
PPN KEJAWANAN	358.540.585	599.433.790	240.893.205
PPN KWANDANG	25.755.400	27.326.400	1.571.000
PPN PEKALONGAN	3.436.860	3.436.860	-
PPN PELABUHAN RATU	22.568.600	27.727.520	5.158.920
PPN PEMANGKAT	2.402.400	2.422.400	20.000
PPN PENGAMBENGAN	12.828.020	13.249.900	421.880
PPN PRIGI	38.661.945	47.355.535	8.693.590
PPN SIBOLGA	216.862.880	253.410.210	36.547.330
PPN SUNGAILIAT	9.886.918	9.886.918	-
PPN TUAL	3.720.000	3.720.000	-
PPS CILACAP	29.634.500	25.514.300	4.120.200
PPS NIZAM ZAHMAN	225.507.876	292.976.451	67.468.575
SEKRETARIAT DJPT	85.916.597	85.916.597	-
<b>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</b>			
PPN AMBON	43.309.540	51.439.990	8.130.450
PPN BRONDONG	28.962.768	31.892.213	2.929.445
PPN KARANGANTU	27.719.404	33.539.366	5.819.962
PPN KEJAWANAN	33.045.643	37.909.614	4.863.971
PPN KWANDANG	2.500.000	2.500.000	-
PPN PEKALONGAN	8.331.784	8.331.784	-
PPN PELABUHAN RATU	2.981.651	2.981.651	-
PPN PEMANGKAT	20.827.530	23.543.200	2.715.670
PPN SIBOLGA	36.623.457	36.623.457	-
PPN TANJUNG PANDAN	3.669.430	3.669.430	-
PPS BELAWAN	54.149.140	45.587.649	8.561.491
PPS BITUNG	66.379.090	66.379.090	-
PPS CILACAP	170.241.218	170.241.218	-
PPS KENDARI	1.615.470	1.615.470	-
PPS NIZAM ZAHMAN	1.031.071.000	857.677.900	173.393.100
<b>Belanja Jasa Pos dan Giro</b>			
PPN PEKALONGAN	214.500	214.500	-
<b>Belanja Jasa Konsultan</b>			
PPN AMBON	24.950.000	24.950.000	-
PPN TANJUNG PANDAN	60.000.000	60.000.000	-
PPS CILACAP	95.515.000	95.515.000	-
PPS NIZAM ZAHMAN	65.351.250	-	65.351.250
SEKRETARIAT DJPT	1.459.723.018	1.459.723.018	-
<b>Belanja Sewa</b>			

BBPPI	19.260.000	18.710.000	- 550.000
PPN AMBON	178.500.000	178.500.000	-
PPN KEJAWANAN	63.398.500	63.398.500	-
PPN KWANDANG	30.168.000	30.168.000	-
PPN PEKALONGAN	5.300.000	5.300.000	-
PPN PENGAMBENGAN	134.370.000	134.370.000	-
PPN SIBOLGA	4.200.000	4.200.000	-
PPN TANJUNG PANDAN	200.000	200.000	-
PPN TERNATE	101.000.000	101.000.000	-
PPS BELAWAN	198.900.000	197.800.000	- 1.100.000
PPS BUNGUS	12.125.000	2.450.000	- 9.675.000
PPS NIZAM ZAHMAN	120.561.000	120.561.000	-
SEKRETARIAT DJPT	3.752.401.002	3.752.401.002	-
<b>Belanja Jasa Profesi</b>			
BBPPI	41.700.000	41.700.000	-
PPN BRONDONG	1.800.000	1.800.000	-
PPN PEKALONGAN	700.000	700.000	-
PPN PELABUHAN RATU	900.000	900.000	-
PPN PEMANGKAT	11.800.000	11.800.000	-
PPN PENGAMBENGAN	1.800.000	1.800.000	-
PPN PRIGI	10.800.000	10.800.000	-
PPN SIBOLGA	5.600.000	5.600.000	-
PPN TANJUNG PANDAN	2.200.000	2.200.000	-
PPS BELAWAN	7.400.000	4.400.000	- 3.000.000
PPS BITUNG	4.500.000	4.500.000	-
PPS CILACAP	20.200.000	20.200.000	-
PPS KENDARI	3.600.000	3.600.000	-
PPS NIZAM ZAHMAN	6.300.000	6.300.000	-
PROV. BENGKULU TP	1.600.000		- 1.600.000
PROV. JAWA BARAT TP	2.400.000	1.650.000	- 750.000
PROV. KALIMANTAN SELATAN TP		-	-
PROV. LAMPUNG TP	9.700.000	9.700.000	-
PROV. NUSA TENGGARA BARAT TP	1.600.000	1.600.000	-
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR TP	4.300.000	2.500.000	- 1.800.000

PROV. RIAU TP	5.000.000	5.000.000	-
PROV. SULAWESI BARAT TP		-	-
PROV. SULAWESI SELATAN TP	4.650.000	4.650.000	-
PROV. SULAWESI TENGGERA TP	3.200.000	3.200.000	-
PROV. SULAWESI UTARA TP	3.600.000	3.600.000	-
SEKRETARIAT DJPT	732.852.933	728.352.933	- 4.500.000
<b>Belanja Jasa Lainnya</b>			
BBPPI	1.144.101.968	1.139.101.968	- 5.000.000
PPN AMBON	674.998.670	674.998.670	-
PPN KARANGANTU	3.757.500	3.757.500	-
PPN KEJAWANAN	1.463.209.529	1.433.173.369	- 30.036.160
PPN KWANDANG	612.200.916	563.747.295	- 48.453.621
PPN PEKALONGAN	688.899.800	688.899.800	-
PPN PELABUHAN RATU	1.211.381.548	1.210.181.548	- 1.200.000
PPN PEMANGKAT	430.251.411	430.251.411	-
PPN PENGAMBENGAN	859.522.254	849.922.254	- 9.600.000
PPN PRIGI	518.527.250	509.575.650	- 8.951.600
PPN SIBOLGA	444.463.700	444.463.700	-
PPN SUNGAILIAT	959.444.829	901.204.829	- 58.240.000
PPN TANJUNG PANDAN	24.176.631	24.176.631	-
PPN TELUK BATANG	509.865.906	432.923.755	- 76.942.151
PPN TERNATE	744.191.743	744.191.743	-
PPN TUAL	496.768.028	495.854.565	- 913.463
PPS BELAWAN	782.755.186	675.455.827	- 107.299.359
PPS BITUNG	1.852.090.520	1.852.090.520	-
PPS BUNGUS	775.718.049	745.939.948	- 29.778.101
PPS CILACAP	1.036.757.500	1.036.757.500	-
PPS KENDARI	910.446.979	910.446.979	-
PPS NIZAM ZAHMAN	1.463.374.879	1.366.454.879	- 96.920.000
SEKRETARIAT DJPT	29.203.849.990	17.405.665.731	- 11.798.184.259
<b>Belanja Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin</b>			

PPN PENGAMBENGAN	1.106.000		- 1.106.000
	<b>111.274.877.036</b>	<b>97.526.053.618</b>	<b>- 13.748.823.418</b>

1. Sebagian besar selisih antara LO dan LRA disebabkan oleh pengajuan proses pembayaran yang dilakukan pada periode Juni 2024 namun sp2dnya terbit pada periode Juli 2024
2. Pada PPN Pengambengan selisih disebabkan oleh kesalahan system aplikasi sakti modul komitmen dan glp.

Beban  
Pemeliharaan Rp  
17.358.659.723

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 17.358.659.723 dan Rp 17.974.641.141.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan.

No	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.289.875.532	6.998.098.901	(10,12)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	423.136.850	465.703.680	(9,14)
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.053.696.390	7.498.144.978	7,41
4	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	637.109.375	1.053.944.403	(39,55)
5	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	285.351.776	500.306.680	(42,96)
6	Beban Pemeliharaan Irigasi	206.905.234	276.855.731	(25,27)
7	Beban Pemeliharaan Jaringan	1.357.279.088	831.295.724	63,27
8	Beban Pemeliharaan Lainnya	0	188.045.000	0,00
9	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	31.938.320	100.251.460	(68,14)
10	Beban Persediaan suku cadang	24.846.708	11.493.009	116,19
11	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	48.520.450	50.501.575	(3,92)
<b>JUMLAH</b>		<b>17.358.659.723</b>	<b>17.974.641.141</b>	<b>(3,43)</b>

Beban Pemeliharaan per satker

AKUN	NAMA AKUN	NAMA SATKER	TOTAL
523111	Beban Pemeliharaan	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	2.620.489.961

	Gedung dan Bangunan		
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	98.611.000
		BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	198.611.283
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	158.107.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	126.935.937
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	326.355.155
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	239.611.180
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	96.927.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	198.801.630
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	752.650.424
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	232.595.200
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	107.427.720
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	186.681.000
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	42.999.180
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	40.157.900
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	63.774.362
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	52.866.050
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	69.584.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	44.744.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	204.576.147
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	146.515.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	172.831.603
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	108.022.800
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Total			6.289.875.532
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	386.043.000
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	11.278.850
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	25.815.000
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Total			423.136.850

523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1.786.246.809
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	444.445.184
		BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	270.141.413
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	444.202.990
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	187.762.431
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	169.507.698
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	143.393.868
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	63.950.430
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	162.464.113
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	244.183.707
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	91.581.143
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	274.128.066
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	184.818.077
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	285.749.329
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	245.519.321
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	1.403.310.427
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	372.921.661
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	393.361.378
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	133.525.432
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	147.100.540
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	133.849.500
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	121.201.432
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	188.761.892
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	161.569.549
		<b>Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Total</b>	<b>8.053.696.390</b>
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	574.294.369
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	30.178.686

		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	28.960.000
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	3.676.320
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Total			637.109.375
523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	1.607.000
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	143.045.551
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	9.301.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	22.752.475
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	49.897.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	32.165.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	24.910.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	1.673.750
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Total			285.351.776
523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	54.804.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	24.499.794
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	24.880.800
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	13.402.140
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	32.556.400
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	11.702.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	15.132.500
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	24.675.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	5.252.600
Beban Pemeliharaan Irigasi Total			206.905.234
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	83.224.312
		BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	13.355.170
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	87.959.650
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	66.896.276
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	14.991.257
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	35.474.800

		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	12.709.600
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	26.326.125
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	86.946.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	17.278.530
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	28.781.570
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	64.703.594
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	48.880.000
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	223.427.960
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	100.179.700
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	53.553.525
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	50.374.870
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	104.347.510
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	16.918.200
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	87.140.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	45.145.365
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	55.818.074
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	32.847.000
Beban Pemeliharaan Jaringan Total			1.357.279.088
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	472.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	59.500
		BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	677.720
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	38.850
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	626.600
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	19.072.500
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	10.991.150
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan Total			31.938.320
593114	Beban Persediaan suku cadang	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	9.027.889
		BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	266.424

		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	15.552.395
Beban Persediaan suku cadang Total			24.846.708
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	48.520.450
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan Total			48.520.450

Beban Perjalanan  
Dinas Rp  
57.383.330.021

## D.5 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 57.383.330.021 dan Rp 48.334.998.459.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan adanya penghematan dan kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana karena suatu hal.

No	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	38.497.144.269	31.204.527.644	23,37
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	481.926.180	619.622.341	(22,22)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.945.014.416	3.877.035.479	79,13
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.581.351.976	11.661.522.942	(17,84)
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1.536.950.745	541.516.762	183,82
6	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	340.942.435	430.773.291	(20,85)
<b>JUMLAH</b>		<b>57.383.330.021</b>	<b>48.334.998.459</b>	<b>18,72</b>

## Beban Pemeliharaan per satker

AKUN	NAMA AKUN	NAMA SATKER	TOTAL
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	34.789.550
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	21.849.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	15.025.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	49.078.500
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	28.781.200
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	24.513.000
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	12.998.374

		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	40.174.350
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	7.170.000
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	33.294.000
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	16.300.000
		SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	30.758.267.392
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	37.563.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	178.983.183
		BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	764.824.545
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	233.013.942
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	100.790.848
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	223.620.343
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	260.967.200
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	272.201.100
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	43.220.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	22.570.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	9.000.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	268.444.078
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	31.680.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	59.947.842
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	36.464.910
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	367.025.250
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	181.378.777
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	174.965.973
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	187.222.016
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	435.440.323
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	394.486.961
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	419.760.576
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	522.717.763

		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	178.413.280
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	308.340.414
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	82.692.087
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	366.179.521
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	483.051.376
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	2.684.200
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	430.766.847
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	376.487.548
Beban Perjalanan Dinas Biasa Total			38.497.144.269
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	3.000.000
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.950.000
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	300.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	4.170.000
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	450.000
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	750.000
		SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	157.732.680
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	900.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	8.200.000
		BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	77.423.500
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	4.000.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	12.165.000
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2.400.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	38.350.000
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	750.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	4.350.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	450.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	7.440.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	8.250.000

		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	5.250.000
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	6.750.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	2.100.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	4.200.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	5.250.000
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	12.200.000
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	44.400.000
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	29.550.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	16.500.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	255.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	1.740.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	16.500.000
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	4.200.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Total			481.926.180
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	16.000.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	20.000.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	18.420.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	6.000.000
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	10.720.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	7.750.000
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	24.151.400
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	19.230.000
		SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	6.325.786.117
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	5.300.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	33.850.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	18.000.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	7.650.000

		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	22.500.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	12.000.000
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	10.500.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	4.500.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	30.820.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	12.300.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	3.000.000
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	12.000.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	15.900.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	42.000.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	21.000.000
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	14.280.000
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	3.750.000
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	29.085.428
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	5.000.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	61.800.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	26.400.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	4.500.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	15.575.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	12.646.471
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	39.600.000
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	33.000.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Total			6.945.014.416
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	40.820.400
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	10.691.500
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	39.260.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	28.427.500

		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	31.103.255
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	43.448.600
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	24.704.920
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	22.651.324
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	16.633.400
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	23.168.300
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	22.591.000
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	53.140.000
		SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	6.482.654.947
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	37.773.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	53.059.032
		BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	20.047.350
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	74.159.719
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	88.506.406
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	111.141.951
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	144.026.400
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	127.158.400
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	54.500.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	21.792.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	24.600.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	18.000.000
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	34.878.575
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	51.201.000
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	44.568.784
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	33.000.000
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	89.890.481
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	126.789.177
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	121.478.697

		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	114.527.789
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	82.879.802
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	77.198.765
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	36.827.820
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	129.288.934
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	108.310.687
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	159.075.112
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	257.972.676
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	206.764.552
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	31.324.060
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	28.850.711
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	50.318.217
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	182.146.733
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Total			9.581.351.976
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1.510.473.145
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	26.477.600
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri Total			1.536.950.745
524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	340.942.435
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri Total			340.942.435

*Beban Barang  
Untuk Diserahkan  
kepada  
Masyarakat Rp  
4.416.284.286*

## **D.6 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 4.416.284.286 dan Rp 4.938.682.753.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat (nelayan) berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan.

No	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
1	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	5.000.000	0	100,00
2	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	299.395.000	0	100,00
3	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	4.111.655.630	4.938.682.753	(16,75)
4	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	233.656	0	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.416.284.286</b>	<b>4.938.682.753</b>	<b>(10,58)</b>

#### Beban per satker

AKUN	NAMA AKUN	NAMA SATKER	TOTAL
593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	5.000.000
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges Total			5.000.000
593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	299.395.000
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Total			299.395.000
593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	4.111.655.630
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Total			4.111.655.630
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	233.656
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat Total			233.656

Beban Bantuan Sosial Rp 0

#### D.7 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

No	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Beban per satker

AKUN	NAMA AKUN	NAMA SATKER	TOTAL
		Total	0

Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi Rp  
116.260.730.602

## D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 116.260.730.602 dan Rp 134.411.509.214.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

No	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	18.523.730.398	22.225.100.736	(16,65)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.320.576.606	9.950.315.876	(6,33)
3	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	60.162.601.139	60.659.382.525	(0,82)
4	Beban Penyusutan Irigasi	23.361.199.525	37.422.953.463	(37,58)
5	Beban Penyusutan Jaringan	2.967.226.739	3.019.112.028	(1,72)
6	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	14.769.333	14.769.333	0,00
7	Beban Penyusutan Properti Investasi	1.186.136.775	0	100,00
8	Beban Amortisasi Software	71.262.125	39.671.250	79,63
9	Beban Amortisasi Lisensi	9.900.000	9.900.000	0,00
10	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	643.327.962	1.070.304.003	(39,89)
	<b>JUMLAH</b>	<b>116.260.730.602</b>	<b>134.411.509.214</b>	<b>(13,50)</b>

Beban per satker

AKUN	NAMA AKUN	NAMA SATKER	TOTAL
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	85.496.860

		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	16.558.920
		SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	7.115.337.200
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	406.959.424
		BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	189.852.671
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	330.740.038
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	222.294.179
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	236.814.529
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	156.377.597
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	246.024.252
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	4.793.120
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	227.203.011
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	71.111
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	1.303.944.828
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	391.531.868
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	290.963.791
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	337.637.523
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	692.453.127
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	258.002.904
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	2.063.793.208
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	1.006.721.465
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	374.195.202
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	430.158.881
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	413.364.382
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	165.926.877
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	648.563.695
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	461.345.442
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	446.604.293
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Total			18.523.730.398
591211	Beban Penyusutan	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	6.041.024

	Gedung dan Bangunan		
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	6.038.312
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	60.471.067
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	154.184
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	46.952.461
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	10.331.893
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	13.062.766
		SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1.288.916.982
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	257.209.652
		BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	324.261.760
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	260.426.066
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	193.334.581
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	567.022.820
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	207.729.751
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	104.923.817
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	26.452.240
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	57.221.030
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	2.286.227
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	134.061.919
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	14.453.975
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	30.480.803
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	142.755.868
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	244.508.237
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	382.798.690
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	358.560.484
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	601.372.410
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	358.123.925
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	916.686.646

		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	386.217.250
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	334.425.115
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	289.272.809
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	460.818.993
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	302.469.284
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	282.174.961
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	262.431.767
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	386.126.837
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Total			9.320.576.606
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	61.858.793
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	18.646.740
		SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	5.255.175.006
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	1.158.579.595
		BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	54.379.254
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	332.351.300
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	154.736.936
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	322.338.172
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	226.259.899
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	405.826.304
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	5.515.250
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	310.003.358
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	7.176.140
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	253.051.356
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	728.492.937
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	612.325.659
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	724.475.000
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	185.790.491
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	1.528.176.179

		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	252.454.649
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	140.283.984
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	754.711.189
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	133.111.594
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	43.763.490.986
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	970.195.856
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	726.794.925
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	1.076.399.587
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan Total			60.162.601.139
591312	Beban Penyusutan Irigasi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	1.574.308
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	8.220.515
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.160.211
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	462.638
		SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	8.023.245.741
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	2.490.944
		BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	1.006.508
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	340.678.305
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	199.734.697
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	61.965.877
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	81.124.766
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	250.729.359
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	15.454.854
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	17.733.499
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	4.442.106
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	1.684.951.051
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	230.919.810
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	4.655.336.999
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	123.930.348

		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	1.680.656.837
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	1.074.837.419
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	868.503.338
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	735.271.807
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	38.572.040
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	386.557.524
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	123.358.865
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	93.336.719
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	754.698.625
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	1.891.725.643
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	8.518.172
Beban Penyusutan Irigasi Total			23.361.199.525
591313	Beban Penyusutan Jaringan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.597.500
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	1.276.779
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2.077.995
		SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	623.704.292
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	84.896.103
		BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	63.089.012
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	193.121.370
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	122.019.374
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	27.203.812
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	70.315.740
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	133.058.430
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	11.212.024
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	28.378.272
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	5.913.518
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	35.768.962
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	184.814.146

		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	364.208.951
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	82.897.868
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	312.308.903
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	382.872.172
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	24.410.814
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	26.706.359
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	14.920.433
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	5.620.367
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	122.763.003
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	27.071.790
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	14.998.750
Beban Penyusutan Jaringan Total			2.967.226.739
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	14.769.333
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Total			14.769.333
591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	14.268.461
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	445.935
		SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	23.187.279
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	12.578.592
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	92.442.763
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	6.102.247
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	27.650.041
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	21.600.394
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	7.060.484
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	12.464.332
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	1.942.079
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	50.023.150
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	50.547.442

		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	31.718.394
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	9.588.092
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	194.061.456
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	315.927.422
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	132.679.592
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	11.663.405
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	99.708.467
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	26.804.094
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	43.672.654
Beban Penyusutan Properti Investasi Total			1.186.136.775
592115	Beban Amortisasi Software	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	44.415.625
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	19.830.875
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	7.015.625
Beban Amortisasi Software Total			71.262.125
592116	Beban Amortisasi Lisensi	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	9.900.000
Beban Amortisasi Lisensi Total			9.900.000
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	10.115.345
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3.030.398
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	1.095.061
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	2.431.652
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	3.344.782
		SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	12.553.722
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	6.469.256
		BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	31.666
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	34.585.666

		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	2.565.279
		PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	7.522.915
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	923.771
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	17.229.180
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	154.167
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	435.469
		DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	1.087.979
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	14.139.838
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	213.100
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	2.707.963
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	488.492.678
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	17.401.966
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	1.853.433
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	12.901.259
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	1.822.792
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	218.625
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah Total			643.327.962

*Beban Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih Rp  
(1.258.310.235)*

### **D.9 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp (1.258.310.235) dan Rp (805.981).

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

No	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023	%
1	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	-1.258.302.712	-740.329	169.865,34
2	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	-7.523	-65.652	(88,54)
<b>JUMLAH</b>		<b>-1.258.310.235</b>	<b>-805.981</b>	<b>156.021,58</b>

Beban per satker

AKUN	NAMA AKUN	NAMA SATKER	TOTAL
594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBPN	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	-79.004
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	-97.924.300
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	-775.866
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	19.905.104
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	-29.503
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	-1.170.667.528
		PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	-8.724.835
		PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	-6.780
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBPN Total			-1.258.302.712
594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	-7.523
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya Total			-7.523

*Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional Rp (7.818.203.349)*

#### **D.10 Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional**

Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp (7.818.203.349) dan Rp (11.649.728.994).

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Neraca Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

*Ekuitas Awal Rp  
5.802.866.832.042*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 5.802.866.832.042 dan Rp 5.986.784.264.050. Tidak terdapat perubahan antara saldo audited dan ekuitas awal pada TA 2024.

*Surplus/Defisit LO Rp  
21.046.847.623*

### **E.2 Surplus/Defisit-LO**

Nilai Surplus/Defisit-LO untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 21.046.847.623 dan Rp (329.625.539.515).

Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Akuntansi Rp 0*

### **E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

*Penyesuaian Nilai Aset  
Rp 0*

#### **E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai  
Persediaan Rp  
3.138.368

#### E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Nilai Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 3.138.368 dan Rp 0.

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kode Satker	NAMA SATKER	TOTAL
239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	3.138.368
Koreksi Nilai Persediaan Total		3.138.368

Selisih Revaluasi Aset  
Rp 0

#### E.4.3 Selisih Revaluasi Aset

Nilai Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

Koreksi Nilai Aset Non  
Revaluasi Rp  
(5.360.748.987)

#### E.4.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Nilai Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp (5.360.748.987) dan Rp 5.066.118.273.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Akun	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-5.360.748.987	5.066.118.273
<b>JUMLAH</b>		<b>-5.360.748.987</b>	<b>5.066.118.273</b>

Koreksi Lain-lain Rp  
(172.005.631)

#### E.4.5 Koreksi Lain-lain

Nilai Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp (172.005.631) dan Rp 109.297.327.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas jurnal balik penyisihan piutang dan belanja yang masih harus dibayar pada tahun anggaran yang lalu.

Kode Satker	NAMA SATKER	TOTAL
179113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	-15.973.565
209117	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	-34.575.266
238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	-122.981.683
239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	25.684
239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	1.883
239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	12.929
427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	15.763
427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	3.382
427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	93.173
537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	1.131.838
537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	128.135
560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	10.773
622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	2.766
633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	12.652
633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	85.905
Koreksi Lainnya Total		-172.005.631

Transaksi Antar Entitas  
Rp (145.972.554.376)

## E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp (145.972.554.376) dan Rp 162.173.093.315.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN.

Akun	Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	324.338.310.418	251.505.049.365
313121	Diterima dari Entitas Lain	-467.047.332.469	-92.036.449.270

313211	Transfer Keluar	-37.828.612.195	-462.300.000
313221	Transfer Masuk	33.322.458.581	472.414.500
391131	Pengesahan Hibah Langsung	1.134.146.289	2.694.378.720
391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	108.475.000	0
<b>JUMLAH</b>		<b>-145.972.554.376</b>	<b>162.173.093.315</b>

*Ekuitas Akhir Rp*  
5.672.411.509.039

## **E.6 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 5.672.411.509.039 dan Rp 5.824.509.215.950.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1 Hibah GEF V

Pada tahun 2017, Indonesia menerima Hibah Langsung dari *the Global Environment Facility 5* disingkat GEF 5 dengan nama proyek *Enabling Transboundary Cooperation for Sustainable Management of the Indonesian Seas* disebut ISLME Project. FAO Indonesia – Timor Leste selaku *the GEF Implementing Agency* dan *Budget Holder* (BH) untuk *project* tersebut memperoleh dana hibah langsung sebesar USD 4.000.000. Alokasi untuk Indonesia sebesar USD 2.788.320 dan alokasi untuk Timor Leste sebesar USD 1.211.680.

Dalam implementasi proyek, FAO berkolaborasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dituangkan ke dalam dokumen *Implementing Arrangement* disingkat IA. Dalam proyek ini, FAO bertindak sebagai *executing agency* yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan proyek. Kementerian Kelautan dan Perikanan bertindak sebagai penerima hibah memberikan layanan dalam koordinasi dan pengambilan keputusan serta memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan tujuan proyek.

*Implementation Arrangement* (IA) ditanda tangani pertama kali pada tanggal 17 Januari 2019 oleh FAO *Representative in* Indonesia-Timor Leste dan Sekretaris Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selama kurun waktu proyek, IA mengalami 2 (dua) kali perubahan (*amendments*). IA *amendments* pertama ditanda tangani oleh FAO *Representatives in* Indonesia-Timor Leste pada tanggal pada tanggal 19 Januari 2021 dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 28 Januari 2021. Selanjutnya *amendment* kedua IA ditanda tangani oleh FAO *Representatives in* Indonesia-Timor Leste pada tanggal pada tanggal 22 Desember 2022 dan ditanda tangani oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 16 Januari 2023. Dalam dokumen IA *amendment* kedua, FAO dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyepakati bahwa proyek berakhir sampai pada tanggal 16 Januari 2024 tanpa adanya perubahan anggaran (*no cost extension*). Sehingga anggaran yang dapat direalisasikan tidak boleh lebih dari USD 2.788.320 untuk Indonesia dan USD 1.211.680 untuk Timor Leste.

### F.3 Hibah GEF VI

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mendapatkan Hibah Langsung dalam bentuk Uang dari *Global Environmental Facilities* (GEF) melalui World Wildlife Fund .Inc (WWF US) untuk periode tahun 2020-2024. Nama Hibah tersebut adalah The Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) in Eastern Indonesia Fisheries Management Area (FMA) 715,717 & 718 Component A,B and D , dengan Nilai hibahnya sebesar USD 7.375.690 selama 4 tahun (2020-2024). Tujuan hibah ini adalah untuk memberikan kontribusi pada perikanan pesisir di WPPNRI 715, 717 dan 718 memberikan manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dan menunjukkan model pengelolaan perikanan pesisir yang efektif, terintegrasi, berkelanjutan dan dapat ditiru yang ditandai oleh pemerintahan yang baik dan insentif yang efektif.

Lokasi hibah berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715, 717 dan 718. Komponen dalam hibah ini ada 3, yaitu: Component A; Implementing Enabling Conditions for EAFM in FMA 715, 717 & 718; Component B; Implementing EAFM Tools to support EAFM in FMA 715, 717 and 718; dan component D; Implementing knowledge management, monitoring and evaluation for sustainable coastal fisheries in FMA 715, 717 and 718.

DJPT sudah melaporkan hibah ini kepada Kementerian Keuangan dan sudah mendaftarkan nomor register 2QTS8A9A dan membuka nomor rekening hibah di Bank BNI dengan Nomor 1233213520 nama RPL 140 PDHL SETDJPT KKP untuk 2QTS8A9A. Rekening hibah ini dalam bentuk IDR dan perlakuan Jasa Giro TNP dengan tidak ada bunga, tidak ada pajak dan tanpa administrasi.

Tahun 2020, DJPT telah melakukan pengesahan pendapatan dan/atau belanja terkait hibah sejumlah: pendapatan Hibah Rp1.832.435.745,- dan Belanja terkait hibah sebesar Rp341.214.000,-. Pengesahan ini melalui Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) nomor 00320/KU.240/DPP/HLL/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020. Sedangkan Kementerian keuangan (KPPN KPH) menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung melalui SP2D nomor SP2D 20140000000033 tanggal 28 Desember 2020.

Pada tahun 2022, DJPT telah mengesahkan pendapatan dan/atau belanja terkait belanja hibah, sebagai berikut: Saldo awal januari 2022 adalah Rp.1.491.221.745,- dengan pendapatan hibah sebesar Rp 1.791.328.281,- dan belanja terkait hibah sebesar Rp 1.639.390.000,- sehingga saldo akhir sebesar 1.643.160.026,-. DJPT telah melaksanakan pengesahan ke Kementerian Keuangan cq. KPPN KPH melalui Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) nomor 01409/PSDI/HLN/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022. Sedangkan kementerian keuangan (KPPN KPH) menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung melalui SP2D nomor SP2D 201400000000044 tanggal 28 Desember 2022.

Pada tahun 2022, DJPT telah mengesahkan pendapatan dan/atau belanja terkait belanja hibah, sebagai berikut: Saldo awal januari 2023 adalah Rp1.643.160.026,- dengan pendapatan hibah sebesar Rp19.133.033.970,- dan belanja terkait hibah sebesar Rp.18.730.520.000,- sehingga saldo akhir Rp.2.045.673.996,-. DJPT telah melaksanakan pengesahan ke Kementerian Keuangan cq. KPPN KPH melalui Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) nomor: 01737T tanggal 15 Des 2022, selanjutnya KPPN KPH menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung melalui SP2D nomor SP2D 2214000000000017 tanggal 20 Des 2023. Selanjutnya untuk SP2HL Nomor: 01854T tanggal 27 Desember 2023, KPPN mengeluarkan SP2D Nomor 2214006000160001 tanggal 28 Desember 2023

#### **F.4 Hibah AFD**

Hibah Langsung proyek Eco Fishing Port dengan nama hibah Training In Port Management And Fisheries Sector In Indonesia direncanakan dengan nilai sebesar EUR320.000 atau ekuivalen Rp. 5.411.200.000 dengan bentuk Jasa yang akan diimplementasikan selama tiga tahun (2022-2024). Pada Hibah langsung ini, AFD berperan sebagai donor, CCI-Port Boulogne sebagai technical and financial partner, dan Ditjen Perikanan Tangkap sebagai Beneficiary. Proses pencatatan administrasi hibah langsung dilakukan melalui BAST, Pengesahan (SP3HLBJS), dan Pencatatan (MPHLBJS) di KPPN.

Sampai dengan tahun 2023 terdapat total realisasi senilai Rp. 3.827.848.287,9 dengan masing - masing realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.649.378.720 dan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.178.469.567,90, sehingga masih

ada sisa Rp.1.583.351.712,1 dari kegiatan capacity building yang telah dilaksanakan pada semester 1 tahun 2024 ini yang perlu dilakukan pencatatan dari total nilai hibah EUR 320.000 atau ekuivalen Rp. 5.411.200.000. Nilai realisasi tahun 2022 dan 2023 dicantumkan berdasarkan pencatatan (MPHLBJS) di KPPN.

#### **F.5 Pinjaman AFD**

Hibah AFD pada Direktorat Kepelabuhanan adalah senilai 480.000 Euro atau setara dengan nilai Rp7.423.200.000-. Proyek Eco Fishing Port merupakan salah satu dari proyek di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang pembiayaannya melalui Pinjaman Luar Negeri dengan Lender Agence Française de Développement (AFD). Proyek ini bertujuan untuk mendukung peningkatan 4 pelabuhan perikanan Indonesia (PPS Belawan, PPS Bitung, PPS Kendari, dan PPS Cilacap) untuk meningkatkan kinerja, daya tarik dan keberlanjutannya sesuai dengan standar internasional. Untuk setiap pelabuhan perikanan yang ditargetkan, proyek ini akan meningkatkan efisiensi dan tata kelola pelabuhan, meningkatkan kualitas sanitasi, sustainability dan nilai tambah produk perikanan dengan memperhatikan pengelolaan berwawasan lingkungan. Dalam proses pengajuan proyek Eco Fishing Port diperlukan studi tambahan untuk memperkaya informasi terkait 4 pelabuhan perikanan yang pembangunannya akan dibiayai oleh Lender Agence Française de Développement (AFD).

Justifikasi Grant Gender studies dengan program prioritas KKP adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung capaian Proyek Eco Fishing Port, yaitu pembangunan pelabuhan perikanan yang inklusif;
- b. Grant dalam bentuk jasa konsultasi yang akan dipilih langsung oleh AFD. KKP akan berperan sebagai penerima manfaat (beneficiary);
- c. Grant dengan nilai 480,000 EUR ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampakdampak potensial baik itu lingkup pekerjaan proyek, jejak iklim, dan social ekonomi dari pembangunan yang diusulkan, sehingga diharapkan menghasilkan draft action plan yang kemudian dapat diterapkan pada saat pelaksanaan proyek

Tujuan dari pemberian hibah Additional Studies ini yaitu:

- a. mendukung persiapan pengembangan Eco Fishing Ports di Indonesia melalui studi tambahan yang diberikan oleh layanan konsultasi yang ditunjuk oleh Donor melalui tender internasional terbuka;
- b. Menganalisis proyek yang diusulkan (terbatas pada fase 1, dipertimbangkan untuk pembiayaan oleh AFD);
- c. Merangkum informasi yang dikumpulkan untuk ANDAL (awal dan tambahan, jika memungkinkan) untuk baseline dan menyoroti sensitivitas Lingkungan dan Sosial di dalam wilayah pengaruh proyek;
- d. Memberikan identifikasi awal dampak potensial dari pembangunan yang diusulkan;
- e. Mengidentifikasi kesenjangan antara informasi yang tersedia, dan perlindungan yang diterapkan hingga saat ini, dengan standar Lingkungan dan Sosial AFD;
- f. Menyediakan dokumen terkait lingkup pekerjaan proyek, review masterplan, ESIA, Analisis jejak Iklim, dan Identifikasi manfaat social-ekonomi proyek di 4 pelabuhan perikanan (PPS Belawan, PPS Bitung, PPS Kendari, dan PPS Cilacap).

#### Ruang Lingkup Kegiatan

Preliminary Design Fasilitas di 4 Pelabuhan Perikanan: PPS Belawan, PPS Kendari, PPS Bitung, dan PPS Cilacap.

Studi ini dilaksanakan pada tiga dari empat pelabuhan perikanan yang termasuk dalam Proyek Eco Fishing Port: Bitung, Kendari, Belawan, dan Cilacap. Studi ini bertujuan untuk melengkapi dan meningkatkan studi yang sudah dilakukan sebelumnya untuk memastikan kesesuaian proyek dengan standar lingkungan internasional dan sosial serta persyaratan AFD untuk capaian dari aspek iklim dan pembangunan

## Analisis Environmental and Social Impact Assessment (Esia) di 4 Pelabuhan Perikanan: PPS Belawan, PPS Kendari, PPS Bitung, dan PPS Cilacap

Studi ini bertujuan untuk menilai dampak masing-masing subproyek terhadap lingkungan beserta populasinya dan memberikan langkah-langkah mitigasi yang perlu dilaksanakan untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif proyek terhadap lingkungan dan populasi.

### Analisis Carbon Footprint and Climate Impact.

Studi Carbon footprint bertujuan untuk menilai karbon terhadap Proyek dengan menggunakan alat perhitungan yang disediakan. Studi Climate Impact bertujuan untuk menilai kerentanan keempat pelabuhan perikanan terhadap risiko terkait perubahan iklim. Risiko ini mungkin bersifat struktural atau fungsional.

### Analisis terkait dampak social-ekonomi proyek

Analisis ini bertujuan memperdalam analisis sosial ekonomi Proyek investasi di setiap pelabuhan untuk merinci hasil/dampak yang diharapkan dan menyoroti kepentingan Proyek dan tingkat profitabilitasnya bagi masyarakat. Ini akan didasarkan pada deskripsi konten Proyek, analisis ekonomi/keuangan yang dilakukan oleh KKP dan kerangka logis sementara Proyek

Anggaran PLN proyek Eco Fishing Port Tahun Anggaran (TA) 2024 dialokasikan sebesar Rp30.000.000.000,00 yang dicantumkan dalam DIPA Satker Pusat selaku PMU dan 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditunjuk sebagai Project Implementation Unit (PIU) dengan pembagian porsi anggaran pada PMU senilai Rp. 29.268.000.000,00 dan anggaran PIU senilai Rp. 732.000.000,00,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. DIPA Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (230720) senilai Rp.29.268.000.000,00
- b. DIPA Satker PPS Belawan (427655) senilai Rp. 174.000.000,00
- c. DIPA Satker PPS Cilacap (518117) senilai Rp. 162.000.000,00

- d. DIPA Satker PPS Kendari (537695) senilai Rp. 198.000.000,00
- e. DIPA Satker PPS Bitung (633707) senilai Rp. 198.000.000,00

Untuk anggaran yang dialokasikan untuk PMU pada DIPA Satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap senilai Rp29.268.000.000,00 bahwa terdapat pagu anggaran yang tidak dapat digunakan dikarenakan masih dalam status blokir anggaran oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu sebesar Rp4.513.850.000,00 yaitu Kegiatan Jasa Konsultansi Construction Management Consultant (CMC), sehingga anggaran yang tersedia atau dapat digunakan menjadi sebesar Rp24.549.150.000,00.

Mekanisme penarikan PLN proyek Eco Fishing Port TA 2024 dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui mekanisme Pembayaran Langsung (PL)/Direct Payment senilai Rp25.541.000.000,00 dan Rekening Khusus (RK)/Special Account senilai Rp4.459.000.000,00.

Saldo pembiayaan dengan penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp4.094.993.335,00 merupakan Dana Awal Reksus (Initial Deposit) yang ditempatkan pada Reksus Bank Indonesia untuk kebutuhan pembiayaan selama periode Januari s.d Juni tahun 2024 diperoleh dari sisa saldo Reksus TA 2023 sebesar Rp837.238.761,00 dan penambahan saldo reksus pada tanggal 29 April 2024 senilai Rp3.257.754.574,00 sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan nomor S-17/PB.34/2024 tanggal 24 Februari 2024 perihal permohonan pengisian rekening khusus proyek eco fishing port.

#### **F.6 PYMHD Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman**

Terdapat temuan dari Tim Inspektorat Jenderal II KKP terkait Penerimaan yang masih harus diterima atas kekurangan bayar dan denda dari Jasa Pelabuhan Perikanan yang tidak dimasukkan ke dalam neraca dikarenakan diragukan untuk dapat dilunasi atau diselesaikan dengan rincian alasan sebagai berikut :

1. Jasa Tambat Labuh Kapal Perikanan senilai Rp11.025.427.531,- yang telah ditagihkan kepada wajib bayar dan menyatakan keberatan atas tagihan PYMHD tersebut dikarenakan adanya perbedaan persepsi untuk penghitungan jasa tambat labuh yang saat itu menggunakan Panjang (L) dan

pada saat dilakukan audit dihitung menggunakan LOA yang menyebabkan terjadinya kurang bayar dan denda kurang bayar. Selain itu, wajib bayar juga keberatan karena sudah melampirkan dokumen keluar kolam namun saat dilakukan audit dokumen tersebut dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Karena Alasan tersebut wajib bayar menyatakan keberatan karena merasa sudah ditagihkan dan membayar sesuai tagihan saat itu.

2. Jasa Tambat Labuh Kapal Perikanan senilai Rp8.566.144.429,- yang telah ditagihkan kepada wajib bayar dan tidak mendapat respon balasan atas tagihan PYMHD tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu adanya perubahan pemilik kapal dikarenakan kapal tersebut sudah dijual kepada pihak lain, surat tagihan yang tidak sampai ke alamat karena adanya perubahan alamat kantor, dan wajib bayar tidak datang pada saat diundang untuk klarifikasi atas tagihan.
3. Jasa Tambat Labuh Kapal non Perikanan senilai Rp2.753.941.410,- yang belum ditagihkan karena adanya perhitungan denda keterlambatan bayar yang belum dikonfirmasi ke pengguna jasa
4. Jasa Pelabuhan Perikanan Lainnya (Jasa Kebersihan Pelabuhan, Jasa Pengolahan Limbah, Jasa Penggunaan Bangunan Warung/Kios/Kantin) senilai Rp409.430.800,- yang belum ditagihkan karena ada beberapa perusahaan yang sudah bangkrut sehingga tidak dapat menyelesaikan tagihan berdasarkan hasil temuan Itjen KKP dan adanya perhitungan denda keterlambatan bayar yang belum dikonfirmasi ke pengguna jasa.

#### F.6 Piutang PT HOI pada PPN Kejawanan

NO	TANGGAL		URAIAN
1	Tanggal 07 Mei 2009	:	Perjanjian Sewa Lahan Industri Perikanan di PPN Kejawanan antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan PT. HACIENDA OCEAN INDUSTRIES (PT. HOI), Nomor : 1865/DPT.3/PL.210.D.3/V/2009 : Luas lahan yang disewa 22.500 M <sup>2</sup> ,Jangka waktu sewa 5 tahun ( 07 Mei 2009 – 06 Mei 2014), Untuk membangun Dock kapal.
2		:	Berdasarkan pemantauan sejak operasional PT. HOI belum mengakomodir Dok untuk

			kapal perikanan sehingga kalabuh dan Syahbandar perikanan telah menyampaikan agar PT. HOI memprioritaskan dok kapal perikanan, menyesuaikan fungsi PPN Kejawanan.
3	Tanggal 07 Juli 2011	:	Direktur Utama PT. HOI membuat surat pernyataan bahwa pelayanan <i>docking</i> kapal perikanan akan diberikan prioritas utama.
4	Tanggal 14 Agustus 2012	:	Direktur Pelabuhan Perikanan (Tyas Budiman) Melalui surat Nomor : B.5152/DJPT.3/TU.210.D3/VIII/2012 Perihal : Teguran yang ditujukan kepada PT. HOI, menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan perjanjian maka sertiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua yang berkaitan dengan pengelolaan pelabuhan perikanan wajib berkoordinasi dengan Kepala Pelabuhan Perikanan</li> <li>• PT. HOI harus memprioritaskan pelayanan terhadap kapal – kapal perikanan</li> <li>• PT. HOI agar mematuhi semua ketentuan yang berlaku di PPN Kejawanan termasuk biaya tambat labuh.</li> </ul>
5	Tanggal 01 Maret 2013		Direktur PT. HOI Melalui Surat nomor : 001/HOI-CRB/III/2013 perihal tanggapan surat yang ditujukan kepada PPN Kejawanan, menyampaikan bahwa : perbaikan floting repair dilakukan di areal PT. HOI yang termasuk dalam satu kesatuan sewa tanah galangan kapal menggunakan system air bag sehingga kapal perikanan tidak dapat

			dinaikan, apabila ada kapal ikan berbahan baja dapat kami layani  untuk keluar/masuk kapal kami akan melapor ke syabhabdar di PPN Kejawanan
6	Tanggal 22 Maret 2013	:	<p>Kepala PPN Kejawanan (Tharmizi Asri RS, A.Pi.M.Si)</p> <p>Melalui surat Nomor : 336/PPNK/PL.210/III/2013 Perihal : Pemanfaatan Fasilitas PPN Kejawanan yang ditujukan kepada PT. HOI, menyampaikan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sesuai kontrak nomor : 1865/DPT.3/PL.210.D.3./V/2009 tanggal 07 Mei 2009 bahwa objek yang disewa PT. Hacienda adalah tanah industri perikanan seluas 22.500 M2 tidak termasuk kolam pelabuhan seperti tertuang dalam pasal 1 dan lay out</li> <li>• Kolam pelabuhan perikanan adalah fasilitas umum yang tidak dikontrakkan pemakaiannya, untuk pemanfaatan kolam pelabuhan perikanan dikenakan biaya sesuai tarif PP 19 tahun 2006</li> <li>• Untuk lebih jelasnya Direktur PT. HOI agar hadir ke kantor PPN Kejawanan untuk mendapatkan penjelasan lebih terperinci.</li> </ul>
7	Tanggal 27 Juni 2014	:	<p><b>Perpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Perikanan</b> antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan PT. HOI Nomor : B.3784/DJPT.3/PL.210.D3/VI/2014, Luas lahan yang disewa 22.500 M<sup>2</sup>, Jangka waktu sewa 5 tahun ( 06 Mei 2014 – 05 Mei 2019), Peruntukan Dock kapal</p>

8	Tanggal 09 November 2015	: Kalabuh PPN Kejawanan (Tharmizi Asri RS, A.Pi.M.Si) Melalui surat Nomor : 1446/PPNK/KU.340/XI/2015 perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada kepada investor pengguna jasa di PPN Kejawanan, menyampaikan informasi tentang telah disyahkannya PP Nomor 75 tahun 2015 dan akan mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2015.
9	Tanggal 11 Januari 2016	: Kalabuh PPN Kejawanan (Tharmizi Asri RS, A.Pi.M.Si) Melalui surat Nomor : 83/PPNK/KU.340/I/2016 Perihal : Penyampaian PP No 75 tahun 2015, mengundang pelaku usaha dalam rangka sosialisasi Teknis Pungutan PNBPN sesuai PP Nomor 75 tahun 2015 yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 07 Desember 2015.
10	Tanggal 13 Januari 2016	: Pelaksanaan sosialisasi/penyampaian Teknis Pungutan PNBPN sesuai PP Nomor 75 tahun 2015 oleh Kalabuh PPN Kejawanan (Tharmizi Asri RS, A.Pi.M.Si) . Pada awalnya pengguna jasa keberatan atas tarif baru dalam PP Nomor 75 tahun 2015 karena meningkat signifikan dibandingkan tarif sebelumnya dalam PP nomor 19 tahun 2006 namun mereka akhirnya dapat menerima tarif PP Nomor 75 tahun 2015. Peserta dari PT. HOI adalah Sdri. Farah Dhiba. Daftar hadir, Notulen Rapat, Dokumentasi (terlampir)
11	Tanggal 27 April 2016	: Direktur PT. HOI

			<p>Melalui surat Nomor : 13/HOI-CN/IV/2016</p> <p>Perihal : Penambahan Sewa Lahan Industri di PPN Kejawanan, bermaksud mengajukan penambahan sewa lahan seluas 115.500 M<sup>2</sup> atau sepanjang breakwater bagian barat sampai rambu navigasi untuk pengembangan areal dock.</p>
12	Tanggal 09 Mei 2016	:	<p>Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)</p> <p>Melalui surat Nomor : 666/PPNK/KU.340/V/2016 Perihal : Biaya Pemeliharaan Prasarana yang ditujukan kepada PT. HOI, menyampaikan bahwa berdasarkan PP 75 tahun 2015 yang mulai berlaku sejak 7 desember 2015 maka kewajiban PT. HOI untuk pembayaran biaya prasarana adalah sebesar Rp. 28.125.000,- dan biaya kebersihan Pelabuhan sebesar Rp. 27.000.000,- periode penggunaan tanah tahun 2016 sd 2017</p>
13	Tanggal 16 Mei 2016	:	<p>Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)</p> <p>Melalui surat Nomor : 698/PPNK/PL.210/V/2016 Perihal : Tanggapan permohonan penambahan luas lahan an. PT. HOI</p> <p>bahwa : Pemberian rekomendasi penggunaan tanah dan bangunan harus sesuai dengan masterplan PPN Kejawanan, Area/tanah yang dimohonkan bukan merupakan area pengembangan dok kapal dan kegiatan dok kapal PT. HOI sampai saat ini belum difokuskan pada kapal – kapal perikanan sesuai rencana pembangunannya, PPN Kejawanan tidak dapat merekomendasikan penambahan luas penggunaan tanah industri di PPN Kejawanan untuk PT. HOI.</p>

14	Mei s/d Juni 2016	:	<p>Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)</p> <p>Melaksanakan komunikasi melalui telepon mengundang manager PT. HOI ( Suryo) untuk datang ke PPN Kejawanan membahas pembayaran biaya jasa tambat labuh dan kebersihan kolam sesuai dengan PP 75 tahun 2016 dan mengklarifikasi data dan aktifitas kapal PT. HOI.</p> <p>Selama periode tersebut sudah dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan namun PT. Hacienda hanya sanggup membayar sebesar Rp. 134.000.000,- dari total tagihan Rp. 1.700.000.000,-</p>
15	Juli 2016	:	<p>Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)</p> <p>Melakukan inspeksi seluruh investor di PPN Kejawanan untuk melihat langsung aktifitas perusahaan dan menyampaikan hal – hal terkait dengan kebersihan, pengecatan tembok luar, kewajiban2 sesuai dalam kontrak termasuk mengunjungi PT. HOI untuk menindaklanjuti pembahasan pembayaran biaya jasa tambat labuh dan kebersihan kolam</p>
16	Tanggal : 18 Juli 2016	:	<p>Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)</p> <p>Melalui surat Nomor : 968/PPNK/PL.210/VII/2016 Perihal : Biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam yang ditujukan kepada PT. HOI, menyampaikan bahwa berdasarkan data di PPN Kejawanan sejak bulan Januari s/d Juni 2016 PT. HOI belum melaksanakan pembayaran jasa tambat labuh dan kebersihan kolam sesuai PP No 75 tahun 2015 dan meminta untuk segera melunasinya.</p>

17	Juli 2016	:	<p>Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)</p> <p>Melalui telepon meminta Direktur PT. HOI untuk hadir ke kantor PPN Kejawanan terkait koordinasi aktifitas usaha dan pembayaran biaya tambat labuh dan kebersihan kolam, namun Direktur PT. HOI tidak hadir memenuhi undangan.</p>
18	Tanggal : 04 Agustus 2016	:	<p>Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)</p> <p>Melalui surat Nomor : 1057/PPNK/PL.210/VIII/2016 Perihal : Undangan/Panggilan yang ditujukan kepada PT. HOI, Menyampaikan surat Panggilan kepada Direktur PT. HOI untuk hadir ke PPN Kejawanan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 di kantor PPN Kejawanan untuk membahas pembayaran jasa tambat labuh dan kebersihan kolam dari bulan Januari s/d Juni 2016 dan bulan selanjutnya sesuai tagihan juga terus berjalan</p>
19	Tanggal : 30 Agustus 2016	:	<p>Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melalui surat Nomor : 1167/PPNK/PL.210/VIII/2016 Perihal : Undangan Rapat yang ditujukan kepada PT. HOI, menyampaikan bahwa surat pemberitahuan pembayaran Biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam Nomor : 968/PPNK/PL.210/VII/2016 Tanggal : 18 Juli 2016 dan surat undangan nomor : 1057/PPNK/PL.210/VIII/2016 tanggal 04 agustus 2016 belum ditindaklanjuti</li> <li>• selanjutnya kalabuh meminta Direktur PT. HOI untuk hadir pada tanggal 01</li> </ul>

			<p>September 2016 dengan tidak diwakilkan. Dan apabila masih tidak hadir juga maka PPN Kejawanan akan membuat surat teguran sesuai PP nomor 29 tahun 2009 tentang tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBPN dan dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Piutang Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia</p>
20	Tanggal 31 Agustus 2016	:	<p>Manajer Operasional PT. HOI (Ir. Dewi Handayani)</p> <p>Melalui surat Nomor : 029/HOI/VIII/2016</p> <p>Perihal : Pemberitahuan yang ditujukan kepada PPN Kejawanan, menyampaikan bahwa Direktur Utama PT HOI (Hari Putra Joseph) pada tanggal 01 September 2016 masih berada di luar negeri sehingga tidak bisa menghadiri undangan Kalabuh PPN Kejawanan dan baru tiba di Indonesia pada tanggal 12-14 September 2016</p>
21	<p>Melalui telepon PPN Kejawanan menkonfirmasi dengan jawaban yang tidak ada kepastian kesediaan untuk kehadiran Direktur PT. Hacienda Ke PPN Kejawanan atau pihak PT. Hacienda yang membuat janji kapan bisa hadir di PPN Kejawanan.</p>		
22	<b>Tanggal : 02 September 2016</b>	:	<p><b>SURAT PANGGILAN Nomor : 89/G/2016/PTUN-BDG</b></p> <p><b>Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memanggil kalabuh PPN Kejawanan untuk hadir memenuhi panggilan proses dismissal pada tanggal 14 September 2016 di PTUN Bandung dengan membawa objek gugatan surat Nomor 968/PPNK/PL.220/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal biaya jasa tambat labuh dan kebersihan kolam yang ditunjuk penggugat PT. HOI.</b></p>

23	Tanggal 20 September 2016	: Penetapan PTUN Bandung Nomor : 89/PEN-DIS/2016/PTUN.BDG Menetapkan : 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima 2. Menyatakan PTUN Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa
24	Tanggal 29 September 2016	: Direktur Utama PT. HOI (Hari Putra Joseph) Melalui surat Nomor : 002/HOI/IX/2016 Perihal : Permohonan Dispensasi yang ditujukan kepada PPN Kejawan, menyampaikan permohonan dispensasi.
25	Tanggal 3 Oktober 2016	: Kalabuh PPN Kejawan (Imas Masriah, S.Pi)  Melalui surat Nomor : 1363/PPNK/KU.340/X/2016 Perihal : Tanggapan Permohonan Dispensasi yang ditujukan kepada PT. HOI, menyampaikan bahwa pungutan biaya tambat labuh dan kebersihan kolam yang di tagihkan sudah sesuai dengan PP 75 tahun 2015 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur PNBPN tidak dikenal/diatur pemberian dispensasi atas pungutan dan piutang PNBPN yang dikenakan kepada wajib bayar.
26	Tanggal 19 Oktober 2016	: Direktur Utama PT. HOI (hari Putra Joseph) Melalui surat Nomor : 003/HOI/X/2016 Perihal : Permohonan Peninjauan Kembali Kewajiban Pembayaran PNBPN yang ditujukan kepada PPN Kejawan, menyampaikan pengajuan peninjauan

			kembali penghitungan pembayaran PNBP kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
27	Tanggal 04 November 2016	:	<p>Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)</p> <p>Melalui surat Nomor : 1530/PPNK/PI.220/XI/2016 perihal penyampaian tagihan biaya tambat labuh dan kebersihan kolam yang ditujukan kepada Direktur PT. HOI, menyampaikan bahwa berdasarkan penghitungan bendahara penerima dan menindaklanjuti surat nomor : 968/PPNK/PL.210/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 Perihal Biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam dan berdasarkan data kapal yang disampaikan oleh PT. HOI setelah dilakukan klarifikasi dan penghitungan ulang total tagihan jasa tambat labuh dan kebersihan kolam bulan Januari sd September 2016 adalah sebesar Rp. 3.685.878.470 (tiga milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)</p>
28	Tanggal 4 November 2016	:	<p>Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)</p> <p>menyampaikan Melalui surat Nomor : 1530/PPNK/PI.220/XI/2016 Perihal : Penyampaian Tagihan Biaya Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam yang ditujukan kepada PT. HOI, menyampaikan surat tagihan biaya tambat labuh dan kebersihan kolam sebagai tindaklanjut surat sebelumnya yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti diselesaikan oleh PT. Hacienda Ocean Industri dengan melaksanakan pembayaran biaya tambat labuh sesuai dengan peraturan yang</p>

			berlaku, total tagihan Januari s/d September 2016 sebesar Rp. 3.685.878.470,-
29	Tanggal 8 Desember 2016	:	<p>Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)</p> <p>Melalui surat Nomor : 1720/PPNK/PI.220/XII/2016 Perihal : Penyampaian Tagihan Biaya Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam yang ditujukan kepada PT. HOI, menyampaikan surat tagihan biaya tambat labuh dan kebersihan kolam. Surat ini sebagai tindaklanjut surat sebelumnya, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor : 968/PPNK/PL.210/VII/2016 Tanggal 18 Juli 2016</li> <li>2. Nomor : 1530/PPNK/PI.220/XI/2016 tanggal 4 November 2016</li> </ol> <p>sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh PT. Hacienda Ocean Industri untuk melaksanakan pembayaran biaya tambat labuh sesuai dengan peraturan yang berlaku, total tagihan Januari s/d November 2016 sebesar Rp. 4.604.798.025,-</p>
30	Tanggal 27 Desember 2016	:	<p>Plh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Dr. Agus Suherman, S.Pi.M.Si)</p> <p>Melalui surat Nomor : B.13999/DJPT.3/KU.340/XII/2016 Perihal : Permohonan Peninjauan Kembali Kewajiban Pembayaran PNBPN yang ditujukan kepada PT. HOI, menyampaikan bahwa PT. Hacienda hanya diijinkan memanfaatkan lahan seluas 22.500 m2 yang digunakan untuk dock kapal tidak termasuk kolam pelabuhan, berdasarkan penghitungan bendahara penerimaan PPN Kejawanan untuk kapal non perikanan yang melakukan tambat labuh melebihi 30 etmal</p>

			sesuai dengan tarif PP 75 tahun 2015 sedangkan penghitungan yang disampaikan PT. Hacienda menggunakan tarif tambat labuh kapal perikanan dibawah 30 etmal, untuk itu pungutan biaya tambat labuh dan kebersihan kolam yang ditagihkan kepada PT. HOI telah sesuai dengan PP 75 tahun 2015.
31	Tanggal 16 Februari 2017	:	<p><b>Surat Panggilan Sidang (Relaas) Nomor : 46/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST.Jo Nomor 81/Pdt.del/2017/PN.Cbn</b></p> <p><b>Panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No. 24,26,28 Kemayoran Jakarta Pusat pada Hari Kamis Tanggal 23 Februari 2017 Jam.10.00 WIB kepada Menteri Kelautan dan Perikanan cq. Direktur Jenderal Perikanan tangkap cq. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.</b></p>
32	Tanggal : 21 Februari 2017	:	<p>An. Kalabuh PPN Kejawanan (Kepala Seksi Tata Kelola Dan Pelayanan Usaha)</p> <p>Melalui surat Nomor : 280/PPNK/HM. 410/II/2017 Perihal : Permohonan data kapal milik PT. HOI yang ditujukan kepada PT. Pelindo II Cirebon, Memohon informasi dan data data kapal milik PT. HOI selama berada di kolam Pelindo II Cirebon</p>
33	General Manager PT. Pelindo II Cirebon menyampaikan data form Permintaan Pelayanan Kapal dan barang (PPKB) an. Kapal HOS PIONEER SV.EXS.SSP OHL tahun 2010 (pindah, tambat)		
34	Tanggal 21 Februari 2017	:	<p><b>Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung</b></p> <p><b>Melalui surat Nomor : 30/G/2017/PTUN.BDG perihal Surat Panggilan yang ditujukan kepada PPN</b></p>

		<p>Kejawanan, menyampaikan Panggilan Kepada Kepala PPN Kejawanan untuk hadir pada acara pemeriksaan persiapan pada hari Rabu, 01 Maret 2017 jam 10.00 WIB dengan membawa objek sengketa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tagihan No. 1266/PPNK/KU.340/XI/2013 tanggal 25 November 2013</li> <li>• Surat tagihan No. 227/PPNK/KU.114/II/2014 tanggal 19 Februari 2014</li> <li>• Surat tagihan No. 289/PPNK/KU.114/III/2014 tanggal 03 Maret 2014</li> <li>• Surat tagihan No. 968/PPNK/PL.220/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016</li> <li>• Surat tagihan No. 1530/PPNK/PL.220/XI/2016 tanggal 04 November 2016</li> <li>• Surat tagihan No. 1720/PPNK/PL.220/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016</li> </ul>
35	Tanggal 24 Februari 2017	<p>: Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)</p> <p>Melalui surat Nomor : 307/PPNK/HM.410/II/2017 Perihal : Pendampingan Hukum yang diujukan kepada Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyampaikan permohonan bantuan pendampingan hukum. Terkait Panggilan PTUN Bandung</p> <p>Hari Rabu, 01 Maret 2017 jam 10.00 Wib di Pengadilan Negeri Tata Usaha Bandung</p>
36	02 Maret 2017	<p><b>Badan Pemeriksa Keuangan melalui surat Nomor : 06/TP/Terinci/Jabar/2/2017 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan</b></p>

			<b>Konsep temuan dimaksud, yaitu Pendapatan Jasa tambat, labuh dan kebersihan di PPN Kejawanan TA.2016 belum dipungut sebesar Rp. 5.071.789.930,-</b>
37	Tanggal 4 Mei 2017	:	Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)  Melalui surat Nomor : 647/PPNK/PL.420/V/2017 Perihal : Permohonan untuk tidak menerbitkan SPB untuk kapal milik PT. HOI yang ditujukan kepada KSOP Kelas II Cirebon, menyampaikan permohonan untuk tidak menerbitkan SPB bagi kapal2 milik PT. HOI.
<b>38</b>	<b>Tanggal 3 Agustus 2017</b>	<b>:</b>	<b>Putusan PTUN Nomor 30/G/2017/PTUN.BDG</b> Hasil : gugatan PT. HOI ditolak
39	Tanggal 16 Agustus 2017	:	Rapat Permohonan ijin Prinsip rencana pengembangan usaha PT. HOI di Dinas PUPR Kota Cirebon  Ijin prinsip dalam rapat tersebut terselubung proses rencana pensertipikatan tanah yang saat ini disewa oleh PT. HOI.
40	Tanggal 18 Agustus 2017	:	Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)  Melalui surat Nomor : 1157/PPNK/HM.110/VIII/2017 Perihal : Permohonan untuk tidak memberikan rekomendasi dan perijinan an. PT. HOI yang diitujukan kepada kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon, menyampaikan Permohonan untuk tidak memberikan rekomendasi dan perijinan an. PT. HOI
41	Tanggal 24 Agustus 2017	:	Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)

		<p>Melalui surat Nomor : 1191/PPNK/PL.210/VIII/2017 Perihal : Penyampaian Kronologi Pensertifikatan tanah oleh PT. HOI yang ditujukan kepada Direktur Pelabuhan Perikanan, menyampaikan rencana pensertipikatan tanah yang saat ini disewa oleh PT. HOI</p>
42	Tanggal 11 September 2017	<p>Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)</p> <p>Melalui surat Nomor : 1288/PPNK/PL.210/IX/2017 Perihal : Permohonan Penangguhan Ijin TUKS an. PT. HOI yang ditujukan Kepada KSOP Kelas II Cirebon,</p> <p>menyampaikan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT HOI sejak tahun 2016 belum melakukan kewajiban pembayaran Jasa tambat labuh</li> <li>- PT. Telah dua kali mengajukan gugatan ke PTUN Bandung dan PN Jakarta Pusat, saat ini masih berlangsung sidang atas gugatan di PN Jakarta Pusat</li> <li>- Perjanjian penggunaan tanah an PT. HOI Nomor B. 3784/DJPT/PL.210.D3/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 akan berakhir pada tanggal 05 Mei 2019</li> <li>- PPN Kejawanan telah menyampaikan ke kepala dinas PUPR untuk penangguhan permohonan ijin prinsip jasa perakitan kapal PT. HOI</li> <li>- PPN Kejawanan telah menyampaikan permohonan kepada kkepala kantor pertanahan untuk penghentian proses sertipikat</li> </ul>

			tanah seluas 22.500 yang diajukan PT. HOI
43	Tanggal 22 September 2017	:	<p>Kalabuh PPN Kejawan (Imas Masriah, S.Pi)</p> <p>Melalui surat Nomor : 1356/PPNK/PL.220/IX/2017 Perihal : Penyampaian Memori Banding dan Permohonan Pendampingan Hukum yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,</p> <p>Menyampaikan bahwa telah menerima memori banding perkara nomor 30/G/2017/PTUN.BDG tanggal 21 Februari 2017 dimana berkasnya diterima tanggal 19 September dan mohon untuk mendapatkan pendampingan hukum.</p>
44	Tanggal 25 September 2017	:	<p>Kalabuh PPN Kejawan (Imas Masriah, S.Pi)</p> <p>Melalui surat Nomor : 1368/PPNK/KU.340/IX/2017 Perihal : Teguran I Pembayaran Biaya Pemeliharaan dan Kebersihan yang ditujukan kepada PT. HOI, menyampaikan surat teguran</p>
45	Tanggal 25 September 2017	:	<p>Kalabuh PPN Kejawan (Imas Masriah, S.Pi)</p> <p>Melalui surat Nomor : 1371/PPNK/PL.220/IX/2017 Perihal : Pemberitahuan Tagihan Biaya Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam yang ditujukan kepada TP. HOI, menyampaikan tagihan</p>
46	Tanggal 17 Oktober 2017	:	<p><b>Plt Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta</b></p> <p><b>Melalui surat Nomor : W2.TUN.992/HK.06/X/2017 perihal Penerimaan dan registasi perkara Banding Tata Usaha Negara yang</b></p>

			<b>dijutukan kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyampaikan bahwa permohonan pemeriksaan pada tingkat banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Juli 2017 Nomor : 30/G/2017/PTUN-BDG yang dikirim pada tanggal 9 Oktober 2017</b>
47	Tanggal 02 November 2017	:	Kuasa Hukum PT. HOI  Melalui surat tanggal 02 November 2017 menyampaikan Somasi kepada Kepala PPN Kejawanan atas surat nomor 647/PPNK/PL.420/2017 tanggal 04 Mei 2017.
48	Tanggal 06 November 2017	:	Direktur PT. Hacienda Offshore  Melalui surat Nomor : 027/HOS-OPS-CRB/XI/2017 perihal Pemberitahuan Keberangkatan Kapal yang ditujukan kepada PPN Kejawanan, menyampaikan pemberitahuan terkait kapal UB. Propindo akan berangkat ke Handil II
49	Tanggal 07 November 2017	:	Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)  Melalui surat nomor : 1576A/PPNK/PI.220/XI/2017 perihal pemberitahuan tagihan biaya tambat labuh dan kebersihan kolam kepada Direktur PT. HOI yang ditujukan kepada PT. HOI, menyampaikan total tagihan jasa tambat labuh dan kebersihan kolam periode 1 Januari 2016 sd 31 Oktober 2017 adalah Rp. 10.389.827.602 (sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah)
50	Tanggal 07 November 2017	:	Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)

		<p>Melalui surat nomor : 1579/PPNK/KU.340/XI/2017 perihal penyelesaian kewajiban pembayaran PNBP yang ditujukan kepada PT. HOI, menyampaikan bahwa sehubungan dengan pemberitahuan keberangkatan kapal UB Propindo GT.278, maka diminta PT. HOI menyelesaikan terlebih dahulu pembayaran PNBP atas jasa tambat labuh dan kebersihan kolam sebelum kapal berangkat.</p>
51	Tanggal 07 November 2017	<p>Kalabuh PPN Kejawatanan (Imas Masriah, S.Pi)</p> <p>Melalui surat nomor : 1581/PPNK/KU.340/XI/2017 perihal Teguran II yang ditujukan kepada PT. HOI, menyampaikan bahwa menindaklanjuti surat nomor : 1368/PPNK/KU.340/IX/2017 tanggal 25 September 2017 perihal Teguran I, diminta agar menyelesaikan tagihan biaya pemeliharaan dan kebersihan kawasan pembayaran tahun 2017 beserta denda keterlambatan sebesar Rp. 55.310.472 (lima puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah),</p>
52	Tanggal 15 November 2017	<p>Kalabuh PPN Kejawatanan (Imas Masriah, S.Pi)</p> <p>Melalui surat Nomor : 1635/PPNK/HM.410/XI/2017 Perihal : Jawaban Somasi yang ditujukan kepada Kuasa Hukum PT. HOI, menyampaikan kepada, bahwa berdasarkan Permen Perhubungan 82 tahun 2014 dan Permen KP nomor 3 tahun 2013 tentang kesyahbandaran di Pelabuhan perikanan, maka SPB dapat diterbitkan setelah PT. HOI melaksanakan kewajiban pembayaran pungutan sesuai PP 75 Tahun 2015</p>

53	Tanggal 17 November 2017	:	<p>Manajer Operasional PT. HOI menyampaikan surat Nomor 051/HOI-Crb/XI/2017 perihal Permohonan Pencabutan Surat No 647/PPNK/PL.420/V/2017</p> <p>Kepada Kepala PPN Kejawanan memohon untuk dapat mencabut surat No 647/PPNK/PL.420/V/2017 karena dengan adanya surat permohonan tidak menerbitkan SPB maka KSOP tidak menerbitkan SPB atas kapal UB Propindo</p>
54	Tanggal 28 November 2017	:	<p><b>Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 46/PDT.G/2017/PN.JKT.PST</b></p> <p><b>Hasil : Gugatan PT. HOI ditolak</b></p> <p><b>Tuntutan untuk tidak membayar biaya tambat labuh atas kapal milik PT HOI yang berada di kolam pelabuhan karena kolam pelabuhan dianggap sebagai halaman parkir atas tanah yang disewa dinyatakan ditolak sehingga PT HOI tetap berkewajiban untuk melaksanakan kebajibannya atas penggunaan fasilitas kolam pelabuhan milik PPN Kejawanan.</b></p>
55	Tanggal 30 November 2017	:	<p>Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi) menyampaikan surat Nomor : 1699/PPNK/HM.410/XI/2017 Perihal : Permohonan Arahan</p> <p>Kalabuh PPN Kejawanan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap perihal surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang ditujukan kepada kepala KSOP Kelas II Cirebon untuk menerbitkan SPB dan pengenaan jasa labuh kapal milik PT. HOI</p>
56	Tanggal 30 November 2017	:	<p>Surat AN Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Nomor KL.202/I/16/DN-17 tanggal 30</p>

			<p>November 2017 perihal Penerbitan SPB dan Pengenaan Jasa Tambat Labuh Kapal Milik PT. HOI yang ditujukan kepada Kepala KSOP Kelas I Cirebon yang menyatakan bahwa PT. HOI merupakan perusahaan Dok kapal yang beradan di wilayah DLKR DLKP KSOP Kelas I Cirebon, UU Nomor 45 tahun 2009 tidak mengatur kewenangan penerbitan SPB dan pungutan jasa tambat labuh bagi kapal motor melainkan hanya untuk kapal penangkap ikan, pengenaan jasa tambat labuh harus sesuai PP 15 tahun 2016, dalam penerbitan SPB harus sesuai dengan PERMENHUB Nomor PM 82 tahun 2014</p>
57	Tanggal 6 Desember 2017	:	<p>Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi) menyampaikan surat Nomor : 1738/PPNK/TU.420/XII/2017 Perihal : Permohonan copy SPB dan Bukti Pembayaran Jasa Labuh</p> <p>Menyampaikan Kepada Kepala KSOP Kelas II Cirebon untuk dapat memberikan salinan asli Surat Direktur KPLP dan copy SPB dan bukti bayar kapal UB Propindo milik PT. HOI.</p>
58	Tanggal 08 Desember 2017	:	<p>Kalabuh PPN Kejawanan menyampaikan surat nomor : 1753/PPNK/PI.220/II/2017 perihal pemberitahuan tagihan biaya tambat labuh dan kebersihan kolam kepada Direktur PT. HOI</p> <p>Total tagihan jasa tambat labuh dan kebersihan kolam periode 1 Januari 2016 sd 30 November 2017 termasuk denda sebesar Rp. 10.888.268.374 (sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)</p>

59	Tanggal 13 Desember 2017	: Badan Pemeriksa Keuangan melalui Surat Nomor : 01/JKT/KST4/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal penyampaian temuan pemeriksaan  Bahwa berdasarkan surat tugas No 87/ST/VI/11/2017 tanggal 7 November 2017 tanggal 7 November 2017, temuan pemeriksaan yang dimaksud yaitu pendapatan jasa tambat, labuh dan kebersihan di PPN Kejawanan TA 2017 belum dipungut sebesar Rp. 10.888.268.374,-
60	Tanggal 28 Desember 2017	: Putusan Banding Nomor : 292/B/2017/PT.TUN.JKT.Jo.Nomor 30/G/2017/PTUN.BDG  Hasil : gugatan penggugat tidak diterima
61	Tanggal 19 Januari 2018	: Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi) menyampaikan surat Nomor : 123/PPNK/PL.210/I/2018 Perihal : PNPB Terutang an. PT. HOI
62	Tanggal 21 Februari 2018	: Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)  Melalui surat Nomor : 282/PPNK/KU.340/II/2018 Perihal : <b>Penyerahan Pengurusan Piutang Negara an. PT. HOI</b> yang ditujukan kepada KPKNL Cirebon, menyampaikan penyerahan atas piutang Jasa Tambat Labuh dan kebersihan kolam s/d 18 Februari 2018 senilai Rp. 11.859.221.664,00 dan Tunggakan Biaya Pemeliharaan dan kebersihan kawasan pelabuhan tahun 2017 senilai Rp. 55.359.182,-
63	Tanggal 22 Februari 2018	: Badan Pemeriksa Keuangan melalui Surat Nomor : 11/KST.IV/TPD/Jabar/02/2018 perihal penyampaian Temuan Pemeriksaan

			<b>Menyampaikan temuan bahwa pendapatan jasa tambat labuh dan kebersihan kolam di PPN Kejawanan TA 2017 belum dipungut sebesar Rp. 11.859.221.664,-</b>
64	Tanggal 27 Februari 2018	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon  Melalui surat Nomor : SP3N-376/PUPNC.13.06/2018 perihal Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara AN. PT. Hacienda Ocean Industries
65	Tanggal 27 Februari 2018	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon  Melalui surat Nomor : S-785/WKN.08/KNL.06/2018 perihal panggilan yang ditujukan kepada PT. HOI dan tembusannya disampaikan kepada PPN Kejawanan, menyampaikan panggilan kepada Sdr. Hari Putra Joseph selaku Direktur PT. HOI untuk menghadap Kepala Seksi Piutang Negara
66	Tanggal 28 Maret 2018	:	Kepala PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)  Melalui surat Nomor : 456/PPNK/KU.340/III/2018 perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Direktur PT. HOI  Menyampaikan pelimpahan pengurusan hutang menjadi Piutang Negara ke PUPN Cabang Jawa Barat yang kepengurusannya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Cirebon yang sebelumnya telah dilakukan teguran sebanyak 3 kali :  1. Surat Teguran I Nomor : 1368/PPNK/KU.340/IX/2017 tanggal 25 September 2017 perihal

			<p>pemberitahuan tagihan biaya tambat labuh dan kebersihan kolam</p> <p>2. Surat Teguran II Nomor : 1581/PPNK/KU.340/XI/2017 tanggal 07 November 2017 dan surat Nomor : 1576A/PPNK/PL.220/XI/2017 tanggal 07 November 2017 perihal pemberitahuan tagihan biaya tambat labuh dan kebersihan kolam</p> <p>3. Surat Teguran III Nomor : 1747/PPNK/KU.340/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 dan surat Nomor : 1753/PPNK/PL.220/XII/2018 TANGGAL 08 DESEMBER 2017 perihal pemberitahuan tagihan biaya tambat labuh dan kebersihan kolam</p> <p>4. Surat Nomor : 279/PPNK/PL.220/2018 tanggal 21 Februari 2018 perihal pemberitahuan tagihan biaya tambat labuh dan kebersihan kolam</p>
67	Tanggal 21 Juni 2018	:	<p>Kepala KPKNL Cirebon</p> <p>Melalui surat nomor : S-1810/WKN.08/KNL.06/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal pemanggilan terakhir yang ditujukan kepada Direktur PT. HOI, menyampaikan agar Direktur PT. HOI hadir menghadap Kepala Seksi Piutang Negara pada hari Senin, 2 Juli 2018 untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian Piutang Negara</p>
68	Tanggal 11 Juli 2018	:	<p>Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. HOI.</p>

			Dengan total nilai : Rp. 13.106.038.931 termasuk biaya administrasi pengurusan piutang negara 10%
69	Tanggal 19 Juli 2018	:	Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi) Melalui surat nomor 967/PPNK/PI.220/VII/2018 perihal pemberitahuan tagihan biaya tambat labuh dan kebersihan kolam yang ditujukan kepada Direktur PT. HOI, menyampaikan Total tagihan jasa tambat labuh dan kebersihan kolam periode 19 Februari sd 30 Juni 2018 adalah Rp. 1.006.457.515 (satu milyar enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah)
70	Tanggal 7 November 2018	:	Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat menyampaikan salinan Nomor : SP-15/PUPNC.13.06/2018 Perihal <b>Surat Paksa</b> kepada PT. HOI untuk melaksanakan kewajiban pembayaran piutang negara sebesar Rp. 13.106.038.931 termasuk biaya administrasi pengurusan Piutang Negara 10% dalam waktu 1 x 24 Jam
71	Tanggal 13 September 2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tanggal 21 November 2018	:	Kepala PPN Kejawanan Menyampaikan Surat Nomor : 1250/PPNK/PL.210/IX/2018 perihal <b>Teguran</b> , Surat Nomor :1421/PPNK/PL.210/X/2018 <b>perihal Teguran II</b> dan Surat Nomor : 1636/PPNK/PL.210/XI/2018 perihal <b>Teguran III</b> kepada Direktur PT. HOI karena PT. HOI tidak membayar biaya pemeliharaan dan biaya kebersihan sejak tahun 2017 s/d sekarang dan beritikad untuk mensertipikatkan tanah yang saat ini disewa dengan mengajukan ijin prinsip ke Walikota Cirebon.
72	Tanggal 11 Desember 2018	:	Kepala PPN Kejawanan Menyampaikan Surat Nomor : 1751/PPNK/PI.220/XII/2018

			perihal pemberitahuan Tagihan Biaya Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam. Tagihan sampai dengan 30 November 2018 senilai Rp. 2.037.023.885,- untuk periode 19 Februari sd 30 November 2018
73	Tanggal 11 Desember 2018	:	Kepala PPN Kejawanan Menyampaikan Surat Nomor : 1752/PPNK/KU.340/XII/2018 perihal penyampaian tagihan biaya pemeliharaan dan kebersihan kawasan an. PT. HOI senilai Rp. 51.618.465,- periode penggunaan tanah 1 tahun (Mei 2017 sd Mei 2018)
74	Tanggal 11 Desember 2018	:	Inspektur Jenderal KKP Menyampaikan Surat Nomor : 6.14/ITJ/XII/2018 perihal undangan rapat terkait proses permohonan HPL an. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas tanah seluas 25.000 M2 yang masih diproses lebih lanjut oleh kantor pertnahan kota cirebon.
75	Tanggal 07 Januari 2019	:	Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)  Melalui Surat Nomor : 36/PPNK/PI.220/I/2019 perihal pemberitahuan Tagihan Biaya Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam yang ditujukan kepada PT. HOI, menyampaikan tagihan periode 19 Februari sd 31 Desember 2018 senilai Rp. 2.100.829.970,-
76	Tanggal 07 Januari 2019	:	Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)  Melalui Surat Nomor : 34/PPNK/PL.210/I/2019 perihal Penyampaian Tagihan Biaya Pemeliharaan dan Kebersihan Kawasan yang ditujukan kepada PT. HOI, menyampaikan tagihan periode Mei sd Januari 2019 senilai Rp.54.900.834

77	Tanggal 07 Januari 2019	: Kalabuh PPN Kejawan (Imas Masriah, S.Pi)  Melalui Surat Nomor : 35/PPNK/PL.210/I/2019 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan Kasus PT. HOI yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, menyampaikan laporan.
78	Tanggal 17 Januari 2019	: Rapat terkait Klarifikasi dari PT. HOI (HOI) terkait teguran I, II dan teguran III.  Rapat dihadiri kuasa hukum PT. HOI, disampaikan oleh Bapak Dirjen Perikanan Tangkap bahwa apakah PT. Hacienda akan melaksanakan kewajibannya membayar piutang yang sudah dilimpahkan ke KPKNL dan pihak PT. HOI menyampaikan bahwa belum mau membayar dan akan mengajukan PK
79	Tanggal 4 Februari 2019	: Kalabuh PPN Kejawan  Melalui surat Nomor : 208/PPNK/KU.340/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 telah menyampaikan pelimpahan pengurusan piutang negara tahun 2018 an. PT. HOI ke KPKNL Kota Cirebon.  Terhadap piutang PNBPN tahun 2018 an. PT. HOI senilai Rp. 2.155.730.804.
80	Tanggal 22 Februari 2019	: Sekretaris Jenderal KKP  Melalui surat surat Nomor : 342/PPNK/KU.340/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal Penyerahan pengurusan Piutang Negara an. PT. HOI yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian keuangan, menyampaikan permohonan percepatan proses eksekusi surat paksa dan membantu proses pengurusan piutang tahap kedua

81	Tanggal 25 Februari 2019	: Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi)  Melalui surat Nomor : 342/PPNK/KU.340/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 perihal Keterangan Pencatatan Piutang PT. HOI di KPKNL Cirebon yang ditujukan Kepada Kepala KPKNL Cirebon, telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK terhadap piutang an. PT. HOI yang meminta PPN Kejawanan untuk memastikan pencatatan piutang apakah tetap masuk dalam neraca PPN Kejawanan atau dicatat oleh KPKNL.
82	Tanggal 4 Maret 2019	: Plt. Kepala Kantor KPKNL Cirebon  Melalui surat Nomor : S-261/WKN.08/KNL.06/2019 perihal Keterangan Pencatatan Piutang PT. HOI di KPKNL Cirebon yang ditujukan kepada PPN Kejawanan, menyampaikan bahwa terhadap piutang PNBPN an PT. HOI kepengurusannya yang telah beralih di KPKNL Cirebon yang dilaksanakan oleh PUPN Cabang Jawa Barat namun untuk pencatatan tetap dilakukan oleh PPN Kejawanan.
83	Tanggal 4 Maret 2019	: Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat  Melalui surat Nomor : SP3N-01/PUPNC.13.06/2019 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an. PT. HOI bahwa SP3N untuk pelimpahan pengurusan piutang negara an. PT. HOI tahun 2018 (kedua)
84	Tanggal 6 Maret 2019	: Kuasa Hukum PT. HOI (Budi Yuwono) dan P Agus Supriatna (Juru Sita) ke PPN Kejawanan menyampaikan bahwa PT. HOI sudah ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah yang berjalan yaitu dengan

			menyampaikan surat ke KPKNL Cirebon bahwa bersedia menyelesaikan pembayaran piutang dengan mencicil setiap bulan berkisar Rp. 180 s/d 250 juta. Rapat dihadiri oleh Kalabuh (Imas Masriah), Kasi Syahbandar (Jajang H), KTU (Anam Tofani) dan Staf TKPU (Sri Handayani)
85	Tanggal 15 Maret 2019	:	Plt. Kepala Kantor KPKNL Cirebon Melalui Surat Nomor : S-311/WKN.08/KNL.06/2019 perihal Permintaan Nomor Rekening Penampungan bahwa PT. HOI telah membayar piutang dengan cara mengangsur sebesar Rp. 220.000.000 pada tanggal 11 Maret 2019 termasuk Bidad 10% sehingga akan dilimpahkan kembali ke Kas Negara sejumlah Rp. 200.000.000
86	Tanggal 18 Maret 2019		Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi) Melalui surat Nomor : 469/PPNK/PL.210/III/2019 perihal Pelimpahan Hak Penyerah Piutang yang ditujukan kepada Ptl. KPKNL Cirebon bahwa rincian atas pembayaran 220.000.000 melalui KPKNL Cirebon adalah sbb:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 20.000.000 Biaya KPKNL 10%</li> <li>2) 28.125.000 Biaya Pemeliharaan</li> <li>3) 27.234.182 Biaya Kebersihan</li> <li>4) 144.640.818 Biaya Tambat Labuh.</li> </ol>
87	Tanggal 21 Maret 2019	:	Kalabuh PPN Kejawanan (Imas Masriah, S.Pi) Melalui Surat Nomor :491/PPNK/PL.210/III/2019 perihal Tindaklanjut Perjanjian Penggunaan Tanah an. PT. HOI yang ditujukan kepada Dirjen Perikanan Tangkap menyampaikan bahwa Perjanjian PT. HOI akan berakhir pada 06

			Mei 2019 dan perkembangan sampai saat ini telah melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 200.000.000,- serta berencana akan mengajukan perpanjangan perjanjian.
88	Tanggal 22 Maret 2019	:	KPKNL melimpahkan pembayaran an. PT. HOI ke PPN Kejawanan (Kas Negara) dengan Kode Billing 820190322766193
89	Tanggal 25 Maret 2019	:	Plt. Kepala Kantor KPKNL Cirebon Melalui surat Nomor : S-337/WKN.08/KNL.06/2019 perihal Penyetoran Hak Penyerah Piutang yang ditujukan kepada kepala PPN Kejawanan, menyampaikan bahwa PT. HOI telah melakukan pembayaran angsuran pertama sebesar Rp. 200.000.000,- terkait pembayaran angsuran untuk pembayaran biaya tambat labuh sebesar Rp. 28.125.000 dan biaya kebersihan kawasan sebesar Rp. 27.234.182 serta tambat/labuh sebesar Rp. 144.640.818 dan telah masuk ke Kas Negara KKP.
90	Tanggal 28 Maret 2019	:	Plt. Kepala Kantor KPKNL Cirebon Melalui surat Nomor : S-360/WKN.08/KNL.06/2019 perihal Panggilan Terakhir Kepada Sdr. Hari Putra Joseph yang ditujukan kepada PT. HOI, menyampaikan panggilan terakhir terkait penyelesaian Piutang Negara sesuai SP3N yang kedua
91	Tanggal 29 Agustus 2019	:	Panitia Pengurusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat menyampaikan surat kepada PT HOI nomor PJPNC- 33' /PUPNC.13,06/2019 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara an PT HOI
92	Tanggal 30 September 2019	:	Penyampaian Surat Paksa Nomor : SP-38/PUPNC.13.06/2019 tanggal 19 September 2019 bahwa PT. HOI untuk

			segera membayar hutangnya kepada Negara cq Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap cq. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sejumlah Rp. 2.155.730.804
93	Tanggal 31 Oktober 2019	:	Penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Penggunaan tanah di PPN Kejawanan Nomor : 1759/PPNK/PL.210/X/2019 antara Kepala PPN Kejawanan (Imas Masriah) dengan Direktur PT. HOI (Rini Suriwati Asang)
94	<b>Sejak bulan Maret 2019 s/d Maret 2020, PT. HOI Melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 220.000.000,- per bulan dikurangi biad 10% sehingga total angsuran yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 2.600.000.000 ( Dua milyar enam ratus juta rupiah)</b>		
95	Tanggal 08 April 2020	:	Direktur PT. HOI melalui surat tertanggal 08 April 2020 yang ditujukan kepada KPKNL Cirebon dan tembusannya disampaikan kepada PPN Kejawanan, menyampaikan sehubungan dengan pandemic covid-19 yang berdampak pada arus kas PT. HOI dan tidak ada order yang masuk dan mohon kebijaksanaan penjadwalan ulang cicilan rutin atas hutang PNBPN.
96	Tanggal 15 Juni 2020	:	Kepala PPN Kejawanan Melalui surat Nomor : 1154/PPNK/KU.340/VI/2020 perihal laporan perkembangan Pelaksanaan Perjanjian PT. HOI yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyampaikan laporan bahwa PT. HOI mengajukan penjadwalan ulang atas kewajiban pembayaran hutang PNBPN kepada KPKNL Cirebon.  PPN Kejawanan telah berkoordinasi melalui WA bahwa KPKNL Cirebon (adanya wabah covid-19, KPKNL tidak melakukan layanan

			tatap muka) dan diperoleh informasi bahwa KPKNL belum membalas surat HOI dan sampai dengan periode April sd Juni 2020 PT HOI belum melaksanakan pembayaran cicilan hutang PNBP
97	Tanggal 16 September 2020	:	<p>Kepala PPN Kejawanan beserta Kasie TKPU dan Staf TKPU ( Bagus Oktorio Sutrisno, Sri Handayani dan Rizky Widiyanto) berkoordinasi langsung dengan Kepala KPKNL yang didampingi Seksi Piutang Negara terkait tindaklanjut atas Surat PT. HOI tertanggal 08 April 2020 terkait permohonan kebijaksanaan penjadwalan ulang atas cicilan rutin atas hutang PNBP.</p> <p>Diperoleh informasi bahwa KPKNL Cirebon berencana akan berkomunikasi dan datang langsung Ke PT HOI di kompleks PPNK pada minggu ke IV bulan September 2020 untuk mengetahui aktifitas usaha dan mendorong untuk melakukan cicilan hutang PNBP kembali.</p>
98	Tanggal 07 Oktober 2020	:	Sub Koordinator Kelompok TKPU koordinasi mendampingi Tim KPKNL (Budi Nur Afianto dan Hasan Basari) ke PT HOI untuk koordinasi tindaklanjut pembayaran piutang PNBP dan melihat kondisi lapangan atas operasional perusahaan, namun karena yang dilapangan/kantor tidak ada yang berkompeten dimintai keterangan terkait piutang.
99	Tanggal 10 November 2020	:	melalui telepon/Wa Sub Koordinator Kelompok TKPU berkoordinasi terkait tindak lanjut KPKNL Cirebon dan diperoleh informasi bahwa KPKNL Cirebon kesulitan berkomunikasi langsung ke Direktur PT HOI, namun secara tertulis sudah bersurat menghimbau agar PT HOI segera

			melaksanakan pembayaran piutangnya. (PPN Kejawanan tidak mendapat Tembusan suratnya)
100	Tanggal 18 Desember 2020	:	Melalui Telepon Sub Koordinator Kelompok TKPU berkoordinasi terkait tanggapan PT. HOI dalam menindaklanjuti surat dari KPKNL terkait himbauan dan diperoleh informasi bahwa pihak KPKNL masih kesulitan berkomunikasi langsung dengan direktur PT. HOI dan terkait surat belum ada tanggapan tertulis. Pihak KPKNL akan terus berupaya.
101	Tanggal 02 Februari 2022	:	Kepala PPN Kejawanan menyampaikan surat Nomor : 187//PPNK/PL.210/11/2022 perihal permohonan informasi  Terkait tindaklanjut penyelesaian piutang PT. HOI dimana pada bulan April 2020 PT. HOI mengajukan permohonan penjadwalan ulang angsuran pembayaran dan tidak adanya angsuran sejak bulan April 2020 s/d sekarang.
102	Tanggal 02 Februari 2022	:	Kepala Kantor KPKNL Cirebon  Melalui Surat Nomor : S-117/WKN.08/KNL.06/2022 perihal penyelesaian Hutang kepada Negara atas Nama PT. Hacienda Ocean Industries  Kepala KPKNL meminta direktur PT. HOI untuk hadir ke KPKNL pada Hari Selasa tanggal 16 Februari 2022 menghadap kepala seksi Piutang Negara, apabila tidak adanya kepastian penyelesaian Hutang maka KPKNL akan melakukan tindakan hukum lebih lanjut berupa tindakan pencegahan dan paksa badan.

103	Tanggal 04 Februari 2022	: Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL mengInformasi bahwa PT. HOI menanggapi surat Nomor : S-117/WKN.08/KNL.06/2022 tanggal 02 Februari 2020 dengan menyampaikan surat keterangan sakit.
104	Tanggal 05 Februari 2022	: Kepala KPKNL Cirebon menyampaikan surat kepada Direktur PT HOI perihal kelengkapan persyaratan permohonan keringanan jangka waktu pembayaran hutang  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2017 kewenangan pemberian persetujuan/penolakan keringanan hutang diatas 1 milyar merupakan kewenangan Kanwil DJKN, dan KPKNL Cirebon telah meneruskan surat PT. HOI ke Kanwil DJKN, Jawa Barat</li> <li>2. Berdasarkan verifikasi masih terdapat kekurangan persyaratan yaitu Laporan Keuangan PT HOI yang sudah diaudit oleh akuntan public/BPK/BPKP sekurang kurangnya 3 tahun terakhir</li> <li>3. Rencana Kegiatan Perusahaan (Business plan) sejak permohonan diajukan sampai dengan saat akhir keringanan jangka waktu pembayaran hutang yang diminta</li> </ol>
105	Tanggal 08 Februari 2022	: Kepala KPKNL Cirebon menyampaikan surat Nomor S-143/WKN.08/KNL.06/2022 perihal penyampaian informasi Pengurusan Piutang Negara Atas Nama PT. HOI

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurusan piutang Negara atas nama PT. HOI telah diterima PPN Kejawanan dengan total nilai sebesar Rp. 14.407.031.165,-</li> <li>2. Selama dalam kepengurusan KPKNL Cirebon PT. HOI baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.860.000.000 (include hak penyerah piutang dan Biaya administrasi pengurusan piutang Negara sebesar 10%)</li> <li>3. PT HOI Mengajukan permohonan keringanan jangka waktu penyelesaian hutang dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2017 kewenangan pemberian persetujuan/penolakan keringanan hutang diatas 1 milyar merupakan kewenangan Kanwil DJKN, dan KPKNL Cirebon telah meneruskan surat PT. HOI ke Kanwil DJKN, Jawa Barat</li> <li>4. Berdasarkan verifikasi atas surat permohonan PT. HOI masih terdapat kekurangan data/persyaratan dan saat ini belum dilengkapi oleh PT. HOI.</li> </ol>
106	Tanggal 24 Februari 2022	: Melalui Telepon Sub Koordinator TKPU berkoordinasi ke Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL terkait informasi terkini tindak lanjut penyelesaian PT. HOI dan informasi yang diperoleh belum ada informasi tambahan.

107	Tanggal 16 Maret 2022	: Kepala PPN Kejawanan menyampaikan surat Nomor : 380/PPNK/PL.210/III/2022 Perihal Permohonan Informasi  Terkait dengan konsep temuan BPK RI yaitu pencatatan Piutang PT. HOI dalam LK dan Neraca Keuangan belum sesuai
108	Tanggal 17 Maret 2022	: Kepala KPKNL menyampaikan informasi melalui surat Nomor : S-323/WKN.08/KNL.06/2022 hal penyampaian informasi penatausahaan piutang Negara atas nama PT. Hacienda Ocean Industries  Menyampaikan bahwa penatausahaan piutang PT HOI telah sesuai dengan ketentuan dan penyisihan piutang adalah sebesar 100% sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua.
109	Tanggal 17 Maret 2022	: Sesditjen Perikanan Tangkap menyampaikan menyampaikan surat Undangan Nomor : B.3946/DJPT/TU.330.S3/III/2022 dengan agenda Penyelesaian Tunggakan piutang PNBPN yang belum diterima dan hal lain yang berkembang dalam rapat.
110	Tanggal 17 Maret 2022	: Kepala KPKNL menyampaikan informasi melalui surat Nomor : S-323/WKN.08/KNL.06/2022 hal penyampaian informasi penatausahaan piutang Negara atas nama PT. Hacienda Ocean Industries  Menyampaikan bahwa penatausahaan piutang PT HOI telah sesuai dengan ketentuan dan penyisihan piutang adalah sebesar 100% sesuai dengan Buletin

			Teknis SAP Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua.
111	Tanggal 12 April 2022	:	<p>PT HOI menyampaikan surat kepada kepala KPKNL Cirebon perihal pemberitahuan pembayaran cicilan</p> <p>Menyampaikan bahwa karena kondisi perusahaan dalam kondisi yang kurang baik akibat pandemi covid-19 maka untuk sementara PT HOI akan mencicil sebesar Rp20.000.000,00 setiap bulan setiap tanggal 30 bulan berjalan</p>
112	Tanggal 20 April 2022	:	<p>Kepala KPKNL Cirebon menyampaikan surat kepada Direktur PT. HOI tembusan Kepala PPN Kejawanan Nomor S-879/WKN.08/KNL.06/2022 perihal pembayaran Angsuran Hutang PT. HOI bahwa sehubungan surat PT. HOI tanggal 12 April 2022 disampaikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. HOI untuk sementara akan melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp20.000.000,00 setiap bulan,</li> <li>2. Jumlah pembayaran PT HOI belum sesuai aturan yang ada namun akan mengurangi saldo hutang PT. HOI kepada negara</li> <li>3. Apabila PT. HOI tidak segera melunasi hutang maka akan dilakukan penyitaa terhadap kekayaan lain milik penanggung hutang/penjamin hutang, dalam hal ini kekayaan milik direksi atau pengurus perusahaan dan/atau milik anggota dewan komisaris atau dewan pengurus perusahaan</li> </ol>

113	Tanggal 03 Agustus 2022	:	<p>Plt. Kepala PPN Kejawanan menyampaikan surat nomor 2241/PPNK/PI.210/VIII/2022 perihal pemberitahuan, bahwa sesuai surat perjanjian penggunaan tanah Nomor : 1759/PPNK/PL.210/X/2019, PT HOI selaku pihak kedua :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib melaporkan setiap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha di Pelabuhan Perikanan</li> <li>2. Memprioritaskan pelayanan kepada kapal-kapal perikanan</li> <li>3. Menyediakan fasilitas dan pelayanan docking untuk kapal perikanan berbahan kayu dan/atau <i>fiberglass</i></li> <li>4. Wajib mematuhi isi perjanjian dan ketentuan yang berlaku</li> </ol>
114	10 November 2022	:	<p>Plt. Kepala PPN Kejawanan menyampaikan surat nomor : 2755/PPNK/PL.210/XI/2022 perihal <b>teguran pertama</b>. Menyampaikan bahwa PT. HOI mendapat teguran pertama diakibatkan karena sampai saat surat ini dilayangkan PT.HOI belum menyediakan fasilitas dan melaksanakan pelayanan docking kapal perikanan berbahan kayu dan/atau fiberglass</p>
115	11 November 2022	:	<p>Direktur PT. HOI menyampaikan <b>tanggapan teguran I</b> melalui surat nomor : 003/HOI-CRB/ST/XI/21 perihal jawaban surat nomor 2755/PPNK/PL.210/XI/2022</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa PT. HOI siap mendukung peraturan, ketentuan, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh PPN Kejawanan</li> <li>2. PT. HOI sudah menyediakan fasilitas doking untuk kapal berbahan fiberglass yakni menggunakan fasilitas balon, namun sampai saat ini belum</li> </ol>

			<p>pernah menerima klien yang berminat untuk melakukan docking.</p> <p>3. Usaha PT. HOI terdampak Covid-19 yang menyebabkan jarang menerima klien sehingga kondisi keuangan perusahaan menurun</p>
116	06 Juni 2023	:	<p>Kepala KPKNL menyampaikan surat kepada Direktur PT HOI tembusan Kepala PPN Kejawanan nomor S-683/KNL-0806/2023 perihal Penyelesaian Hutang Hegara an. PT HOI. Disampaikan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPN kejawanan menyerahkan pengurusan piutang negara atas nama PT HOI sebanyak Rp11.914.580.846,00 dan Rp2.155.730.804,00</li> <li>2. PT HOI baru melakukan pembayaran sebesar Rp2.854.945.452,00 sisa hutang Rp11.215.766.198,00</li> <li>3. PT HOI diminta menaikan jumlah angsuran, karena angsuran sebesar Rp20.000.000,00 setiap bulan masih terlalu kecil sehingga waktu pelunasan akan semakin lama</li> </ol>
117	13 September 2023	:	<p>Kepala PPN Kejawanan (Sarwono) menyampaikan surat Nomor : B.1578/PPNK/PL.210/IX/2023 Perihal <b>Teguran II</b>, berdasarkan evaluasi perjanjian Nomor : 1759/PPNK/PL.210/X/2019 oleh Direktur Kepelabuhanan Perikanan dan Kepala PPN Kejawanan disampaikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktifitas oprasional di PT. HOI masih berjalan dengan tenaga kerja ± 22 orang sehingga dinilai kondisi perusahaan baik/normal</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sampai saat ini belum tersedia fasilitas docking kapal perikanan berbahan kayu dan/atau fiberglass</li> <li>3. Pembayaran hutang PNBP senilai RP14.070.311.650,00 baru dibayar sebesar Rp2.890.909.088,00 sehingga masih tersisa Rp11.179.402.562,00</li> <li>4. PT. HOI dianggap kurang beritikad baik dalam komitmen pelaksanaan perjanjian penggunaan tanah sehingga dapat menjadi pertimbangan pemutusan perjanjian sepihak oleh PIHAK KESATU</li> </ol>
118	05 Oktober 2023	:	<p>Direktur PT HOI menanggapi atas teguran II dengan menyampaikan surat Nomor : 020/HOI-CRB/X/2023 Perihal Jawaban atas surat No. B.1578/PPNK/PL.210/IX/2023 Menyampaikan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendati dilapangan PT.HOI masih memiliki karyawan tetapi selama ini tidak ada satupun kapal kayu dan fiberglass yang melakukan docking</li> <li>2. PT. HOI telah beritikad baik dengan menyediakan fasilitas docking kapal menggunakan teknologi airbag dimana teknologi ini dapat menaikan dan menurunkan kapal jenis apapun (besi, kayu, maupun fiberglass)</li> <li>3. PT. HOI tetap berusaha semampunya untuk tetap membayar hutang PNBP secara rutin dan tepat waktu setiap bulannya ditengah krisis ekonomi yang sedang dihadapi</li> </ol>
119	19 Januari 2023	:	<p>Kepala PPN Kejawanan dan Subkoordinator TKPU berkoordinasi sekaligus silaturahmi ke KPKNL Cirebon</p>

			dengan agenda pembahasan terkait pemanfaatan aset BMN dan pengelolaan piutang negara an. PT. Hacienda Ocean Industries
120	27 Januari 2023	:	Kepala KPKNL Cirebon menyampaikan surat nomor S-138/KNL.0806/2023 kepada Direktur Utama PT. HOI perihal penyelesaian hutang kepada negara atas nama PT. Hacienda Ocean Industries KPKNL mengundang Direktur PT. HOI untuk hadir ke KPKNL Cirebon menghadap Kepala Seksi Piutang Negara pada hari rabu 08 Februari 2023
1211	02 Februari 2023		Kepala PPN Kejawanan menyampaikan surat nomor B.411/PPNK/KU.340/II/2023 kepada Direktur PT. HOI perihal Kewajiban Pihak Kedua Bahwa berdasarkan PP 85 Tahun 2022 yang berlaku mulai 18 September 2022 Dan PT. HOI berkewajiban membayar biaya penyesuaian penggunaan tanah senilai. 108.281.250,00
122	13 Februari 2023	:	Kepala PPN Kejawanan dan Ketua Subkelompok kerja TKPU berkunjung ke kantor PT. HOI dan Kediaman Direksi PT. HOI di Jakarta, namun tidak dapat bertemu baik dengan Direktur (Ibu Rini Suriwati Asang) maupun Direksi (Hari Putra Joseph) sehingga tidak ada komunikasi lebih lanjut terkait operasionalisasi, pembayaran kewajiban pembayaran penyesuaian PP 85 Tahun 2022 atas penggunaan tanah dan penyelesaian hutang.
123	24 Februari 2023	:	Kepala KPKNL Cirebon menyampaikan surat nomor S-259/KNL.0806/2023 kepada Direktur Utama PT. HOI kepada Direktur PT. HOI perihal penyelesaian hutang kepada

			<p>negara atas nama PT. Hacienda Ocean Industries</p> <p>KPKNL mengundang Direktur PT. HOI untuk hadir ke KPKNL Cirebon menghadap Kepala Seksi Piutang Negara pada hari rabu 08 Maret 2023</p> <p>Selama kepengurusan piutang PT. HOI baru membayar 21,19% dari total kewajiban dan KPKNL Cirebon selaku anggota PUPN Cabang Jawa barat dapat melakukan Tindakan hukum lebih lanjut berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemblokiran dan penyitaan Harta kekayaan lainnyayang dilakukan terhadap barang bergerak dan/atau tidak bergerak</li> <li>2. Pencegahan keluar wilayah Indonesia</li> <li>3. Tindakan keperdataan dan/atau Tindakan layanan publik</li> <li>4. Paksa badan</li> </ol>
124	01 Maret 2023	:	<p>PT. HOI telah melakukan pembayaran penyesuaian PP 85 tahun 2022 atas penggunaan tanah senilai Rp108.281.250,00 berdasarkan NTPN <b>833F58N3EA36DMDB</b></p>

### F.7 Progress Tindak Lanjut Temuan BPK

1. Telah ada Surat MKP pengajuan usulan status 4, namun belum bisa diusulkan menjadi status 4, masih status 2/BS (3 rekom):

A. LHP SIPTL: 72/LHP/XVII/12/2011 NO LHP RESMI: 75/LHP/XVII/12/2011, LHP Kinerja atas Program MINAPOLITAN TA 2009, 2010, dan Semester I 2011 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Rekomendasi Apabila rekanan telah menerima pembayaran sesuai kontrak tersebut, maka diperintahkan untuk menyetorkan ke kas negara sebesar Rp3.394.450.292,00 dan bukti setor disampaikan kepada BPK

Telaahan BPK

Perubahan/addendum kontrak tujuh rekanan dengan PT FGP yang disampaikan oleh PT FGP dan dimuat dalam LHP BPK sudah merupakan risiko dalam menerima pekerjaan kontrak tersebut, dan perubahan kontrak masih dalam rentang waktu 12 bulan sehingga perubahan kenaikan harga pasar seharusnya tidak terlalu signifikan.

Dokumen TL

Dirjen Perikanan Tangkap mengusulkan rekomendasi tersebut menjadi TPTD dengan dokumen pendukung berupa :

1. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Auditoriat IV BPK RI perihal Penyampaian 9 Rekomendasi Prioritas Nomor B.2171/MEN-KP/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
  2. Hasil Reviu Keberadaan PT Fiber Glass Perkasa Nomor T.363/ITJ/HP.380/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023
- B. LHP 12/LHP/XVII/01/2013 PDTT atas Pengadaan Barang dan Jasa Kapal Perikanan TA 2010 s.d 2012 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya.

BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginsruksikan Dirjen Perikanan Tangkap supaya menegur Kepala Dinas Kelautan Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan pengawasan atas pencairan anggaran dan secara berjenjang menegur PPK agar melakukan pengawasan atas kegiatan pengadaan kapal serta menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp795.224.527,00 dan menyetorkan ke kas Negara

Telaahan BPK

Tindak Lanjut semester I tahun 2023 belum sesuai rekomendasi: >> Dirjen Perikanan tangkap melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-797/MEN-KP/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 mengajukan penetapan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Dilengkapi dengan dokumen: 1. Surat Itjen kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KKP perihal Penyampaian Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu BPK-RI atas Pengadaan Barang dan Jasa Kapal Perikanan di Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara Nomor R.145/ITJ.2/HP.550/VII/2022 tgl 18 Juli 2022. 2. Memorandum dari Tim Pemantauan KKP kepada Inspektur II bulan Februari Tahun 2013 tentang Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu BPK-RI atas Pengadaan Barang dan Jasa Kapal Perikanan di Kab. Halmahera Timur yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa indikasi fiktif terhadap pekerjaan Pembangunan 2 (dua) unit Kapal, yaitu Kapal armada Purse Seine 10-30 GT paket 2 yang dilaksanakan oleh CV. SSSJ dan Kapal armada Purse Seine 10-30 GT paket 3 yang dilaksanakan oleh CV. RA di Kab. Halmahera Timur tidak benar 3. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur kepada Dirjen Perikanan Tangkap KKP nomor 530/kp.01.68/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Penyampaian Surat Keterangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010-

2017 yang menerangkan bahwa: a. Berdasarkan laporan hasil pemantauan dan monitoring serta evaluasi yang dilakukan pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 diketahui: 1) Paket 2 Kapal Purse Seine 10-30GT dilaksanakan oleh CV. SSJ seharga Rp710.554.000,00 secara fisik penyelesaian telah mencapai 82,86%; 2) Paket 3 Kapal Purse Seine 10-30GT dilaksanakan oleh CV. RA seharga Rp710.554.000,00 secara fisik penyelesaian telah mencapai 85,50%; 3) Berdasarkan kesimpulan oleh Tim Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyatakan bahwa indikasi fiktif terhadap pekerjaan Pembangunan 2 (dua) Unit Kapal armada Purse Seine 10 - 30 GT tidak benar; 4) Pada bulan Maret 2013, Tim Dirjen Perikanan Tangkap melakukan pemantauan dan monitoring serta evaluasi dan menyatakan bahwa Pengadaan Kapal armada Purse Seine 10 -30 GT Paket 2 dan Paket 3, telah selesai 100%. 4. Bukti setor denda ketelambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan kapal Purse Sein 10-30 GT di Halmahera Timur tahun 2012 dari CV. SSJ sebesar Rp16.450.000,00 NTPN 7683D0RBRAK5958P tanggal 29 Januari 2018. >>> Namun, masih terdapat dokumen yang belum dilengkapi yaitu: a. Dokumen terkait amandemen kontrak terkait waktu penyelesaian yang diperpanjang selama 75 hari kalender sehingga pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Februari 2013; b. Dokumen/Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang menyatakan bahwa Sampai dengan 7 Februari 2013, Pekerjaan Pengadaan 2 (dua) Unit Kapal Purse Seine 10-30 GT masih dalam proses penyelesaian masing-masing untuk paket 2 sebesar 82,86% dan paket 3 sebesar 85,50%; c. Berita acara cek fisik yang dilakukan oleh Itjen KKP atas kapal yang diduga fiktif, berikut dengan foto cek fisik. d. Surat Pesanan Nomor 01/SSJ/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari CV SSJ kepada FL; e. Surat Pesanan Nomor 01/RA/XII/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari CV RA kepada FL; f. Lampiran Kronologis alasan keterlambatan pekerjaan; g. Perhitungan denda keterlambatan; h. Laporan Hasil Pemantauan Itjen tidak menjelaskan bahwa Itjen KKP telah memastikan bahwa pekerjaan kapal tersebut telah selesai, dan diserahterimakan (tidak ada BAST Penyerahan Pekerjaan atas kapal tersebut); i. Kronologis terkait permasalahan indikasi fiktif terhadap Pekerjaan Pengadaan Dua Unit Kapal; j. Pernyataan dari Itjen KKP bahwa seluruh dokumen yang diberikan kepada BPK RI telah dicek kebenarannya.

Tindak Lanjut DJPT:

Ditjen Perikanan tangkap melalui surat Menteri Kelautan dan Perikanan B-797/MEN-KP/VIII/2022 mengajukan penetapan TPTD dengan alasan yang sah. dapat dijelaskan bahwa berdasarkan surat keterangan kepala dinas Halmahera timur terkait pekerjaan 2 (dua) unit kapal purse seine 10-30 GT yang diindikasikan fiktif ternyata tidak benar

Tindak Lanjut DJPT

Update TL semester II 2023 >>>>> Ditjen Perikanan Tangkap mengusulkan rekomendasi tersebut menjadi Status 1 dengan dokumen pendukung berupa :

- a. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Auditoriat IV BPK RI perihal Penyampaian 9 Rekomendasi Prioritas Nomor B.2171/MEN-KP/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023
  - b. Hasil Reviu Dokumen Pengadaan 2 Kapal Purse Seine di Kab Halmahera Timur Nomor T.454/ITJ/HP.380/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023
2. Hasil telaah PTLRHP Sem.1/2023: Rekomendasi yang perlu diskusi dan penelaahan lebih lanjut, diusulkan masih status 2/BS (6 rekom):.

A. LHP 25/LHP/XVII/06/2017 PDDT Pengadaan Kapal Perikanan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Serta Instansi Terkait Lainnya

BPK RI merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan KPA dan PPK agar menarik kelebihan pembayaran dari pelaksana kegiatan dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp2.545.754.028,00

Telaahan BPK

Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena masih terdapat kelebihan pembayaran yang belum disetorkan ke kas negara senilai Rp1.441.691.000,00, yang terdiri atas: 1. CV AMM senilai Rp6.000.000,00 2. CV MBS senilai Rp1.402.691.000,00 3. CV MKU senilai Rp33.000.000,00 Terkait bukti tindak lanjut berupa serah terima kapal Mina Maritim 004 dari CV MBS kepada DKP Kabupaten Natuna dan Berita Acara Sea Trial dari CV Adrian Muda Mandiri akan diusulkan sebagai rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti pada periode pemantauan berikutnya setelah dilengkapi dengan dokumen pendukung dan reviu Itjen KKP.

Tindak Lanjut DJPT :

Ditjen Perikanan Tangkap mengusulkan rekomendasi tersebut menjadi TPTD dengan dokumen pendukung berupa :

1. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Auditoriat IV BPK RI perihal Penyampaian 9 Rekomendasi Prioritas
2. Hasil Reviu Dokumen TL atas Kekurangan Volume 7 Paket Pekerjaan pada Dit. KAPI TA 2015 & 2016

Ditjen Perikanan Tangkap melalui Surat Penjelasan dari Direktur KAPI no B.2503/DJPT.3/HP.520/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 bahwa Kapal Mina Maritim 004 telah diterima, sehingga dapat mengurangi nilai kerugian Negara senilai Rp.854.625.000,00 nilai temuan untuk CV Mitra Bahari

Status Diusulkan: Belum Sesuai. Telaah: Kelebihan pembayaran yang direkomendasikan untuk disetor ke Kas Negara senilai Rp2.545.754.028,00. Realisasi penyetoran ke Kas Negara yang telah dilakukan sampai dengan periode Semester I Tahun 2023 adalah senilai Rp1.104.063.028,00. Pada periode pemantauan Semester I Tahun 2023, entitas menyampaikan dokumen tindak lanjut berupa Surat Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Nomor B.2053/DJPT.3/HP.520/V/2023, tanggal 23 Mei 2023, perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI yang isinya antara lain

menjelaskan bahwa terkait dengan temuan kelebihan pembayaran senilai Rp854.625.000,00 kepada CV Mitra Bahari atas pengadaan Kapal Mina Maritim 004 yang belum diterima oleh KUB, pihak penyedia (CV Mitra Bahari) telah menindaklanjutinya dengan menyerahkan Kapal Mina Maritim 004 tersebut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna pada tanggal 19 Desember 2016. Dengan sudah diserahkannya kapal tersebut, maka KKP menganggap tidak ada lagi potensi kerugian negara karena kapal sudah terkirim dan termanfaatkan. Namun surat penjelasan dari Direktur KAPI tersebut belum dilengkapi dengan hasil reuiv Itjen KKP untuk memastikan bahwa kapal Mina Maritim 004 telah benar-benar diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna. >>> Dengan demikian, kelebihan pembayaran yang belum disetorkan ke kas negara adalah senilai Rp1.441.691.000,00 (Rp2.545.754.028,00 - Rp1.104.063.028,00).

Alasan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena masih terdapat kelebihan pembayaran yang belum disetorkan ke kas negara senilai Rp1.441.691.000,00, yang terdiri atas:

1. CV AMM senilai Rp6.000.000,00.
2. CV MBS senilai Rp1.402.691.000,00.
3. CV MKU senilai Rp33.000.000,00

Terkait bukti tindak lanjut berupa serah terima kapal Mina Maritim 004 dari CV MB kepada DKP Kabupaten Natuna dan Berita Acara Sea Trial dari CV Adrian Muda Mandiri akan diusulkan sebagai rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti pada periode pemantauan berikutnya setelah dilengkapi dengan dokumen pendukung dan reuiv Itjen KKP.

- B. LHP 44/LHP/XVII/12/2013 Kinerja Terinci atas Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan (Sustainable Fisheries Management) Tahun 2011 S.D Semester I Tahun 2013 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kab/Kota serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah Kepulauan Riau, dan Maluku

BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar memerintahkan Dirjen Perikanan Tangkap supaya memperbaiki pedoman teknis PUMP Perikanan Tangkap sesuai dengan aspek kelestarian SDI

Telaahan BPK

Ditjen Perikanan Tangkap menyampaikan surat Nomor B.2580/DJPT.1/KU.420/VI/2023 menjelaskan bahwa Program PUMP saat ini tidak dilanjutkan lagi oleh DJPT sehingga perbaikan atas pedoman teknis tidak diperlukan, sementara itu terkait dana bergulir saat ini pengurusannya dilakukan oleh LPUMKP yg diatur pada Permen KP 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh Permen KP 2 Tahun 2022. Namun, sampai saat ini rekomendasi untuk memperbaiki pedoman teknis PUMP Perikanan Tangkap sesuai dengan aspek SDI belum dilaksanakan. (Belum ada surat pengajuan status 4 dari MKP ke Anggota BPK)

Tindak Lanjut DJPT :

- a. Tindak Lanjut LHP BPK-RI Nomor 44/LHP/XVII/12/2013 dan Nomor 45/LHP/XVII/12/2013 terkait Program PUMP Nomor B.2580/DJPT.1/KU.420/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023
- b. Hasil Reviu Inspektorat Jenderal atas Penjelasan Program PUMP pada DJPT Nomor B.296/ITJ/HP.520/IX/2023 tanggal 29 September 2023
- c. Update TL semester I 2023 >>>>> Ditjen Perikanan Tangkap melalui surat Nomor B.2580/DJPT.1/KU.420/VI/2023 menjelaskan bahwa Program PUMP saat ini tidak dilanjutkan lagi oleh DJPT sehingga perbaikan atas pedoman teknis tidak diperlukan, sementara itu terkait dana bergulir saat ini pengurusannya dilakukan oleh LPUMKP yg diatur pada Permen KP 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh Permen KP 2 Tahun 2022

Usulan Status: BS

Telaah/Alasan: Ditjen Perikanan Tangkap menyampaikan surat Nomor B.2580/DJPT.1/KU.420/VI/2023 menjelaskan bahwa Program PUMP saat ini tidak dilanjutkan lagi oleh DJPT sehingga perbaikan atas pedoman teknis tidak diperlukan, sementara itu terkait dana bergulir saat ini pengurusannya dilakukan oleh LPUMKP yg diatur pada Permen KP 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh Permen KP 2 Tahun 2022. Namun, sampai saat ini rekomendasi untuk memperbaiki pedoman teknis PUMP Perikanan Tangkap sesuai dengan aspek SDI belum dilaksanakan. (Belum ada surat pengajuan status 4 dari MKP ke Anggota BPK)

- C. LHP 45/LHP/XVII/12/2013 Kinerja Terinci atas Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Tahun 2011 s.d 2013 (Semester I) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar Dirjen Perikanan Tangkap memperbaiki mekanisme penyaluran BLM PUMP

Telaahan BPK

Program PUMP tidak dilanjutkan lagi oleh DJPT dan pengurusan dana bergulir saat ini dilakukan oleh LPUMKP (Peraturan Menteri KP No 2 Tahun 2022, sehingga kewenangan untuk memperbaiki pedoman teknis berada pada LPUMKP. Rekomendasi BPK untuk memperbaiki mekanisme penyaluran BLM PUMP belum dapat dipenuhi, namun MKP belum mengajukan surat permohonan status 4 kepada Anggota IV BPK.

Tindak Lanjut DJPT :

- a. Tindak Lanjut LHP BPK-RI Nomor 44/LHP/XVII/12/2013 dan Nomor 45/LHP/XVII/12/2013 terkait Program PUMP Nomor B.2580/DJPT.1/KU.420/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023
- b. Hasil Reviu Inspektorat Jenderal atas Penjelasan Program PUMP pada DJPT Nomor B.296/ITJ/HP.520/IX/2023 tanggal 29 September 2023
- c. Ditjen Perikanan Tangkap melalui surat Nomor B.2580/DJPT.1/KU.420/VI/2023 menjelaskan bahwa Program PUMP saat ini tidak dilanjutkan lagi oleh DJPT sehingga perbaikan atas pedoman teknis tidak diperlukan, sementara itu terkait dana bergulir saat ini pengurusannya dilakukan oleh LPUMKP yg diatur pada Permen KP 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh Permen KP 2 Tahun 2022

Usulan Status: Belum Sesuai

Telaah/Alasan:

Program PUMP tidak dilanjutkan lagi oleh DJPT dan pengurusan dana bergulir saat ini dilakukan oleh LPUMKP (Peraturan Menteri KP No 2 Tahun 2022, sehingga kewenangan untuk memperbaiki pedoman teknis berada pada LPUMKP. Rekomendasi BPK untuk memperbaiki mekanisme penyaluran BLM PUMP belum dapat dipenuhi, namun MKP belum mengajukan surat permohonan status 4 kepada Anggota IV BPK.

- D. LHP 02/LHP/XVII/01/2015 Pengadaan Barang dan Jasa TA 2014 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi/Kab/Kota serta Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Bali dan Maluku.

BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar: (a) berkoordinasi dengan Gubernur Bali untuk menegur KPA dan PPK atas kelalaiannya, memerintahkan KPA/PPK untuk memasukkan PT. FP dalam daftar hitam penyedia barang/jasa dan segera menagih claim jaminan pelaksanaan dan uang muka,

Telaahan BPK

Belum sesuai rekomendasi karena belum ada tindak lanjut penyetoran atas claim jaminan uang muka sebesar Rp755.078.882,00

Tindak Lanjut DJPT :

Ditjen Perikanan Tangkap mengusulkan rekomendasi tersebut menjadi TPTD dengan dokumen pendukung berupa :

- a. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Auditoriat IV BPK RI perihal Penyampaian 9 Rekomendasi Prioritas
- b. Hasil Reviu Dokumen Tindak Lanjut Pembangunan 7 unit Kapal >30GT
- c. Ditjen Perikanan Tangkap menindaklanjuti dengan menelusuri terkait pembayaran kerugian negara yang dimaksud. Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan putusan dan surat keterangan dari penjara, kerugian negara sebesar Rp755.078.882,00 telah digantikan oleh direktur PT. FP yaitu Suyadi dengan tambahan hukuman penjara 2 tahun

Status diusulkan: Belum sesuai

Dokumen yang dilampirkan: 1. Penjelasan TGR; 2. Putusan Pengadilan; 3. SS Putusan Pengadilan; 4. Bukti Setor Rp1.100.000; 5. Validasi setoran

Hasil penelahaan dan Alasan:

Putusan pengadilan menyatakan terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar Rp755.078.882.

Apabila tidak dibayar, maka harta milik terdakwa disita untuk menutupi kerugian negara, serta jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama dua tahun.

Belum ada bukti penyitaan atau surat yang menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki harta untuk disita.

Surat dari Lapas hanya menjelaskan bahwa Penahanan pada tahun 2017 dan ybs meninggal dunia pada tahun 2020, yang berarti masih dalam masa tahanan pokok (belum masuk masa tahanan tambahan 2 tahun sebagai pengganti Rp755.078.882,00)

- Belum ada surat penetapan pidana penjara pengganti/penjelasan dari Kejaksaan/pengadilan terkait Proses Ganti Kerugian.

E. LHP 13A, B, C/LHP/XVII/05/2017 Atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Dirjen Perikanan Tangkap supaya Memerintahkan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan untuk menarik dan menyetor denda keterlambatan senilai Rp17.305.339.119,1 ke Kas Negara;

Telaahan BPK

masih terdapat denda keterlambatan yang belum disetorkan ke kas negara adalah sebesar Rp13.840.208.374,10 (Rp17.305.339.119,10 - Rp3.465.130.745,00).

Tindak Lanut DJPT :

Penjelasan atas Perbedaan Perhitungan Denda Keterlambatan 17M: Terdapat perbedaan perhitungan antara LHP BPK-RI, reviu Itjen KKP, dan Kajian BPKP terhadap denda keterlambatan yang harus ditagihkan, terlampir: 1. Penjelasan Itjen nomor T.227/ITJ/HP.520/VI/2023 perihal Penjelasan atas Perbedaan Perhitungan Denda Keterlambatan Pengadaan Kapal Tahun Anggaran 2016 dengan LHP BPK; 2. Penjelasan DJPT nomor B. 2528/DJPT.3/HP.520/VI/2023 perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI; 3. Kronologis Pengadaan Kapal TA 2016; LHA Itjen KKP nomor 3584/ITJ/HP.120/VIII/2017 atas Pengadaan Kapal Perikanan Lanjutan TA 2016 pada Direktorat KAPI TA 2017 dan LHR BPKP nomor LHR-96/D102/1/2017 atas Kegiatan TA 2016 yang akan dibayarkan di TA 2017 pada Direktorat KAPI.

untuk LHA Itjen KKP nomor 3584/ITJ/HP.120/VIII/2017 atas Pengadaan Kapal Perikanan Lanjutan TA 2016 pada Direktorat KAPI TA 2017 dan LHR BPKP nomor LHR-96/D102/1/2017 atas Kegiatan TA 2016 yang akan dibayarkan di TA 2017 pada Direktorat KAPI sudah pernah diajukan sebagai tindak lanjut pada periode Semester 1 tahun 2022.

Belum Sesuai

Denda keterlambatan yang direkomendasikan agar disetor ke kas negara adalah sebesar Rp17.305.339.119,10, sedangkan realisasi penyetoran ke kas negara yang telah dilakukan hingga periode pemantauan Semester I Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.465.130.745,00. Dengan demikian, denda keterlambatan yang belum disetorkan ke kas negara adalah sebesar Rp13.840.208.374,10 (Rp17.305.339.119,10 - Rp3.465.130.745,00).

F. LHP 13A, B, C/LHP/XVII/05/2017 Atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Dirjen Perikanan Tangkap supaya Memerintahkan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan untuk menarik dan menyetor denda keterlambatan atas kontrak yang dibatalkan sebesar Rp6.963.714.497,7 ke Kas Negara

Telaahan BPK

BPK merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan agar menginstruksikan Dirjen Perikanan Tangkap supaya Memerintahkan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan untuk menarik dan menyetor denda keterlambatan atas kontrak yang dibatalkan sebesar Rp6.963.714.497,7 ke Kas Negara;

Tindak Lajut DJPT :

Ditjen Perikanan Tangkap mengusulkan rekomendasi tersebut menjadi TPTD dengan dokumen pendukung berupa :

- a. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Auditoriat IV BPK RI perihal Penyampaian 9 Rekomendasi Prioritas
- b. Surat Inspektorat Jenderal atas Penjelasan atas Pembatalan Kontrak Pengadaan Kapal 2016

Penjelasan atas Pembatalan Kontrak Pengadaan Kapal TA 2016 denda 6 M: terhadap potensi denda keterlambatan senilai Rp6.963.714.497,70 atas kontrak yang dibatalkan, KKP berpendapat bahwa terhadap kontrak yang sudah dibatalkan tidak dikenakan denda lagi hal ini selaras dengan hasil TL sebelumnya yaitu LHA Inspektorat Jenderal No 3584/ITJ/HP.120/VIII/2017 tentang Pengadaan Kapal Perikanan Lanjutan TA 2016 Dit KAPI TA 2017, pada pernyataan sebanyak 25 kontrak untuk 350 unit kapal senilai Rp97.623.454.208 dibatalkan (pada hal 4 poin C). Terlampir: 1. Penjelasan Itjen KKP nomor T. 225/ITJ/TU.140/VI/2023 perihal Penjelasan atas Pembatalan Kontrak pengadaan Kapal TA 2016 tanggal 21 Juni 2023; 2. Penjelasan Direktur KAPI nomor B.2526/DJPT.3/HP.520/VI/2023 perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI tanggal 22 Juni 2023; 3. 25 Surat Permohonan Galangan dan Surat Pembatalan Kontrak; 4. 25 Kontrak yang dibatalkan

Belum Sesuai

Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi BPK karena belum disampaikan bukti penyetoran denda keterlambatan atas kontrak yang dibatalkan sebesar Rp6.963.714.497,7 ke Kas Negara

## **F.8 Piutang Perindo**

1. Piutang atas Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap TA 2019 s.d 2020 oleh Inspektorat Jenderal KKP Nomor 5146/ITJ/HP.110/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Terdapat

kekurangan PNBPN yang harus diperhitungkan senilai Rp754.106.908,00 antara lain:

- a. Jasa CS senilai Rp253.601.812,00 dan denda keterlambatan senilai Rp63.630.163,00
  - b. Jasa penggunaan ABF senilai Rp339.058.100,00 dan denda keterlambatan senilai Rp95.247.350,00;
  - c. Biaya kebersihan atas ICS seluas 747 m<sup>2</sup> senilai Rp2.016.900,00 dan denda keterlambatan senilai Rp552.584,00.
2. Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 39/LHP/11/2013 tanggal 9 November 2013 atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2011 s/d Mei 2013 pada Ditjen Perikanan Tangkap, melalui uji petik pada PPN Pekalongan, PPN Sibolga dan PPS Belawan terdapat Potensi PNBPN yang belum diterima Negara dari jasa tambat labuh dan kebersihan kolam minimal sebesar Rp.240.304.612,25 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penerimaan dari jasa tambat labuh dan kebersihan kolam sebesar Rp.33.387.175,- yang seharusnya diterima PPN Pekalongan dari armada kapal sebanyak 12.147 unit yang mengurus SPB.
  - b. Potensi PNBPN yang belum diterima negara dari tahun 2011 s/d 2012 atas jasa tambat labuh dan kebersihan kolam di PPS Belawan sebesar Rp.206.917.437,25

### **F.9 Kampung Nelayan Maju**

Kampung nelayan merupakan suatu lingkungan permukiman masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan yang melakukan mata pencaharian penangkapan ikan di perairan laut atau di perairan darat. Kawasan kampung nelayan umumnya dekat dengan sentra perikanan (pelabuhan perikanan/tempat pendaratan ikan) yang menjadi pusat aktifitas para nelayan.

Pada perkembangannya, kampung nelayan berkembang semakin padat dengan semakin bertambahnya pertumbuhan penduduk alami dan adanya urbanisasi. Keadaan perumahan dan lingkungan permukiman masyarakat nelayan dengan infrastruktur publik yang ada seperti: jalan lingkungan, ketersediaan air bersih, sarana drainase, pengelolaan sampah, limbah dan lainnya secara umum di wilayah Indonesia kondisinya masih kurang memadai. Kesadaran masyarakat nelayan terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan kampung nelayan juga dirasakan masih minim. Keadaan ini tentunya perlu perbaikan agar tercipta kawasan/lingkungan kampung nelayan yang bersih, sehat dan nyaman serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan. Kawasan permukiman nelayan diharapkan dapat dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai sehingga dapat memberikan pengaruh bagi keberlangsungan hidup dan penghidupan para nelayan dan keluarganya.

Mengacu pada Arah Kebijakan Perikanan Tangkap Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dinyatakan bahwa salah satu upaya Pemerintah untuk Pembangunan Perikanan Tangkap yakni dengan mengupayakan "Pengembangan Pemukiman Nelayan Maju". Diantara program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah melalui pemenuhan kebutuhan

infrastruktur dasar kawasan hunian nelayan di suatu kampung nelayan agar tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, maju dan mandiri”.

Kegiatan Kampung Nelayan Maju dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat RPJMN TA 2020-2024 sebagaimana ditetapkan di dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang didalamnya mengamanatkan tentang penataan Kawasan pemukiman nelayan maju.

Tujuan kegiatan bantuan penataan kampung nelayan maju adalah, sebagai berikut:

- a. menyediakan atau memperbaiki sarana/prasarana publik di kampung nelayan untuk meningkatkan fungsinya;
- b. menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang maju dalam kegiatan penataan kawasan kampung nelayan;
- c. menciptakan lapangan kerja sementara yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat di kampung nelayan melalui kegiatan padat karya.

Output yang dihasilkan adalah Telah terbangunnya sarana dan prasarana di Kampung Nelayan di 79 Lokasi. Sedangkan Out Come atau dampak dari pembangunan secara positif yang dihasilkan antara lain :

1. Lingkungan Nelayan Lebih tertata,
2. Maju
3. Bersih & sehat
4. Nyaman
5. Meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas usaha nelayan serta Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kelembagaan usaha



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032**  
**ESELON I : DITJEN PERIKANAN TANGKAP 03**

Tgl Data : 24/07/24 12:25 AM  
Tgl Cetak : 24/07/24 7:26 AM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_es1\_new\_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>a. Dana Perimbangan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Dana Transfer Umum</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b. Dana Insentif Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c. Dana Keistimewaan DIY</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>d. Dana Otonomi Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Desa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Hibah Kepada Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>946,990,571,000</b>	<b>324,338,310,418</b>	<b>(622,652,260,582)</b>	<b>34</b>	<b>955,652,399,000</b>	<b>251,505,049,365</b>	<b>704,147,349,635</b>	<b>26</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 7:26 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	324,338,310,418
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	467,047,332,469	0
3.0	421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	0	18,977,302,407
3.0	421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	0	55,275,000
3.0	421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	0	392,248,732,084
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,582,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	998,300,552
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	47,992,516
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,537,166,647
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	7,951,631,992
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	5,820,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	3,759
3.0	425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	0	42,652,720,220
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	132,480,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	11,025,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	2,493,288
3.0	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	1,000,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,081,554,054
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	96,465,572
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,120,123,128
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	68,656,811
3.0	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	586
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	48,006,853
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	36,887,402,100	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	582,320	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2,862,988,420	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	879,137,342	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	494,260,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,705,016,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	562,072,696	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	2,090,910,240	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	3,190,694,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	810,580,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	10,270,862,600	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	229,881	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	657,286,830	0

# NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 7:26 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	199,106,676	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,497,616,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	663,005,100	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,238,813,250	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	554,235,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	343,499,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	42,476,469,363	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	11,849,528,371	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	18,124,743,561	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	262,337,866	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	37,076,112	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,624,663,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,285,223,189	0
3.0	521211	Belanja Bahan	19,421,418,277	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,529,523,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	741,325,295	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,319,815,417	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	40,900,000	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	20,997,695	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	9,178,407,185	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	612,732,314	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,677,997,682	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,373,932,032	0
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	214,500	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	1,640,188,018	0
3.0	522141	Belanja Sewa	4,609,058,502	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	876,552,933	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	34,539,762,815	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6,175,403,867	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	423,136,850	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,760,026,192	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	622,019,375	0
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	275,265,276	0
3.0	523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	206,905,234	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1,335,190,588	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37,366,959,143	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	467,501,180	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,607,122,016	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 7:26 AM

Halaman : 3

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8,807,847,131	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,479,970,745	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	340,942,435	0
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	7,300,094,930	0
3.0	526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	6,300,000,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,085,193,878	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	86,034,660	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,058,521,676	0
3.0	533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	2,240,000	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	118,264,465	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2,288,193,909	0
3.0	534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	701,002,500	0
3.0	534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	69,214,427	0
3.0	534131	Belanja Modal Jaringan	44,448,000	0
3.0	534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	985,033,635	0
3.0	534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi	221,369,031	0
3.0	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	96,090,700	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	27,200,328	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	221,200
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	53,141
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	12,400,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	3,135,000
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	3,278
3.1	511628	Pengembalian Belanja Uang Makan PPPK	0	736,000
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	8,878,710
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	3,274,220
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	3,803,200
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	1,498,500
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	526,743
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	1,257,497
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	28,169,846
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	35,000
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	54,000
JUMLAH			791,449,689,222	791,449,689,222

# NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

**TINGKAT ESELON I**

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERIKANAN TANGKAP**

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 7:26 AM

Halaman : 4

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1\_poc

Keterangan :

FINAL

# NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 03 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 7:26 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	6,365,153,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	115,848,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	399,121,332	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	450,480,375	0
0.0	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	19,547,323,268	0
0.0	114211	uang muka belanja pegawai (prepayment)	0	100,361
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	26,585,364,193	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	5,956,301,223	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBPNP	0	26,143,191,146
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	5,833,321,527
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,394,711,177	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	13,271,530	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	3,188,439,300	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	140,202,000	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	7,020,000,000	0
0.0	117131	Bahan Baku	486,179,150	0
0.0	117911	Persediaan yang belum diregister	62,242,100	0
0.0	131111	Tanah	3,618,080,652,312	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	801,213,831,501	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	744,973,205,905	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	1,619,505,243,195	0
0.0	134112	Irigasi	1,004,653,630,740	0
0.0	134113	Jaringan	193,620,336,755	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	13,154,122,060	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	13,634,983,410	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	22,459,445,016	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	684,835,142,442
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	132,434,934,846
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	858,823,199,058
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	802,273,908,552
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	67,613,538,653
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	402,547,666
0.0	138311	Properti Investasi	186,878,004,466	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	15,947,308,449
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	109,314,000	0
0.0	155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	2,855,976,110	0
0.0	156911	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	14,279,881

# NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 7:26 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	162151	Software	4,468,209,382	0
0.0	162161	Lisensi	198,000,000	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	789,767,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	969,520,750	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	154,233,709,347	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	13,776,951,400	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	127,887,752,171
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	4,288,152,882
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	178,200,000
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	13,678,611,400
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	7,679,313,528
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	4,487,161,464
0.0	212113	Beban modal yang masih harus dibayar	0	501,017,650
0.0	212144	Pengeluaran transito yang masih harus dibayar	0	71,318,000
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	324,985,875
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	5,164,075,782
0.0	218211	Hibah Langsung yang Belum Disahkan	0	29,803,912,429
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	6,481,001,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	2,817,457
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	324,338,310,418
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	467,047,332,469	0
0.0	313211	Transfer Keluar	37,828,612,195	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	33,340,697,320
0.0	391111	Ekuitas	0	5,802,866,832,042
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	3,138,368
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	5,360,748,987	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	172,005,631	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	1,134,146,289
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	108,475,000
3.0	421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	0	18,977,302,407
3.0	421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	0	55,275,000
3.0	421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	0	391,492,443,015
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,582,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	998,300,552
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	47,992,516
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,600,804,853
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	14,931,657,435

# NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 7:26 AM

Halaman : 3

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	5,820,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	3,759
3.0	425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	0	22,028,068,790
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	132,480,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	11,025,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	2,493,288
3.0	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	1,000,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,081,554,054
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	95,789,105
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,120,123,128
3.0	425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	68,656,811
3.0	425918	Penerimaan Kembali Beban Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	586
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	48,191,853
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	7,776,354,293
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	41,444,813,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	588,937	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	3,218,702,005	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	987,776,594	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	555,705,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	4,163,592,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	570,275,523	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	2,348,471,970	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,109,147,600	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	915,135,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	11,596,050,700	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	253,863	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	742,771,270	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	224,851,432	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1,690,738,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	748,533,120	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	1,221,284,600	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	555,955,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	348,179,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	42,515,538,951	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	11,850,373,987	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	19,670,798,629	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	267,168,866	0

# NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 7:26 AM

Halaman : 4

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	37,785,082	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,672,546,800	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,302,840,189	0
3.0	521211	Beban Bahan	20,671,381,987	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,624,033,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	747,599,695	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	7,863,413,905	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	610,584,354	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,249,096,415	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,531,427,125	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	214,500	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	1,705,539,268	0
3.0	522141	Beban Sewa	4,620,383,502	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	888,202,933	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	46,810,754,786	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6,289,875,532	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	423,136,850	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8,053,696,390	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	637,109,375	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	285,351,776	0
3.0	523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	206,905,234	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	1,357,279,088	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	38,497,144,269	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	481,926,180	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,945,014,416	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,581,351,976	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	1,536,950,745	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	340,942,435	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	18,523,730,398	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9,320,576,606	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	60,162,601,139	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	23,361,199,525	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	2,967,226,739	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	14,769,333	0
3.0	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	1,186,136,775	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	71,262,125	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	9,900,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	643,327,962	0

# NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 7:26 AM

Halaman : 5

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1\_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,832,695,745	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	31,938,320	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	24,846,708	0
3.0	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	5,000,000	0
3.0	593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	299,395,000	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	4,111,655,630	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	233,656	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	61,469,650	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	420,000	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	1,258,302,712
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	7,523
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1,106,000	0
3.0	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	48,520,450	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	2,300,175,642	0
<b>JUMLAH</b>			<b>9,418,405,620,336</b>	<b>9,418,405,620,336</b>

Keterangan :

FINAL

NERACA  
TINGKAT ESELON I  
PER 30 JUNI 2024  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 7:26 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_es1\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	6,481,001,000	206,500	6,480,794,500	3,138,399.27
Kas di Bendahara Penerimaan	0	81,395,000	(81,395,000)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	20,396,924,975	471,900,375	19,925,024,600	4,222.29
Uang Muka Belanja (prepayment)	(100,361)	0	(100,361)	0.00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	19,813,818,803	(19,813,818,803)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	32,541,665,416	34,785,209,515	(2,243,544,099)	(6.45)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(31,976,512,673)	(33,408,927,363)	1,432,414,690	(4.29)
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)</b>	<b>565,152,743</b>	<b>1,376,282,152</b>	<b>(811,129,409)</b>	<b>(58.94)</b>
Persediaan	12,242,803,157	1,685,317,542	10,557,485,615	626.44
Persediaan yang Belum Diregister	62,242,100	0	62,242,100	0.00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>39,748,023,614</b>	<b>23,428,920,372</b>	<b>16,319,103,242</b>	<b>69.65</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	3,618,080,652,312	3,618,080,652,312	0	0.00
Peralatan dan Mesin	801,213,831,501	797,654,420,257	3,559,411,244	0.45
Gedung dan Bangunan	744,973,205,905	740,302,680,416	4,670,525,489	0.63
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,817,779,210,690	2,819,507,801,303	(1,728,590,613)	(0.06)
Aset Tetap Lainnya	26,789,105,470	27,617,048,970	(827,943,500)	(3.00)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	22,459,445,016	20,324,415,386	2,135,029,630	10.50
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>	<b>(2,546,383,271,217)</b>	<b>(2,440,460,619,146)</b>	<b>(105,922,652,071)</b>	<b>4.34</b>
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>5,484,912,179,677</b>	<b>5,583,026,399,498</b>	<b>(98,114,219,821)</b>	<b>(1.76)</b>
<b>Properti Investasi</b>				
Properti Investasi	186,878,004,466	186,801,004,466	77,000,000	0.04
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(15,947,308,449)	(14,761,171,674)	(1,186,136,775)	8.04
<b>JUMLAH Properti Investasi</b>	<b>170,930,696,017</b>	<b>172,039,832,792</b>	<b>(1,109,136,775)</b>	<b>(0.64)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Aset Tetap yang Belum Diregister	109,314,000	0	109,314,000	0.00
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>109,314,000</b>	<b>0</b>	<b>109,314,000</b>	
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>				
Piutang Jangka Panjang lainnya	2,855,976,110	2,855,976,110	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(14,279,881)	(14,279,881)	0	0.00
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA(NETTO)</b>	<b>2,841,696,229</b>	<b>2,841,696,229</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>2,841,696,229</b>	<b>2,841,696,229</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	6,425,497,132	6,425,497,132	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	2,760,602,390	(2,760,602,390)	(100.00)
Aset Lain-lain	168,010,660,747	180,426,395,119	(12,415,734,372)	(6.88)

**NERACA**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER 30 JUNI 2024**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERIKANAN TANGKAP**

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 7:26 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_es1\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(146,032,716,453)	(155,764,055,731)	9,731,339,278	(6.25)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>28,403,441,426</b>	<b>33,848,438,910</b>	<b>(5,444,997,484)</b>	<b>(16.09)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>5,726,945,350,963</b>	<b>5,815,185,287,801</b>	<b>(88,239,936,838)</b>	<b>(1.52)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	13,063,796,517	4,996,539,285	8,067,257,232	161.46
Utang Yang Belum Ditagihkan	5,164,075,782	0	5,164,075,782	0.00
Hibah Yang Belum Disahkan	29,803,912,429	0	29,803,912,429	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	7,300,289,974	(7,300,289,974)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	6,481,001,000	206,500	6,480,794,500	3,138,399.27
Utang Jangka Pendek Lainnya	2,817,457	21,420,000	(18,602,543)	(86.85)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>54,515,603,185</b>	<b>12,318,455,759</b>	<b>42,197,147,426</b>	<b>342.55</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>54,515,603,185</b>	<b>12,318,455,759</b>	<b>42,197,147,426</b>	<b>342.55</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	5,672,429,747,778	5,802,866,832,042	(130,437,084,264)	(2.25)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>5,672,429,747,778</b>	<b>5,802,866,832,042</b>	<b>(130,437,084,264)</b>	<b>(2.25)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>5,672,429,747,778</b>	<b>5,802,866,832,042</b>	<b>(130,437,084,264)</b>	<b>(2.25)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>5,726,945,350,963</b>	<b>5,815,185,287,801</b>	<b>(88,239,936,838)</b>	<b>(1.52)</b>

Keterangan :

FINAL

# LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 7:25 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_es1\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	410,525,020,422	42,609,219,425	367,915,800,997	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	39,842,099,032	30,177,766,284	9,664,332,748	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	450,367,119,454	72,786,985,709	377,580,133,745	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	450,367,119,454	72,786,985,709	377,580,133,745	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	128,808,738,352	97,500,594,269	31,308,144,083	-
Beban Persediaan	2,894,165,395	3,539,387,230	(645,221,835)	-
Beban Barang dan Jasa	111,274,877,036	107,363,247,133	3,911,629,903	-
Beban Pemeliharaan	17,358,659,723	17,974,641,141	(615,981,418)	-
Beban Perjalanan Dinas	57,383,330,021	48,334,998,459	9,048,331,562	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	4,416,284,286	4,938,682,753	(522,398,467)	-
Beban Bunga	0	0	0	-

## LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 7:25 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_es1\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	116,260,730,602	134,411,509,214	(18,150,778,612)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1,258,310,235)	(805,981)	(1,257,504,254)	-
Beban Transfer	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	437,138,475,180	414,062,254,218	23,076,220,962	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	13,228,644,274	(341,275,268,509)	354,503,912,783	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(1,243,300,574)	(7,455,181,693)	6,211,881,119	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,056,875,068	424,658,764	632,216,304	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	2,300,175,642	7,879,840,457	(5,579,664,815)	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9,061,503,923	19,104,910,687	(10,043,406,764)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9,061,923,923	19,113,624,337	(10,051,700,414)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	420,000	8,713,650	(8,293,650)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7,818,203,349	11,649,728,994	(3,831,525,645)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	21,046,847,623	(329,625,539,515)	350,672,387,138	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	21,046,847,623	(329,625,539,515)	350,672,387,138	-

Keterangan :

FINAL

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 032 ) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) DITJEN PERIKANAN TANGKAP

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 7:25 AM

Halaman : 1

lap\_lpe\_es1\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	5,802,866,832,042	5,986,784,264,050	(183,917,432,008)	(3.07)
SURPLUS/DEFISIT-LO	21,046,847,623	(329,625,539,515)	350,672,387,138	(106.39)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(5,529,616,250)	5,177,398,100	(10,707,014,350)	(206.8)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	3,138,368	0	3,138,368	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	1,982,500	(1,982,500)	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(5,360,748,987)	5,066,118,273	(10,426,867,260)	(205.82)
LAIN-LAIN	(172,005,631)	109,297,327	(281,302,958)	(257.37)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(145,954,315,637)	162,173,093,315	(308,127,408,952)	(190)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(130,437,084,264)	(162,275,048,100)	31,837,963,836	(19.62)
EKUITAS AKHIR	5,672,429,747,778	5,824,509,215,950	(152,079,468,172)	(2.61)

Keterangan :

FINAL